BADAN POM

WBBM WBK SETARA BERDAYA BADAN POM BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif #bangga melayani bangsa

LAPKIN

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PADANG



TAHUN

2025

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM NO 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nota Dinas Sekretaris Utama No. PR.09.01.2.01.26.71 26 Januari 2026 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025.



Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target Tahun 2025, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target tahunan dan target akhir periode Renstra 2025-2029.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan target indikator kinerja tahun 2025 tertuang pada revisi Pernjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar POM di Padang pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar POM di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar POM di Padang pada periode berikutnya.

Padang, 25 Februari 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Drs. Martin Suhendri, Apt., M.Farm.

Tim Penyusun

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.01.26.23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



Penanggungjawab : Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm.
Sekretaris : Nery Revisa, SE., M.Sc.

ANGGOTA :

1. Linda Gusrini F, S.Si., Apt., M.Farm.
2. Dra. Patria Dehelen, Apt.
3. Aria Bogorianti, S.Si., Apt.
4. Fitra Yelli, S.Farm., Apt., M.Farm
5. Rina Syukrina, S.Farm., Apt.
6. Saafrida, S.Si., Apt.
7. Azfrianty, STP., M.Farm.
8. Fitria, S.Si., Apt.
9. Reni Sepriyanti, S.Farm., Apt.
10. Yelvina, S.Si., Apt.
11. Thudesy Cameryta, S.Farm., Apt., M.Farm
12. Mutiara Yulanda, S.Farm., Apt.
13. Ade Cahyana, S.Si., Apt., M.Pharm
14. Dilla Shavera, S.Si, Apt. M.Biomed
15. Nining, S.Farm., Apt
16. Vera Sribanon, S.Si., Apt.
17. Airin Muchlis, S.E.
18. Sony Aulia Dwita AM, S.E.

EDITOR :
Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M.Eng
Taruna Wadi, S.Kom.



Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Tim Penyusun iii

Daftar Isi iv

Daftar Lampiran xiv

Ringkasan Eksekutif xv

Highlight xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 3

1.4 ISU STRATEGIS 5

1.4.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 5

1.4.2 ISU STRATEGIS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 11

1.4.3 PERMASALAHAN UTAMA 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 22

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025 26

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 28

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 30

2.5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 38

3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I 38

3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II 108

3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III 113

3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV 132

3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V 138

3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI 142

3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII 145

3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII 151

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 174

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 239

3.4. REALISASI ANGGARAN 250

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 277

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA 281

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029
3. SK Perubahan IKU tahun 2025-2029
4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 Revisi
5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 Revisi
6. Nilai Pencapaian Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
7. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
8. Capaian Realisasi Anggaran Per-Indikator Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
9. Capaian Realisasi Anggaran Per-Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
10. Capaian Realisasi Anggaran Per-Output Balai Besar POM di Padang Tahun 2025
11. Capaian tingkat Efisiensi per-Indikator Tahun 2025
12. Capaian tingkat Efisiensi per-Sasaran Kegiatan Tahun 2025
13. Kertas Kerja Realisasi Indikator Tahun 2025
14. Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahaun 2025 Balai Besar POM di Padang



Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Tahun 2025 menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Internal tahun 2025, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ditunjukkan oleh hasil Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan yang merupakan hasil seluruh realisasi indikator kinerja. Nilai NKO Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2025 sebesar 100,15% dengan kriteria Istimewa.



Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 diwujudkan dalam 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025.. Dari 8 sasaran kegiatan, maka 3 sasaran kegiatan memperoleh capaian “Sangat Baik”, 2 sasaran kegiatan memperoleh capaian “Baik”, 2 sasaran kegiatan memperoleh capaian “CukuP” dan 1 sasaran kegiatan dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Kedelapan sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Meningkatkanefektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan nilai capaian sasaran kegiatan 108,14% (Sangat Baik).
2. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,21% (Baik).
3. 1Meningkatkan efektivitas KIE dengan nilai capaian sasaran kegiatan 75,43% (Cukup).
4. Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu dengan nilai capaian sasaran kegiatan 115,39% (Tidak dapat disimpulkan) sehingga dinormalisasi menjadi 110%.
5. Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan nilai capaian sasaran kegiatan 83,33% (Cukup).
6. 1Melaksanakan kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan nilai capaian sasaran kegiatan 105,56% (Sangat Baik).
7. Mewujudkan Layanan Publik UPT yang Prima dengan nilai capaian sasaran kegiatan 102,98% (Sangat Baik).
8. Mewujudkan tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,53% (Baik).

Capaian kinerja terhadap 28 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (capaian 100% < x ≤ 110%) sebanyak 13 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,10%.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 103,85%.
3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 106,48%
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 109,89%
5. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 104,42%.
6. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 108,12%.
7. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 108,33%.
8. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan capaian 105,57%.
9. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian 107,53%.
10. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 101,72%.
11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 105,56%.

12. Indeks Pelayanan Publik UPT dengan capaian 102,98%.
13. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan capaian 100,23%.

b. Indikator dengan kriteria Baik (capaian 90% ≤ x ≤ 110%) sebanyak 7 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian 100%.
2. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100,00%.
3. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan dengan capaian 99,21%.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
5. Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian 98,22%.
6. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan capaian 100%.
7. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan capaian 99,66%.

c. Indikator dengan kriteria Cukup (capaian 60% ≤ s.d ≤ 90%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 83,33%.

d. Indikator dengan kriteria Kurang (capaian < 60%) sebanyak 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 50,00%.
2. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 50,00%.

e. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (capaian > 110%) sebanyak 5 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan capaian 111,12%.
2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 112,36%.
3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%.
4. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 111,11% dengan capaian 117,65%.
5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 115,39%.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada Tahun 2025 berkisar antara 50% sampai dengan 117,65%. Terdapat 6 indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai. Persentase capaian indikator yang tertinggi adalah persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Capaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi (117,65% disebabkan kesinambungan dalam pengawasan produk PIRT terus dilaksanakan walaupun realisasinya sudah mencapai target. Produk PIRT yang diawasi dapat dikategorikan kedalam kategori pangan tertentu atau dalam rangka Emerging Issue.

Pengawasan berkesinambungan terus dilakukan jika terdapat perkembangan isu keamanan pangan, dapat berupa potensi/kasus pelanggaran/masalah pangan, pengaduan masyarakat, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), emerging issues, sampel pendampingan UMK atau pendampingan pangan risiko Menengah Rendah (MR), dan/atau tujuan lain yang dianggap perlu berdasarkan hasil kajian risiko.

Kemudian indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi (117,65%) disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi internal perencanaan distribusi pangan olahan dan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan. Selain itu karena petugas telah mengikuti pelatihan food inspektur pelatihan keamanan pangan sehingga meningkatkan kapsitas dalam melaksankan pengawasan.

Persentase capaian indikator yang terendah adalah Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Jumlah desa pangan aman (50%) disebabkan oleh pemblokiran anggaran sehingga jumlah sekolah dan desa yang diintervensi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada dan berharap terjadi relaksasi anggaran untuk pencapaian target pada semester 1 namuan sampai akhir tahun tidak ada relaksasi anggaran untuk kegiatan sekolah desan pangan aman.

1.Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 8 (delapan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.751.537.766 atau 65,23% dari total pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.36.412.013.000 dan 99,20% dari total pagu anggaran setelah dikurangi blokir yaitu sebesar Rp.23.943.777.000.

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran yang diperoleh dari perbandingan capaian sasaran kegiatan dengan persentase realisasi anggaran maka diperoleh hasil bahwa kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 100%.


Highlight

Program Makan Bergizi Gratis di Kota Pariaman



BBPOM di Padang turut berkontribusi dalam menyukseskan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didistribusikan di kota pariaman pada tanggal 6 Januari 2025.
Program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) secara serempak di seluruh Indonesia, dan untuk Running pertama di Provinsi Sumatera barat, dilakukan di Kota Pariaman. Makan Bergizi Gratis diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) de ngan mitra Asmaul Kalidamang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No 10 Alai Galombang kota Pariaman ,
Plt Kepala BBPOM di Padang. ibu Hilda Murni memberikan pengarahan kepada pelaksana program terkait keamanan makanan bergizi dari cemaran biologi, cemaran kimia dan cemaran fisik serta mengenai prosedur menjaga kebersihan makanan mulai dari tahap unit-unit pengolahan hingga distribusi. Untuk memastikan pemenuhan asupan gizi anak-anak, program pemberian makanan bergizi gratis juga perlu memperhatikan aspek kebersihan makanan, guna mencegah munculnya penyakit akibat cemaran.

Rayakan Ulang Tahun BPOM ke 28

Memperingati HUT ke-24 BPOM RI tanggal 31 Januari, UPT BPOM di seluruh Indonesia serentak menyelenggarakan acara Car Free Day (CFD) dengan tema “Cek Produkmu Bersama BPOM” pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan tersebut di GOR H Agus Salim Padang Kavling A pukul 06.00 WIB – 10.00 WIB. Acara dimulai dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti lebih dari 150 peserta, dilanjutkan dengan sambutan dari Plt Kepala Balai Besar POM di Padang Hilda Murni. Pada kesempatan ini juga diadakan minum jamu bersama dengan para peserta yang hadir dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diantaranya Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumtera Barat, BKKBN Provinsi Sumtera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Acara dilanjutkan dengan penyuluhan terkait Layanan Balai Besar POM di Padang diselingi dengan tanya jawab dan diberikan hadiah kepada para peserta yang berhasil menjawab dengan benar. Pada kesempatan ini juga tersedia Layanan Mobil Keliling untuk pengujian cepat dan pameran produk-produk berbahaya dan produk tanpa izin edar.



KIE Pada Car Free Day "Balanjuang Durian"



Pada CFD tanggal 2 Februari 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan acara yang bertajuk Balanjuang Durian dengan membagikan sekitar 15.000 durian secara gratis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas keberkahan yang diberikan kepada Sumbar sekaligus momen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjelang Ramadhan. Balai Besar POM (BBPOM) di Padang hadir di kegiatan CFD dengan booth mini pameran untuk edukasi masyarakat terkait keamanan obat dan makanan.

Audiensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan

Pada tanggal 24 Maret 2025 Plt. Kepala BBPOM di Padang (Hilda Murni) beserta Tim melakukan audiensi kepada Bupati Kabupaten Solok (Jon Pandu) berserta OPD terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang meluputi: Desa Pangan Aman, Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang akan dilaksanakn pada Kabupaten Solok sepanjang Tahun 2025. Diharapkan melalui audiensi ini dapat membangun komunikasi, sinergitas dan dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program.



Penindakan terhadap pengedar obat bahan alam illegal dan mangandung bahan kimia obat berbahaya



Menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap peredaran obat bahan alam illegal dan mengandung bahan kimia obat yang beredar di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, PPNS BBPOM di Padang melakukan penindakan terhadap pelaku pengedar obat bahan alam illegal dan yang mengandung bahan kimia obat yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Operasi penindakan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat yaitu pada bulan Maret. Pada operasi penindakan tersebut, PPNS BBPOM di Padang menyita obat bahan alam ilegal dan mengandung bahan kimia obat berbahaya sebanyak 4 Kardus , 1 Box , HP Vivo dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.450.000,- dengan nilai ekonomi Rp. 100.000.000,-. Perkara tersebut, setelah melalui tahapan gelar perkara, disimpulkan telah memenuhi unsur pidana pasal 435 Undang-Undang no.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP.

Forum Konsultasi Publik Untuk Kualitas Pelayanan Yang Lebih Baik

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 di Aula lantai 3 gedung BBPOM di Padang. Dihadiri 25 orang peserta yang terdiri dari penerima layanan, stakeholder, organisasi masyarakat, akademisi dan media. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala BBPOM di Padang, Hilda Murni. Pada kegiatan ini juga diperkenalkan inovasi terbaru "Simpelin Aja" yang diperuntukkan bagi kemudahan pelaku usaha dalam penyiapan Dokumen Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB). Kegiatan penyiapan dokumen yang biasanya dikerjakan hingga 3 hari dapat dipersingkat menjadi setengah jam melalui aplikasi ini.



KIE Cegah Stunting di Nagari Lubuak Aluang



Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bertema "Cegah Stunting dengan Konsumsi Pangan Aman dan Gizi Seimbang" kembali digelar BBPOM di Padang. Kali ini kegiatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan di Aula Puskesmas Sikabu tanggal 5 Mei 2025 di locus stunting Nagari Lubuak Alung dengan plevalensi sebesar 21,47%.

Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Elia Munawwari, S.KM, M.Kes., PFM Ahli Madya BBPOM di Padang Azfrianty dan PFM Ahli Muda BBPOM di Padang Novita Normasari.

Berkolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) dalam program SAPA UMK, BBPOM di Padang melaksanakan melaksanakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan. SAPA UMK merupakan program yang memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan pengembangan kewirausahaan bagi UMK yang disinergikan dengan Program Orang Tua Angkat (OTA) yang pada kesempatan ini difasilitasi oleh PT. Niramas Utama. Diharapkan pelaku usaha mampu membuat dokumen desain GMP, CPPOB dan SSOP untuk sarana produksi pangan olahan sehingga percepatan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dapat segera dilaksanakan.



Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Di SMA N 2 Gunung Talang



Bimbingan Teknis Keamanan pangan Bagi Sekolah yang dintervensi dilaksanakan di Aula SMA N 2 Gunung Talang, Kamis tanggal 15 Mei 2025. SMA ini merupakan Sekolah yang diintervensi BBPOM di Padang sebagai Locus Intervensi program Prioritas nasional. Peserta Kegiatan di bekali dengan Materi tentang "Kebijakan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Nutrisi Seimbang Untuk Sdm Unggul, Materi 5 Kunci Mengolah Pangan dan Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah (KPS). Harapannya, Program ini dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah dan mencetak kader keamanan pangan.

IN HOUSE TRANING Awareness Training & Workshop Occupational Health and Safety Management System Based on ISO 45001:2018

Tanggal 26 - 27 Mei 2025 BBPOM di Padang mengadakan *Awareness Training & Workshop Occupational Health and Safety Management System Based on ISO* 45001:2018. Pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Yura Training Center ini diadakan secara luring dengan materi pemahaman mendasar mengenai konsep, prinsip, dan persyaratan ISO 45001 serta memahami terkait implementasi standar K3. Penting bagi laboratorium untuk menerapkan ISO 450001: 2018 untuk meminimalisir Kecelakaan kerja dan kesehatan yang muncul selama aktivitas bekerja ,mengurangi hingga menghilangkan risiko K3, meningkatkan reputasi organisasi hingga mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga berupa sertifikat ISO 45001 : 2018



Pelatihan Interpretasi Sertifikat Kalibrasi dan Verifikasi Alat



Pelatihan interpretasi sertifikat kalibrasi dan verifikasi alat bertujuan untuk membekali perserta dengan pegetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mengevaluasi hasil kalibrasi alat ukur serta memastikan keabsahan sertifikat kalibrasi. Pelatihna ini relevan untuk berbagai sektor industri dan laboratorium yang memerlukan pengukuran yang akurat.
Untuk memastikan keakuratan alat ukur, BBPOM di Padang mengadakan pelatihan Interpretasi Sertifikat Kalibrasi dan Verifikasi Alat pada 24 - 26 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh semua personel laboratorium pengujian.

BPOM Kawal Makan Bergizi Gratis (MBG) Bersama Lintas Sektor



Pada tanggal 16 Mei 2025 bertempat di rumah walikota Padang, BBPOM di Padang ikut bersama-sama dengan lintas sektor mengikuti rapat koordinasi bersama wakil walikota Padang Maigus Nasir di posko Makan Bergizi Gratis (MBG) Jl. A Yani Padang. Pada kesempatan ini maigus Nasir menyampaikan pentingnya koordinasi dan Sinergi lintas sektor dalam rangka pengawalan MBG. Maigus Nasir wakil Walikota Padang menyampaikan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bersinergi mensukseskan program MBG ini. Hilda Murni sebagai Plt. Kepala BBPOM di Padang menyampaikan BBPOM di Padang siap mengawal program MBG .

DPD RI jemput Aspirasi tentang TBC dan pengawasan makanan



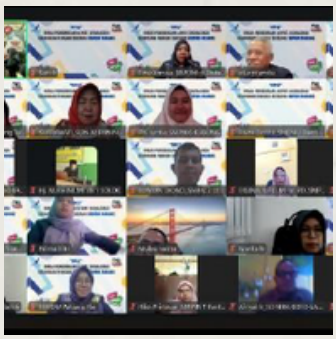
Bertempat di kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 16 Juni 2025 bapak Jelita Donal sebagai anggota DPD RI, menjemput aspirasi tentang makanan bersama OPD tingkat provinsi maupun kota Padang termasuk BBPOM di Padang. Pada kesempatan ini Hilda Murni sebagai Plt. Kepala BBPOM di Padang menyampaikan bahwa pengawasan terhadap makanan yang mengandung gula berlebih selalu diawasi secara rutin baik pre market maupun post market dalam program kegiatan sampling, pemeriksaan sarana, pembinaan pelaku usaha maupun edukasi terhadap masyarakat. Sinergi hasil pengawasan makan bersama pemda selalu dilakukan baik dalam kegiatan rutin maupun kegiatan khusus, untuk memastikan masyarakat terllindungi.

Minum Jamu Bersama Di Car Free Day Kota Padang



Dalam rangka menyambut pekan Jamu Nasional yang bertemakan Jamu: Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat, BBPOM di Padang mengadakan acara Penyebaran Informasi melalui Car Free Day (CFD) . Diadakan aksi minum jamu bersama dengan pengunjung CFD Kota Padang pada Minggu (25/5) bertempat di area CFD Jalan Jendral Sudirman No.54. mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB. Agent of Change (AOC) BBPOM di Padang berkolaborasi dalam acara ini dengan mengusung program GREBEK (Gerakan Edukasi Bareng Konsumen) di CFD. Kegiatan berupa grebek tas pengunjung. Jika dalam tas tersebut ditemukan Obat, Kosmetik dan Makanan terkemas maka dijelaskan penggunaan BPOM Mobile untuk melihat keaslian izin edar yang tertera di kemasan.

Kegiatan MPLS Keamanan Pangan BBPOM di Padang



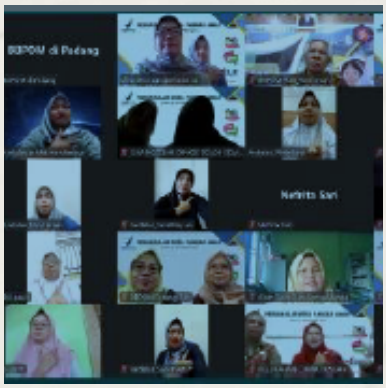
30 Juli 2025 — Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lewat Sosialisasi) Keamanan Pangan secara daring bagi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Solok. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran pentingnya keamanan pangan sejak dini dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan sadar pangan aman ditingkat SD/SMP, madrasah, serta SMA/SMK/SLB. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Padang berharap orang tua, guru, dan siswa dapat memahami peran penting mereka dalam menerapkan praktik keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga budaya pangan aman dapat tumbuh sejak lingkungan sekolah.

BPOM Padang Kenalkan Keamanan Pangan Sejak Dini kepada Siswa TK



Edukasi mengenalkan keamanan pangan sejak dini kepada siswa TK Sabbihisma 4 bersama guru, serta orang tua siswa (23/9) dan SD Kristen Kalam Kudus (15/8). di aula Lantai 3 BBPOM di Padang. Kegiatan ini Sebagai bentuk pelayanan kepada kelompok ramah rentan dan memerlukan perlakuan khusus, pendekatan edukatif, dan perlindungan lebih, agar mereka dapat memperoleh hak yang sama atas kesehatan, keamanan obat dan makanankegiatan ini Memberikan perlindungan dini terhadap bahaya pangan tidak aman dengan Melibatkan guru dan orang tua sebagai agen pendamping anak, memperkuat lingkungan ramah anak dan ramah pangan dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Pengawalan Program Desa Pangan Aman BBPOM di Padang



4 September 2025, Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan Pengawalan Program Desa Pangan Aman secara Zoom Meeting sebagai upaya memastikan keberlanjutan program serta memperkuat kemandirian masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang aman pangan. Kegiatan ini diikuti oleh Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa dari delapan wilayah intervensi tahun 2024,yaitu Kota Padang, Kabupetan Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan sebagai bentuk komitmen BPOM untuk memastikan masyarakat mampu menjaga keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan dengan melihat hasil kegiatan dan inovasi lokal yang diasmpaikan oleh masing masing desa melalui pemaparan materi.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tokoh Masyarakat



Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar oleh Balai Besar POM di Padang bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI, bertempat di Hall Badminton GG, Jorong Ekor Parit, Nagari Limbanang, Kabupaten 50 Kota, tanggal 11 September 2025. Kegiatan bertema "Bersama BPOM RI, Usaha Mikro Kecil Menengah Naik Kelas" ini dibuka secara daring oleh Ade Rizki Pratama, Anggota Komisi IX DPR RI. Ia menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan berisiko, serta dukungan BPOM bagi UMKM agar naik kelas dan menembus pasar ekspor. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Padang berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan, serta terbentuknya UMKM tangguh dan berdaya saing tinggi di Nagari Limbanang dan sekitarnya.

Bimbingan Teknis Izin Penerapan Pogram Manajemen Resiko



Dalam rangka Sosialisasi Izin Penerapan PMR bertahap bagi UMK pangan olahan risiko tinggi, Balai Besar POM di Padang bersama Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM RI mengadakan Bimbingan Teknis dan Desk Pengajuan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko bagi UMK Pangan Steril Komersil pada tanggal 21 Agustus 2025 bertempat di Aula Lt.3 Balai Besar POM di Padang. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar UMK yang mengolah pangan resiko tinggi dapat lebih memahami bagaimana menerapkan Program Manajemen Resiko secara bertahap dan dapat mengajukan permohonan Izin Penerapan PMR secara mandiri.

Sinergi BBPOM di Padang dengan Badan Gizi Nasional dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Pangan



Dalam pengawalan Program Unggulan Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), tanggal 28 September 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penjamah Pangan pada 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang bertempat di hotel Truntum Padang. Adapun Nara Sumber berasal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang hadir sebagai pemateri bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang, Persagi dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun materi yang disampaikan terkait Penerapan Keamanan Pangan di SPPG. Kegiatan bimtek ini sangat penting karena merupakan tindak lanjut dan Langkah antisipasi banyaknya kasus KLB yang terjadi di berbagai kabupaten/Kota

Pembinaan oleh Deputi IV Bidang Penindakan BPOM RI



Dalam rangka meningkatkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Padang, Deputi IV bidang penindakan BPOM RI Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat melakukan pembinaan kepada UPT Balai Besar POM di Padang khususnya terhadap fungsi penindakan yang dilaksanakan tanggal 18 September 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, berdiskusi mengenai capaian dan kendala yang dihadapi UPT, serta memberikan dukungan dan solusi untuk menghadapi perubahan

IN HOUSE TRANING Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2015



BBPOM di Padang Selenggarakan In House Training Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Green Laboratory dan lingkungan kerja yang berkelanjutan, BBPOM di Padang menyelenggarakan In House Training (IHT) Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 pada 29–30 September 2025 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang. Peserta mendapatkan wawasan komprehensif mengenai penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) berbasis ISO 14001:2015, dengan fokus pada konteks operasional BBPOM — mulai dari pengawasan, pengujian laboratorium, pengelolaan limbah B3, IPAL, hingga limbah mikrobiologi serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di Indonesia.

Surveilan KAN: Wujud Komitmen BBPOM di Padang dalam Menjaga Mutu dan Kompetensi Laboratorium



Sebagai bagian dari pemeliharaan akreditasi Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2017, Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan Asesmen Surveilen ke-2 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada 25–26 September 2025. Tim asesor KAN melakukan asesmen terhadap penerapan sistem manajemen mutu dan kegiatan teknis pengujian, meliputi bidang Kimia dan Mikrobiologi, serta melakukan verifikasi tindak lanjut hasil surveilan sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2017 terus berjalan secara konsisten dan efektif. BBPOM di Padang siap mewujudkan laboratorium pengujian yang kompeten, terpercaya, dan berintegritas.

IN HOUSE TRANING Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : 2015



BBPOM di Padang Selenggarakan In House Training Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Green Laboratory dan lingkungan kerja yang berkelanjutan, BBPOM di Padang menyelenggarakan In House Training (IHT) Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 pada 29–30 September 2025 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang. Peserta mendapatkan wawasan komprehensif mengenai penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) berbasis ISO 14001:2015, dengan fokus pada konteks operasional BBPOM — mulai dari pengawasan, pengujian laboratorium, pengelolaan limbah B3, IPAL, hingga limbah mikrobiologi serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di Indonesia.

Surveilan KAN: Wujud Komitmen BBPOM di Padang dalam Menjaga Mutu dan Kompetensi Laboratorium

Sebagai bagian dari pemeliharaan akreditasi Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2017, Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan Asesmen Surveilen ke-2 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada 25–26 September 2025. Tim asesor KAN melakukan asesmen terhadap penerapan sistem manajemen mutu dan kegiatan teknis pengujian, meliputi bidang Kimia dan Mikrobiologi, serta melakukan verifikasi tindak lanjut hasil surveilan sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2017 terus berjalan secara konsisten dan efektif. BBPOM di Padang siap mewujudkan laboratorium pengujian yang kompeten, terpercaya, dan berintegritas.



Pemkab Solok Selatan Dukung Pembentukan Loka POM



Upaya memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah kembali mendapat dukungan positif. BBPOM di Padang melakukan audiensi dengan Bupati Solok Selatan, H. bapak Khairunas, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Syamsurizal, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Bapak dr. Pendewal, M.H, bertempat di Kantor Bupati Solok Selatan, Padang Aro (14/10). Kepala BBPOM di Padang, Martin Suhendri menyampaikan rencana pembentukan Loka POM di Kabupaten Solok Selatan sebagai upaya strategis memperkuat efektivitas pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan di wilayah selatan Sumatera Barat.

Perkuat Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan serta Pembinaan UMKM



Dalam upaya memperkuat kolaborasi pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Padang, Kepala Balai Besar POM di Padang, Drs. Martin Suhendri, Apt. M. Farm melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nazir, pada Senin (13/10) di ruang kerja Wakil Wali Kota Padang. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas sinergi strategis antara BBPOM di Padang dan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian utama.

Forum Komunikasi Pelaporan KTD/ESO Dorong Penguatan Farmakovigilans di Sumatera Barat



BBPOM di Padang menyelenggarakan Forum Komunikasi Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) sebagai tindak lanjut hasil pemantauan pelaporan melalui aplikasi e-MESO hingga 30 September 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 3 BBPOM di Padang dan diikuti oleh Penanggung Jawab Farmakovigilans dari berbagai rumah sakit dan klinik di Sumatera Barat (6/11). Kepala BBPOM di Padang, Martin Suhendri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa risiko efek samping obat merupakan isu penting yang perlu menjadi perhatian seluruh tenaga kesehatan. Melalui forum ini, diharapkan semangat dan komitmen Fasyankes dalam pelaporan KTD/ESO semakin meningkat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap risiko efek samping obat.

Edukasi Obat dan Obat Bahan Alam di Desa Talago Sariak, Kota Pariaman



BBPOM di Padang bersama Perguruan Tinggi Farmasi se-Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Talago Sariak, Kota Pariaman (8/10). Kegiatan ini bertempat di Kantor Desa Talago Sariak dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pariaman yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, Yalviendri. Kegiatan ini diikuti oleh 23 Perguruan Tinggi Farmasi se-Indonesia yang berkolaborasi dalam memberikan edukasi terkait penggunaan obat, pemanfaatan obat bahan alam, serta pelatihan pembuatan teh celup mengkudu bagi masyarakat.

CFD Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional dan GERMAS



Sebagai bentuk dukungan terhadap HKN dan GERMAS, Unit Kegiatan Mahasiswa Scouting Action For Empowerment Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan di area Car Free Day (CFD), Sato Resto, Jl. HR Rasuna Said, Padang (9/11). Kegiatan ini mengangkat tema "Dari Keluarga Sehat, Tumbuh Generasi Hebat, Menuju Masa Depan Indonesia yang Lebih Kuat." Martin Suhendri, menyampaikan materi mengenai Penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik di Rumah Tangga. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan Cek KLIK sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan.

Perkenalkan Krida SAKA POM dan Himbau Anggota Pramuka Jadi AMR Warrior di Raimuna Daerah Sumbar VII Tahun 2025



Sebagai bagian dari rangkaian Raimuna, para peserta mendapatkan kesempatan mengunjungi berbagai Satuan Karya (SAKA), termasuk SAKA Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Kunjungan ke SAKA POM dilaksanakan pada 19 November 2025 yang bertempat di Aula Lantai 3 Balai Besar POM di Padang. Agenda ini bertujuan memperkenalkan krida SAKA POM sekaligus nenghimbau anggota Pramuka berperan sebagai AMR Warrior untuk mendukung upaya nasional pencegahan resistensi antimikroba. Ketua Mabi SAKA POM Sumatera Barat, Drs. Martin Suhendri, Apt., M.Farm, secara resmi membuka kegiatan dan memberikan materi mengenai tugas dan fungsi BPOM, sistem pengawasan full spectrum (premarket–postmarket), serta program edukasi publik melalui KIE. Peserta juga diperkenalkan pada tiga Krida SAKA POM.

BBPOM Padang mendorong Percepatan DAK dan SK TKPOM



BBPOM di Padang mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera mempercepat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik tahun 2025 dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TKPOM). Desakan ini disampaikan dalam audiensi strategis yang dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Padang, Drs. Martin Suhendri, Apt, M.Farm, di ruang kerja Bupati Padang Pariaman pada Senin (24/11). Audiensi ini dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. Jhon Kenedi Aziz, S.H., M.H., bersama jajaran Kepala Dinas terkait, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Dinas Pertanian.

FGD Revisi Peraturan Farmakovigilans dan Pengawasan Obat Tuberkulosis



Direktorat Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans serta Penguatan Pengawasan Regulatori melalui Evaluasi Standar Mutu Pengujian Obat Tuberkulosis di Aula Balai Besar POM Padang (28/11). Acara ini dihadiri secara daring oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (ONPPZA) Badan POM, Dr. William Adi Teja, MD., BMed., MMed, dan secara luring oleh Direktur Standardisasi Obat NPPZA, Dr. Ria Christine Siagian, S.Si., Apt., M.Sc.

Percepatan UMKM Naik Kelas melalui Pendampingan Badan POM



Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat sadar memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu serta antihoaks. BBPOM di Padang bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama menggelar kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi di Kabupaten Agam (11/12) dan Kota Bukittinggi (12/12). Kegiatan dihadiri oleh 250 orang peserta di masing-masing lokasi kegiatan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Ade Rezki Pratama juga menyalurkan bantuan Padat Karya Tunai Desa kepada 15 orang dengan total Rp.100.000.000,- dan sekaligus melakukan penyerahan donasi sembako untuk korban banjir dan longsor di Kabupaten Agam.

PENGHARGAAN


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

No. HM.09.1.3.01.25.01

Piagam ini dengan bangga diberikan kepada

Balai Besar POM di Padang

Atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan
Lintas Sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-1
dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024

Jakarta, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, MD, M.Biomed, PhD

Kontribusi Aktif dalam mengkoordinasikan Lintas Sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-1 dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024


BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.97

DIBERIKAN KEPADA

BALAI BESAR POM DI PADANG

SEBAGAI

BALAI BESAR TERBAIK 1

PADA KATEGORI TINDAK LANJUT REKOMENDASI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DIBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Terbaik 1 pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan


BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.30

DIBERIKAN KEPADA

BALAI BESAR POM DI PADANG

SEBAGAI

BALAI BESAR TERBAIK 2

PADA KATEGORI PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DIBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Terbaik 2 pada Kategori Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan


BADAN POM

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Balai Besar POM di Padang

Atas Partisipasinya

Terbaik Pelaporan Tepat Waktu Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024

Jakarta, 1 September 2025
Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST., MBA.

Terbaik Pelaporan Tepat Waktu Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024

PENGHARGAAN


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Piagam Penghargaan

diberikan kepada

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang

atas dedikasi dalam pembinaan sehingga 2 dari 3 satuan kerja di wilayah kerjanya berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025

Padang, 21 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Ditandatangani secara elektronik

Mohammad Dody Fachrudin

Penghargaan dari DJP Kanwil Sumbar atas dedikasi dalam pembinaan sehingga 2 (dari 3) satker wilayah kerja meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

BALAI BESAR POM DI PADANG

sebagai:

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024

Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori

"PELAYANAN PRIMA"

Jakarta, November 2024

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.

Indeks Pelayanan Publik dengan Predikat PELAYANAN PRIMA


BADAN POM

ANUGERAH

eterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPO

2024

KATEGORI PPID PELAKSANA UPT BALAI BESAR POM

BALAI BESAR POM DI PADANG

SEBAGAI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

Jakarta, 3 Desember 2024

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Predikat INFORMATIF : Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



BAB I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan pre-market dan post-market produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Di Propinsi Sumatera Barat terdapat 3 unit pelaksana teknis yang memiliki cakupan wilayah pada 19 Kabupaten/Kota. Salah satunya Balai Besar POM di Padang, memiliki 9 kabupaten/kota yang menjadi wilayah yang diawasi dalam peredaran obat dan makanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi dilaksanakan secara berkesinambungan. Sedangkan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk tanpa izin edar dan produk-produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Padang.

Balai Besar POM di Padang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa sedian farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman. Pengawasan terhadap iklan dan label produk obat dan makanan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan produk yang akan dikonsumsi. Dengan adanya Balai Besar POM di Padang, masyarakat Sumatera Barat pada 9 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Padang memiliki keyakinan bahwa sedian farmasi dan pangan olahan yang dikonsumsi telah melewati proses pengawasan dan memenuhi standar kemanan dan kualitas yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sampai akhir Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang dan penetapan Renstra selanjutnya. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip- prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk Implementasi Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar POM di Padang masih terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis lainnya yaitu Balai POM di Payakumbuh dan Loka POM di Kabupaten Sijunjung.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan makanan sebagai berikut:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 9 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok.

2. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh meliputi 7 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung meliputi 3 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makananadalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

1. Kepala Balai;
2. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang maka uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangandan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan

jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan Adminstrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsioanal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. ISU STRATEGIS

1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

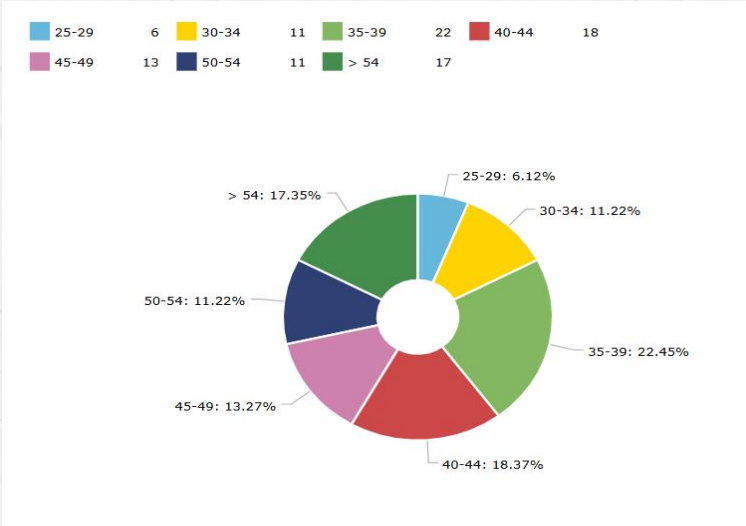
A. Analisis Lingkungan Strategis Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Desember 2025 adalah 115 orang (97 PNS dan 18 PPPK), dengan rincian jumlah berdasarkan umur, golongan dan pendidikan:

a. Umur

Grafik ASN berdasarkan kelompok Umur



Gambar 1.2. Profil SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan umur

b. Golongan

Tabel 1.1. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan II b	2
2	Golongan II c	4
3	Golongan III a	7
4	Golongan III b	15

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
5	Golongan III c	17
6	Golongan III d	27
7	Golongan IV a	13
8	Golongan IV b	9
9	Golongan IV c	3
10	Golongan IX	15
11	Golongan VII	3
Total		**115**

c. Latar belakang pendidikan

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 Farmasi	9
2	S2 Teknologi Pangan	1
3	S2 Biomedik	1
4	S2 Kesehatan Masyarakat	1
5	S2 Kimia	1
6	S2 Hukum	2
7	S2 Teknik Elektro	1
8	S2 Akuntansi	1
9	Apoteker	28
10	S1 Farmasi	3
11	S1 Biologi	8
12	S1 Kimia	12
13	S1 Teknologi Hasil Pertanian	3
14	S1 Teknologi Pangan	2
15	S1 Hukum	5
16	S1 Ekonomi/ Akuntansi	11
17	S1 Kesehatan Masyarakat	1
19	S1 Informatika	3
20	S1 Lainnya	4
21	D3 Analis Farmasi/ Kimia/ Gizi/ Kom	7
22	SLTA/ sederajat	11
Total		**115**

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja, total kebutuhan SDM di BBPOM di Padang adalah 135 orang, dimana pemenuhan terhadap ABK saat ini adalah sebesar 85,19%. Dengan demikian masih terdapat kekurangan SDM sebesar 20 orang.

2. Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3687 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor BBPOM di Padang yang digunakan seluas 3687 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m2. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Setiap tahun dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan e-government setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus diupdate. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (Internet Service Provider) Speedy Indihome 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. Balai Besar POM di Padang sendiri pada tahun 2021 berlangganan internet ISP Lintas Arta dengan kapasitas bandwidth 20 Mbps dan 1 IP Publik, dan pada tahun 2023 di upgrade menjadi 35 Mbps dan 5 IP publik. Pada Tahun 2024, langganan internet pindah ke Fibernet dengan kapasitas bandwidth 80Mbps dengan 5 IP Publik. Tahun 2025, karena kebutuhan internet yang cukup tinggi, Balai Besar POM di Padang berlangganan internet ke ISP icon plus dengan kapasitas bandwidth 100 Mbps dengan 5 IP publik, dan layanan cloud server. Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya Storage Server, Network Management Sistem (NMS) Server dan MRTG Web Server yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI Balai Besar POM di Padang.

Pasca Pandemi, Balai Besar POM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi zoom meeting untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder

terkait dan digunakan sampai sekarang untuk kegiatan daring ataupun hybrid. Selain itu Balai Besar POM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Tahun 2021 Balai Besar POM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh customer Balai Besar POM di Padang dimana saja dan kapan saja. Sampai saat ini aplikasi Galamai terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan Teknologi Informasi. Pada Tahun 2025 Galamai dibangun ulang dan dibuat khusus untuk seluruh layanan yang ada di Balai Besar POM Padang dengan dilengkapi layanan KIE, dan layanan magang. Kemudian untuk fitur layanan pihak ketiga pada aplikasi Galamai sudah dikembangkan oleh Pusdatin BPOM menjadi aplikasi Portal SIPT Pihak Ketiga yang digunakan oleh semua unit kerja.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2025 untuk pemenuhan standar laboratorium, terdapat pengadaan peralatan laboratorium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit.

6. Pagu Anggaran Tahun 2025

Anggaran pada awal tahun yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 No SP DIPA-063.01.2.432810/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.36.739.481.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.9.087.481.000, Belanja Barang Rp.22.252.868.000 (termasuk blokir Rp.4.867.946.000), dan Belanja Modal Rp.5.399.132.000.

Pada triwulan I terjadi efisiensi anggaran pada Badan POM yang berdampak pada pemblokiran mandiri dalam rangka Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara pada belanja barang dan belanja modal dengan total sebesar Rp.17.106.396.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 01 tanggal 22 Februari 2025. Sedangkan pada triwulan II terdapat pembukaan blokir relaksasi anggaran pada belanja barang sebesar Rp.4.562.382.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 03 tanggal 09 April 2025. Kemudian pada triwulan III terjadi pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp.259.336.000 dan penambahan belanja barang sebesar Rp.8.808.000 dalam rangka Revisi Anggaran Kebutuhan Belanja Pegawai Exsisting dan Anggaran CASN TA 2025 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 05 tanggal 07 Juli 2025.

Pada triwulan IV terjadi pengurangan pagu belanja modal sebesar Rp.68.132.000 dalam rangka Memenuhi kebutuhan anggaran untuk CASN TA 2025 Biro SDM yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 08 tanggal 31 Oktober 2025. Selanjutnya pembukaan blokir relaksasi anggaran pada belanja barang sebesar Rp.75.778.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 09 tanggal 11 November 2025. Maka per 31 Desember 2025 total pagu anggaran Balai Besar POM di Padang sebesar Rp.36.412.013.000. Dari total pagu terdapat blokir sebesar Rp.12.468.236.000, sehingga pagu anggaran Balai Besar POM di Padang yang bisa digunakan sebesar Rp.23.943.777.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.8.779.337.000, Belanja Barang Rp.10.989.542.000, dan Belanja Modal Rp. 4.174.898.000.

B. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat

Luas Wilayah Sumatera Barat: 42.252,24 km2, yang merupakan catchment area dari Balai Besar POM di Padang, Balai POM di Payakumbuh, dan Loka POM di Sijunjung.



Kota

- Padang
- Pariaman
- Padang Panjang
- Bukittinggi
- Payakumbuh
- Solok
- Sawahlunto

Kabupaten

- Padang Pariaman
- Agam
- Sijunjung
- Pesisir selatan
- Mentawai
- Solok
- 50 kota
- Tanah Datar
- Pasaman Barat
- Pasaman Timur
- Solok Selatan
- Dharmasraya

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

1. Jumlah Sasaran Pengawasan

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang, terhadap 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana yang diawasi target tahun ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sarana Distribusi		**Jumlah**
1.	Pedagang Besar Farmasi	21
2.	IFP	7
3.	Pusat Kesehan Masyarakat	50
4.	Rumah Sakit	28
5.	Klinik	40
6.	Apotek	101
7.	Fasilitas Lain	27
8.	Obat Tradisional	74
9.	Suplemen Kesehatan	28
10.	Kosmetik	112
11.	Pangan Olahan	194
Total Sarana Distribusi		**682**
Sarana Produksi		
1.	Produksi Obat	1
2.	UMOT	1
3.	UKOT	1
4.	Industri Kosmetik	3

Sarana Distribusi		Jumlah
5.	Industri Pangan	45
Total Sarana Produksi		**51**

1.4.2 Isu Strategis Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawalan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi gratis sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 secara nasional dan juga dilaksanakan juga di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Dalam pelaksanaanya MBG dievaluasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. MBG menjadi isu strategis bagi Badan POM karena ditugasi untuk pengawalan sampling dan pengujian kimia dan mikrobiologi makanan yang akan di bagikan kepada siswa sekolah dan memberikan edukasi tentang pangan yang aman dan bermutu, disamping itu dilakukan juga inspeksi pada rantai distribusi pasokan makanan. Balai Besar POM di Padang juga menjadi narasumber terkait makanan pada kegiatan program nasional ini dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional di Sumatera Barat. Dalam pengawalan ini telah dilakukan sampling dan pengujian di Kab/Kota yang menjadi titik lokasi kegiatan di Sumatera Barat.

2. Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, maka seluruh unit kerja di lingkungan BPOM baik di Pusat dan UPT melakukan pemblokiran secara mandiri dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing unit kerja. Akibat kebijakan efisiensi anggaran ini maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu mengurangi belanja yang bersifat pendukung dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di sembilan Kab/Kota yang menjadi wilayah kerja. Hal ini mempengaruhi perubahan skema kegiatan dan penyederhanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan kondisi kebijakan efisiensi anggaran ini maka akan mempengaruhi ketercapaian target terkhususnya target prioritas nasional yang telah ditetapkan pada DIPA Tahun Anggaran 2025.

Pada akhir Maret terdapat relaksasi anggaran sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan

Blokir Anggaran TA 2025 sehingga perlu diajaukan revisi pembukaan blokir anggaran 100% untuk 7 rincian output priotas nasional yaitu: Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Padang, Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT, dan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT. Namun, pengesahan DIPA atas diajukan revisi buka blokir baru ditetapkan pada tanggal 09 April 2025, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan pada triwulan 1 sesuai anggaran relaksasi. Jadi penyesuaian rencana pelaksanaan kembali kegiatan 7 prioritas nasional tersebut dapat dilaksanakan pada triwulan 2, tentunya dengan usaha yang lebih maksimal untuk mengejar tercapainya target.

3. Peran UPT Pencapaian WHO Listed Authority (WLA)

Badan POM terus mengupayakan untuk memperoleh level pengakuan sebagai otoritas regulator obat dan makanan kelas dunia melalui status WHO Listed Authority (WLA). Sejak November 2023, BPOM telah memulai persiapan menuju perolehan status WLA tersebut. Dengan pengakuan WLA, BPOM dapat sejajar dengan otoritas regulatori obat negara maju, seperti United States Food and Drug Administration (US FDA), European Medicines Agency (EMA) Uni Eropa, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) United Kingdom, Health Canada, dan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang. Ini bukan hanya tentang kredibilitas, tetapi juga memastikan produk farmasi Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.

UPT Badan POM memainkan peran krusial dalam membuktikan bahwa sistem regulasi BPOM berfungsi efektif hingga level operasional di daerah. Tahapan WHO penilaian lapangan, mengirim tim evaluator internasional untuk melakukan *assessment* langsung ke kantor pusat BPOM dan kantor UPT di daerah. Tim evaluator akan melakukan wawancara dengan manajemen dan teknisi, tinjau pelaksanaan di lapangan (inspeksi, sampling, pengujian) dan cek kesesuaian praktik dengan standar WHO. Balai Basar POM harus mempersiapkan seluruh tahapan evaluasi lapangan apabila dijadikan perwakilan yang akan dikunjungi Tim evaluator WHO.

Pada Desember 2025 BPOM resmi meraih status WLA. Hal ini menunjukkan bawah BPOM menjadi organisasi pertama pada negara berkembang dan salah satu dari sedikit otoritas regulatori dunia yang diakui standar pengawasan obat dan vaksinnya secara internasional. Pengakuan ini menegaskan sistem regulasi BPOM handal, transparan, dan berstandar global. Status WLA ini membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Pencapaian ini perlu dipertahankan dengan kerjasama dan kolaborasi semua bagian di Lingkungan BPOM.

4. Renstra Baru 2025 - 2029

Tahun 2025 adalah tahun pertama pada Rencana Strategis (Renstra) BPOM periode 2025-2029. Renstra diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan yang tertuang dalam dokumen RPJPN dan RPJMN. Renstra BPOM dirancang tidak hanya untuk menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Perencanaa ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan BPOM untuk periode 2025-2029, disusun indikator yang akan menjadi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya di Sumatera Barat. Indikator Kinerja merupakan turunan dari sasaran strategis Badan POM, sasaran program dan sasaran kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan metode penyusunan berdasarkan kerangka logis kinerja (*logframe*). Indikator kinerja memuat target-target yang telah disepakati antara Kepala UPT dan Kepala Badan POM yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja terdiri dari 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator turunan dari sasaran kegiatan tersebut. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja merupakan pengukuran yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang selama periode yang ditetapkan.

5. Penyimpangan Penyaluran Obat yang Sering Disalahgunakan

Banyaknya pelanggaran penyaluran obat merupakan suatu tantangan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melakukan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Obat-obat yang berpotensi disalahgunakan adalah Obat-Obat Tertentu (OOT) antara lain dekstrometorfan, ketamin, dan Misoprostol. Adanya peningkatan jumlah peredaran belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh fasilitas distribusi dan pelayanan, bahkan menfasilitasi penyimpangan ini sehingga berdasarkan data Badan POM, banyak ditemukan pelanggaran pengelolaan OOT dan Ketamin selama tahun 2022 sampai 2024. Selain ini, pengawasan juga lebih diperketat terhadap

bahan kimia obat yang sering disalahgunakan dicampurkan ke dalam obat tradisional maupun kosmetik. Beberapa BKO yang pernah disebutkan dalam public warning antara lain Sildenafil Sitrat dan turunannya, Parasetamol, Tadalafil, Dexametason, Sibutramine Hidroklorida, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, dan Piroksikam (Obat Tradisional), Hydroquinone, Tretinoin, Cilndamycin dan Mometasone (Kosmetik). Sehubungan dengan trend ini, BBPOM di Padang memiliki target melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan potensi tinggi pelanggaran peraturan perundan-undangan di bidang obat dan makanan.

6. Stategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 BPOM ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan kegiatan *konvergensi* dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah. Badan POM juga ditugaskan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fortifikasi pangan. Sesuai dengan tugas yang di berikan pemerintah kepada BPOM pada strategi Nasional percepatan penurunan stunting, Balai Besar POM di Padang mengimplementasikannya dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selain itu juga diimplementasikan pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja kegiatan Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan target sekolah pada tahun 2025 sebanyak 14 sekolah, Jumlah desa pangan aman dengan target 6 desa pada tahun 2025, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 1 pasar pada tahun 2025.

Masih ditemukan produk pangan fortifikasi yang tidak sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang merupakan suatu tantangan dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sebagai upaya percepatan penurunn stunting. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah peningkatkan pembinan dan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, KIE langsung tatap muka maupun KIE tidak langsung melalui berbagai media dan penanganan melibatkan pendekatan komprehensif dengan lintas sektor terkait.

Balai Besar POM di Padang senantiasa mengedukasi masyarakat melalui media sosial (Intagram, Facebook dan Tiktok: @bpom.padang; X: @bbpompadang; subsite: padang.pom.go.id; Galamai: bbpompadang.id) dengan konten “Cegah Stunting” series setiap bulannya. Pelaksanaan KIE Langsung dengan tema “Cegah Stunting” pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 35%. Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan pada 2 *locus* stunting yang ada di Wilayah kerja Balai Besar

POM di Padang dengan plevalensi stunting yang tinggi yaitu: Kelurahan Koto Panjang Kota Solok dan Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

7. Pengendalian Resistensi Antimikroba

BPOM memiliki peran dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba secara nasional melalui 5 langkah yaitu penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas (SDM, laboratorium dan sistem informasi), surveilans, intervensi serta advokasi dan kerja sama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024. Badan POM telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.03.20.98 tahun 2020 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Antimicrobial Resistance di Lingkungan Badan POM tahun 2020 – 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan rekapitulasi data hasil pengawasan tahun 2024 di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan hasil persentase apotek yang menjual antibiotik tanpa resep dokter sebesar 84,78% dan persentase kehadiran apoteker di apotek pada jam operasional apotek masih rendah senilai 37,25%.

Pada tahun 2025 dengan masuknya indikator kinerja kegiatan Pengendalian Resistensi Antimikroba di triwulan III diharapkan terjadi perbaikan dalam penyerahan antibiotik dan kehadiran apoteker di apotek. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah publikasi hasil pengawasan apotek melalui media sosial Balai Besar POM di Padang sebagai bentuk transparansi kepada seluruh masyarakat termasuk *stakeholder* terkait praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di wilayah pengawasan UPT. Selain publikasi, telah dilaksanakan pemeriksaan bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.ke PT. Japfa Food Comfeed Indonesia, di Kawasan Industri Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Inspeksi bersama ini bertujuan untuk mengawal integritas rantai distribusi/peredaran bahan obat dan/atau obat khususnya antibiotik yang penggunaannya beririsan di sektor kesehatan manusia dan hewan termasuk ikan, dan diharapkan dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan, rantai distribusi/peredaran, dan penggunaan bahan obat dan/atau obat termasuk pemanfaatan produk yang tidak memenuhi persyaratan dari sektor manusia di sektor hewan serta mencegah atau mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran terkait penyediaan, distribusi/peredaran dan penggunaan bahan obat dan/atau obat untuk mengendalikan kasus resistensi antimikroba yang disebabkan dari produk hewan yang mengandung mikroba resisten.

8. Pendampingan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional dan sektor UMKM tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Balai Besar POM di Padang selalu mendukung percepatan perkembangan UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik melalui bimbingan teknis dan pendampingan serta berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan bersinergi dengan lintas sektor sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.

Target Balai Besar POM di Padang dalam pendampingan UMKM tahun 2025 adalah 11 UMKM Pangan, 1 UMKM Kosmetik dan 1 UMKM Obat Tradisional. Pendampingan dimulai dari penyiapan denah bangunan ruang produksi, bimbingan terhadap penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB hingga proses pendaftaran produk UMKM di aplikasi. Pendampingan ini dilaksanakan dengan menerapkan SI JEMPOL (Siap Jemput Bola) sehingga layanan dapat dipercepat dan pelaku usaha merasa puas karena petugas akan langsung melakukan pembinaan ke sarana produksi.

Bimbingan teknis CPPOB dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) dalam program SAPA UMK, yang memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan pengembangan kewirausahaan bagi UMK yang disinergikan dengan Program Orang Tua Angkat (OTA). Sinergi program ini diharapkan dapat mencapai visi yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMK sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Permasalahan UMKM yang di rasakan petugas di lapangan terkait ketersediaan dana UMKM untuk persiapan ruang produksi, implementasi penerapan cara produksi yang baik dan keterbatasan personil dalam memenuhi dokumen penerapan CPPOB, kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan perangkat dan aplikasi pendaftaran. Serta budaya kerja UMKM yang belum memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kapasitas dan nilai dari produk yang di produksi, masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

9. Tren Penjualan Obat dan Makanan llegal Secara Online

Terjadinya pergeseran pola distribusi dan promosi sediaan farmasi dan pangan olahan secara online sehingga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan mendistribuskan produk secara online. Penjualan secara online menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, tiktok dan platform *e-commerce.* Untuk itu, penertiban produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu target pengawasan BPOM berdasarkan analisis risiko. Balai Besar POM di Padang telah melakukan patroli siber secara berkesinambungan untuk mencegah dan menelusuri praktik peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan hasil patroli siber ini dilaporkan ke Direktorat Siber BPOM yang telah berkoordinasi dengan

Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Indonesia E-commerce Association (idEA) untuk dilakukan penurunan konten/*takedown* terhadap link yang teridentifikasi menjual produk TIE. Apabila ditemukan indikasi pidana maka akan dilakukan proses Pro justitia oleh PPNS BPOM.

10. Penjualan Obat dan Makanan Secara Daring

Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyatakan bahwa produk yang dapat diedarkan secara daring meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Semua komoditi tersebut harus memiliki nomor izin edar sesuai ketentuan dan diedarkan oleh sarana yang memiliki perizinan sesuai ketentuan. Terdapat larangan untuk mengedarkan secara daring untuk obat dan kosmetika tertentu secara langsung kepada masyarakat yaitu obat golongan Narkotika dan Psikotropika, sediaan injeksi dan implan KB sedangkan untuk kosmetika adalah yang mengandung Alpha hidroxy acid (AHA) diatas 10 %, pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan Hydrogen peroxide diats 6% dan Kosmetika isi ulang. Terdapat jenis obat yang dibatasi dalam peredaran daring ini yaitu prekursor farmasi, obat keras golongan Obat-obat tertentu, obat disfungsi ereksi.

11. Optimalisasi Fungsi Media Sosial sebagai jembatan Komunikasi dengan masyarakat

Untuk pengelolaan Media Sosial yang baik Badan POM telah mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada saat ini semakin penting pengelolaan media sosial yang strategis dan bertanggung jawab, terlebih bagi instansi pemerintahan seperti BPOM, untuk dapat menyampaikan kebijakan maupun informasi strategis kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Tak bisa dipungkiri, saat ini media sosial telah menjadi kekuatan baru saluran informasi. Pengguna media sosial di Indonesia yang semakin bertambah pada akhirnya mampu mengikis sekat dan batas seperti waktu, lokasi, maupun demografis dengan lembaga pemerintah, termasuk BPOM. Apabila realitas digital ini tidak disadari dan media sosial tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik dapat membawa dampak negatif. Potensi netizen alih-alih turut membangun kepercayaan terhadap BPOM, malah sebaliknya dapat memberikan sentimen negatif terhadap citra BPOM. Media sosial memungkinkan BPOM untuk menyampaikan kebijakan dan informasi penting dengan cara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, media sosial juga menjadi alat untuk melawan misinformasi dengan menyediakan klarifikasi yang cepat dan tepat.

Balai Besar POM di Padang aktif menggunakan media sosial dalam rangka mengedukasi masyarakat. Akun media sosial Balai Besar POM di Padang, antar lain: Subbsite (https://padang.pom.go.id), Instagram (@bpom.padang), Facebook bpom.padang), Youtube (bpom.padang), X (bbpompadang) dan Galamai (https://bbpompadang.id). Melalui akun tersebut Balai Besar POM di Padang mengedukasi masyarakat dengan konten yang sesuaiakan dengan agenda settingan bulanan yang ditetapkan Badan POM, konten kinerja Balai Besar POM di Padang, konten edukasi, konten pelayanaan publik dankonten lain yang dirasa penting.

12. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Melaui Sinergitas UPT BPOM dan Pemerintah Daerah

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;

Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dapat dicapai melalui sinergitas pengawasan antara kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah. Pada inpres 03 tahun 2017, presiden mengamanatkan kepada BPOM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Pembagian kewenangan pada urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur pada undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM yang berada di wilayah Sumatera Barat. Sesuai dengan PerBPOM No. 3 tahun 2025 wilayah keja Balai Besar POM di Padang meliputi 9 kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Balai Besar POM di Padang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja UPT. Dalam pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan beberapa fungsi salah satunya "**pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan".** Untuk itu pada tahun 2025 ini Balai Besar POM di Padang menargetkan

terlaksananya advokasi terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diwilayah kerja Balai Besa POM di Padang.

13. Pengarusutamaan Gender dan Inkulusi Sosial (PUGIS)

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Hal ini berkaitan dengan BPOM yang utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PUGIS menjadi isu penting di lingkungan BPOM sampai level UPT karena diintegrasikan sebagai strategi dalam pengawasan obat dan makanan untuk memastikan pelayanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi PUGIS BPOM telah menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Balai Besar POM di Padang juga telah menyusun Rencana Aksi yang tertuang pada Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.10.25.186 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2026.

Kemudian PUGIS menjadi isu karena berkaitan dengan akuntabilitas anggaran yaitu perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga dalam penyusuanan anggaran memastikan program kegiatan yang dilakasanakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender dan sosial. PUGIS bertujuan memastikan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki (termasuk kelompok rentan) terhadap obat dan makanan aman. Hal ini mencakup perlindungan konsumen dari produk ilegal yang menargetkan kelompok tertentu. Selain itu PUGIS juga bertujuan untuk meningkatan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dalam pengawasan obat dan makanan dengan cara meningkatkan kesadaran (awareness) dan kesetaraan dalam mendapatkan informasi obat dan makanan yang aman sehingga dapat merasakan manfaat dari kegiatan pengawasan obat dan makanan.

1.4.3 Permasalahan Utama

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan, terutama terhadap sarana obat dan sarana pangan, dimana sarana ini merupakan target yang paling banyak diperiksa sehingga menyebabkan kinerja pengawasan di sarana produksi belum maksimal.
2. Sebagian pelaku usaha belum menyadari pentingnya melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian pengelolaan obat dan makanan atau perbaikan telah dilakukan namun belum secara tuntas sehingga seringkali terjadi temuan berulang di sarana yang sama.
3. Pelaku usaha UMKM Pangan/OBA/ Kosmetik belum memahami Cara Produksi yang Baik dan gagap teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.
4. Ketentuan pelaksanaan sampling sesuai pedoman sampling yang terbaru (berbasis risiko) harus adanya evaluasi terlebih dahulu atas pemenuhan penilaian risiko terhadap produk obat yang ada di sarana terhadap ketentuan yang ada di pedoman sampling. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria sesuai perencanaan pada sarana yang dikunjungi sehingga mengharuskan sampling dilakukan pada sarana yang lain yang memenuhi kriteria risiko. Hal ini berdampak pada diperlukannya lebih banyak waktu untuk penyelesaian sampling. Untuk mengatasi hal ini maka perlu mengoptimalkan penggunaan data e-was untuk informasi penyaluran produk obat.
5. Pelaksanaan sampling berbasis risiko menyebabkan meningkatnya pembiayaan untuk pembelian sampel karena harus memenuhi target kategori yang telah ditetapkan sesuai pedoman sampling, dan pemenuhan PUK sesuai decision tree, terutama untuk komoditi OBA, SK dan Kosmetik. Hali ini diatasi dengan menambah anggaran untuk pengadaan sampel serta melakukan revisi DIPA ke DJA.
6. Sarana yang dijadikan target sampling tidak selalu memiliki jenis dan/atau jumlah yang memadai untuk sampel yang ditargetkan untuk disampling. Selain itu, tidak semua sarana yang pengelolaan obatnya baik, menjual obat yang kualitasnya baik. Cara mengatasinya dengan Mengganti sarana target saat di lapangan dan Mengoptimalkan penggunaan data e-was untuk data sarana yang memungkinkan sampling.
7. Terdapat sarana yang NIE nya masih berlaku, namun sarana tidak beroperasional karena terkendala biaya yang kurang (sebagian besar sarana produksi merupakan UMKM). Untuk mengatasi hal ini maka pengawasan lebih bersifat pembinaan, mengganti target dengan sarana lain, jika memungkinkan mengalihkan target ke jenis sarana produksi lainnya.

8. Beberapa target iklan pada jenis media iklan tertentu (media penyiaran lokal) termasuk target iklan obat keras tidak tersedia, sehingga tidak dapat terpenuhi pelaporannya. Untuk mengatasi hal ini maka target dialihkan ke media lainnya. Penetapan kesimpulan penilaian kesesuaian iklan masih terdapat perbedaan dengan kesimpulan pusat, untuk itu perlu Refreshment petugas terhadap ketentuan penilaian iklan (termasuk melalui bimtek).
9. Tingginya pelanggaran terkait pendistribusian obat antara lain maraknya Apotek distributor, penjualan antibiotik tanpa resep dokter, praktek dispensing. Untuk mengatasi hal ini perlu perkuatan pengawasan dari hulu ke hilir berbasis resiko
10. Pelaksanaan program Keamanan Pangan Terpadu untuk Desa dan Sekolah tidak dapat mencapai target karena keterbatasan anggaran akibat blokir(capaian hanya 50% dari jumlah target).
11. Sarana dan prasarana layanan publik ramah rentan belum sepenuhnya sesuai, seperti marka (jalur pemandu khusus disabilitas) yang kondisinya saat ini ada yang terputus dan beberapa sudah lepas, laptop huruf braile, dan lainnya.
12. Kerusakan alat laboratorium sehingga mempengaruhi proses pengujian sampel.
13. Sarana dan prasarana untuk berita acara pemeriksaan belum memadai sehingga mempengaruhi kelancaran pemeriksaan.
14. Luas dan kapasitas laboratorium yang tidak memadai lagi sehingga menghambat pengembangan laboratorium termasuk perencanaan penambahan alat laboratorium.



BAB II
Perencanaan Kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM dan Satuan Kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Padang yang mengacu kepada Renstra Badan POM Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Renstra Badan POM Tahun 2025-2029 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Padang sebagai Satuan Kerja dan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Sumatera Barat. Sasaran Kegiatan dan indictor kinerja kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan POM serta Sasaran Program Unit Pengampu berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis.

Dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025-2029 yaitu:

> ***"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya

Balai Besar POM di Padang sesuai tugas dan fungsinya mendukung semua misi BPOM.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yaitu:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT BPOM sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Padang mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makanan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Balai Besar POM di Padang dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan 2025-2029 menyusun strategi dengan mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM serta penyesuaian yang relevan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar POM di Padang. Berikut strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 Balai Besar POM di Padang:

1. Memperkuat pengawasan terhadap produk dan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif berbasis risiko dan sesuai standar yang dipersyaratkan, penguatan farmakovigilan dan pengawasan program makan bergizi gratis dari standar kemanan pangan untuk mencegah terjadinya KLB serta perluasan cakupan pengawasan seiring dengan peningkatan daya saing industri obat dan makanan.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka efektivitas kinerja penindakan kejahatan untuk mencegah/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara online dan offline.

3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM melalui sistem jemput bola dan inovasi Simpelin Aja dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.
4. Memanfaatkan jaringan Pentahelix dalam rangka penguatan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman melalui berbagai jenis media untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sedian farmasi dan pangan olahan yang aman.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dengan pemangku kepentingan melalui advokasi, forum konsultasi publik, perjanjian kerjasama, dan pengawasan bersama dalam rangka efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. Memanfaatkan teknologi, jejaring dan regionalisasi laboratorium, melakukan investasi peralatan laboratorium yang mutakhir, serta meningkatkan kompetensi SDM untuk peningkatan kualitas pengujian laboratorium dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Peningkatan.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar serta digitalisasi pelaksanaan layanan publik untuk mendukung peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator , dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

RKT Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang NOMOR HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari Sasaran Startegis Badan POM dan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan unit pengampu pusat berdasarkan penyusunan kerangka logis kinerja (*logframe*). RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKT 2025 disusun sebelum Renstra 2025-2029 ditetapkan sehingga ada perbedaan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target RKT 2025 dengan Renstra 2025-2029.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana(anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dansanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Terdapat perbedaan target indikator yang terdapat pada RKT dan PK, hal ini dikarenakan adanya perubahan target indikator sesuai Renstra 2025-2029 dan berdasarkan kesepakatan antara unit pengampu, Biro perencanaan dan Keuangan serta Balai Besar POM di Padang.

PK Balai Besar POM di Padang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah dilakukan 3 kali revisi karena:

1. Pergantian Pelaksana Tugas (PLT) BBPOM di Padang pada bulan Juli.pada bulan Juli.
2. Terdapat penambahan 3 indikator kinerja, perubaan sasaran kegaiatan, dan perubahan target kinerja beberapa indiakotor kinerja sesuai dengan pemutakhiran Renstra 2025-2029 pada bulan Agustus.
3. Pergantian pimpinan unit kerja dari PLT ke Kepala definitive yang ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25 Persen
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89 Persen
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5 Persen
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75 Persen
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60 Persen
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90 Persen
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100 Persen
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11 Persen
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		3	Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,85 Persen
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Indeks
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90 Nilai
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82 Nilai
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95 Indeks

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per bulan dengan anggaran per indikator kinerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Balai Besar POM di Padang telah 5 kali mengajukan usulan revisi RAPK dan telah mendapatkan tanggapan dan persetujuan usulan tersebut dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan RAPK revisi terakhir telah ditetapkan oleh Kepala Balai Besar POM di Padang pada tanggal 01 Oktober 2025.

Rincian revisi RAPK Balai Besar POM di Padang sebagai berikut:

1. Revisi 1

Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM di Padang nomor B-PR.02.01.3A.04.25.179 tanggal 17 April 2025 perihal usulan revisi target indikator kinerja kegiatan bulanan dan surat tanggapan dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 21 April 2025 nomor B-PR.02.01.21.04.25.102 tentang Tanggapan terhadap Usulan Revisi Target RAPK Tahun 2025 BBPOM di Padang, maka Balai

Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 21 April 2025 dengan perubahan target triwulan 1 2025 terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase cakupan sarana produksi fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Penyebab dilakukan revisi untuk Indikator Persentase cakupan sarana produksi fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena frekuensi target yang disusun pada awal tahun bersifat flat atau sama setiap bulan, sementara sesuai defenisi operasional frekuensi bersifat komulatif yaitu berdasarkan jumlah sarana yang telah diperiksa dan diselesaikan sampai dengan periode pelaporan. Pada triwulan I terdapat 2 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sementara pada bulan April terdapat 3 sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti dari total 5 sarana sehingga semua sarana telah dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025.

Untuk IKK Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, revisi target disebabkan karena adanya perubahan jadwal kegiatan masing-masing program oleh unit pengampu sehingga progres kegiatan berubah.

2. Revisi 2

Revisi kedua dilakukan terhadap Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sesuai surat usulan revisi Kepala Balai Besa5 POM di Padang No B-PR.02.01.3A.05.25.223 tanggal 02 Mei 2025 yang mendapat tanggapan persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai Surat No B-PR.07.21.05.25.139 tanggal 14 Mei 2025. Maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 15 Mei 2025.

Revisi ini dilakukan karena terdapatnya perubahan cara perhitungan penetapan target, dimana pada awalnya target disusun berdasarkan perhitungan terhadap 1 perkara, yaitu jumlah target perkara setelah adanya efisiensi anggaran. Setelah relaksasi anggaran maka terjadi perubahan target perkara menjadi sama dengan target DIPA awal yaitu 4 perkara dan 1 perkara carry over, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali target bulanan sampai November 2025.

3. Revisi 3

Revisi ketiga terhadap Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Jumlah desa pangan aman, sesuai surat usulan Revisi Kepala BBPOM di Padang No B-

PR.02.01.3A.05.25.319 tanggal 26 Mei 2025 yang mendapat tanggapan persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai Surat No PR.07.21.06.25.229 tanggal 30 Juni 2025. Maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 01 Juli 2025.

Justifikasi usulan perubahan target bulanan ini disebabkan perhitungan target selama ini adalah berdasarkan jumlah sekolah dan desa yang dapat dilaksanakan intervensi oleh Balai Besar POM di Padang sesuai dengan anggaran setelah efisiensi, yaitu sebanyak 7 sekolah dan 3 desa. Oleh karena sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target awal rancangan Renstra 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target jumlah sekolah dan desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebanyak 14 sekolah dan 6 desa. Pada Revisi ini juga sekalian revisi RAPK karena ada pergantian pimpinan (PLT Kepala Balai Besar POM di Padang).

4. Revisi 4

Revisi ke 4 dilaksanakan sesuai Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 yang mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029. Maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 29 Agustus 2025.

5. Revisi 5

Revisi ke 5 dilaksanakan pergantian pimpinan unit kerja dari PLT ke Kepala definitive. Maka Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi RAPK pada tanggal 01 Oktober 2025.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86, 75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	89	89	89	89	89

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	81,09	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	76,7	76,7	76,7	76,8	76,8	76,8	76,9	76,9	76,9	77
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,11
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerjaUPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	5	25	47,5	47,5	50	50	60	75	90	14
		3	Jumlah desa pangan aman	-	-	5	25	37,5	45	45	50	60	75	90	6
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	5	25	50	60	100	100	100	100	100	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4,16	10,33	14,5	23,32	30,84	43,33	52,5	60	68,5	71	79,17	15,85
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,5	42,5	42,5	42,5	43	43	45	65	70	80	83	90
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
		2	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

2.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

a. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
b. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Capaian indikator kinerja

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kategori Capaian IKK tahun 2025

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Sedangkan untuk capaian realisasi indikator kinerja jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra (2029) maka dinyatakan dalam kategori sebagai berikut

Tabel 2.5. Kategori Capaian Perbandinga dengan Target Akhir Renstra (2029)

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

2.3.2. NILAI KINERJA ORGANISASI

1. Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

2. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel. 2.6. Prediket Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	



BAB III
Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 No. HK.02.3A.09.24.266 tanggal 20 September 2024 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang revisi tanggal 01 Oktober 2025. Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025 telah direalisasikan pada Tahun 2025 dengan baik yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan.

Kinerja Balai Besar POM di Padang mengacu kepada Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Pembahasan dan analisis capaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Padang 2025-2029.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 Balai Besar POM di Padang adalah 100,15% dengan kategori **Istimewa.** Untuk meningkatkan pencapaian nilai NKO ini perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang optimal dan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan kinerja dalam rangka evaluasi kinerja. Kemudian upaya perbaikan terus dilaksanakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dan peningkatan kualitas data kinerja yang terukur, andal, serta dilengkapi data dukung yang akurat.

Pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DINORMALISASI	KATEGORI
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	108.14	106.89	Sangat baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99.21	99.21	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DINORMALISASI	KATEGORI
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	75,43	75,43	Cukup
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115.39	110.00	Tidak dapat disimpulkan
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	83.33	83.33	Cukup
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	105.56	105.56	Sangat Baik
7.	Layanan Publik UPT yang prima	102.98	102.98	Sangat Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99.53	99.53	Baik

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM yang Setara Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan 2025			
		Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.88	108.14	106.13	104.36
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.45	99.21	149.25	100.78
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.12	75,43	100.04	105.05
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	142.31	115.39	103.66	100.00

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan 2025			
		Jakarta	Padang	Yogyakarta	Medan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	109.34	83.33	108.23	93.89
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	104.17	105.56	108.02	111.11
7	Layanan Publik UPT yang prima	105.11	102.98	106.17	105.96
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98.23	99.53	98.26	100.34

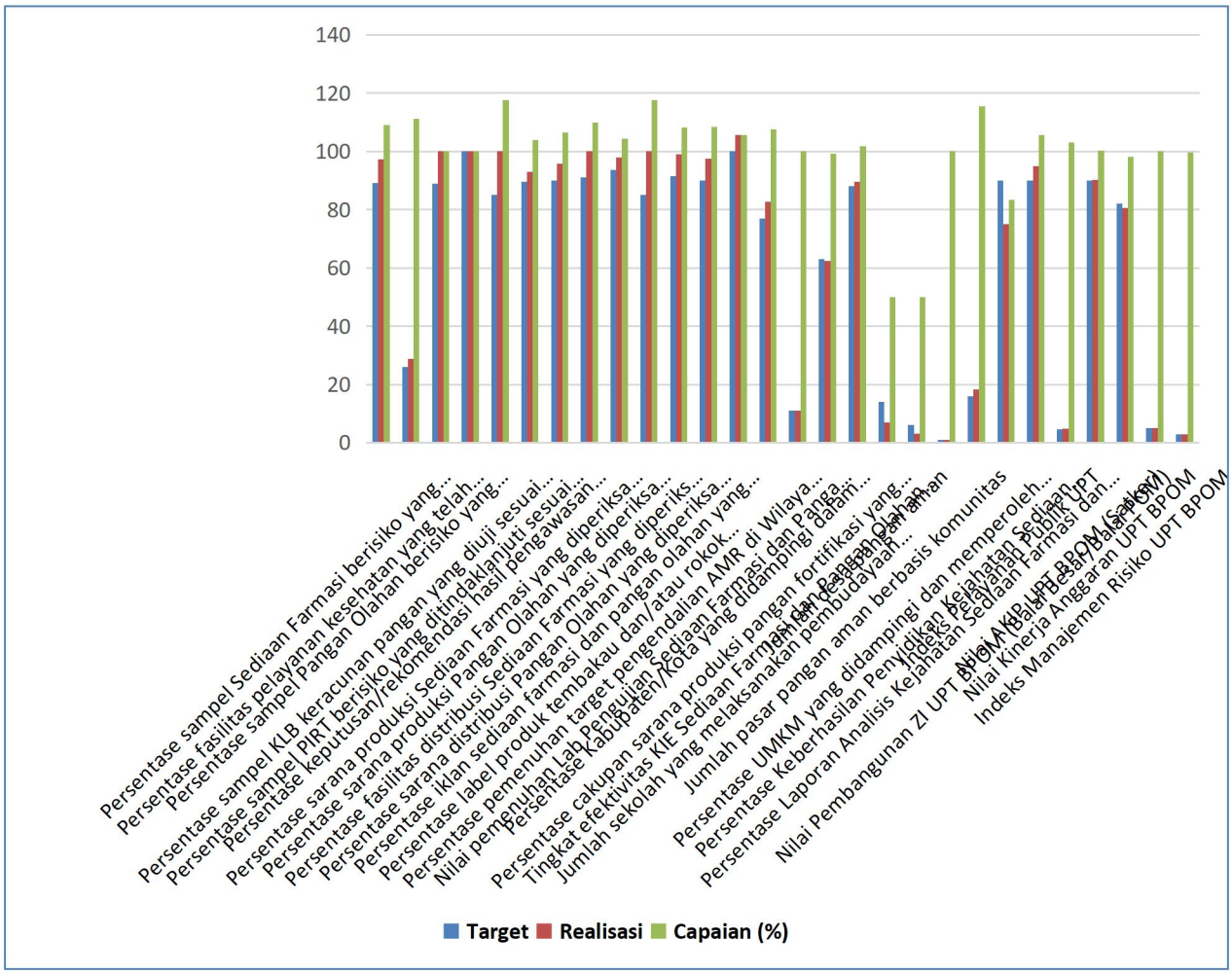
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.25	97.37	109.10	109.10	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26.00	28.89	111.12	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.00	100.00	112.36	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persen	89.50	92.95	103.85	103.85	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	90.00	95.83	106.48	106.48	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	91.00	100.00	109.89	109.89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	93.75	97.89	104.42	104.42	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	91.60	99.04	108.12	108.12	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	90.00	97.50	108.33	108.33	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	%	100.00	105.57	105.57	105.57	Sangat Baik
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persen	77.00	82.80	107.53	107.53	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persen	11.11	11.11	100.00	100.00	Baik
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan SaranaProduksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan	Persen	63.00	62.50	99.21	99.21	Baik
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	89.51	101.72	101.72	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah	14.00	7.00	50.00	50.00	Kurang
		19	Jumlah desa pangan aman	Jumlah	6.00	3.00	50.00	50.00	Kurang
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	1.00	1.00	100.00	100.00	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persen	15.85	18.29	115.39	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persen	90.00	75.00	83.33	83.33	Cukup
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persen	90.00	95.00	105.56	105.56	Sangat Baik
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Persen	4.70	4.84	102.98	102.98	Sangat Baik
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai	90.00	90.21	100.23	100.23	Sangat Baik
		26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai	82.00	80.54	98.22	98.22	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai	5.00	5.00	100.00	100.00	Baik
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Persen	2.95	2.94	99.66	99.66	Baik



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Dari 28 (dua puluh lima) indikator kinerja kegiatan (IKK) terdapat 5 indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan, 13 indikator dengan kategori sangat baik, 7 indikator dengan kategori baik, 1 indikator dengan kategori cukup, dan 2 indikator dengan kategori kurang. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berikut.

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 15 indikator kinerja kegiatan, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 108,14% dengan capaian dinormalisasi sebesar 106,89% dengan kategori sangat baik.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.25	97.37	109.10	109.10	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26.00	28.89	111.12	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.00	100.00	112.36	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persen	89.50	92.95	103.85	103.85	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	90.00	95.83	106.48	106.48	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	91.00	100.00	109.89	109.89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	93.75	97.89	104.42	104.42	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	91.60	99.04	108.12	108.12	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	90.00	97.50	108.33	108.33	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	%	100.00	105.57	105.57	105.57	Sangat Baik
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persen	77.00	82.80	107.53	107.53	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persen	11.11	11.11	100.00	100.00	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pada IKK ini yang dimaksud Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait .

Cara Perhitungan Dan Formula

Perhitungan realisasi kinerja IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata capaian kinerja masing-masing komoditi, dengan formula sebagai berikut :

= (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Masing-masing komoditi memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda, secara garis besar aspek yang dinilai adalah persentase sampel berbasis risiko yang diselesaikan sesuai ketentuan dibandingkan terhadap target yang telah direncanakan per bulan. Perhitungan untuk bulan berikutnya dihitung secara kumulatif.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.4 Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.25	97.37	109.10	109.10	Sangat Baik

Pada hasil review target Renstra yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025, terdapat penyesuaian target kinerja untuk indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, target awal 86,75% direvisi menjadi 89,25%. Realisasi indikator tersebut pada Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar 97,37%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 89,25%, maka tingkat capaian kinerja mencapai 109,10%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
1036	89,25	93,89	98,23	98,06	99,31	97,37

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

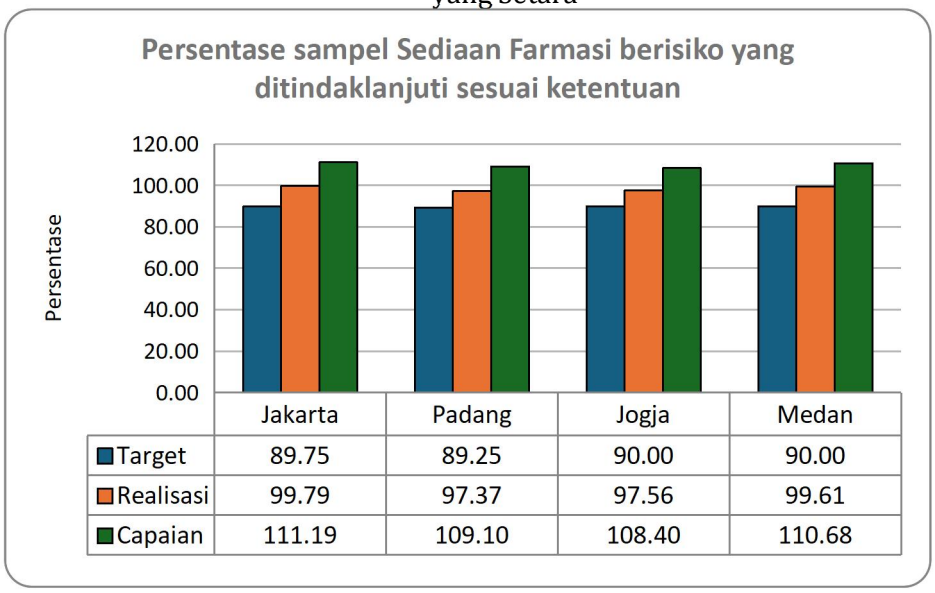
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	97,37	103,31	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 94,25%, maka realisasi akhir Tahun 2025 97,37% telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 103,31% termasuk kategori Tercapai/Melampaui. Namun demikian, tetap perlu dilakukan upaya peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, serta menetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi setiap kendala atau permasalahan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi BBPOM Jakarta 99,79% dan terendah BBPOM Padang 97,37 sedangkan untuk capaian tertinggi BBPOM Jakarta 111,19% dan terendah BBPOM Jogja 108,40. Pada klaster UPT ini semua target tercapai dan capaian di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian yang berbasis risiko dan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Optimalisasi Sumber Daya Laboratorium Meskipun terjadi peningkatan beban kerja, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Padang mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pengaturan jadwal pengujian, pembagian tugas antar analis. Hal ini mendukung tetap tercapainya target indikator dengan kategori Sangat Baik.

c. Kinerja Personel laboratorium dalam melaksanakan pengujian serta koordinasi yang baik antara fungsi terkait juga mempercepat proses tindak lanjut terhadap hasil pengujian sediaan farmasi berisiko.

d. Perbaikan Proses Tindak Lanjut Hasil Pengujian Adanya peningkatan sinergi antara bidang pengujian dan pengawasan pasca-edar turut mempercepat proses tindak lanjut terhadap hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan persentase capaian dibandingkan Triwulan sebelumnya.

e. Pada awal triwulan IV dilakukan penyesuaian target kategori sampling sesuai realisasi dengan justifikasi berdasarkan kondisi real di lapangan sehingga capaian sampling sesuai target.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Ketentuan pelaksanaan sampling bebasis resiko menyebabkan kesulitan memperoleh sampel sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling sesuai perencanaan , terutama untuk komoditi obat dan obat tradisional. 2. Keterbatsaan anggaran akibat kebijakan efesiensi menyebabkan pemilihan jenis sampel harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia 2. Adanya kebijakan efesiensi anggaran di awal TW 1 dan post efesiensi di awal TW2, menyebabkan penumpukan sampel di pengujian sehingga berpengaruh terhadap capaian pengujian sesuai parameter uji .	1. Melakukan revisi terhadap perencanaan awal dan menyesuaikan sarana target saat dilapangan. 2. Melakukan revisi anggaran pengadaan sampel di RO yang sama 3. Melakukan koordinasi antar lab regional Menggunakan sharing reagen dengan sesama laboratorium pengujian BBPOM di Padang dan regional maupun diluar regional dan monitoring performance alat,	1. Mempersiapkan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran IDEAS tentang pedoman sampling berbasis resiko 2. Mempersiapkan data dukung dalam bentuk sharing folder yang bisa diakses petugas saat melakukan sampling sebagai pedoman sampling berbasis resikoantara lain data hasil pengujian tahun 2025, hasil pengawasan sarana TMK, data produk recall dan public warning. 3. Merencanakan verifikasi dan kalibrasi peralatan sesuai pedoman 4.. mempersiapkan perencanaan dan pengadaan reagensia sesuai target pengujian	Januari-April 2026	Y	O-05	Pengujian tidak dapat dilakukan sesuai standar (PUK tidak dapat dikerjakan)

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian pencapaian target pelaksanaan sampling dan pengujian yang didukung oleh ketersediaan anggaran untuk pembelian sampel dan pelaksanaan pengujian di laboratorium.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian

a. Ketua tim sampling dan pengujian saling berkoordinasi untuk pemilihan target sampling sesuai dengan kemampuan pengujian dan ketersediaan reagensia dan alat.
b. Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi semua anggota tim sampling dan pengujian melalui pembelajaran IDEAS dan sharing knowledge antar personel.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian setiap bulan.
d. Meningkatkan kemampuan pengujian melalui pengembangan metoda analisis, verifikasi metoda dan pelatihan teknis personel pengujian.
e. Memaksimalkan kemampuan peralatan uji melalui program kalibrasi internal dan eksternal, pemeliharaan alat dan pembelian suku cadang.
f. Memanfaatkan sharing reagensia antar laboratorium anggota regional untuk pemenuhan kekurangan reagensia.

B. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. KIE ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tenaga kesehatan dalam hal pelaporan KTD/ESO, dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

.

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id

B = umlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengikuti KIE farmakovigilans di awal tahun

Setelah pelaksanaan KIE farmakovigilans pada tanggal 26 Februari 2025 dilaksanakan pemantauan pelaporan KTD/ESO melalui subsite https://e-meso.pom.go.id/ADR setiap bulan dan dilaporkan ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Pelaporan hingga Bulan Desember 2025 tercatat 13 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.7 Capaian Persentase Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	%	26.00	28.89	111.12	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi capaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan persentase dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dibagi dengan yang mengikuti KIE di awal tahun, (13 fasyankes /45 fasyankes) x 100 % adalah 28.89%, maka realisasi kinerja dibandingkan dengan target tahun 2025 (26%) mencapai 111,12% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator baru yang diturunkan ke UPT mulai tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

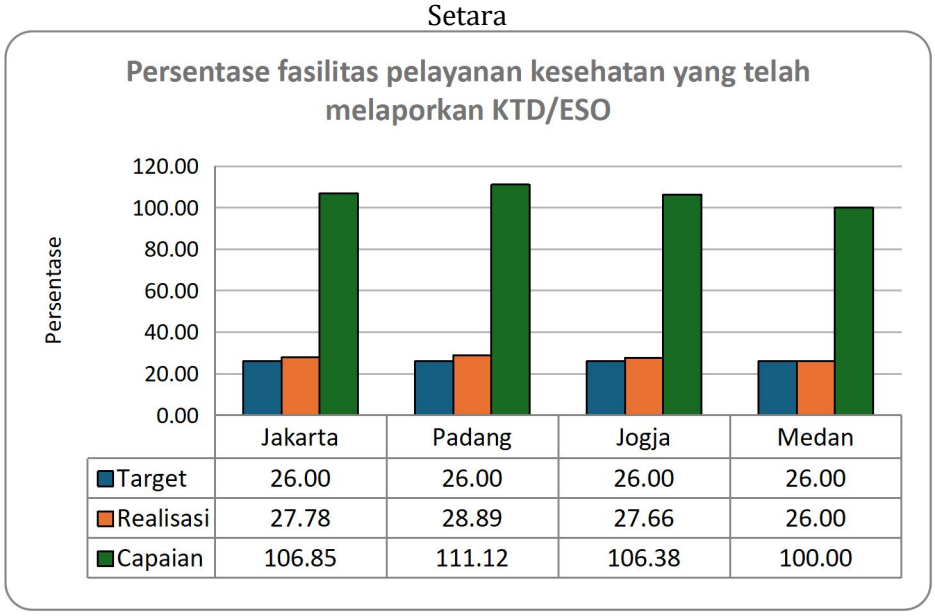
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	28,89	96,30	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO adalah 28,89%, maka realisasi tahun 2025 mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 96,30% termasuk kategori akan tercapai. Namun demikian, perlu peningkatan usaha dan sumber daya di tahun berikutnya, mengingat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target KIE dan pelaporan sesuai pedoman adalah Fasyankes yang belum pernah diberikan KIE dan atau yang belum pernah melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	26.00	26.00	26.00	26.00
Realisasi	27.78	28.89	27.66	26.00
Capaian	106.85	111.12	106.38	100.00

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian persentase pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO BBPOM Padang tahun 2025 berada di atas capaian UPT lain yang setara dengan rentang capaian 100,00 % - 111,12%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Perolehan capaian 28,89 % laporan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) diperoleh setelah dilaksanakannya pertemuan Forum Komunikasi Farmakovigilans secara tatap muka menggunakan tambahan anggaran dari QIC.004 pada Bulan November 2025 dengan tenaga kesehatan dari fasyankes yang telah diberikan KIE Farmakovigilans pada Bulan Februari 2025. Pada kegiatan Forum komunikasi ini, tenaga kesehatan diajak berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pelaporan farmakovigilans, serta didampingi dalam melaporkan KTD/ESO melalui subsite e-meso.pom.go.id.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja

Tabel 3.9 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pertemuan luring dengan tenaga kesehatan dari Fasyankes yang diberikan KIE farmakovigilans, mengingat tahun 2025, laporran KTD/ESO diperoleh setelah dilaksanakannya pertemuan secara luring	Mengalokasikan anggaran untuk pertemuan secara luring dengan dinas dan stake holder serta mengadakan desk dan forum komunikasi farmakovigilans dengan tenaga kesehatan dari fasyankes target paska KIE	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan lintas sektor terkait pengawasan dan pelaksanaan farmakovigilans di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Desember 2026	Y	O-15	Tenaga kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pemilihan fasyankes dengan riwayat pengawasan yang baik serta ketersediaan tenaga kesehatan KFT Medik yang uraian tugasnya mencakup monitoring efek samping obat.
b. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan provinsi sebagai pengawas pelaksanaan farmakovigilans di sarana pelayanan kesehatan.
c. Kegiatan forum komunikasi berupa sharing pengalaman dari fasyankes dengan frekuensi laporan tertinggi serta pemberian penghargaan dari BBPOM di Padang kepada fasyankes dengan frekuensi laporan tertinggi.

C. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko

.

sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan Dan Formula =

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

A. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

.

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

B. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

C. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

D. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.10 Capaian Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	89.00	100.00	112.36	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 100,00%, bila dibandingkan dengan target 89,00%, maka capaian adalah 112,36 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2025, inidikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pusat dengan realisasi sebesar 100.00% dan capaian 112.36%. Tercapainya realisasi dan capaian yang terpenuhi ini dikarenakan adanya tindak lanjut hasil pengujian sampel yang diuji dan dilaporkan sesuai time line dan ditindaklanjuti sehingga perhitungan untuk formula F (tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya) mencapai 100 % yang berpengaruh pada total perhitungan realisasi dan capaian pada triwulan. Hasil pengujian pada Tahun 2025 dapat langsung ditindaklanjuti pada Tahun 2025 juga.

Tabel 3.11 Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	TL sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
486,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

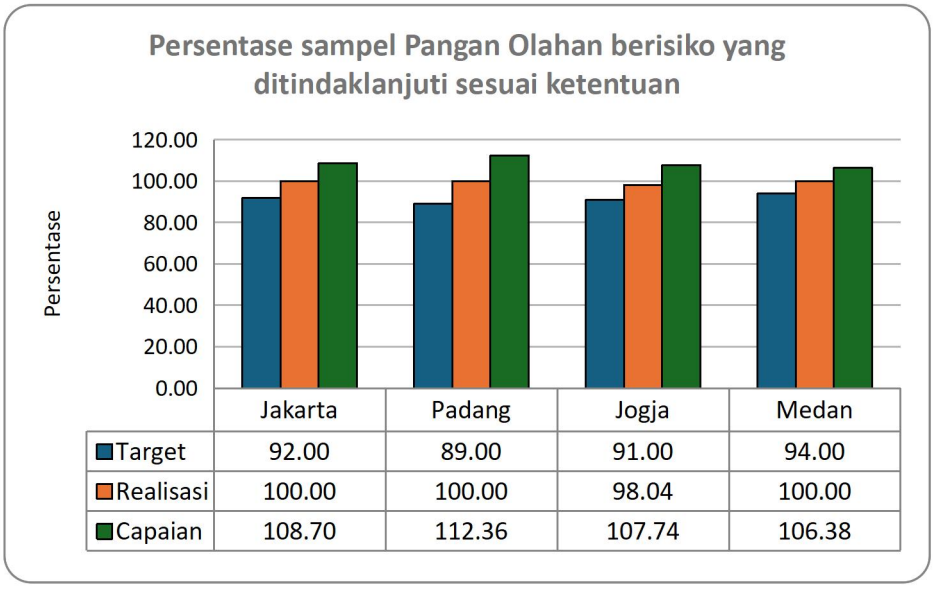
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	100,00	107,53	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 93%, maka realisasi pada Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 107,53% termasuk kategori .

tercapai/melampaui. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis setiap tahunnya dalam perencanaan target yang matang untuk mencapai target pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sehingga dengan sendirinya target akhir Renstra (Tahun 2029) tercapai dimana tidak terjadi lagi gap/bias yang besar antara target dan capaian, dan perlu dilakukan reviu tarhadap target 2026-2029.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	92.00	89.00	91.00	94.00
Realisasi	100.00	100.00	98.04	100.00
Capaian	108.70	112.36	107.74	106.38

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Adanya koordinasi perencanaan sampling dan pengujian yang disusun bersama oleh tim sampling dan tim pengujian dengan mempertimbangkan kapasitas laboratorium dan kapasitas pelaksanaan sampling.

b. Komunikasi yang efektif antara tim sampling dan tim pengujian dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian

c. Koordinasi dengan tim pengadaan agar melakukan percepatan pemenuhan reagensia, suku cadang, perawatan dan kalibrasi alat terutama untuk persediaan yang indent.

d. Koordinasi dengan Balai/Balai Besar POM dalam dan luar region untuk masalah teknis, sarana dan prasarana seperti reagen dan suku cadang sehingga pelaksanaan pengujian dapat berjalan dengan lancar

e. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian meliputi kesesuaian target sampling, ketepatan waktu pengambilan sampling,

kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut .

f. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan secara berkelanjutan.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.13 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Adanya kebijakan efesiensi menyebabkan pemilihan jenis sampel harus disesuaikan dengan reagen dan anggaran yang tersedia, sehingga terjadi perubahan perencanaan sampling dan pengujian yang telah direncanakan pada awal tahun 2. Kondisi peralatan yang rusak, reagensia dan baku banding yang belum tersedia karena keterlambatan pengadaan menyebabkan terjadinya pergeseran jadwal sampling dan pengujian dari yang telah direncanakan pada awal tahun 3. Adanya kebijakan efesiensi anggaran di awal TW 1 dan post efesiensi di awal TW2, menyebabkan penumpukan sampel di pengujian sehingga berpengaruh terhadap capaian pengujian sesuai parameter uji	1. Melakukan revisi terhadap perencanaan awal dan menyesuaikan sarana target saat dilapangan. 2. Melakukan revisi anggaran pengadaan sampel di RO yang sama 3. Melakukan koordinasi antar lab regional Menggunakan sharing reagen dan peminjaman baku banding dengan sesama laboratorium pengujian BBPOM di Padang dan regional maupun diluar regional dan monitoring performance alat, 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan tim SARPRAS dalam hal monitoring percepatan pengadaan dan perbaikan/perawatan kerusakan alat	1. Mempersiapkan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran IDEAS tentang pedoman sampling berbasis resiko 2. Mempersiapkan data dukung dalam bentuk sharing folder yang bisa diakses petugas saat melakukan sampling sebagai pedoman sampling berbasis resikoantara lain data hasil pengujian tahun 2025, hasil pengawasan sarana TMK, data produk recall dan public warning. 3. Merencanakan verifikasi dan kalibrasi peralatan sesuai pedoman 4. Mempercepat pengadaan alat, suku cadang, reagensia, baku banding sesuai target pengujian	Desember 2026	Y	A-01	Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim masing-masing fungsi untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis.

b. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian secara mandiri seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS.

c. Memperbanyak pelatihan teknis dan praktikum terutama untuk inovasi dan ilmu metode analisa yang upto date dan mengikuti perkembangan zaman.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap bulan.

D. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan,

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Dalam melakukan pemeriksaan sampel KLB Keracunan Pangan yang berasal dari Dinas Kesehatan sebelum diuji terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelengkapan surat pengantarnya. Untuk dugaan pangan KLB Keracunan Pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan yang disampling oleh UPT atau yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dengan parameter uji sampel yang sesuai dengan hasil investigasi dan mengacu pada pedoman sampling pangan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	Baik

Realisasi Persentase Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar pada tahun 2025 adalah 100%, bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian adalah 100% dengan kategori baik. Pada tahun 2025 Sampel KLB yang diterima dan diuji di Balai Besar POM di Padang sebanyak 39 sampel. Semua sampel diuji di laboratorium dan telah selesai ditindaklanjuti dengan capaian 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

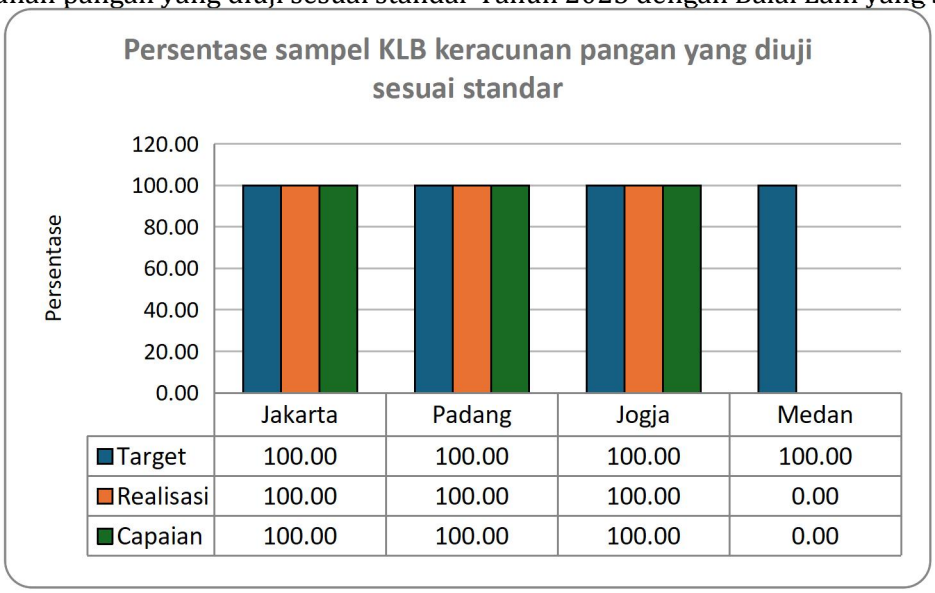
Tabel 3.15 Perbandingan Persentase sampel Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 100% termasuk kategori tercapai/melampaui. Realisasi ini harus dapat dicapai terus dengan melaksanakan pengelolaan kasus KLB sesuai standar yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	100.00	100.00	100.00	0.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	0.00

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tahun 2025 untuk BBPOM Jakarta, Padang, dan Jogja adalah 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan untuk BBPOM di Medan tidak ada menerimsa sampel KLB.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kotamadya yang ada di wilayah Sumatera barat dalam menindaklanjuti kasus KLB.
b. Meningkatkan koordinasi internal dalam menindaklanjuti sampel KLB.
c. Meningkatkan kompetensi petugas tentang penanganan KLB.
d. Melakukan monitoring pelaporan sampel KLB sesuai timeline.
e. Meningkatkan koordinasi eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten/kota tentang tindak lanjut KLB.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.16 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	sampel KLB tidak representatif untuk diuji karena terlambatnya sampling dilakukan, pemahaman stke holder tentang tindak lanjut KLB yang belum maksimal	1. meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut sampel KLB. 2. melakukkan koordinasi internal terkaiat keteersedia	1. meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut sampel KLB, 2. melakukkan koordinasi internal terkait ketersedian penerimaan, investigasi dan pengujian sampel KLB	Desember 2026	Y	A-01	Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   a. Keberhasilan penanganan KLB sangat ditentukan oleh terjalinnya koordinasi eksternal dan internal yang baik dalam menindaklanjutinya sampel KLB.
   b. Informasi gejala yang dialami oleh korban KLB secara update sangat menentukan dalam menetapkan arah parameter uji KLB.
   c. Ketersediaan sampel KLB yang representatif ikut berkontribusi dalam suksesnya mencari agen penyebab dari KLB.
   d. Pentingnya pemahaman Pemerintah daerah dalam menyingkapi kasus KLB.

E. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor

.

seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

.

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 100%, bila dibandingkan dengan target 85,00%, maka capaian adalah 117,65% tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.18 Hasil Perhitungan Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

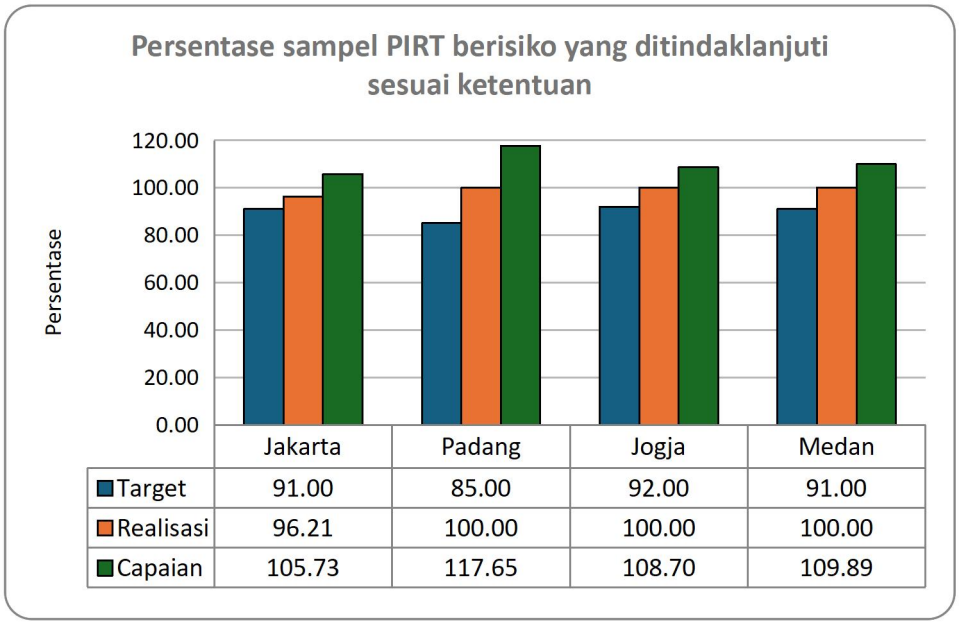
Tabel 3.19 Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 105,26% termasuk kategori tercapai/terlampaui, untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target 2026-2029 agar dalam pencapaian target sesuai trend yang diperoleh dari tahun sebelumnya hal ini dalam rangka antisipasi capaian target renstra dalam rentang yang sesuai standar (100 sd 110%).

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	91.00	85.00	92.00	91.00
Realisasi	96.21	100.00	100.00	100.00
Capaian	105.73	117.65	108.70	109.89

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi 100% pada BBPOM Padang, Jogja, dan Medan sedangkan terendah 96,21% di BBPOM Jakarta. Namun taraget kinerja semua UPT klaster ini tercapai dan capaian kinerja di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Adanya pemberitahuan dari Ditwas bahwa seluruh target IKU 5 Persentase Sampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan harus disampling, diuji dan dilaporkan dengan batas waktu selambat-lambatnya pada TW II 2025.

b. Kesinambungan dalam pengawasan produk PIRT terus dilaksanakan walaupun realisasinya sudah mencapai target pada TW II 2025. Produk PIRT yang diawasi dapat dikategorikan kedalam kategori pangan tertentu atau dalam rangka *Emerging Issue*. Pengawasan berkesinambungan terus dilakukan jika terdapat perkembangan isu keamanan pangan, dapat berupa potensi/kasus pelanggaran/masalah pangan, pengaduan masyarakat, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), *emerging issues*, sampel pendampingan UMK atau pendampingan pangan risiko Menengah Rendah (MR), dan/atau tujuan lain yang dianggap perlu berdasarkan hasil kajian risiko.

c. Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran DAK Badan POM sehingga mempunyai daya ungkit terhadap pemahaman pelaku usaha dalam memproduksi pangan PIRT sesuai ketentuan.

d. Peningkatan koordinasi pengawasan makanan bersama lintas sektor terkait dalam program dana DAK membuat pemerintah daerah mempunyai anggaran dalam pengawasan makanan di wilayah kerja masing-masing.

e. Peningkatan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha dapat meningkatkan pengetahuannya dalam produksi pangan olahan yang baik

f. Koordinasi dengan tim pengadaan agar melakukan percepatan pemenuhan reagensia terutama untuk persediaan yang indent.

g. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap capaian sampling dan pengujian

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.20 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Adanya kebijakan efesiensi menyebabkan pemilihan jenis sampel harus disesuaikan dengan reagen dan anggaran yang tersedia, sehingga terjadi perubahan perencanaan sampling dan pengujian yang telah direncanakan pada awal tahun 2. Kondisi peralatan yang rusak, reagensia dan baku banding yang belum tersedia karena keterlambatan pengadaan menyebabkan terjadinya pergeseran jadwal sampling dan pengujian dari yang telah direncanakan pada awal tahun 3. Adanya kebijakan efesiensi anggaran di awal TW 1 dan post efesiensi di awal TW2, menyebabkan penumpukan sampel di pengujian sehingga berpengaruh terhadap capaian pengujian sesuai parameter uji	1. Melakukan revisi terhadap perencanaan awal dan menyesuaikan sarana target saat dilapangan. 2. Melakukan revisi anggaran pengadaan sampel di RO yang sama 3. Melakukan koordinasi antar lab regional Menggunakan sharing reagen dan peminjaman baku banding dengan sesama laboratorium pengujian BBPOM di Padang dan regional maupun diluar regional dan monitoring performance alat, 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan tim SARPRAS dalam hal monitoring percepatan pengadaan dan perbaikan/perawatan kerusakan alat	1. Mempersiapkan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran IDEAS tentang pedoman sampling berbasis resiko 2. Mempersiapkan data dukung dalam bentuk sharing folder yang bisa diakses petugas saat melakukan sampling sebagai pedoman sampling berbasis resikoantara lain data hasil pengujian tahun 2025, hasil pengawasan sarana TMK, data produk recall dan public warning. 3. Merencanakan verifikasi dan kalibrasi peralatan sesuai pedoman 4. Mempercepat pengadaan alat, suku cadang, reagensia, baku banding sesuai target pengujian	Desember 2026	Y	A-01	Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   a. Perencanaan sampling yang matang dan menyesuaikan dengan kebutuhan awal sarana dan prasarana pengujian di laboratorium, mengusulkan perencanaan kebutuhan alat , reagensia dan suku cadang, dan melakukan koordinasi dengan laboratorium regional
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan
   c. Melakukan sosialisasi oleh ketua tim fungsi Inspeksi dan Pengujian untuk meningkatkan pemahaman terkait pedoman sampling pengujian serta petunjuk teknis.
   d. Mengikuti pelatihan mandiri oleh semua staf fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian secara mandiri seperti pelatihan yang telah disediakan pada aplikasi IDEAS.
   e. Memperbanyak pelatihan teknis beserta praktikum terutama untuk inovasi dan ilmu metode analisa yang uptodate dan mengikuti perkembangan zaman.

F. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER.

Pada IKU ini yang dimaksud Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan

oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Tindak lanjut ini dapat berupa tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha ataupun lintas sektor terkait agar ketidaksesuaian tidak berulang lagi. Untuk ini kepada pelaku usaha diberikan waktu selama 21 hari kerja sebagai batas waktu maksimal dalam mengirimkan data dukung CAPA yang telah dilakukan. Terhadap CAPA ini akan dilakukan evaluasi oleh petugas sehingga temuan ketidaksesuaian dapat dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti atau masih belum sesuai ditindaklanjuti. Jika belum sesuai, maka kepada pelaku usaha diminta lagi memperbaiki sampai semua temuan dinyatakan telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti.

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B)/2

A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** *x* 100%
B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** *x* 100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.21 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja BBPOM di Padang Tahun 2025

Indikator Kinerja	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persen	89.50	92.95	103.85	103.85	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 adalah 92,95% bila dibandingkan dengan target 89,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 103,85% dan mendapatkan kategori sangat baik.

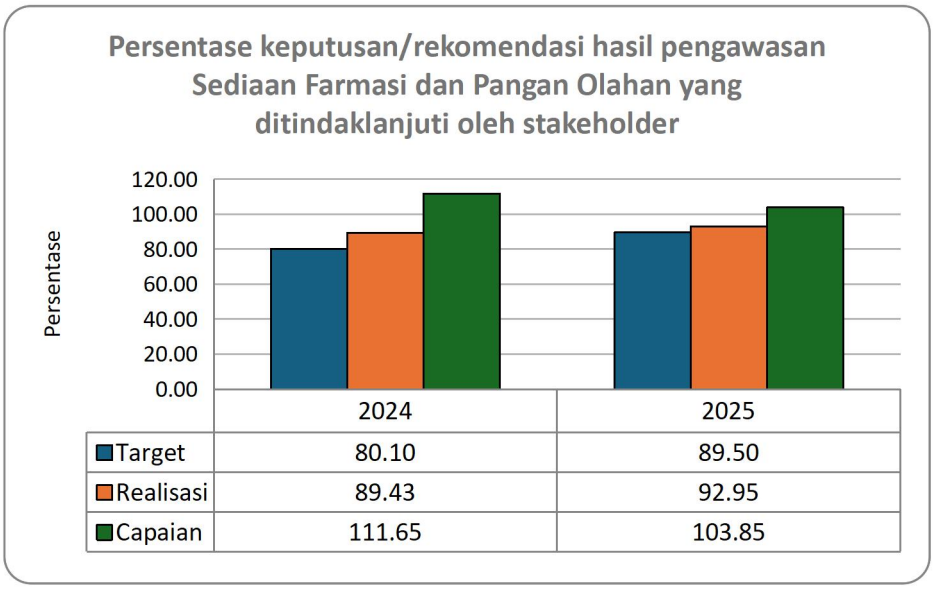
Nilai 92,95% diperoleh sebagai rata-rata dari nilai % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (85,89%) dan % rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (100%). Nilai 85,89% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari pelaku usaha (274 CAPA) dari 319 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada pelaku usaha.

Sedangkan nilai 100% diperoleh dari persentase CAPA yang masuk dari lintas sektor (10 CAPA) dari 10 keputusan/ rekomendasi yang dikirimkan kepada lintas sektor terkait.

Tabel 3.22 Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025

Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
89,50	85,89	100,00	92,95

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya



Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025, namun cara perhitungan capaian indikator ini masih sama dengan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (89,43%), maka terjadi kenaikan realisasi tahun 2025 sebesar 3,52%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

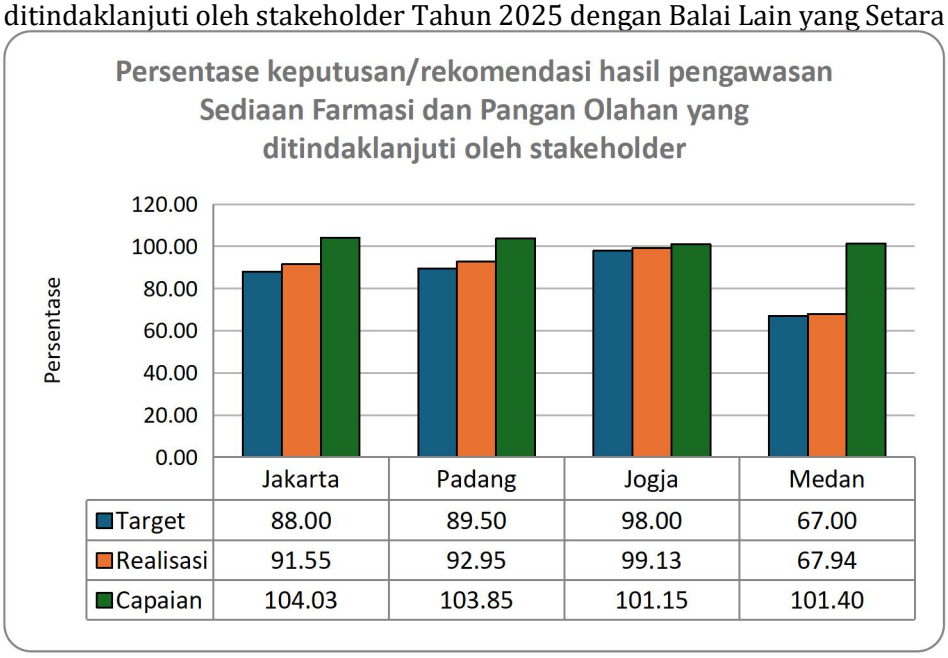
Tabel 3.23 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,25	92,95	101,86	Tercapai/melampaui ▲

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dadalah 91,50%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 101,86% termasuk kategori tercapai/melampaui. Namun karena capaian ini bergantung pada pihak eksternal menyebabkan kinerja untuk tahun 2026 dipertahankan pada target 90.0%.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jogja 99,13% dan terendah 67,94% sedangkan capaian tertinggi BBPOM Jakarta 104,03% dan terendah BBPOM Jogja 101,15%. Namun untuk semua UPT dalam satu klaster ini realisasi mencapai target dan capaian kinerja di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Tercapainya kinerja pada tahun 2025 ini disebabkan semua tindak lanjut hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh semua lintas sektor, dengan mengadakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan mengundang petugas Balai Besar POM di Padang sebagai salah satu narasumbernya. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar sesama instansi pemerintah dan berkolaborasi yang positif untuk mendukung tercapainya cita-cita bersama.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.6 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indiakator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sebagian pelaku usaha belum menyadari pentingnya melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian pengelolaan obat dan makanan atau perbaikan telah dilakukan namun belum secara tuntas sehingga seringkali terjadi temuan berulang di sarana.	Pembinaan dan KIE secara terus menerus dan semaksimal mungkin berkolaborasi dengan lintas sektor, asosiasi pelaku usaha dan organisasi profesi terkait	Monitoring Tindak Lanjut dan CAPA secara rutin dan terkendali	Desember 2026	Y	1. S-06 2. S-07	1. Timeline pemenuhan CAPA yang dikirim pelaku usaha tidak tercapai 2. CAPA yang telah dibuat oleh Sarana belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target kinerja ini, dapat didukung oleh adanya:

a. Sistem yang dapat memastikan keputusan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana sampai ke pelaku usaha atau lintas sektor terkait secara tepat waktu. Sampai saat ini sistem yang ada dengan memanfaatkan secara maksimal jaringan komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha melalui email atau whatsapp dan melalui surat yang dikirimkan hardcopy melalui ekspedisi.

b. Tersedianya softcopy CAPA dalam format word atau excel sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyusun CAPA dan dapat dengan tepat waktu mengirimkan melalui link yang telah dicantumkan dalam surat keputusan.
c. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan baik kepada pelaku usaha sehingga CAPA dapat diterima tepat waktu. Kemampuan petugas ini sangat dipengaruhi adanya pelatihan dan bimbingan teknis terkait kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana.
d. Secara rutin berkolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam memberikan pembinaan atau bimbingan teknis tentang pentingnya cara produksi/ distribusi yang baik kepada pelaku usaha terkait obat dan makanan.

G. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada : regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Jumlah target sarana produksi sediaan farmasi BBPOM di Padang selama tahun 2025 adalah sebanyak 6 sarana, antara lain 1 sarana IOT, 1 sarana UKOT, 1 sarana UMOT dan 3 sarana IKOS. Sarana industri obat tidak lagi menjadi target karena sejak akhir tahun 2024, sarana tersebut tidak lagi melakukan kegiatan operasional produksi obat.

Cara Perhitungan Dan Formula

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

Parameter penilaian sarana produksi OBA dan kosmetik dilakukan berdasarkan parameter pemeriksaan yang meliputi persentase pelaksanaan inspeksi, persentase kelengkapan dan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi, persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.25 Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	90.00	95.83	106.48	106.48	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 95,83% bila dibandingkan dengan target 90%, maka capaian yang diperoleh adalah 106,48% mendapatkan kategori Sangat baik.

Tabel 3. 26 Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Target	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
90,00	100,00	91,67	95,83

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

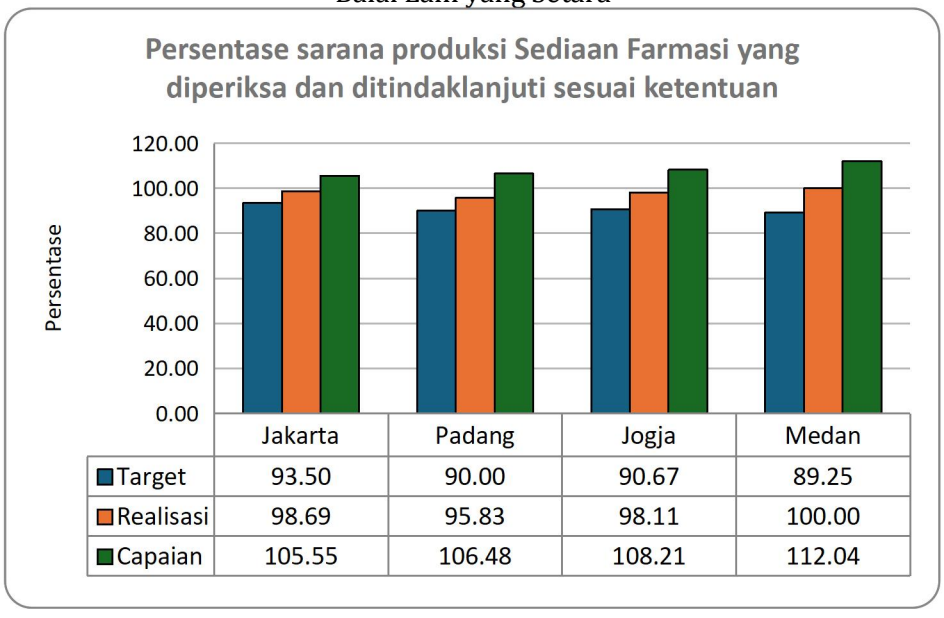
Tabel 3.27 Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	95,83	101,95	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 94%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 101,95% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui . Untuk ini perlu dilakukan reviu terhadap target kinerja tahun 2026-2029.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah

BBPOM Medan 100% dan terendah Padang 95,83%. Namun target semua UPT dalam klaster ini tercapai dengan capaian di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Tercapainya kinerja ini disebabkan terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan, antara lain:

a. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan terealisasi sebanyak 100 persen dari jumlah yang ditargetkan.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat telah terpenuhi sebanyak 5 sarana dari target 6 sarana
c. Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dimana kesimpulan yang diberikan petugas telah sesuai dengan pedoman cara produksi kosmetik yang baik.
d. Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana semua sarana yang diperiksa 100% telah disurati dalam batas waktu yang ditentukan.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.28 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Populasi sarana yang sedikit menyebabkan sering terkendala dalam pencapaian target, terutama jika sarana nya jarang sekali beroperasional/ tidak rutin. Pengulangan pemeriksaan dapat terjadi jika sarana tersebut juga diperlukan untuk praktek kerja lapangan petugas yang sedang mengikuti pelatihan inspektur terkait.	Diperlukan perencanaan yang matang setiap akan melakukan pemeriksaan sarana, maupun dalam perencanaan pelatihan teknis terkait sarana tersebut	Meningkatkan koordinasi dengan Ditwas terkait, lintas sektor dan stakeholder lainnya terkait status sarana	Desember 2026	Y	O-09	Terjadi keberulangan pemeriksaan sarana

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh:

a. Program pelatihan teknis inspektur pemeriksaan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memastikan tersedianya personil yang kompeten dan memiliki komitmen melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditetapkan.

b. Kepatuhan pelaku usaha atas kerjasamanya mengikuti semua proses pemeriksaan sehingga inspeksi dapat berjalan dengan lancar.

c. Tersedianya jaringan internet yang memadai dan kondisi server Srikandi dan SIPT yang tidak bermasalah sehingga proses pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan lancar.

H. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa. Sarana yang diperiksa adalah Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Indikator yang digunakan untuk menilai persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.29 Capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	91.00	100.00	109.89	109.89	Sangat Baik

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 91%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,89% dan mendapatkan kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 sarana produksi pangan olahan yang terdiri dari 35 sarana pangan olahan BPOM MD dan 10 sarana pangan industri rumah tangga. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah 23 sarana memenuhi ketentuan (51,11 %) dan 22 belum memenuhi ketentuan (48,89 %).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.30 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

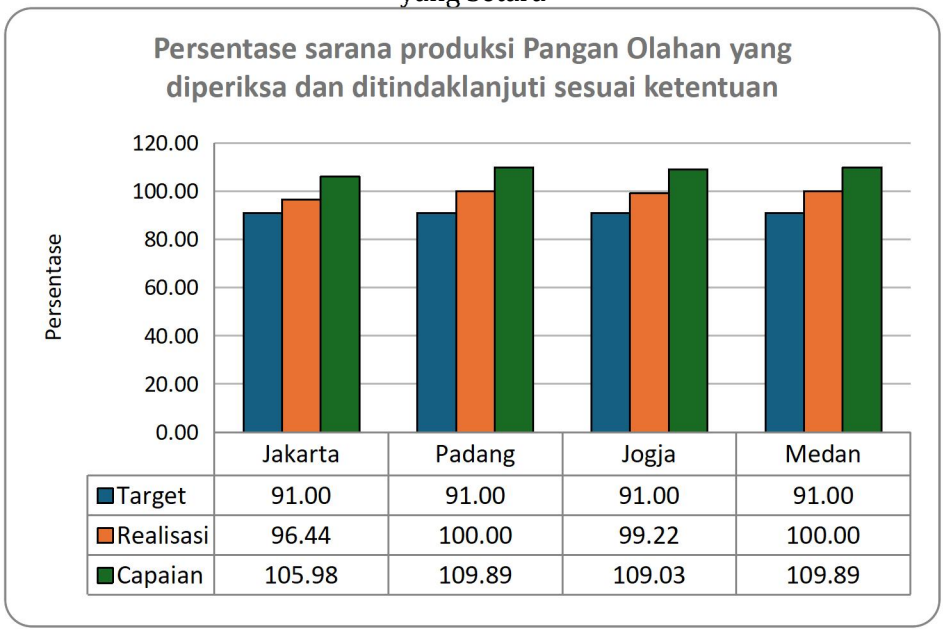
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai/melampaui

Target Renstra tahun 2025 untuk indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95 %, sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 100 %, maka realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun

2025 telah melewati target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir Target akhir Renstra (Tahun 2029) yaitu 95 %, maka capaian telah tercapai/terlampaui.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.8 Perbandingan realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	91.00	91.00	91.00	91.00
Realisasi	96.44	100.00	99.22	100.00
Capaian	105.98	109.89	109.03	109.89

Berdasarkan garfik perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM di Padang dan Medan. Namun untuk capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Jogja juga melebihi 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pencapaian kinerja atau penyebab keberhasilan adalah :

a. Pemeriksaan sarana pangan olahan yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota sesuai dengan semua parameter penilaian dalam pemeriksaan dan terealisasi 100 persen dari jumlah target yang ditetapkan.
b. Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan dimana kesimpulan yang diberikan petugas telah sesuai dengan pedoman cara produksi pangan yang baik.
c. Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana semua sarana yang diperiksa 100% telah disurati dalam batas waktu yang ditentukan.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.31 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaku usaha tidak menerapkan CPPOB dengan baik	Merencakanan pembinaan bagi pelaku usaha pangan olahan	Melaksanakan pembinaan bagi pelaku usaha pangan olahan	Juli 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh:

a. Kepatuhan pelaku usaha atas kerjasamanya mengikuti semua proses pemeriksaan sehingga inspeksi dapat berjalan dengan lancar.

b. Peningkatan kompetensi petugas pada tahun 2025 yaitu Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan mengenaI Pengawasan Fortifikasi Pangan dan Food inspector (FI) Dasar, pelatihan/bimtek ini dapat memastikan tersedianya personil yang kompeten dan memiliki komitmen melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditetapkan.

c. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan pelaku usaha pangan olahan terutama pangan industri rumah tangga.

I. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen

kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Cara perhitungan dan Formula

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

Dimana

A : Persentase Sarana Distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

B : Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

C : Persentase Sarana Distribusi Kosmetika yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	93.75	97.89	104.42	104.42	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 97,89%, jika dibandingkan dengan target 93,75%, maka capaian adalah 104,42 % dengan kategori sangat baik.

Tabel 3.33 Hasil Perhit ungan Realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
93.75	94.59	98,03	100	98,95	97,89

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

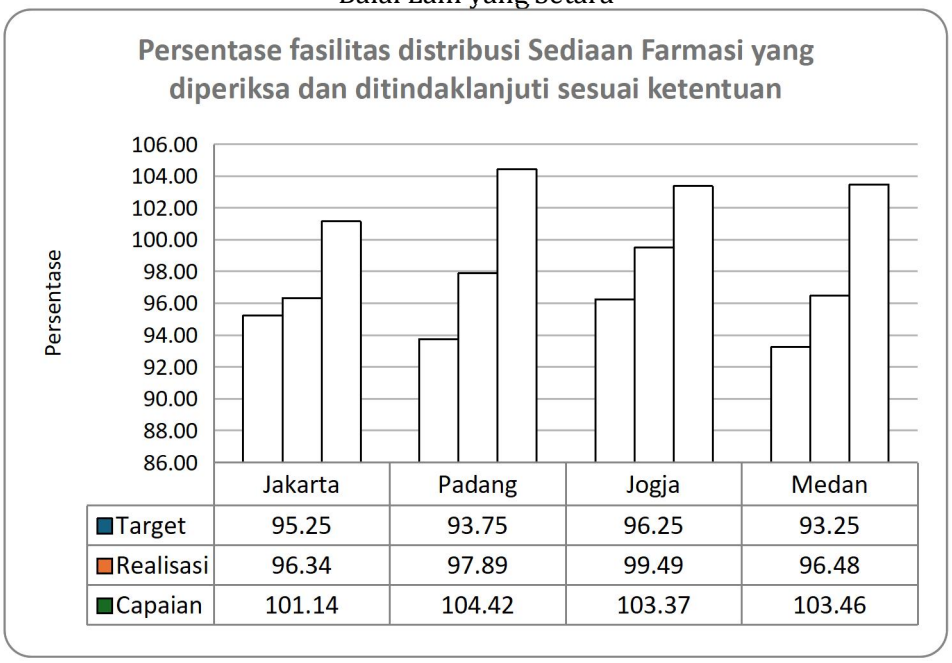
Tabel 3.34 Perbandingan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,25	97,89	99,63	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,25%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 99,63% termasuk kategori tercapai/melampaui.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	95.25	93.75	96.25	93.25
Realisasi	96.34	97.89	99.49	96.48
Capaian	101.14	104.42	103.37	103.46

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jogja 99,49% dan terendah BBPOM Jakarta 96,34% sedangkan untuk capaian tertinggi BBPOM Padang 104,42% dan terendah BBPOM Jakarta 101,14%. Namun targetkinerja UPT dalam satu kalater ini tercapai dan capaian di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ini dicapai berdasarkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan sarana distribusi, dimulai dari penyusunan rencana pemeriksaan berbasis risiko, pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai juknis, penyusunan tindak lanjut sesuai dengan Pola Tindak lanjut dan pelaporan dalam Aplikasi SIPT sesuai timeline.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.35 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaku Usaha belum konsisten dalam melakukan pengelolaan sedian farmasi sesuai ketentuan	Penerapan sanksi sesuai Pola Tindak lanjut dan bekerjasama dengan Stakeholder dalam penegakan dan pengawalan penegakan sanksi	Penerapan sanksi sesuai Pola Tindak lanjut dan bekerjasama dengan Stakeholder dalam penegakan dan pengawalan penegakan sanksi	Desember 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Efektivitas pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan didukung dengan pengelolaan anggaran. Efektivitas pengelolaan unsur tersebut akan memberikan kinerja yang terbaik pada pencapaian target kegiatan.

J. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut:

jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.36 Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	85.00	100.00	117.65	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 100%, bila dibandingkan dengan target 85%, maka capaian yang diperoleh adalah 117,65%4 dan mendapatkan kategori Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.37 Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025.

Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
85	164	164	20,00	160	164	68,29	164	164	10,00	98,29

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IndikatorPersentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

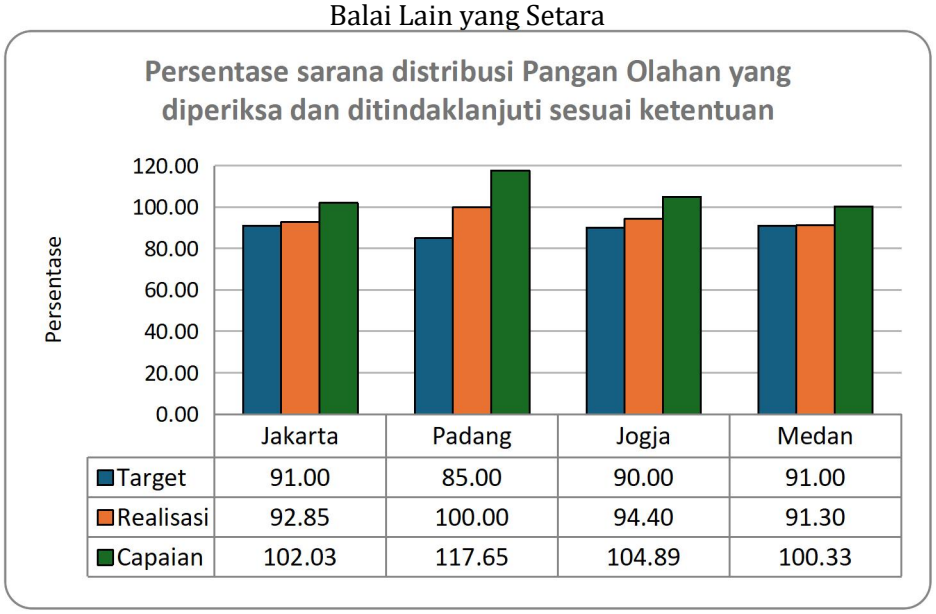
Tabel 3.38 Perbandingan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 105,26% termasuk kategori tercapai/melampaui. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target 2026-2029.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	91.00	85.00	90.00	91.00
Realisasi	92.85	100.00	94.40	91.30
Capaian	102.03	117.65	104.89	100.33

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM 100% dan yang terendah BBPOM Medan 91,30%. Namun semua UPT dalam klaster ini telah mencapai target dengan capaian di atas 100%.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**
   a. Melakukan koordinasi dan komunikasi internal perencanaan distribusi pangan olahan.
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap triwulan.
   c. Mengirimkan peserta mengikuti pelatihan food inspektur.
   d. Mengikuti pelatihan keamanan pangan.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.39 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	belum semua petugas pengawas pangan memiliki kompetensi sebagai food inspektur, masih terdapat perbedaan persepsi dala penetapan hasil kesimpulan penagawasan, pelaku usaha distribusi pangan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan belum update.	Mengusulkan peningkatan kompetensi personil melalui ideas dan ppsdm , memberikan KIE kepada pelaku usaha distribusi pangan tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru, melakukan KIE melalui media sosial tentang cara distribusi pangan olahan yang baik	-penyampaian usulan kepada kantor Pusat dan mengajak petugas mengikuti pelatihan tentang pangan di ideas, melakaukan jadwal KIE baik secara langsung maupun media sosial tentang pangan yang aman	Desember 2026	Y	SDM-07	Pemeriksaan sarana belum komprehensif dan sesuai pedoman yang berlaku

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
   a. Melakukan perencanaan distribusi sarana berbasis risiko
   b. Melakukan monitoring terhadap pelaporan sarana distribusi
   c. melakukan peningkatan kompetensi melalui ikut sosialisasi terkait pengawasan sarana distribusi pangan olahan.
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulannya

K. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan didefinisikan sebagai setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan

.

Olahan. Balai Besar POM di Padang melaksanakan pengawasan iklan baik iklan komoditi sediaan farmasi maupun pangan olahan pada berbagai jenis media iklan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pengampu masing-masing komoditi.

Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan mencakup penetapan target, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, evaluasi hasil pengawasan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh tahapan pelaksanaan pengawasan iklan ini didasarkan kepada berbagai regulasi atau peraturan terutama pedoman pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi. Pedoman pengawasan tersebut yang dilengkapi dengan edaran terkait pengawasan iklan dari pengampu masing-masing komoditi sekaligus menjadi acuan dalam tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan di Balai Besar POM di Padang.

Kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dipantau dan dievaluasi capaiannya setiap bulan berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SIPT yang nilainya diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Cara Perhitungan Dan Formula

= (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan Rerata
E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan rumusan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kinerja terbaik pada pengawasan iklan untuk setiap komoditi diperlukan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja sesuai dengan atau melebihi target yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.40 Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	91.60	99.04	108.12	108.12	Sangat Baik

Target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar 91,6% yang efektif berlaku mulai bulan Agustus 2025, dan mengalami peningkatan secara signifikan dari target awal sebesar 81,09%. Berdasarkan hasil evaluasi nilai capaian pada tahun 2025, nilai capaian yang diperoleh sebesar 108,12% dengan kategori Sangat Baik.

Rincian capaian hasil pengawasan berdasarkan penilaian data laporan yang disampaikan melalui SIPT setiap bulan selama tahun 2025 untuk masing-masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 3.23 Data pada tabel menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target pengawasan yang ditetapkan dengan nilai realisasi sebesar 99,04% pada akhir Tahun 2025..

Tabel 3. 41 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
91,6	100,00	100,00	97,32	98,15	99,74	99,04

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

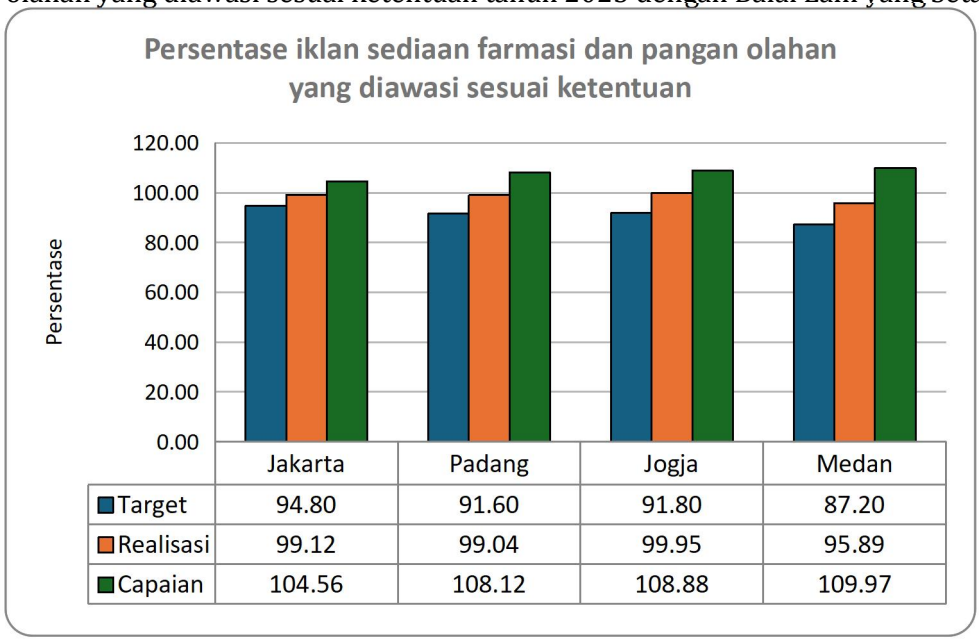
Tabel 3.42 Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	96,00	99,04	103,17	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 96,00%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 103,17% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui. Hingga saat ini sudah dilakukan reviu terhadap target kinerja untuk IKK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan termasuk penetapan penyesuaian target untuk tiap tahun selama periode Renstra 2025-2029.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.11 Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara.



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jogja 99,95% dan terendah BBPOM Medan 95,89% sedangkan untuk capaian tertinggi BBPOM Medan 109,97% dan terendah BBPOM Jakarta 104,56%. Namun semua target kinerja UPT dalam klaster ini tercapai dan capaian di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pemenuhan parameter yang menjadi kriteria penilaian kinerja Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat menentukan kualitas capaian kinerja. Terdapat sedikit penurunan realisasi pada triwulan IV dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada triwulan III tahun 2025 disebabkan adanya keterlambatan pelaporan iklan namun masih dapat menjaga nilai capaian sesuai dengan target. Salah satu faktor yang turut menjadi pendorong ketepatan waktu pelaporan tersebut adalah dengan adanya perencanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang baik, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.43 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	- Terdapat keterbatasan jenis media iklan tertentu (misalnya iklan obat keras untuk iklan komoditi obat) - Terdapat perbedaan kesimpulan penilaian kesesuaian iklan antara petugas Balai dengan evaluator pusat.	- Persentase jumlah iklan untuk media tertentu agar dapat ditetapkan secara fleksibel dengan justifikasi jika tidak dapat terpenuhi targetnya - Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan atau bimtek untuk penilaian iklan	- Penyampaian usulan ke pengampu masing-masing komoditi - Penyampaian usulan untuk pelaksanaan pelatihan terkait pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi	Juli 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran, tata kelola teknologi informasi pendukung, serta manajemen sumber daya manusia. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan

atau program terkait tersebut akan sangat membantu untuk memberikan kinerja yang terbaik pada pencapaian target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

L. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2020, lebih dari tujuh juta orang di dunia meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh konsumsi tembakau, termasuk 1,2 juta kematian akibat paparan asap rokok sebagai perokok pasif. Di Indonesia, merokok merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan, termasuk kematian prematur, penurunan produktivitas, dan pengeluaran tidak produktif. Berdasarkan Tobacco Atlas 2018, Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak setelah Tiongkok dan India, dengan prevalensi konsumsi rokok dewasa mencapai 36,3% menurut The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, 2018.

Data GATS 2021 juga mencatat peningkatan signifikan penggunaan rokok elektronik, dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021). Prevalensi pengguna rokok elektronik pada anak dan remaja usia 10-18 tahun meningkat dari 1,2% (2016) menjadi 10,9% (2018), empat kali lebih tinggi dibandingkan prevalensi usia dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa rokok elektronik semakin populer di kalangan generasi muda, meningkatkan urgensi pengawasan yang efektif.

Tingginya prevalensi konsumsi tembakau dan rokok elektronik mengancam bonus demografi Indonesia pada periode 2020–2035, di mana rasio penduduk produktif lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif. Kebiasaan merokok pada usia muda meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke, yang dapat menghambat produktivitas dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Badan POM, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diberikan tugas dalam pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik dalam bentuk pengawasan pencantuman peringatan kesehatan dan pengujian kandungan nikotin dan tar.

Pengawasan pencantuman peringatan kesehatan dan pemenuhan terhadap ketentuan label pada produk tembakau dan rokok elektronik menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama mulai triwulan III tahun 2025 ini. Pemenuhan terhadap IKU ini didasarkan kepada 2 (dua) parameter yaitu Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label (A) dan Persentase ketepatan waktu pelaporan label (B) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{A + B}{2}$$

Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM Pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT. Untuk target capaian yang ditetapkan pada Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 dan mulai efektif pada triwulan III sebagaimana tercantum pada tabel 3.48.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.44 Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Persen	90.00	97.50	108.33	108.33	Sangat Baik

Pada tahun 2025 ini, baik jumlah maupun waktu pelaporan dapat dipenuhi sesuai dengan target sehingga realisasi untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 97,50%. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 108,33% dengan kategori Sangat Baik. Rincian realisasi pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.45

Tabel 3.45 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025

Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
90.00	97.50	97.50	97.50

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

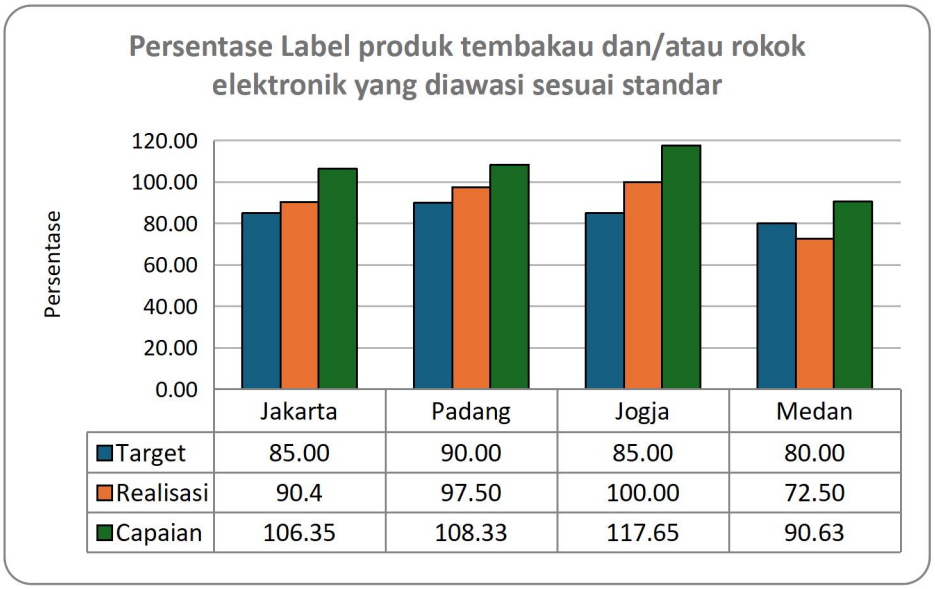
Tabel 3.46 Perbandingan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,00	97,50	103,72	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah 94,00%. Dengan demikian, realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 103,72% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui. Hingga saat ini sudah dilakukan reviu terhadap target kinerja untuk indikatorPersentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan termasuk penetapan penyesuaian target untuk tiap tahun selama periode Renstra 2025-2029.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jogja 100% dan

yang terendah BBPOM Medan 72,50%. Target BBPOM Padang tercapai dan capaian di atas 100% di bawah BBPOM Jogja.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilakukan terhadap produk tembakau maupun rokok elektronik yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Pemenuhan terhadap target sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan sampling, evaluasi penandaan dan pelaporannya sesuai dengan target jumlah dan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.47 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	- Saluran pelaporan pengawas iklan rokok elektronik masih menggunakan google form sehingga menyulitkan untuk evaluasi	- Pelaporan sebaiknya sudah diakomodasi melalui SIPT	- Penyampaian usulan kepada pengampu komoditi	Juli 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Efektivitas pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sangat erat kaitannya dengan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran, tata kelola teknologi informasi pendukung, serta manajemen sumber daya manusia. Efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait tersebut akan sangat membantu untuk memberikan kinerja yang terbaik pada pencapaian target pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik.

M. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas mengingat pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian global. Penilaian indikator kinerja dalam pengendalian AMR dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan dari kegiatan berikut

1) Pengawasan dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik, dimana penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan apotek. Kriteria penilaian indikator dihitung dari
   a. jumlah penggunaan tools antibiotik dalam pemeriksaan Apotek dibandingkan dengan jumlah pemeriksaan Apotek.
   b. Pengisian seluruh pertanyaan dalam tools antibiotik termasuk pertanyaan terkait jenis antibiotik yang diserahkan tanpa resep dokter serta penulisan jumlahnya

      Target pada pelaksanaan kesesuaian di tahun 2025 adalah 80 % dan ditargetkan naik 5% setiap tahunnya
2) Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba

   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta bimtek dalam mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba, secara lebih spesifik meliputi pemahaman tentang resistensi, penyebab terjadinya resistensi dan dampaknya yang merugikan terhadap kesehatan masyarakat sehingga dapat mendorong penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional di fasilitas pelayanan kesehatan serta memperkuat peran dan tanggung jawab apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di apotek. Bimbingan teknis diikuti oleh minimal 30 (tiga puluh) orang dan pada tahun 2025 dilaksanakan 1(satu) kali dan 2 (dua) kali untuk tahun 2026 dan seterusnya.. Pengukuran efektivitas penyelenggaraan Bimtek melalui nilai posttest adalah 70 (tujuh puluh) dari 10 (sepuluh) soal, dokumentasi penggalangan komitmen dalam program pengendalian resistensi antimikroba sesuai format juknis serta laporan pelaksanaan kegiatan.
3) Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba.

   Advokasi merupakan upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder yaitu pemerintah daerah dalam mengendalikan resistensi antimikroba demi mencapai komitmen dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian AMR. Kegiatan ini minimal dilaksanakan minimal sebanyak 1 (satu) kali per tahun dalam bentuk pertemuan baik secara daring maupun luring di setiap wilayah kepada pemerintah daerah/Dinas Kesehatan setempat (Provinsi, Kota, Kabupaten), dengan topik antara lain Program Badan POM dalam pengendalian AMR, Hasil pengawasan terhadap praktik penyerahan antibiotik di apotek. serta dukungan pemda yang dapat diberikan. Output dari kegiatan yang diharapkan berupa Bukti penyampaian informasi hasil pengawasan, laporan pelaksanaan advokasi, dokumen penggalangan komitmen, dan penerbitan kebijakan/regulasi.
4) Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Publikasi ini merupakan penyampaian informasi hasil pengawasan pemeriksaan fasilitas pelayanan apotek di wilayah pengawasan BBPOM di Padang sebagai bentuk transparansi kepada seluruh masyarakat termasuk stakeholder terkait praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Pelaksanaan publikasi diselaraskan dengan data hasil evaluasi pusat, dapat berupa tabel, grafik, infografik peta wilayah maupun format lainnya. Pelaksanaan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dilaksanakan 1 (satu) kali per triwulan melalui media publikasi BBPOM di Padang (Website, Media Sosial).

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Pemenuhan target pada kegiatan dihitung pada akhir tahun 2025.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.48 Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	%	100.00	105.57	105.57	105.57	Sangat Baik

Target pengendalian AMR dapat dipenuhi untuk ke empat kegiatan yang ditetapkan, yaitu pengisian tools antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, kegiatan advokasi dan publikasi hasil pengawasan. Hasil dari kegiatan advokasi lintas sektor telah menghasilkan Surat Edaran Penggunaan Antibiotik secara Bijak dari Pemerintah Daerah, yaitu dari Gubernur Sumatera Barat diikuti oleh Bupati dan walikota dari 6 kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan indikator baru yang ada di triwulan 3 tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

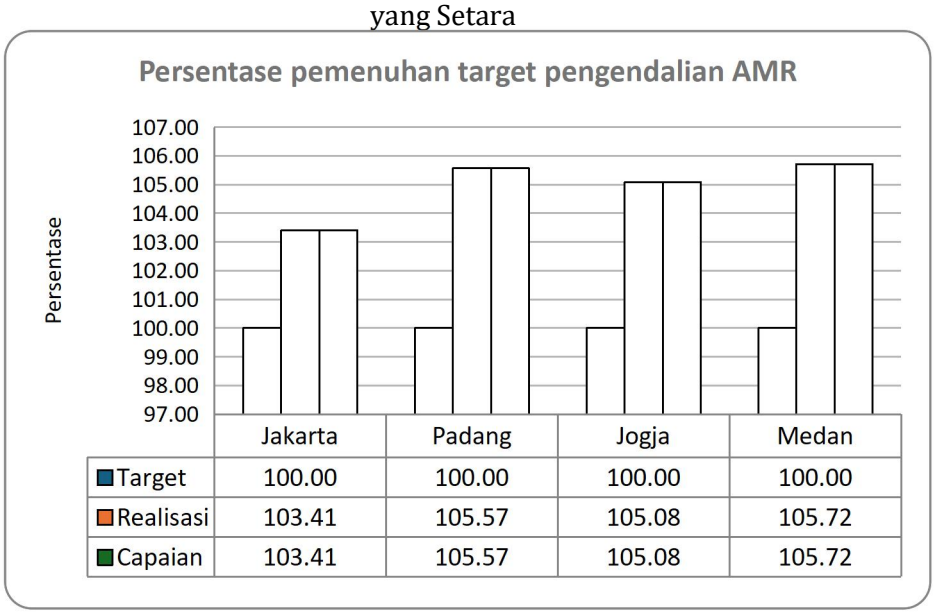
Tabel 3.49 Perbandingan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,57	105,57	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) untuk IKK Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah 100,00%. Dengan demikian, realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 105,57% termasuk kategori Tercapai/ Melampaui.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Medan 105,72 dan selanjutnya BBPOM 105,57%. Namun semua capaian kinerja UPT dalam satu klaster berada di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Kegiatan advokasi yang menghasilkan 7 Surat Edaran dari pemerintah daerah didukung oleh harmonisnya hubungan kerjasama Balai Besar POM di Padang dengan Pemerintah Daerah di Wilayah kerja sehingga dapat segera mencapai kesamaan pemikiran dan tindakan dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dari Fasyankes dapat terlaksana dengan baik dengan penandatanganan komitmen dari seluruh Apoteker Penanggungjawab Apotek yang hadir dalam kegiatan didukung oleh kemampuan narasumber dalam memberikan pemahaman dan mempengaruhi peserta tentang pentingnya gerakan nyata dalam pengendalian resistensi antibiotik.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3. 50 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	tindaklanjut SE Pemda terhadap pengurangan penyerahan antibiotika tanpa resep	Pembentukan Tim Kerja / penunjukan PIC pengendalian Resistensi	Pembutan surat tindaklanjut SE Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana kerja	Desember 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pengisian tools antibiotik melekat pada sistem pelaporan SIPT, sehingga petugas diharuskan untuk mengisikan hasil monitoring distribusi antibiotik di bawah supervisi ketua tim

b. Bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggungjawab Apotek dilaksanakan dengan narasumber influencer Mr Matt, yang menggugah kesadaran dan tanggungjawab APJ untuk turut aktif dalam pengendalian resistensi antibiotik.

c. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara proaktif oleh pimpinan melalui pendekatan persuasif dan logis berdasarkan data hasil pengawasan pengeluaran antibiotik tanpa resep di tahun 2023 dan 2024 sehingga Pemerintah daerah Provinsi dan kab/kota menerbitkan surat edaran penggunaan antibiotik secara bijak.

N. NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1) Standar Ruang Lingkup;
2) Standar Peralatan;
3) Standar Kompetensi Laboratorium;
4) Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2) Standar Peralatan;
3) Standar Kompetensi Laboratorium.

A. Standar Ruang Lingkup

   Pemenuhan Standar Ruang Lingkup untuk tahun 2025 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengharuskan verifikasi untuk metoda analisa yang akan ditingkatkan kemampuan ujinya. Metoda analisa yang sudah bisa dinyatakan terpenuhi (dihitung penilaiannya) oleh P3OMN jika sudah terverifikasi metoda analisanya.

B. Standar Peralatan Laboratorium.

C. Standar Kompetensi Laboratorium.

   Penilaian Standar Kompetensi Pengujian dilakukan dengan matriks yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 ini, standar kompetensi dinilai berdasarkan personil yang mampu melaksanakan pengujian (penguji pengampu) untuk metoda analisa yang sudah mampu uji berdasarkan jumlanya.

D. Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi.

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3
C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2
D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.51 Capaian Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persen	77.00	82.80	107.53	107.53	Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 adalah 82,80% bila dibandingkan dengan target 77 %, maka capaian yang diperoleh adalah 107,6 % dan mendapatkan kategori sangat baik.

Tabel 3.52 Hasil Perhitungan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

SRL	STANDAR PERALATAN	STANDAR KOMPETENSI LABORATORIUM	STANDAR METODE TERVERIFIKASI	NILAI PEMENUHAN SKL Tahun 2025
84,9	88,6	100	26,8	82,8

2. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan indikator yang sudah ada di tahun sebelumnya namun ada perubahan pada cara perhitungan di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

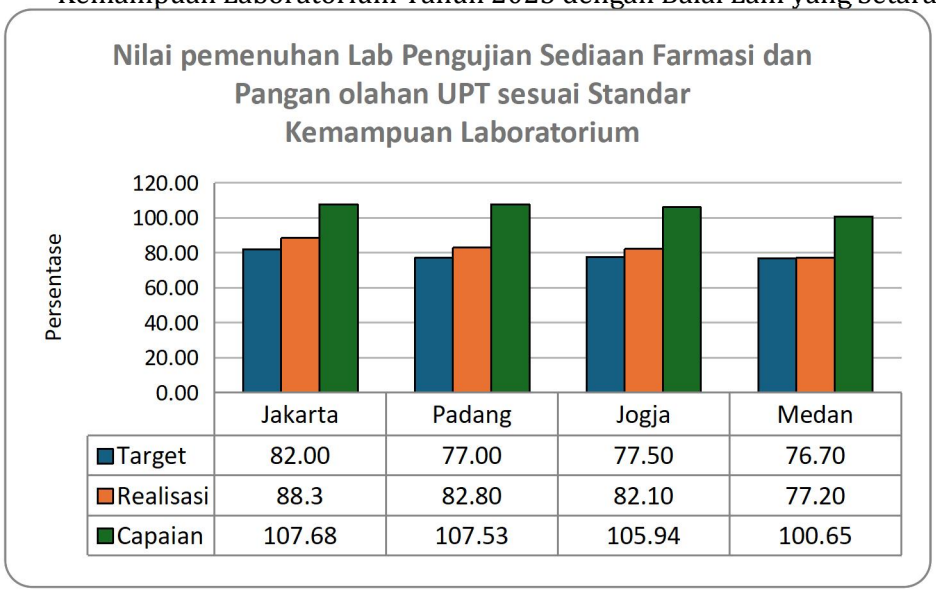
Tabel 3.53 Perbandingan Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,9	82,80	96,39	Tercapai/melampaui 

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 85,90%, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 96,39%. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dari tim laboratorium pengujian untuk mencapai target dengan peningkatan aspek SKL seperti SRL, Standar Kompetensi, Standar Peralatan dan Verifikasi Metoda Analisa. Masing-masing laboratorium masih mempunyai target aspek SKL yang belum terpenuhi sehingga harus direncanakan setiap tahunnya sampai akhir Renstra 2029. Perencanaan dibuat tidak hanya untuk setiap aspek SKL yang belum tercapai, tetapi juga diikuti dengan penyusunan perencanaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi target SKL yang telah disusun seperti reagensia, suku cadang dan peralatan laboratorium, untuk mendapatkan realisasi SKL dari rencana yang sudah disusun. Tahun 2025 ini Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 77,0 telah tercapai 82,80 dengan capaian 107.6 %. Target tahun 2026 sebesar 81,5 harus menyesuaikan dengan capaian tahun 2025 ini sehingga adanya usulan perubahan target yang lebih tinggi lagi karena capaian realisasi tahun 2025 sudah melebihi.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.14 Realisasi dan Capaian Kinerja Rekomendasi Perbaikan Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	82.00	77.00	77.50	76.70
Realisasi	88.3	82.80	82.10	77.20
Capaian	107.68	107.53	105.94	100.65

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

Kemampuan Laboratorium tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jakarta 88,3% sedangkan yang terendah BBPOM Medan 77,20%. Persentase realisasi dan capaian BBPOM Padang berada di bawah BBPOM Jakarta. Semua UPT dalam kalster ini telah emncapai target dengan capaian di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian di Tahun 2025 ini mendapat kategori sangat baik disebabkan adanya koordinasi dan kerja sama tim pengujian dalam memenuhi target SKL yang meliputi aspek SRL, kompetensi dan Verifikasi Metoda Analisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan, walaupun ada beberapa rencana yang belum terealisasi terkait kendala reagen dan suku cadang tetapi tidak menurunkan keberhasilan pencapaian target. Di samping itu koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membantu percepatan pemenuhan peralatan sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Padang.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.54 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ketersediaan reagen, suku cadang dan alat untuk mendukung SRL dan Verifikasi MA	Perencanaan reagen, suku cadang dan alat untuk mendukung SRL dan Verifikasi MA	Pengadaan reagen, suku cadang dan alat untuk mendukung SRL dan Verifikasi MA	Desember 2026	Y	1. A-01 2. K3-01 3. SDM-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Personil Laboratorium Terpapar bahan kimia 3. Personil Laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, karena adanya perpindahan / rotasi personil

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Poin penting yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dalam target SKL ini adalah koordinasi dan kerja sama tim yang baik antara internal pengujian maupun dengan tim sampling serta tim pengadaan (PPK).

O. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi sesuai dengan target UPT BPOM pada tahun berjalan. Kegiatan pendampingan telah diawali Sosialisasi Kabupaten/Kota Pangan Aman yang dilaksanakan secara daring bersama Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI selama periode Mei-Juni 2025.

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota

c. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formula

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
d) Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang berhasil Didampingi sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\ \%$$

Pelaksanaan pendampingan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman terhadap Pemerintah Daerah di wilayah kerja BBPOM di Padang telah dilakukan melalui tahapan kegiatan berikut:

1. Advokasi ke Seluruh Kabupaten/Kota

   Telah dilakukan advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 9 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kab Pesisir Selatan.

No	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi
1.	Kab. Solok	28 April 2025
2.	Kab. Padang Pariaman	30 April 2025
3.	Kab. Solok Selatan	23 Mei 2025
4.	Kota Pariaman	18 Juni 2025
5.	Kab. Pesisir Selatan	18 Juli 2025
6	Kota Padang Panjang	22 Juli 2025
7.	Kota Solok	23 Juli 2025
8	Kab. Kepulauan Mentawai	28 Juli 2025
9.	Kota Padang	21 Agustus 2025

Pelaksanaan kegiatan advokasi bertujuan untuk mengajak dan meminta komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian mandiri. Adapun materi yang dipaparkan dalam advokasi ini terkait penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman, penjelasan terkait tools penilaian dan data dukung penilaian. Selain itu, melalui advokasi ini juga disampaikan terkait Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BPOM, serta Peran Pemerintah Daerah terkait kebijakan penanggulangan resistensi antimikroba.

2. Seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi

   Tahapan ini dilakukan untuk memilih Kabupaten/Kota yang berkomitmen tinggi dan potensial dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kabupaten/Kota terpilih ini diberikan pendampingan khusus dalam pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar data dukung yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri. Berdasarkan penilaian komitmen dan kesiapan Pemerintah Daerah, Kota Padang Panjang merupakan Kota yang terpilih untuk pendampingan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.

3. Pendampingan

   Pendampingan dilakukan dengan melakukan pemantauan pengisian tools penilaian mandiri agar dapat terisi dengan baik dan benar, memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Kabupaten/Kota terkait pengisian tools, dan melakukan penilaian terhadap data dukung yang diisi oleh Kabupaten/Kota. Disamping itu, juga dilakukan monitoring terhadap seluruh Kabupaten/Kota yang melakukan pengisian tools.

Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengisian Tools	Kabupaten/Kota yang Tidak Melakukan Pengisian Tools
1. Kota Padang Panjang 2. Kota Padang 3. Kota Solok 4. Kab. Solok Selatan 5. Kab. Solok 6. Kab. Kepulauan Mentawai	1. Kota Pariaman 2. Kab. Padang Pariaman 3. Kab. Pesisir Selatan

4. Pelaporan

   Pelaporan terkait pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang dilaporkan secara berkala paling lambat setiap tanggal 30 setiap bulannya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.55 Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan AmanTahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persen	11.11	11,11	100%	100%	Baik

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 11,11%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kategori sangat baik.

2. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

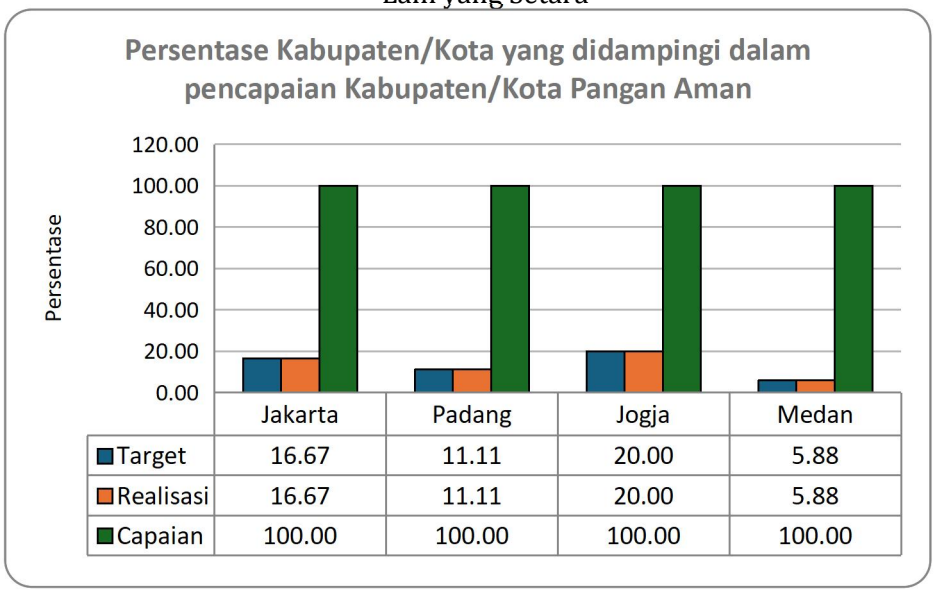
Tabel 3.56 Perbandingan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66,67	11,11	16,66	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 66.67%, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 16,66% termasuk kategori perlu upaya keras.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	16.67	11.11	20.00	5.88
Realisasi	16.67	11.11	20.00	5.88
Capaian	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 capaian semua UPT dalam satu klaster ini adalah 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian persentase pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman di Tahun 2025 ini mendapat kategori baik. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik kepada Pemerintah Daerah, mulai dari pendekatan advokasi di setiap Kabupaten/Kota hingga pendampingan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Padang dalam pengisian tools penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tak hanya itu, juga dilakukan pendampingan terhadap pengisian data dukung yang sesuai untuk masing-masing poin penilaian.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.57 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum semua Kabupaten/Kota yang melakukan pengisian tools dan data dukung yang sesuai	Melakukan pendampingan kembali kepada Kabupaten/Kota di Tahun 2026 dalam pengisian tools penilaian dan data dukung	Melakukan kembali Advokasi kepada Pemerintah Daerah, Pendampingan Pengisian Tools dan monitoring serta pelaporan	Desember 2026	T	-	-

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   a. Optimalisasi Advokasi penilaian mandiri Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menggerakkan seluruh OPD terkait untuk berperan aktif dalam pengisian tools sesuai tupoksi masing-masing hingga menyiapkan data dukung yang sesuai.

   b. Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam pengisian tools penilaian dan kelengakapan data dukung dapat menghasilkan penilaian yang maksimal

   c. Adanya inovasi daerah dalam implementasi keamanan pangan dalam setiap aspek menjadi poin penilaian sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu :

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan membandingkan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing .

UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025.

Cara Perhitungan dan Formula

Cara perhitungan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan: *Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.58 Capaian Persentase Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan	Persen	63.00	62,5	99,21	99,21	Baik

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 adalah 62,5 %, bila dibandingkan dengan target 63% maka capaian yang diperoleh adalah 99,21 % dan mendapatkan kategori Baik. Hal ini disebabkan tidak dilakukan revisi target jumlah sarana yang ditindaklanjuti. seharusnya diajukan pada TW 3 sehingga hasil capaian indikator kinerja dapat memenuhi ketercakupan pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang berdasarkan data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 adalah 8 sarana, dan target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 5 sarana. Pada tahun 2024 terdapat 3 sarana produksi garam yang tidak aktif dan telah berganti fungsi menjadi usaha lain, sehingga hanya terdapat 5 sarana produksi pangan fortifikasi yang aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

Pada tahun 2025 target pemeriksaan sarana pangan fortifikasi adalah 5 sarana yang dilaksanakan pada bulan Januari – April 2025. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana produksi minyak goreng sawit dan 2 sarana produksi garam. Dari hasil pemeriksaan terdapat 1 sarana produksi garam Kurnia Garam Sejahtera yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Kelima sarana produksi telah melaksanakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap sarana produksinya dengan dokumen CAPA yang telah dievaluasi dan telah memenuhi ketentuan. Pengawasan sarana produksi fortifikasi dapat menunjang kinerja pemerintah dalam aksi percepatan penurunan stunting secara nasional.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2029

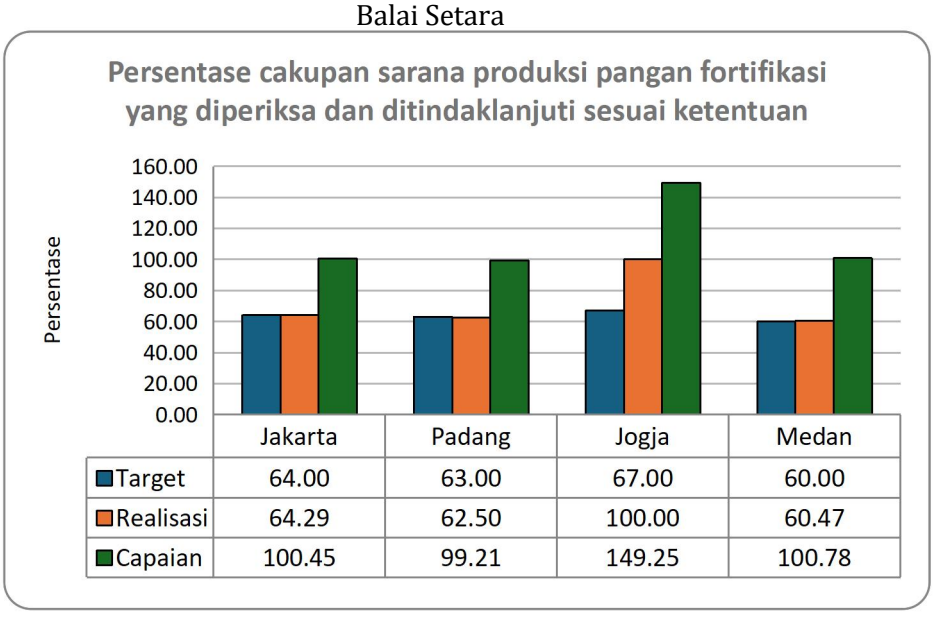
Tabel 3.59 Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	62,5	83,33	Akan Tercapai

Target Renstra tahun 2025 untuk indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 63 %, sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 62,5 %, maka realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 83,33% dan ini belum memenuhi ketercakupan pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Jika dibandingkan dengan target akhir target akhir renstra (tahun 2029) yaitu 75 %, maka capaian akan tercapai..

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 Dengan Balai Setara



Berdasarkan tabel perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM Jogja 100%, sedangkan capaian BBPOM di Padang tidak 100% karena belum memenuhi ketercakupan pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang..

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pencapaian kinerja atau penyebab kegagalan adalah :

a. Pemeriksaan sarana pangan fortifikasi pada tahun 2025 dilaksanakan 5 sarana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 terdapat 8 sarana produksi pangan fortifikasi yang memiliki izin edar, tetapi sejak tahun 2024 terdapat 3 sarana produksi garam yang tidak aktif dan telah beralih fungsi menjadi usaha lain, sehingga hanya terdapat 5 sarana produksi pangan fortifikasi yang aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.
b. Dengan tidak aktifnya 3 sarana produksi garam yang digunakan sebagai baseline data sarana produksi pangan fortifikasi pada tahun 2023, maka seharusnya dilakukan revisi target jumlah sarana yang ditindaklanjuti pada triwulan III sehingga hasil capaian indikator kinerja dapat memenuhi ketercakupan pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.60 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku	Merencanakan konsultasi/desk CAPA terhadap pelaku usaha	Melaksanakan konsultasi/desk CAPA bagi pelaku usaha	Desember 2026	Y	S - 11	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target kinerja tahu 2025 tidak tercapai dan untuk bisa meningakatkan pencapaian kinerja maka sangat didukung oleh:

.

a. Kepatuhan pelaku usaha atas kerjasamanya mengikuti semua proses pemeriksaan sehingga inspeksi dapat berjalan dengan lancar.

b. Peningkatan kompetensi petugas pada tahun 2025 yaitu Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan mengenaI Pengawasan Fortifikasi Pangan dan Food inspector (FI) Dasar, pelatihan/bimtek ini dapat memastikan tersedianya personil yang kompeten dan memiliki komitmen melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditetapkan.

c. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan pelaku usaha pangan fortifikasi.

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama. Hasil capaian rata-rata keempat indikator tersebut adalah 75,43% dan setelah dinormalisasi tetap menjadi 75,43% Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.61 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	89.51	101.72	101.72	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah	14.00	7.00	50.00	50.00	Kurang
		19	Jumlah desa pangan aman	Jumlah	6.00	3.00	50.00	50.00	Kurang
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	1.00	1.00	100.00	100.00	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

A. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber/petugas, konten/informasi, pemahaman audiens dan manfaat KIE. Tingkat efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks.

Jenis kegiatan KIE terbagi menjadi KIE Langsung/ Tatap Muka dan KIE Media (Tidak Langsung).

KIE Langsung/ Tatap Muka meliputi:

1. KIE bersama Tokoh Masyarakat,
2. Sosialisasi/ Penyuluhan,
3. Seminar, Webinar,
4. Talkshow,
5. Penyebaran informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD) dan
6. Pameran.

KIE Media meliputi:

1. Media Sosial melalui kanal media sosial official Balai Besar POM di Padang antara lain: Facebook, Instafgram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube.
2. KIE Non Media Sosial melalui media digital, media online, media elektronik, media cetak, media luar ruang.

Pengukuran dilakukan melalui aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2025. Survei dilakukan secara mandiri oleh petugas Balai Besar POM di Padang menggunakan instrumen yang terdiri dari 2 (dua) kuesioner yaitu: kuesioner KIE tatap muka dan kuesioner KIE media. Responden survei efektifitas KIE tatap muka yaitu peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan. Sedangkan responden survei efektifitas KIE media adalah masyarakat yang pernah mengakses saluran media KIE Balai Besar POM di Padang atau menerima produk informasi Balai Besar POM di Padang. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE, yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara Perhitungan Indeks Efektivitas KIE

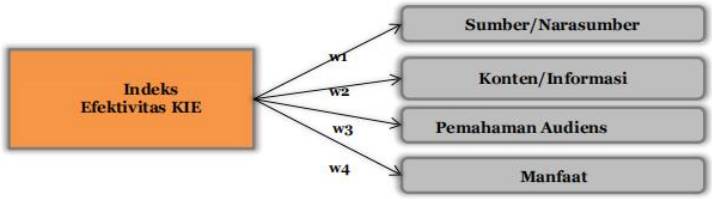
.

a. Indeks efektivitas KIE diukur pada bulan Januari s/d Desember 2025 terhadap responden yang mengikuti KIE secara langsung maupun melalui Media.

b. Indeks efektivitas KIE dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing unit penyelenggara KIE.

c. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE dibentuk dari dimensi-dimensi yang sudah ditetapkan yaitu, sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman konten, dan manfaat. Cara perhitungan Indeks Efektivitas KIE dapat diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) sejumlah dimensi.

Perhitungan Indeks dan Rumus ;



$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} X_{ij} \cdot w_k$$

- m = Jumlah Indikator Pembentuk (Jenis KIE);
- n = Kategori Analisis (Sub Indikator atau Wilayah Survei);
- Xij = Skor Indikator ke-i dan kategori ke-j
- Wk = Bobot Indikator ke-k (dihitung melalui skor AHP Pakar atau hasil bobot empirik).

Pembobotan Indikator Indeks Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ Media)	$(0,25 \; x \; X_1) + (0,25 \; x \; X_2) + (0,25 \; x \; X_3) + (0,25 \; x \; X_4)$

Tabel 3. Kategori Indeks Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.62 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai	88.00	89.51	101.72	101.72	Sangat Baik

Total responden survei efektifitas KIE pada Tahun 2025 sebanyak 809 orang yang terdiri dari 673 orang responden survei KIE tatap muka dan 136 orang responden survei KIE media. Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 adalah 89.51 dari target sebesar 88.00 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 101.72 % dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.63 Perhitungan realisasi Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2025

RESPONDEN				INDEKS			
UNIT PELAKSANA TEKNIS	**Tatap Muka**	**Media**	**Total Responden**	**INDEKS TATAP MUKA**	**INDEKS MEDIA**	**INDEKS KIE**	**KATEGORI INDEKS**
BBPOM Padang	673	136	809	89,51	89,99	89,04	Efektif

Berdasarkan hasil survei efektifitas KIE Tahun 2025, diperoleh capaian tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Padang sebesar 89,51 dengan kategori Efektif dengan rincian capaian indeks survei tatap muka sebesar 89.99 (kategori efektif) dan capaian indeks survei media sebesar 89,04 (kategori efektif).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan indikator dengan metode perhitungan baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat efektivitas KIE pada tahun 2025 (priode restra 2025-2029) berbeda dengan tahun 2024 (priode renstra 2020-2024) sehingga tidak relevan untuk dijadikan acuan/ pembanding.

Pada tahun 2025 pengukuran tingkat efektifitas KIE menggunakan teori **taksonomi bloom**. Pengukuran tingkat efektivitas KIE tahun 2025 tidak hanya evaluasi terhadap penyelenggaraan namun juga evaluasi efektifitas KIE yang meliputi: narasumber dan petugas KIE, konten atau informasi, pemahaman audiens dan manfaat KIE. Selain itu pada tahun 2025,

pengukuran tingkat efektivitas KIE tidak hanya pada kegiatan KIE yang dilaksanakan secara Tatap Muka namun juga KIE melalui Media Sosial.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

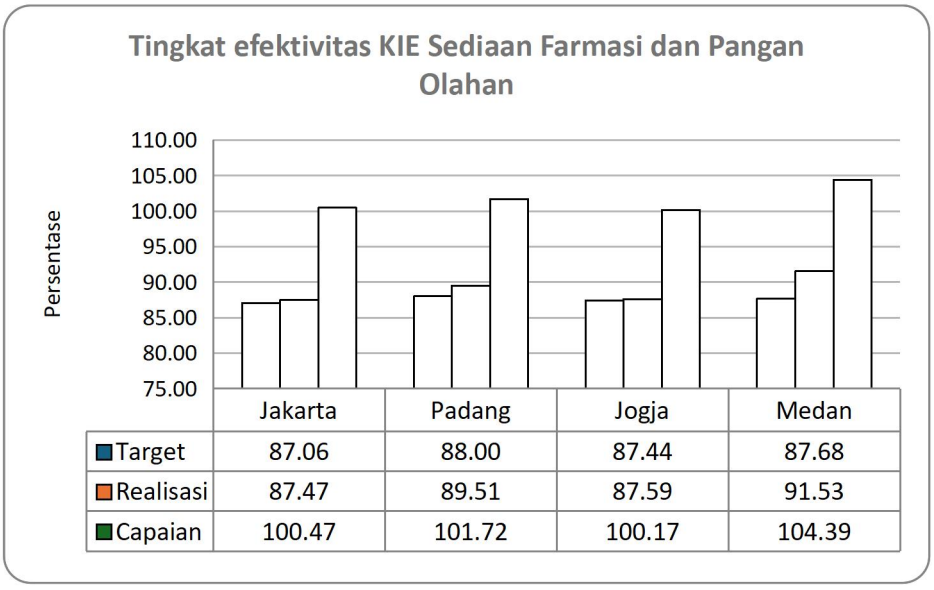
Tabel 3.64 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	89,51	97,80	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91.52, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 97,80% termasuk kategori akan tercapai.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tahun 2025 BBPOM di Padang 89,51% berada diperingkat kedua setelah BBPOM Medan 91,53%. Capaian pada setiap UPT dalam satu klaster ini berada di atas 100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 sebesar 101.72 % dengan kategori Sangat Baik. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Kerja sama anggota tim dalam melaksanakan kegiatan KIE sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
b. Koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Tatap Muka dan KIE Media dengan lintas sektor, seperti: Tokoh masyarakat Ade Rizki Pratama, SE, MM, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, dsb.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.65 Rekomendasi perbaikan kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Terdapat beberapa peserta KIE yang kehadirannya tidak sepenuhnya (dari awal kegaiatn sampai kegiatan selesai) 2. Pemahaman peserta KIE masih rendah	1. Penomoran pada kokarde/ tanda pengenal yang sama dengan nomor pada daftar hadir dan amplop uang traspor yang akan diserahkan setelah kegiatan selesai dan - Pencantuman nomor HP Peserta KIE pada daftar hadir untuk diverifikasi secara acak oleh Tim Keuangan dalam rangka memastikan kesesuaiannya. 2. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tujuan, sasaran dan materi).	1. Penomoran pada kokarde/ tanda pengenal yang sama dengan nomor pada daftar hadir dan amplop uang traspor yang akan diserahkan setelah kegiatan selesai dan - Pencantuman nomor HP Peserta KIE pada daftar hadir untuk diverifikasi secara acak oleh Tim Keuangan dalam rangka memastikan kesesuaiannya. 2. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tujuan, sasaran dan materi).	Desember 2026	Y	1. F-01 2. S-01 3. R-02	1. Manipulasi data kehadiran peserta KIE oleh peserta lainnya. 2. Pemahaman peserta KIE terhadap materi yang disampaikan masih rendah. 3. Masyarakat percaya dan menyebarkan Hoaks.

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja anatara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan KIE tatap muka (KIE Rutin, KIE Stunting, KIE Tomas, KIE Pameran, KIE pada CFD, sdb).
b. Pelaksanaan KIE Tatap Muka dilengkapi alat peraga, brosur, bunner, dan produk informasi lainnya sehingga masyarakat yang diberdayakan dapat ditingkatkan pemahamannya, didorong sikap dan prilaku positif dalam menerapkan praktek keamanan Obat dan Makanan yang aman dalam kehidupan sehari-hari.
c. Melayani permintaan kunjungan dan permintaan narasumber dari berbagai pihak (akademisi, lintas sektor, pelaku usaha, media, dsb) yang ingin mendapatkan edukasi dari Balia Besar POM di Padang.
d. Menjalin interaksi dengan pengguna media sosial melalui quiz setiap Bulan.
e. KIE melalui Media Sosial setiap hari (Facebook, Instagram, X, Tiktok, Whatsapp dan Youtube)
f. KIE melalui Non Media Sosial (Website, Leaflet/Brosur, Poster, Running Teks dan Videotron).
g. KIE Tatap Muka melalui layanan pengaduan dan informasi serta PPID pada Balai Besar POM di padang, Mal Pelayanan Publik Kota Padang dan Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman.

B. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah/madrasah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kategori Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah = 25%

.

- Sosialisasi Keamanan Pangan = 20%
- Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah = 25%
- Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan = 25%
- Pengawalan = 5%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.66 Capaian Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Jumlah	14.00	7.00	50.00	50.00	Kurang

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 adalah 7 sekolah dari target sebesar 14 sekolah sehingga capaian yang diperoleh sebesar 50% dengan kategori Kurang. Kondisi ini disebabkan karena efisiensi anggaran hingga akhir tahun tidak memperoleh relaksasi anggaran pelaksanaan jumlah sekolah yang dapat diintervensi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tabel 3.67 Progres Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi
100	25,00	12,50	12,50	10,00	5,00	65,00

Progres tahapan pelaksanaan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung berdasarkan bobot penilaian tahapan. Untuk advokasi dapat dilaksanakan secara penuh dengan bobot penilaian 25%, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader dan monitoring dihitungan setengah dari bobot penilaian karena jumlah sekolah yang diintervensi hanya 50% dari target.

2. **Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan renstra Badan POM Tahun 2025-2029 dengan baseline data yang baru. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan indikator yang telah ada di tahun sebelumnya namun cara penetapan target tahun 2025 berbeda dengan target tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

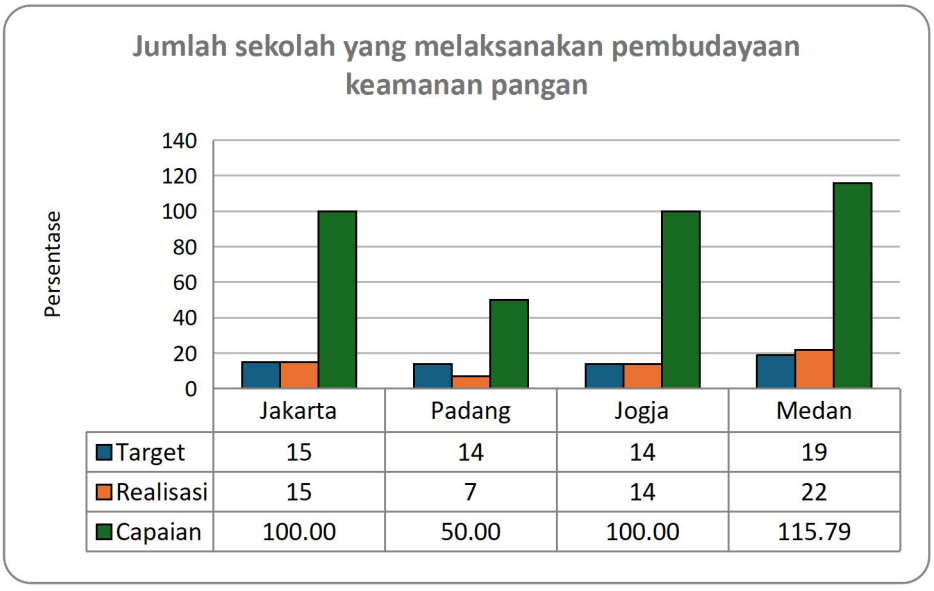
Tabel 3.68 Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	7,00	33,33	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 21, maka capaian 33,33% sehingga perlu upaya keras untuk mencapainya.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Garfik 3.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 BBPOM diPadang berada di bawah realiasasi UPT dalam satu klaster ini dan capaian tidak 100%, sedangkan 3 UPT lainnya mendapakana capaian 100% dan 115,79%.

5. **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja**

Pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a. Kondisi pemblokiran anggaran sehingga pada awalnya jumlah sekolah yang diintervensi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada dan berharap terjadi relaksasi anggaran untuk pencapaian target pada semester 1.
b. Hingga akhir tahun tidak terdapat relaksasi anggaran sama sekali sehingga target tidak dapat dicapai.
c. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan tidak dapat optimal dilakukan secara daring karena kondisi daerah intervensi merupakan daerah dengan kondisi jaringan internet yang sulit dibeberapa wilayah.
d. Perlengkapan kader keamanan pangan sekolah (seperti rompi kader) tidak dapat diberikan karena anggaran yang tidak tersedia. Pemberian rompi kader dapat menjadi salah satu motivasi/penyemangat para kader dalam melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah.
e. Pemberian rapid test kit keamanan pangan tidak lagi diberikan kepada sekolah karena tidak ada anggaran yang tersedia sehingga hal ini tidak dapat dioptimalkan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.68 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kondisi efisiensi anggaran dan tidak ada relaksasi hingga akhir tahun sehingga pelaksanaan program hanya dapat dilakukan 50% dari target dan beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai timeline	Anggaran pelaksanaan program agar dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan	- Pelaksanaan program kedepannya agar dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. - Arahan terkait pentingnya pelaksanaan replikasi sekolah/madrasah dapat didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait sehingga informasi keamanan pangan dapat menjangkau seluruh sekolah/madrasah yang ada di Kab/Kota intervensi. - Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat memastikan keberlanjutan program dapat tetap berjalan secara mandiri setelah pelaksanaan intervensi selesai. Sekolah/Madrasah yang telah ditunjuk sebagai pilot project melalui program Sekolah dengan PJAS Aman ini diharapkan dapat menjadi rujukan penerapan keamanan pangan dan mengimbaskan pelaksanaan keamanan pangan di sekolah setingkat.	Desember 2026	Y	1. O-03 2. S-02 3. S-03 4. S-04	1. Pemilihan kader pada Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang tidak tepat . 2. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan tidak dilanjutkan setelah berakhirnya intervens. 3. Pemahaman kader keamanan pangan kurang optimal terhadap materi yang disampaikan oleh petugas. 4. Paket edukasi yang diberikan kepada Sekolah tidak digunakan sesuai dengan pedoman,

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 dapat terlaksana d itengah kondisi anggaran yang ada disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik bersama sekolah/madrasah intervensi sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Pengembangan program dilakukan dengan Sosialisasi Keamanan pangan secara menyeluruh untuk semua jenjang pendidikan (selain sekolah intervensi) dapat

terlaksana dengan dukungan dari OPD terkait seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Solok, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, Dinas Kesehatan Kab. Solok dan Kantor Kementerian Agama Kab. Solok sehingga perluasan sosialisasi keamanan pangan dapat dilakukan secara daring walaupun belum optimal untuk sekolah yang terkendala jaringan internet di beberapa wilayah.

c. Pembentukan grup whatsapp baik untuk sekolah intervensi maupun pengawalan (sekolah yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya) untuk memudahkan komunikasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang didalamnya bergabung seluruh tim keamanan pangan sekolah, OPD terkait dan petugas BBPOM di Padang.

d. Terhadap sekolah yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya tetap dilakukan komunikasi melalui grup whatsapp sehingga pelaksanaan pengawalan secara daring dapat diikuti oleh seluruh sekolah dengan pemaparan materi yang komprehensif sesuai dengan kondisi dan update isu saat ini seperti keamanan pangan terkait Makan Bergizi Gratis.

B. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi

Perhitungan dan formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kategori Desa Pangan Aman

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Advokasi = 25%

.

- Pelatihan Kader = 25%
- Bimbingan Teknis Komunitas = 20%
- Monitoring dan Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.70. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	Jumlah	6.00	3.00	50.00	50.00	Kurang

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2025 adalah sebesar 3, dengan target 6, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 50,00% dengan kategori kurang. Kondisi ini disebabkan karena efisiensi anggaran hingga akhir tahun tidak memperoleh relaksasi anggaran pelaksanaan jumlah sekolah yang dapat diintervensi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tabel 3.71 Progres Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025

Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
100	25,00	12,50	10,00	10.00	10,00	67,50

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan renstra Badan POM Tahun 2025-2029 dengan baseline data yang baru. Indikator Jumlah desa pangan aman merupakan indikator yang telah ada di tahun sebelumnya namun cara penetapan target tahun 2025 berbeda dengan target tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

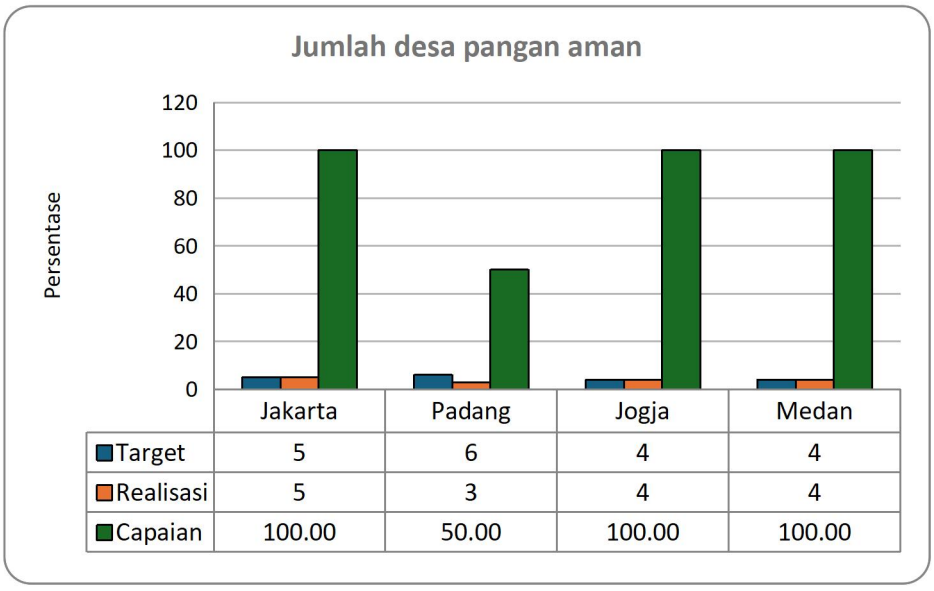
Tabel 3.72 Perbandingan Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	10,00	3,00	30,00	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah desa pangan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 10, maka capaian dari realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029, namun masih perlu upaya keras.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Grafik 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah desa pangan aman Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2025 yang tidak mencapai target hanya BBPOM di Padang.

5. **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja**

Pelaksanaan program Desa Pangan Aman Tahun 2025 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Kondisi pemblokiran anggaran sehingga pada awalnya jumlah desa yang diintervensi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada dan berharap terjadi relaksasi anggaran untuk pencapaian target pada semester 1.

b. Hingga akhir tahun tidak terdapat relaksasi anggaran sama sekali sehingga target tidak dapat dicapai.
c. Perlengkapan kader keamanan pangan desa (seperti rompi kader) tidak dapat diberikan karena anggaran yang tidak tersedia. Pemberian rompi kader dapat menjadi salah satu motivasi/penyemangat para kader dalam melakukan sosialisasi kepada komunitas desa.
d. Pemberian rapid test kit keamanan pangan tidak lagi diberikan kepada sekolah karena tidak ada anggaran yang tersedia sehingga hal ini tidak dapat dioptimalkan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah
e. Efisiensi anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran untuk melakukan pertemuan tatap muka sehingga pengawalan program desa yang biasanya dilakukan secara luring dengan penambahan materi bagi kader keamanan pangan desa dan komunitas desa tidak dapat dilakukan.
f. Pengawalan desa madya dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh perwakilan desa intervensi dan telah didapat hasil terkait kelanjutan program desa pangan aman di masing -masing desa.
g. Fasilitasi kepada komunitas desa tidak dapat dilakukan karena anggaran tidak tersedia sehingga pendampingan terhadap Komunitas dan UMK Pangan Olahan tidak dapat optimal dilakukan oleh kader.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.73 Rekomendasi perbaikan kinerja inidikator jumlah desa pangan aman

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

Jumlah desa pangan aman	Kondisi efisiensi anggaran dan tidak ada relaksasi hingga akhir tahun sehingga pelaksanaan program hanya dapat dilakukan 50% dari target dan beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai timeline	Anggaran pelaksanaan program agar dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan	- Perlu ada penekanan pentingnya replikasi desa pangan aman kepada pimpinan daerah. Jika replikasi dibebankan pada desa intervensi seperti yang telah dilakukan sebelumnya sulit untuk direalisasikan. Jika berdasarkan komitmen pimpinan daerah untuk replikasi desa pangan aman diharapkan replikasi dapat terealisasi di desa - desa lainnya. - Pelaksanaan program kedepannya agar dapat didukung dengan anggaran yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. - Mendorong Pemerintah Daerah agar dapat memastikan keberlanjutan program dapat tetap berjalan secara mandiri setelah pelaksanaan intervensi selesai.	Desember 2026	Y	1. O-03 2. S-02 3. S-03	1. Pemilihan kader pada Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang tidak tepat . 2. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan tidak dilanjutkan setelah berakhirnya intervensi. 3. Pemahaman kader keamanan pangan kurang optimal terhadap materi yang disampaikan oleh petugas.

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

   a. Pelaksanaan program diupayakan dapat memberikan dampak kepada desa/nagari seperti dengan memberdayakan kader keamanan pangan untuk membuat konten edukasi yang diposting di media sosial Balai Besar POM di Padang, sehingga diharapkan keterlibatan kader dapat memberikan rasa lebih dan semangat untuk terus memberikan edukasi kepada komunitas.

   b. Peran kader yang aktif dalam melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai momen kegiatan seperti rembug stunting untuk menyebarluaskan informasi terkait keamanan pangan.

   c. Untuk pemerataan informasi keamanan pangan, BBPOM di Padang melakukan inovasi pengembangan program dengan melaksanakan Sosialisasi Program Desa Pangan Aman kepada nagari non intervensi yang ada di Kabupaten Solok. Dari hasil sosialisasi program yang dilakukan terdapat 5 desa/nagari yang akan melakukan replikasi program dengan pemanfaatan dana desa.

C. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah

segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Cara Perhitungan dan formula

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masing :

- Forum Advokasi Komitmen Pemda = 25%
- Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar = 25%
- Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar = 20%
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi = 20%
- Pengawalan = 10%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.74 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	1.00	1.00	100.00	100.00	Baik

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh dengan kategori baik.

Pelasksanaan kegiatan dengan target 100% dapat tercapai dengan baik melalui seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana sesuai target, mulai dari kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor pasar, Bimtek dan

Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, Pengawalan Pasar yang telah diintervensi sebelumnya serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi.

Tabel 3.75. Progres Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025

Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00

2. Perbandingan Realisasi Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan indikator yang telah ada di tahun sebelumnya namun cara penetapan target tahun 2025 berbeda dengan target tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

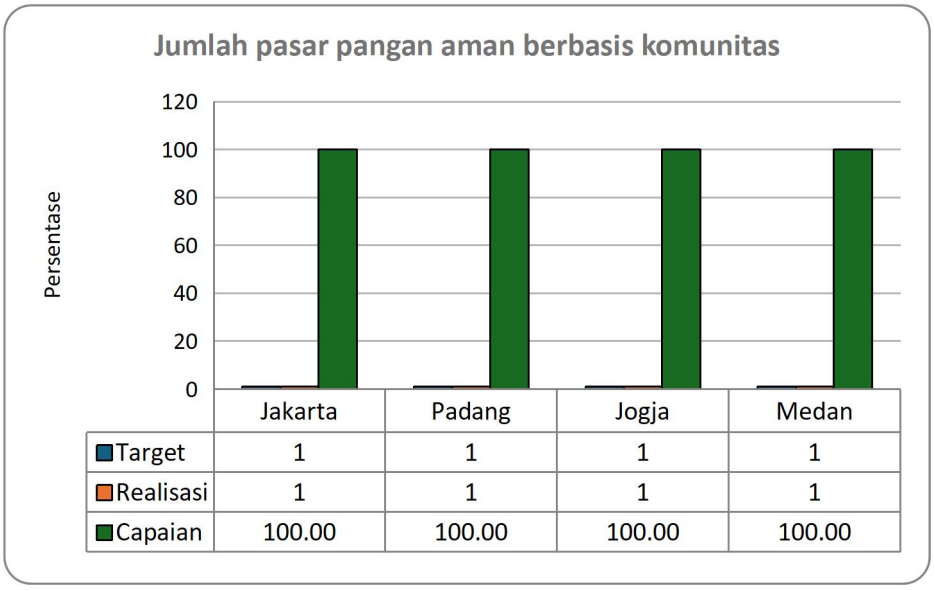
Tabel 3.76 Perbandingan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	50,00	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 2, ika dibadingkan dengan realisasi Tahun 2025 maka target akhir Renstra belum tercapai dengan capaian 50% dan perlu upaya keras.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Grafik 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 BBPOM di Padang sama dengan UPT lainnya dalam satu klaster ini.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

a. Pelaksanaan tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah terlaksana untuk seluruh tahapan, hal ini ditunjang dengan koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan petugas pasar dan instansi terkait sehingga dapat dilaksanakan sesuai target.

b. Penyusunan perencanaan program telah disesuaikan dengan tahapan program kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dari unit pengampu.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.77 Rekomendasi perbaikan kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan dilakukan dengan edukasi melalui media sosial (karena keterbatasan anggaran) dirasa kurang efektif untuk komunitas yang tidak memiliki android	Anggaran pelaksanaan program agar dapat diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan sosialisasi secara langsung (bukan media sosial) kepada komunitas pasar karena tidak semua komunitas memilik android atau bahkan tidak mengenal media sosial	- pela	Desember 2026	Y	1. O-03 2. S-02 3. S-03	1. Pemilihan kader pada Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang tidak tepat . 2. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan tidak dilanjutkan setelah berakhirnya intervensi. 3. Pemahaman kader keamanan pangan kurang optimal terhadap materi yang disampaikan oleh petugas.

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan keamanan pangan dilakukan dengan pemberdayaan komunitas pasar melalui penyebaran konten edukasi dan pengawasan Cek KLIK Keamanan Pangan terhadap pangan yang beredar di lingkungan pasar oleh petugas dan komunitas pasar. Namun, penyebaran konten edukasi ini dapat menjadi kendala bagi komunitas yang tidak memiliki android.

b. Seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas telah terlaksana sesuai target pelaksanaan yang telah ditetapkan melalui komunikasi dan kooordinasi yang baik dengan petugas pasar dan OPD terkait.

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN.

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK umkm yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMK Pangan Olahan adalah (a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, dan (b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Kategori yang didampingi untuk UMKM OBA adalah (a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar; (b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK); (c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam; (d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap; (e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan (f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Obat Bahan Alam yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM obat tradisional, Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator,

.

Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kategori UMKM yang didampingi untuk UMKM Kosmetik adalah (a) UMKM yang memproduksi kosmetik; (b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*); (c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan (d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Tahapan Pendampingan UMK Kosmetik yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMKM Kosmetik, Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, Sertifikasi dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cara Perhitungan dan formula

Perhitungan Target Tahunan (B12)

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB +Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.78 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persen	15.85	18.29	115.39	110.00	Tidak Dapat Disimpulkan

.

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 adalah 18,29 % bila dibandingkan dengan target 15,85 %, maka capaian yang diperoleh adalah 115,39 % dan dinormalisasi 110 %. capaian mendapatkan kategori tidak dapat disimpulkan. Capaian yang melebihi target ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah UMKM yang didampingi. Pada awal Tahun 2025, pendampingan UMKM ditargetkan kepada 13 sarana. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tambahan 2 UMKM kosmetik yang mengajukan permohonan pendampingan terkait layanan rekomendasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), sehingga total UMKM yang didampingi menjadi 15 sarana. Realisasi penerbitan rekomendasi Sertifikat Penerapan CPKB yang melebihi target berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pendampingan dengan target 13 UMKM, dengan rincian 11 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM OBA dan 1 UMKM Kosmetik.

Tahapan kegiatan pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan adalah 1) KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan secara daring pada bulan Maret 2025; 2) Penetapan target UMK pangan olahan setelah dilakukan seleksi terhadap UMKM di 9 Kabupaten/Kota. Penetapan dalam bentuk SK Kepala Balai Besar POM di Padang pada bulan Maret 2025 dan telah ditetapkan pendampingan terhadap 11 UMK Pangan Olahan dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan; 3) Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai tindak lanjut Sinergi Program OTA dan SAPA UMK tahun 2025. Bimtek CPPOB diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 Mei 2025 di Aula Balai Besar POM di Padang dengan mengundang 18 UMKM Pangan; 4) Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB terhadap 11 UMKM Pangan baik secara onsite ataupun desk pendampingan (April – Desember 2025). Pendampingan berupa konsultasi Dokumen Mutu, Desk konsultasi penganjuan IP CPPOB dan Registrasi Pangan Olahan. Dari kegiatan pendampingan pangan olahan tahun 2025, 11 pelaku usaha telah mampu menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan diterbitkannya PB-UMKU Izin Penerapan CPPOB. Pada tahun 2025 ini Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan produk rendang dalam rangka rekomendasi IP PMR terhadap 3 pelaku usaha rendang di sarana produksi Sentra Rendang Padang.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM OBA berupa : 1) Penetapan target UMKM obat tradisional terhadap 1 UMKM pada bulan Februari 2025; 2) Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator yang dilaksanakan dengan cara konsultasi

langsung pelaku usaha dengan fasilitator OBA; 3) Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator, fasilitasi pendampingan dan bimbingan UMKM OBA telah dilaksanakan pada pelaku usaha yang sedang mengajukan CPOTB Tahap 2, sekaligus mengikuti program Nuansa Direktorat Pengawasan Obat Tradisional. Bimbingan, fasilitasi dan pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator telah dilaksanakan dan drafting rekomendasi telah diajukan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik (April – September 2025); 4) Sertifikasi CPOTB Tahap 2 (September 2025). Dari kegiatan pendampingan terhadap UMLM OBA tahun 2025, 1 pelaku usaha telah mampu menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dengan diterbitkannya PB-UMKU Sertifikat CPOTB Tahap 2.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pendampingan terhadap UMKM Kosmetik berupa : 1) Penetapan target UMKM Kosmetik terhadap 1 UMKM pada bulan Februari 2025; 2) Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator yang dilaksanakan dengan cara konsultasi langsung pelaku usaha dengan fasilitator Kosmetik; 3) Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator, (April – September 2025); 4) Sertifikasi CPKB (September 2025). Pada akhir tahun dibulan Oktober – Desember 2025 terdapat 2 UMKM Kosmetik yang telah didampingi dari tahun 2024 mampu melakukan sertifikasi CPKB sehingga telah diterbitkan rekomendasi sertifikat CPKB terhadap 2 UMKM Kosmetik tersebut. Dari kegiatan pendampingan terhadap UMLM OBA tahun 2025, 3 pelaku usaha telah mampu menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dengan diterbitkannya PB-UMKU Sertifikat CPOTB Tahap 2.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan merupakan indikator dengan cara perhitungan baru di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

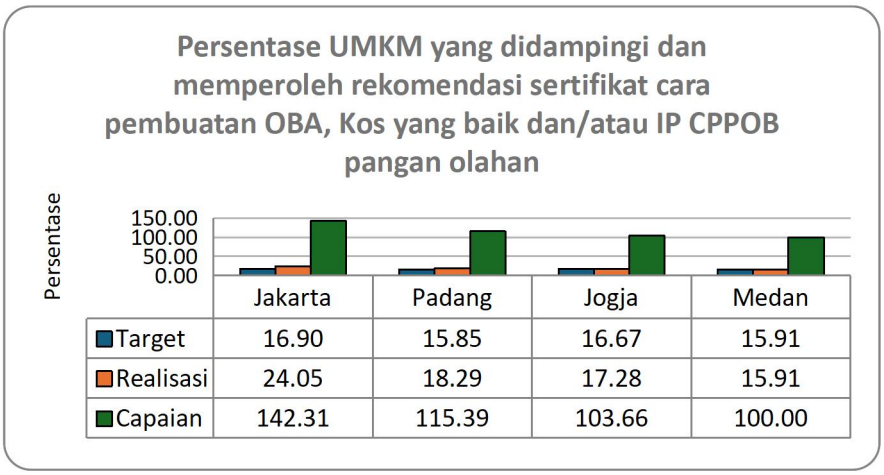
Tabel 3.79 Perbandingan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	18,29	18,29	Perlu Upaya Keras

Target Renstra tahun 2025 untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 15,85 %, sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 18,29 %, maka realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 telah melewati target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir Target akhir Renstra (Tahun 2029) yaitu 100 %, maka masih diperlukan upaya keras agar dari hasil akumulasi target dari tahun 2025 hingga 2029 akan dapat tercapai menjadi 10 %.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	16.90	15.85	16.67	15.91
Realisasi	24.05	18.29	17.28	15.91
Capaian	142.31	115.39	103.66	100.00

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2025 BBPOM di Padang berada di peringkat kedua stelah BBPOM Jakarta.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

Pencapaian kinerja atau penyebab keberhasilan adalah:

a. BBPOM di Padang sudah menerapkan Program Layanan Si Jempol bagi UMKM sejak tahun 2017. Layanan Si Jempol terbentuk karena meningkatnya antusias masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendaftaran izin edar obat dan makanan baik dalam permintaan informasi secara langsung melalui layanan publik ataupun melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Padang.

b. Perubahan dan regulasi yang memberikan kemudahan dalam memperoleh izin edar, sehingga UMKM lebih bersemangat untuk mengurus izin edar produknya.

c. Kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan turut memfasilitasi UMKM dalam pengurusan izin edar turut memberikan fasilitas pendampingan GMP.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.80 Rekomendasi perbaikan kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pelaku usaha kesulitan penggunaan aplikasi dalam pengajuan sertifikasi IP CPPOB/CPOTB/ CPKB	Merencanakan konsultasi/desk sertifikasi bagi pelaku usaha	Melaksanakan konsultasi/desk sertifikasi bagi pelaku usaha	April - Oktober 2026	Y	O-14	Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu.

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh:

a. Pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan, OBA dan kosmetik dalam rangka penerapan CPPOB/CPOTB/CPKB dilakukan secara onsite dengan melakukan GAP assesmen kondisi awal sebelum dilakukan pendampingan, pendampingan selama pemenuhan GMP dan evaluasi setelah pendampingan serta konsultasi/desk pada pengajuan sertifikasi.

b. Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melaksanakan tahapan pendampingan UMKM. Beberapa instansi pemerintah daerah memiliki fasilitator yang dapat diberdayakan untuk mendampingi UMKM, diantaranya fasilitator UMKM Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, fasilitator di masing-masing Kecamatan di Kota Padang.

c. Program Pangan Goes to Campus (PAGC) yang melibatkan mahasiswa dalam melakukan pendampingan pada 3 sarana UMKM, dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan dokumen mutu dan proses pengajuan PB-UMKU secara online.

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

A. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian keberhasilan penyidikan kajahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Cara Perhitungan Dan Formula

: Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

.

Tabel 3.81 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persen	90.00	75.00	83.33	83.33	Cukup

Berdasarkan pembobotan tersebut diatas realisasi nilai tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada tahun 2025 adalah 75,00%, bila dibandingkan dengan target 90%, maka capaian yang diperoleh adalah 83,33% dengan kategori cukup. Pada penetapan target IKK tahun 2025 sebesar 90,00 % dan perkara yang diproses projustisia sebanyak 4 perkara sedangkan 1 perkara carry over tidak diperhitungkan lagi karena sudah diterbitkannya SP3 pada TW III.

Pada tahun 2025 ini, perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU sebanyak 4 Perkara dengan tahap proses penyidikan; 2 perkara sudah tahap II dan 1 perkara P21 dan 1 perkara SPDP.

Tabel 3.82 Hasil Perhitungan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025

Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
4		1		0,15				1		0,85	2		2	75,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT merupakan indikator yang telah ada di tahun sebelumnya namun cara perhitungan realisasi tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.83 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

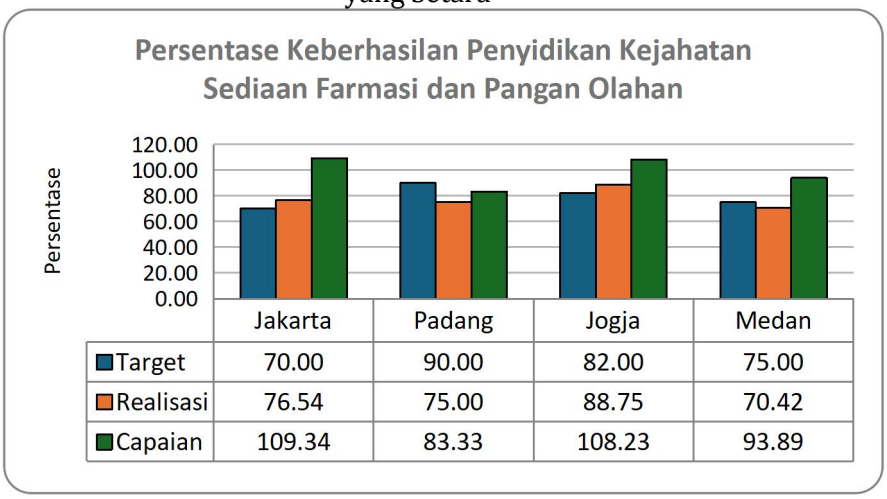
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	CAPAIAN

			%	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	75,00	79,79	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 79,79% termasuk kategori Akan Tercapai. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan kerja dengan menyelesaikan penyidikan perkara sampai ke proses tahap II dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	70.00	90.00	82.00	75.00
Realisasi	76.54	75.00	88.75	70.42
Capaian	109.34	83.33	108.23	93.89

Berdasarkan data perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan UPT lain yang setara dapat disimpulkan bahwa capaian kegiatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta (109,34%), diikuti oleh Jogjakarta (108,23%), BBPOM di Medan (93,89%), dan BBPOM di Padang (83,33%). Hal ini disebabkan target indikator BBPOM padang yang tinggi (90%) dan 2 perkara belum bisa diselesaikan karena DPO.

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Penurunan nilai persentase Keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan disebabkan oleh tidak semua perkara yang dapat diselesaikan sampai proses tahap II karena tersangka/saksi melarikan diri. Saksi/tersangka membaca pola penyidik karena tidak ditahan, tersangka tidak dilakukan penahanan sehingga tersangka bisa pergi dengan bebas.

Adanya rasa ketakutan tersangka penahanan yang dilakukan oleh jaksa walaupun BBPOM di Padang tidak melakukan penahanan.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.84 Rekomendasi perbaikan kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersangka dan terlapor melarikan diri sehingga proses penyidikan terhenti, perkara belum bisa diselesaikan pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.	Koordinasi dengan korwas Polda Sumbar untuk pencarian tersangka dan terlapor sehingga dapat dihadirkan menghadap penyidik.	Terbitnya DPO (daftar pencarian orang dan DPS (daftar pencarian saksi)	Desember 2026	Y	H-01	Terhentinya proses penyidikan karena tersangka dan terlapor tidak memenuhi panggilan penyidik

7. Analisis Program/kegiatan yang Tidak Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hambatan atau kendala yang tidak mendukung tercapainya keberhasilan indikator Penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif antara lain:

a. Modus pelaku kejahatan sering berubah-rubah sehingga untuk memproses projustisia perlu teknik dan taktik yang mendalam.
b. Pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat membaca pola pengawas/petugas.
c. Ketidak pedulian pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan ilegal.
d. Perkembangan teknologi informasi terlihat dari maraknya peredaran sediaan farmasi dan pangan ilegal terutama dimedia on-line.
e. Saksi dan tersangka tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sehingga perkara tidak bisa diproses lebih lanjut sampai tahap II.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DIBIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu

PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Cara Perhitungan Dan Formula

: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan

rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.85 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persen	90.00	95.00	105.56	105.56	Sangat Baik

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 adalah 100,56% bila dibandingkan dengan target 90%, maka capaian yang diperoleh adalah 105,56% dan mendapatkan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator baru yang ada di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

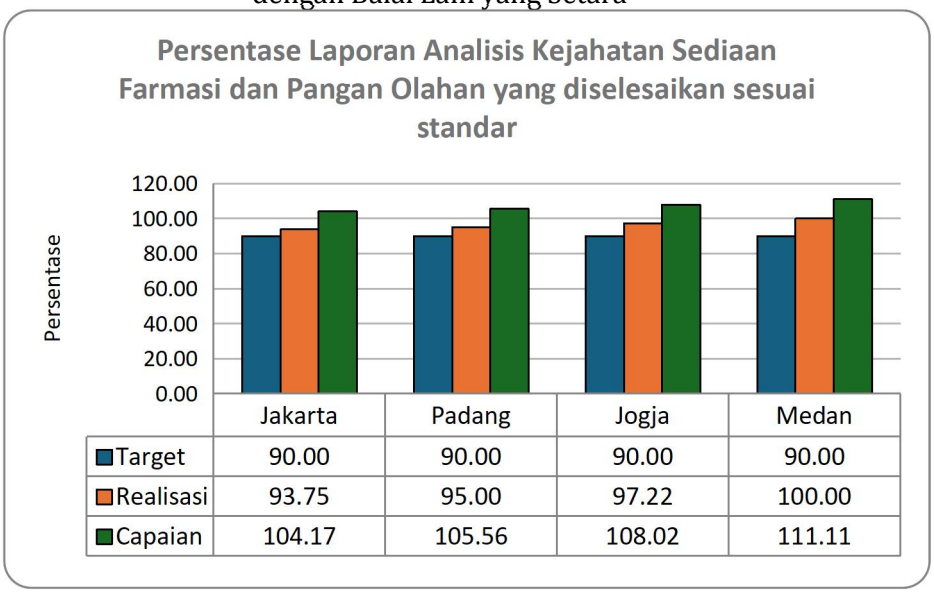
Tabel 3.86 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	95,00	101,06	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 94%, maka realisasi Tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 95% termasuk kategori tercapai/melampaui.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standarTahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



	Jakarta	Padang	Jogja	Medan
Target	90.00	90.00	90.00	90.00
Realisasi	93.75	95.00	97.22	100.00
Capaian	104.17	105.56	108.02	111.11

Berdasarkan data perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan UPT lain yang setara dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 yang tertinggi adalah BBPOM di Medan (111,11%), diikuti oleh Jogjakarta (108,02%), BBPOM di Padang (105,56%), dan BBPOM di Jakarta (104,17%).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Petugas yang kompeten telah melakukan pelaporan patroli siber dan profiling siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara tepat waktu dan didukung oleh sarana dan prasarana informasi teknologi yang mumpuni. Untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi analisis yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal telah dilengkapi pada Triwulan IV, terdapat 9 (sembilan) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Padang. Rekomendasi tindak lanjut tersebut merupakan hasil kegiatan dari beberapa fungsi seperti fungsi pemeriksaan, fungsi informasi dan komunikasi, dan fungsi pengujian. Penyusunan laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

ilegal telah selesai disusun dan dilaporkan, hal ini didukung oleh petugas yang mumpuni dan kompeten dalam mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan penulisan makalah.

6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 3.87 Rekomendasi perbaikan Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	anggaran yang tersedia untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal dan penyusunan laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sangat terbatas	Memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk tetap maksimal mencapai pelaksanaan kegiatan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk tetap maksimal mencapai pelaksanaan kegiatan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Januari - Desember 2026	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang kinerja pada tahun 2025 adalah patroli siber dan profiling siber yang dilaksanakan terencana dan tepat waktu. Untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi analisis yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal melibatkan beberapa fungsi seperti fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi semua rekomendasi yang diberikan. Untuk penyusunan laporan analisis kejahatan obat dan makanan diperlukan pengumpulan bahan keterangan yang dapat melibatkan lintas sektor dan data-data yang mendukung untuk laporan tersebut.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran ini diwujudkan melalui 1 indikator utama yaitu :

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);

5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Cara Perhitungan dan formula

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202

Tabel 3.88 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025

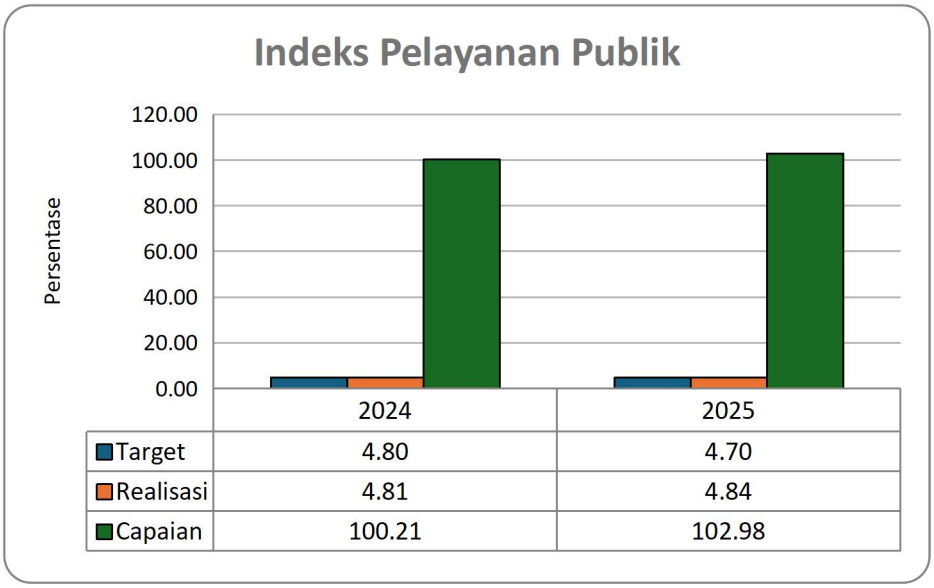
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	Persen	4.70	4.84	102.98	102.98	Sangat Baik

Target Indeks Pelayanan Publik ditetapkan pada akhir tahun yaitu sebesar 4,7 dan target ini telah dapat dicapai pada tahun 2025 sebesar 4,84 dengan capaian 102,98%. Dengan nilai ini maka Balai Besar POM di Padang telah dikategorikan Pelayanan prima.

Pada tahun 2025 telah diberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat dan pelaku usaha yaitu: 12 Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; 246 Layanan Pengujian Obat dan Makanan (Sampel yang berasal dari pihak ke-3); 299 layanan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan; 3 layanan Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan; 2 Layanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Evaluasi CAPA dalam Rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); 1 layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertahap; 3 layanan Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB); 2 layanan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika; 15 layanan Penerbitan Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya



	2024	2025
Target	4.80	4.70
Realisasi	4.81	4.84
Capaian	100.21	102.98

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (4.81%) maka Indeks Pelayanan Publik UPT mengalami peningkatan sebesar 0,03% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (100,21%%) maka terdapat kenaikan sebesar 2,77%. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

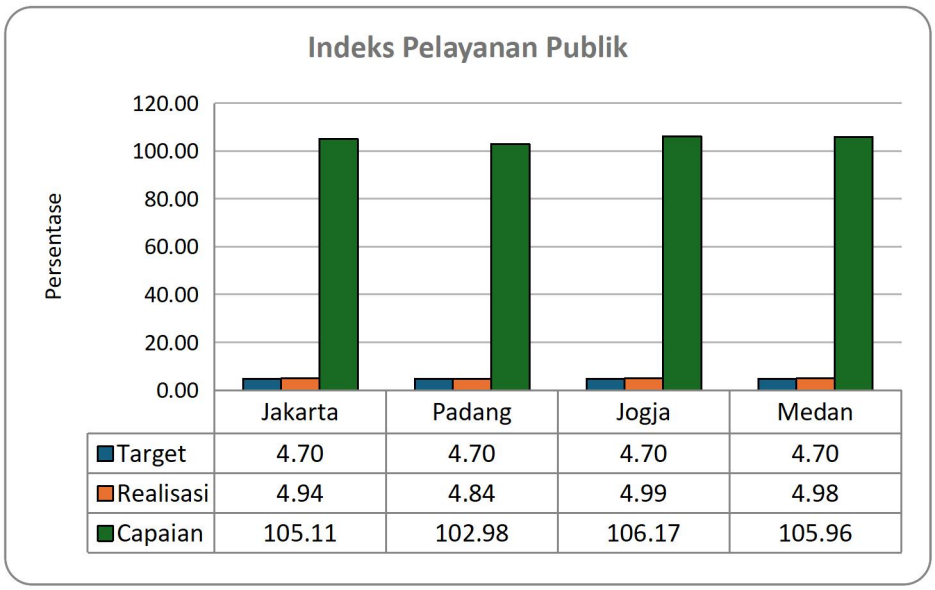
Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 terhadap Target Akhir Rensftra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,84	98,78	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Indeks Pelayanan Publik UPT adalah 4.90, maka realisasi Tahun 2025 (4.84) belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 98,87% termasuk kategori akan tercapai. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan sehingga target akhir Renstra dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik tahun 2025 BBPOM Padang adalah yang terendah dari BBPOM Jogja, Medan, dan Jakarta namun taregt indikator tetap tercapaia dan capaian di atas 100.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Selalu melaksanakan dan pemantauan kegiatan yang telah direncanakan di 6 aspek pendukung Indeks Pelayanan Publik secara rutin yaitu Kebijakan Pelayanan Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistim Informasi dan Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi
b. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik, seperti pelatihan pelayanan publik prima dan pelatihan penanganan pengaduan menjadi upaya BBPOM di Padang untuk memastikan bahwa SDM pelayanan publik memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
c. Sudah adanya SK terkait Kode Perilaku petugas layanan, penandatangan Pakta Integritas dan Benturan Kepentingan penerapan budaya pelayanan untuk memberikan solusi terbaik bagi pengguna layanan, pemberian motivasi dalam peningkatan kinerja baik .
d. Sarana dan prasarana penunjang layanan telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ruang pelayanan yang nyaman dan dilayani oleh petugas yang kompeten,
e. Untuk sistim informasi dan pelayanan publik, BBPOM di Padang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui tatap muka di kantor balai dan di Mal Pelayanan Publik di 2 Kota yaitu di MPP Kota Padang dan MPP Kota Pariaman. Kota Padang melakukan layanan sertifikasi dan layanan pengaduan dan informasi di Mall Layanan Publik Kota Padang 2 kali seminggu tiap hari Senin dan Kamis. MPP Kota Pariaman Melakukan layanan sertifikasi dan layanan pengaduan dan informasi di Mall Layanan Publik Kota Pariaman 1 kali sebulan pada hari Jumast minggu ketiga.
f. Layanan tidak langsung melalui telefon, email, wahtsapp, website dan media sosial. Semua sarana layanan bisa diakses oleh pengguna layanan serta dilengkapi aplikasi lain yang terhubung dengan website antara lain SP4N-LAPOR, SIPPN dan aplikasi lain yang membantu terlaksanan.
g. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional. Dengan mengimplementasikan berbagai kanal pelayanan informasi dan pengaduan melalui LAPOR PAK, SP4N_LAPOR, SIPPN, telepon, email, whatsapp, media sosial, dan loket pelayanan publik
h. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) tiap bulan dan dipublikasikan secara transparan, dan penerapan digitalisasi BBPOM di Padang berupaya untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.90 Rekomendasi perbaikan kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Indeks Pelayanan Publik UPT	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan September 4.00 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) September : 99.88 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Januari-Desember 2026 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Januari - Desember 2026 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Januari-Desember 2026 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Januari-Desember 2026	1. Untuk Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulanJanuari-Desember 2026 2. Untuk Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Januari-Desember 2026 3. Untuk Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Januari-Desember 2026 4. Untuk Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Januari-Desember 2026	Januari-Desember 2026	Y	1. O-04 2. R-01 3. O-12	1. Pelayanan tidak optimal karena petugas MPP terbatas 2. Informasi publik tidak valid dan tidak mutakhir. 3. Kesalahan pemilihan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha) saat pengajuan IP CPPOB

7. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

a. Program pelayanan di luar kantor yaitu di Mal Pelayanan Publik sebagai bentukkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTS Kota Padang dan Kota Pariaman. Layanan yang dilaksanakan luar kantor ini untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat dan sebagai upaya pemenuha nilai IPP pada unsur konsultasi dan pengaduan serta aspek sistim informasi pelayanan publik pada kegiatan langsung tatap muka.

b. Pembentukan Tim AOC BBPOM di Padang dengan berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan aspek profesionalisme SDM, aspek SIPP serta aspek Konsultasi dan Pengaduan. Kegiatan CFD yang selalu berkolaborasi dengan team AoC.

c. Inovasi yang terus dilaksanakan dan dikembangkan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas antara lain inovasi Simpelin Aja.

d. Melakukan sosialisasi pelayanan publik melalui berbagai metode dan media. Akses pelayanan publik dipublikasi baik melalui kegiatan Komunikasi, Informasi,

dan Edukasi) yang dilakukan maupun melalui media seperti media cetak, media luar ruang (videotron), media online, media sosial, dan subsite.

e. Pelaksanaan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Padang sekaligus sebagai wadah aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di BBPOM di Padang

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja kegiatan, yaitu :

A. Nilai Pembangunan ZI UPT
B. Nilai AKIP UPT
C. Nilai Kinerja Anggaran
D. Indeks Manajemen Risiko

Dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,53% dengan capaian dinormalisasi sebesar 99,53% dengan kategori baik.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	Nilai	90.00	90.21	100.23	100.23	Sangat Baik
		26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Nilai	82.00	80.54	98.22	98.22	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai	5.00	5.00	100.00	100.00	Baik
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Persen	2.95	2.94	99.66	99.66	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VIII sebagai berikut :

A. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan .

Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Perhitungan dan formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Target kinerja IKK Nilai pembangunan ZI diukur pada akhir tahun.

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

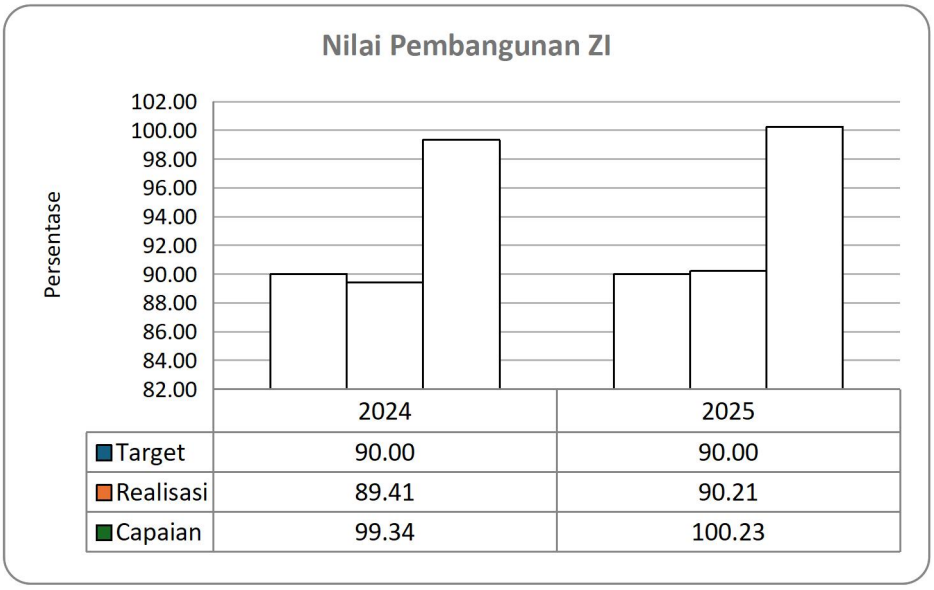
Tabel 3.91 Capaian Persentase Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai	90.00	90.21	100.23	100.23	Sangat Baik

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada tahun 2025 adalah 90.21 bila dibandingkan dengan target 90.00, maka capaian yang diperoleh adalah 100,23% dan mendapatkan sangat baik.

2. **Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Grafik 3.26 Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya



Bila dibandingkan dengan tahun 2024 (89,41%) maka Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM mengalami peningkatan sebesar 0,8% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (99,34%) maka terdapat kenaikan sebesar 0,89%. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 90, target ini berlaku untuk UPT yang telah mendapatkan predikat WBBM yang telah dapat dicapai pada tahun 2025.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

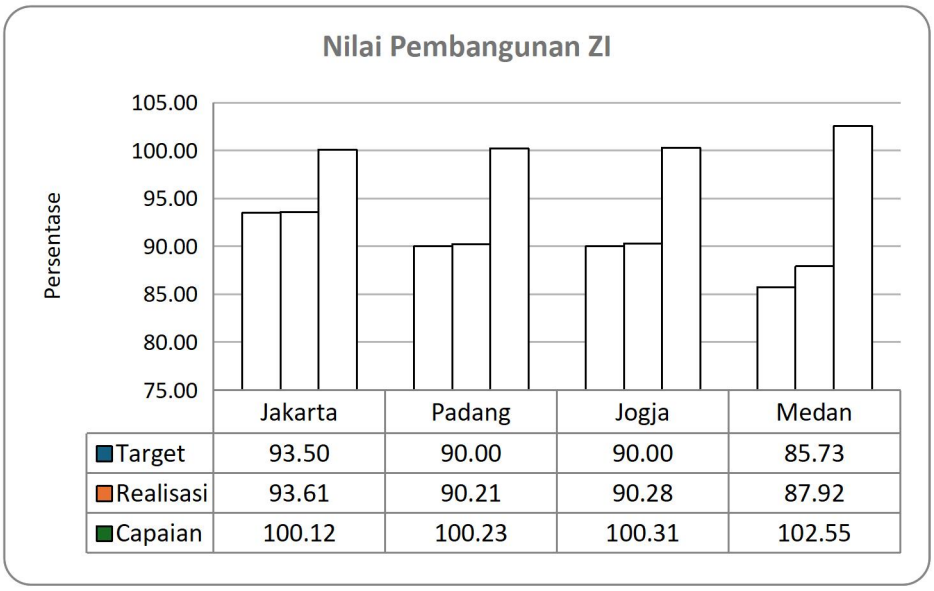
Tabel 3.92 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,21	100,01	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM adalah 90.20, maka realisasi Tahun 2025 (90.21) telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 100,01% termasuk kategori tercapai/melampaui. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target akhir tahun Renstra mejadi lebih tinggi dari realisasi Tahun 2025.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian KinerjaNilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkak grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Padang . tahun 2025 berada di bawah BBPOM Jogja namuan target indikator telah tercapaian dan capaian indikator juga di atas 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Tercapainya target kinerja Nilai Pembangunan ZI karena penilaian terhadap komponen pengungkit Memenuhi Syarat dengan nilai disetiap zona juga memenuhi syarat. Untuk Penilaian komponen hasil memenuhi syarat dengan hasil penilaian terkait Birokrasi Bersih dan Akuntabel serta pelayanan Publik yang Prima juga memenuhi syarat. Keberhasilan ini disebabkan antara lai :

a. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI telah dilakukan per bulan, sehingga hasil evaluasi dapat segera ditundaklanjuti.
b. Peranan AOC dalam memberikan motivasi kepada pegawai turut menambah pengetahuan tentang reformasi birokrasi.
c. Telah melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan pedoman untuk semua zona sehingga memenuhi indikator sebagai Wilayah berpredikat WBBM.
d. Tingginya integritas pegawai BBPOM di Padang sehingga pelayanan publik di BBPOM di Padang memenuhi indikator Birokrasi bersih dan melayani dan tidak terdapatnya kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya indikator bersih dan Melayani.
e. Tingginya tingkat kepuasan Masyarakat kepada Balai Besar POM di Padang yang dibuktikan dengan nilai Survei Persepsi Kualitas pelayanan (SPKP) sebesar 3,86 dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,9

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.93 Rekomendasi perbaikan kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/ Balai POM)	1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan ZI belum sepenuhnya memada. 2. indeks berakhlak Balai Besar POM di Padang tahun 2024 sebesar 60,50% masih berada dibawah rata-rata indeks berakhlak BPOM sebesar 61,10%; . 3. Belum dilengkapi monitoring dan evaluasi implementasi inovasi hingga analisis dampak 4. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM dan pemberian pelayanan publik. 5. belum terdapat pelaporan atas implementasi kebijakan tersebut yang disusun secara periodik serta belum dapat menunjukkan adanya proses monitoring dan evaluasi tindak lanjut atau status tanggapan atas permintaan informasi yang diterima. 6. Mutasi dan rotasi pegawai belum mempertimbangkan standar kompetensi jabatan. 7. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	1. …empurnakan …toring dan evaluasi …dap pembangunan …tara lain …an menambahkan …masi berupa …ine pelaksanaan …penanggung …b kegiatan, …elasan seluruh …batan atau kendala …dap rencana kerja …belum terealisasi …indak lanjutnya …n dokumen …toring dan evaluasi …melibatkan …inan unit kerja …n pelaksanaan …toring dan …asi; …elakukan upaya …bangunan budaya …dan pola pikir serta …yusun …egi untuk …ngkatkan indeks …khlak Unit Kerja; …endorong …bangunan dan …rapan inovasi pada …uh area perubahan …an memperhatikan …ksanaan inovasi …efektif dan efisien …kukan monitoring …evaluasi …ementasi secara …ala serta menyusun …sis dampak before- …penerapan inovasi; …elakukan monitoring …evaluasi terhadap …nfaatan teknologi	1. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI antara lain dengan menambahkan informasi berupa timeline pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, penjelasan seluruh hambatan atau kendala terhadap rencana kerja yang belum terealisasi dan tindak lanjutnya dalam dokumen monitoring dan evaluasi serta melibatkan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 2. Melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta menyusun strategi untuk meningkatkan indeks berakhlak Unit Kerja; 3. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan pelaksanaan inovasi yang efektif dan efisien dan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala serta menyusun analisis dampak	Januari - Desember 2026	Y	1. SDM-04 2. F-08 3. F-04 4.R-01	1. Manipulasi hasil pemeriksaan sarana oleh petugas. 2. Adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ke-3 karena telah ditunjuk sebagai Penyedia. 3. Pelaku usaha memberi suap kepada petugas untuk menguranggi / menghilangkan ketidaksesuaian. 4. Informasi publik tidak valid dan tidak mutakhir

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala; 8. Belum terdapat bukti keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja disertai dokumentasi yang memadai atas arahan/masukan/koreksian yang disampaikan. 9. Belum terdapay inovasi dalam pengendalian gratifikasi. 10. belum terdapat analisis dan/atau upaya yang dilakukan atas nihilnya pelaporan pengaduan masyarakat dan WBS . 11. Belum terlihat bukti implementasi dan monitoring kesesuaian pemberian layanan dengan standar pelayanan.	masi a berkala dan kukan tindak lanjut hasil evaluasi but; mbuat laporan bukaan informasi k secara periodik menyajikan lasan tindak lanjut status terhadap intaan informasi diterima; nyusun rencana ihan dan embangan betensi yang pertimbangkan pengelolaan kinerja wai untuk tiap wai; ningkatkan upaya n meminimalisir njangan kompetensi wai an standar betensi yang apkan baik betensi teknis, betensi jerial maupun betensi sosial ral, melalui ncanaan yang adai berdasarkan pengelolaan kinerja wai serta kukan toring dan evaluasi dap hasil embangan betensi dalam nnya dengan aikan kinerja secara ala; libatkan pimpinan kegiatan usunan ncanaan hingga ntauan apaian kinerja serta	before-after penerapan inovasi; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut; 5. Membuat laporan keterbukaan informasi publik secara periodik yang menyajikan penjelasan tindak lanjut atau status terhadap permintaan informasi yang diterima; 6. Menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk tiap pegawai; 7. Meningkatkan upaya dalam meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural, melalui perencanaan yang memadai berdasarkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja				

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dokumentasikan an/ masukan/ inan secara adai; elakukan analisis upaya atas nihilnya dan pengaduan arakat gai langkah untuk gidentifikasi potensi aikan layanan dan ngkatkan ivitas mekanisme aduan; gimplementasikan akan pemberian pensasi bagi rima layanan idak sesuai dengan dar pelayanan serta kukan monitoring suaian pemberian an dengan standar anan tersebut; elaksanakan nuous ovement dan ngkatkan kualitas n bangun ZI sehingga pu menciptakan kelola pemerintah bersih kuntabel serta anan publik yang a.	secara berkala; 8. Melibatkan pimpinan pada kegiatan penyusunan perencanaan hingga pemantauan pencapaian kinerja serta mendokumentasikan arahan/ masukan/ pimpinan secara memadai; 9. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya WBS dan pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan; 10. Mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan jika tidak sesuai dengan standar pelayanan serta melakukan monitoring kesesuaian pemberian layanan dengan standar pelayanan tersebut; 11. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.				

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang tercapainya target Pembangunan ZI BBPOM di Padang adalah :

a. Meningkatkan peranan agen perubahan dalam pembangunan ZI dengan program-program agen perubahan tahun 2025.
b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI secara rutin setiap bulan .
c. Melaksanakan sistem mutu terintergrasi meliputi kaji ulang dokumen, Audit internal, rapat tinjauan manajemen serta monitoring dan evaluasi implementasi SOP dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan.
d. Penggunaan aplikasi Sagalo sebagai wadah penyimpanan dokumen internal.
e. Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan secara online dan offline termasuk pelatihan mandiri melaui IDEAS.
f. Implementasi AKIP sesuai pedoman dan pengiriman laporan tepat waktu.
g. Peningkatan penguatan pengawasan dengan pembuatan Laporan SPIP, Benturan Kepentingan, Laporan Gratifikasi dan laporan lainnya sesuai pedoman dan dilaporkan tepat waktu serta penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan.
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan pelatihan bahasa Isyarat dan pengembangan inovasi “Simpelin Aja”

B. NILAI AKIP UPT

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja Internal dan (5) Capaian Kinerja.

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

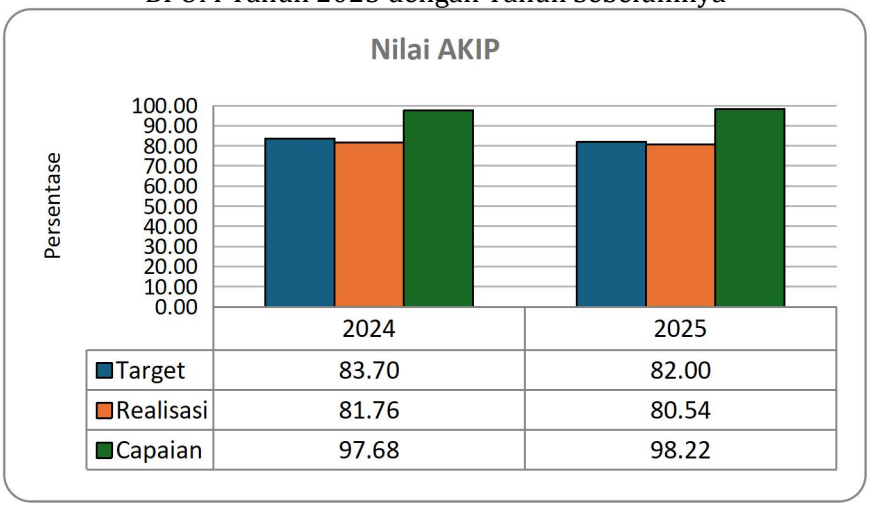
Tabel 3.94 Capaian Persentase Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai	82.00	80.54	98.22	98.22	Baik

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM pada tahun 2025 adalah 80.54 bila dibandingkan dengan target 82.00, maka capaian yang diperoleh adalah 98.22% dan mendapatkan kategori Baik.

2. **Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Grafik 3.28 Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya



	2024	2025
Target	83.70	82.00
Realisasi	81.76	80.54
Capaian	97.68	98.22

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (81,76%) maka Nilai AKIP UPT BPOM mengalami penurunan sebesar 1,36% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (97,68%) maka terdapat penurunan sebesar 0,54%.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

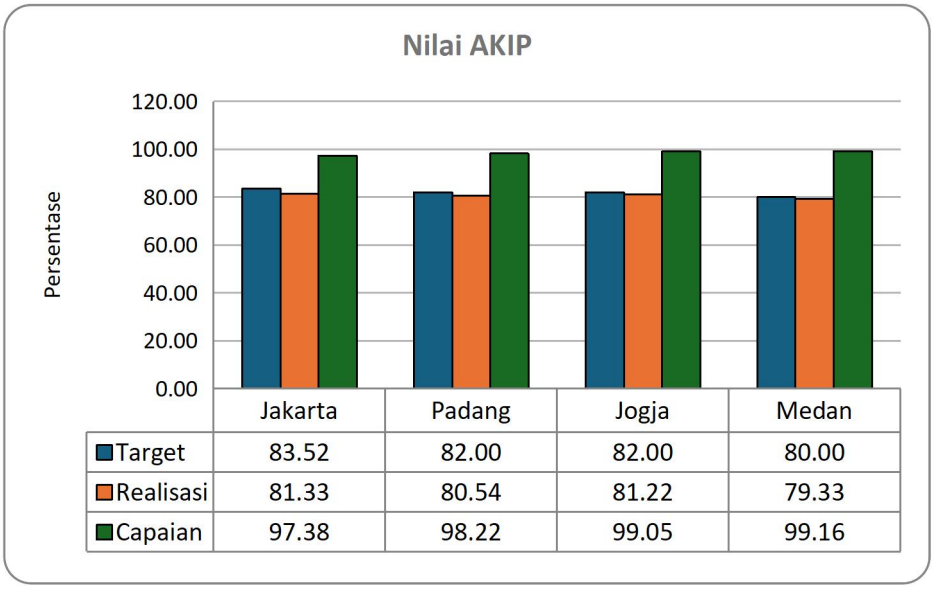
Tabel 3.95 Perbandingan Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	84,00	80,54	95,88	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai AKIP UPT BPOM adalah 84.00, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 95.88% termasuk kategori akan tercapai. Untuk ini perlu dilakukan perencanaan dan program-program yang akurat untuk tercapai target Renstra.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Grafik 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarkan grafik maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Nilai AKIP Tahun 2025 dalam satu klaster ini tidak ada yang targetnya tercapai dan semuanya mengalami penuruna

nilai dari tahun 2024. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Padang berada di bawah nilai BBPOM Jogja.

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penuranan Kinerja

Nilai AKIP BBPOM di Padang telah telah mendapatkan nilai A, namun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 serta mengalami penurunan dari tahun 2024. Nilai AKIP berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat menyatakan bahwa implementasi SAKIP Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Tabel 3.96. Rincian hasil evaluasi komponen nilai AKIP BBPOM di Padang

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	19,44
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,24	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	9,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	16,49	16,02
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	81,77	80,54
Predikat			**A**	**A**

Dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 oleh Inspektorat dan analisa yang telah dilakukan terdapat beberapa kekurangan yang menurunkan nilai AKIP :

a. Kertas kerja perhitungan penetapan target indikator tahun 2025 belum memadai dalam menetapkan target indikator termasuk analisis kenaikan/penurunan target.
b. Pada evaluasi akhir rencana strategis (renstra) tahun 2020-204 belum menyajikan capaian anggaran tahun 2020 sd 2024
c. Pada dokumen perencanaan kinerja/ kertas kerja MPH terdapat pegawai Balai Besar POM di Padang yang terlibat lebih dari 5 tim kerja.
d. Kertas kerja masih terpisah pada masing-masing penanggung jawab data dan belum terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara capaian kinerja dan kertas kerja

e. Terdapat perbedaan penyajian target kinerja pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim serta aplikasi SIMETRIS
f. Terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi simetris pada bbeberapa IKU
g. Terkait efisiensi anggaran masih kurang memadai penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya.
h. Matriks monitoring dan evaluasi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan belum seluruhnya menyajikan gambaran kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi dilaksanakan serta belum menunjukan berkesinambungan setiap triwulan.
i. Kurang akuratnya data yag disajikan pada laporan yaitu Terdapat perbedaan RATL dan waktu penyelesaian antara yang diinput pada simetris dengan Laporan Evaluasi Internal

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.97 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Perencanaan Kinerja: 1. Masih terdapat ketidaksesuaian pada. dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun. 2. Pada Kertas Kerja MPH dan MPH SIMAKIN, Indikator Kinerja Kepala Unit Kerja hanya dibagi hingga level Ketua Tim, tidak turun ke anggota tim, namun belum terdapat mekanisme pencapaian target indikator terseb.ut 3. pada dokumen perencanaan kinerja/ kertas kerja MPH terdapat pegawai Balai Besar POM di Padang yang terlibat lebih dari 5 tim kerja. Pengukuran Kinerja: 1. Kertas kerja capaian kinerja masih terpisah pada masing-masing penanggung jawab data dan belum terdokumentasi dengan baik. 2. Hasil pengukuran data	Perencanaan Kinerja: 1. Mengoptimalkan peran Tim Sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan pada dokumen perencanaan. 2. Menetapkan target kinerja dengan baik disertai dengan kertas kerja berdasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis. 3. Memastikan IKU Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading 4. Menyusun perencanaan kinerja/kertas kerja MPH dengan memperhatikan beban kerja masing-	Perencanaan Kinerja: 1. Menyusun SK Tim Sakip dan menyususn Dokumen Perencanaan dengan selaras. 2. Menyusun kertas kerja pentapan target kinerja berdasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis. 3. Memastikan IKU Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading 4. Menyusun perencanaan kinerja/kertas kerja MPH dengan memperhatikan	Januari - Desember 2026	Y	1. S-10 2. S-11 3. O-19 4. O-20 5.SDM-20 6. O-24	1. Ketidaktepatan dalam menetapkan target kinerja. 2. Ketidaktepatan dalam menetapkan target RAPK per bulan. 3. Monitoring kendala/hambatan dengan tindak lanjut dan rencana aksi tidak selaras 4. Pengiriman laporan tidak tepat waktu. 5. Terdapatnya kesalahan data pada Laporan kinerja interim. 6. Data Dukung LKE SAKIP tidak lengkap.

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	capaian kinerja belum seluruhnya didukung dengan kertas kerja perhitungan capaian kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan data sumber (raw data) yang telah dimanfaatkan agar memudahkan proses mampu telusur, cara perhitungan (pembilang dan penyebut), cut off data serta proses intervensi data sumber eksisting untuk mendukung proses pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan.. 3. Terdapat perbedaan penyajian target kinerja antar dokumen pengukuran kinerja pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim serta aplikasi SIMETRIS. Pelaporan Kinerja 1. Terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi simetris 2. Pada indikator kinerja yang belum tercapai (capaian <100%) belum terdapat pembahasan kendala/hambatan atas tidak tercapainya indikator tersebut. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 1. pada matriks monitoring dan evaluasi belum seluruhnya menyajikan gambaran kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi dilaksanakan serta belum menunjukan berkesinambungan setiap triwulan. 2. Terdapat perbedaan RATL dan waktu penyelesaian antara yang diinput pada simetris dengan LEI.	masing individu Pengukuran Kinerja: 1. Mendokumentasikan data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja dan memastikan data sumber capaian kinerja jelas serta mampu tertelusur. 2. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja. 3. Memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim. Pelaporan Kinerja: 1. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja. 2 Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan/atau Tahunan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi Akuntabilita Kinerja Internal: 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling	beban kerja masing-masing individu . Pengukuran Kinerja: 1. Mendokumentasikan data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja dan memastikan data sumber capaian kinerja jelas serta mampu tertelusur. 2. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja. 3. Memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim. Pelaporan Kinerja: 1. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja. 2 Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan/atau Tahunan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menggambarkan				

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan 2. Melakukan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan antara pelaporan pada Laporan Evaluasi Internal, aplikasi e-simetris dan laporan kinerja interim/tahunan.	upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi Akuntabilita Kinerja Internal: 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan 2. Melakukan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan antara pelaporan pada Laporan Evaluasi Internal, aplikasi e-simetris dan laporan kinerja interim/tahunan.				

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Melaksanakan rapat evaluasi triwulan dan bulanan membahas pencapaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
b. Peningkatan kompetensi tim Sakip dengan Pelatihan bimtek sakip yang diadakan oleh Roren secara daring dan luring serta pembelajaran mandiri melalui IDEAS
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan melakukan revisi RAPK terhadap target yang belum tercapai
d. Melakukan pengumpulan data kinerja menggunakan link bit.ly melalui memo dinas setiap bulan dan meningkatkan koordinasi antara tim monev bagian Tata Usaha dengan ketua tim IKU terkait
e. Melaksanakan SOP pengumpulan data kinerja dalam rekapitulasi pencapaian kinerja dan melaksananakan pengelolaan kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP yang ditetapkan Kepala BPOM
f. Segera melakukan perbaikan apabila ditemukan data realisasi Indikator yang keliru dan melakukan reviu berjenjang untuk meminimalkan kesalahan penyajian data target dan realisasi kinerja pada dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja sehingga dapat memastikan keselarasan data target kierja dan realisasi kinerja pada aplikasi simetris, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.

g. Memberikan reward dan punisment terhadap pencapaian IKK dan realisasi anggaran masing-masing fungsi.
h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian IKK dan melaksanakan tindak lanjut yang direkomendasikan sehingga target IKK yang belum tercapai dapat tercapai pada periode berikutnya
i. Membuat perencanaan target kinerja berdasarkan hasil realisasi indikator kinerja utama (IKU) tahun sebelumnya dan melakukan revisi target bulanan berdasarkan realisasi bulan sebelumnya.

C. NILAI KINERJA ANGGARAN

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1. Revisi DIPA (bobot 10%)
    2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
    3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
    4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
    5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
    6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
    7. Capaian Output (bobot 25%)
    8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
    1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun. Nilai EKA mencapai maksimal pada akhir tahun sedangkan nilai IKPA dihitung setiap bulan terhadap kepatuhan terhadap 8 pembentuk nilai IKPA.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.98 Capaian Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai	5.00	5.00	100.00	100.00	Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada tahun 2025 adalah 5 bila dibandingkan dengan target 5, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kategori Baik.

Tabel 3.99 Hasil Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025

JENIS	BOBOT	NILAI
IKPA	50%	96,90
EKA	50%	85,92
NKA		**91,41**
Nilai dikonversi menjadi 5		

2. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Anggaran tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan dalam penetapan target. Pada tahun 2025 target berupa dalam bentuk konversi atau kategori sedangkan pada tahun 2024 target dalam bentuk nilai hasil pembobotan pada IKPA dan EKA.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra**

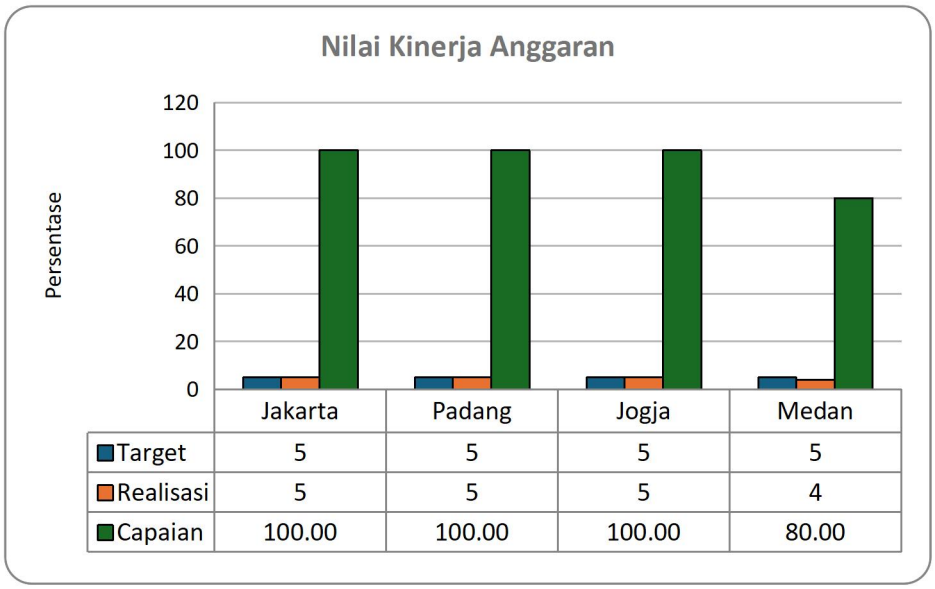
Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	Tercapai/melampaui

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM adalah 5, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 100% termasuk kategori tercapai. Untuk ini perlu dilakukan perencanaan dan program-program yang akurat untuk memeprtahankan tercapainya target Renstra.

4. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara**

Grafik 3.30 Perbandingan sRealisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun BBPOM di Padang sama dengan BBPOM Jakarta dan Jogja.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

Penyebab tercapainya indikator kinerja anggaran adalah:

1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi.

2. Menjaga Konsistensi RPD bulan yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.
3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW
4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu
2. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual
3. Melaporkan capaian output secara tepat dan tepat waktu.
4. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu
5. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.101 Rekomendasi perbaikan kinerja Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Niliai IKPA dan EKA belum maksimal	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual 6. Melaporkan capaian output secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual 6. Melaporkan capaian output secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	Januari - Desember 2026	Y	1. K-01 2. O-21 3. O-22 4. O-23	1. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. 2. Revisi anggaran pergeseran pagu melebihi batas maksimal dalam 1 semester. 3. Realisasi anggaran per triwulan tidak mencapai target triwulan yang ditetapkan oleh Kemenkeu. 4. Realisasi Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan.

7. **Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah:

a. Bimtek atau sosialisasi IKPA dan EKA sehingga mengetahui cara penilaian IKPA dan EKA.

b. Monitoring, target realisasi anggaran per triwulan dan rencana penrikan dana/ halaman III DIPA per bulan.
c. Komitmen pimpinan selaku Kuasa Penguna Anggaran dan tim perbendaharaan sebgaai pengelola anggaran.
d. Kerjasama semua pihak terkait untuk mematuhi atau menjalankan kegiatan sesaui ketentuan yang berlaku.

E. INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Cara Perhitungan dan Formula :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.102 Capaian Persentase Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN DINORMALISASI (%)	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Persen	2.95	2.94	99.66	99.66	Baik

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM padaI tahun 2025 adalah 2.94 bila dibandingkan dengan target 2.95, maka capaian yang diperoleh adalah 99.66% dan mendapatkan kategori Baik.

Tabel 3.103 Hasil Perhitungan ..... Tahun 2025

2. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru masuk ke dalam perjanjian kinerja pada tahun ini. Namun pada tahun-tahun sebelumnya BPOM dan UPT telah menerapkan manajemen risiko.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

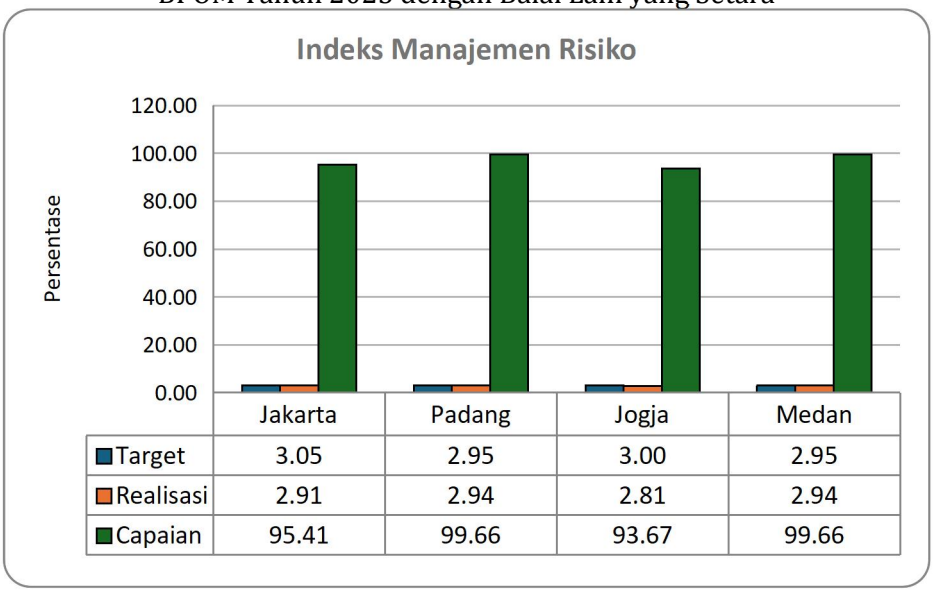
Tabel 3.104 Perbandingan **Realisasi Kinerja** Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)	REALISASI 2025	CAPAIAN	
			%	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,94	93,27	Akan Tercapai

Target akhir Renstra (Tahun 2029) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM adalah 3.15, maka realisasi Tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra 2025-2029 dengan capaian 93,27% termasuk kategori akan tercapai. Untuk ini perlu dilakukan perencanaan dan program-program yang akurat untuk tercapai target Renstra.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara

Grafik 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 dengan Balai Lain yang Setara



Berdasarka grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan balai lain yang setara maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks manajemen risiko tahun 2025 BBPOM di Padang adalah yang tertinggi sama dengan BBPOM di Medan.

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penuranan Kinerja

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh evaluator Inspektorat, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Padang dikategorikan Risk Aware dengan nilai 2,938.

Penyebab tidak tercapainya target berdasarkan hasil evaluasi inspektorat adalah sebagai berikut:

a. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
    1. Terdapat akibat/potensi kerugian yang belum spesifik menggambarkan dampak negatif yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi,, atau masih menggunakan narasi umum seperti “tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal
    2. Terdapat lebih dari satu risk event pada satu kode risiko.
    3. Terdapat Risk event yang merupakan suatu pernyataan dengan menggambarkan kondisi tertentu serta hubungan sebab akibat dari potensi tersebut.
    4. Terdapat sumber risiko yang berasal dari eksternal namun nama unit kerja terkait belum dituliskan,
    5. Kategori risiko belum sepenuhnya dikaitkan dengan penyebab
    6. Terdapat atribut pengendalian yang tidak selaras dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control)
    7. Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16, namun penetapan level kemungkinan setelah dilakukan mitigasi lebih besar dari level kemungkinan residual
b. Belum terdapat cascading untuk indikator indeks manajemen risiko kepada seluruh tim pengelola manajemen risiko unit kerja;
c. Proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, namun belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.

Terhadap kelemahan implementasi SPIP BBPOM di Padang, Inspektorat Utama telah merekomendasikan melakukan perbaikan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan ini adalah:

a. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM .

.

b. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja;
c. Kepala Balai Besar POM di Padang selaku pemilik risiko unit kerja agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko di yang dibuktikan dengan informasi terdokumentasi yang memadai.

Balai Besar POM di Padang telah melakukan identifikasi risiko semester I dan semester II tahun 2025 terhadap semua sasaran kegiatan yang ada, teridentifikasi sebanyak 100 risiko pada semester I dan 112 risiko pada semester II, pada semua proses bisnis yang ada di Balai Besar POM di Padang. penyusunan telah memperhatikan dan mememenuhi rekomendasi Inspektorat pada Hasil Evaluasi Maturitas Risiko BBPOM di Padang Tahun 2024. Juga telah dilakukan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri Manajemen Risiko dan pengiriman data dukung yang telah dikirimkan tepat waktu.

6. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tabel 3.105 Rekomendasi perbaikan kinerja indeks manajemen risiko UPT BPOM

Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1. Masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko. 2. Belum terdapat cascading untuk indikator indeks manajemen risiko kepada seluruh tim pengelola manajemen risiko unit kerja. 3. Belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.	1. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan dari evalautor. 2. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja; 3. Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pemilik risiko unit kerja (pimpinan) dalam proses pengelolaan manajemen risiko di yang dibuktikan dengan informasi terdokumentasi yang memadai.	1. Melaksankana identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan dari evalautor. 2. Menambahkan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja;. 3. Mendokumentasikan keterlibatan pemilik risiko unit kerja (pimpinan) dalam proses pengelolaan manajemen risiko.	Januari - Desember 2036	T	-	-

7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko adalah penyusunan Identifikasi Risiko secara berjenjang dan daftar risiko yang dikirimkan di SAPA.APIP adalah yang telah direviu oleh Auditor Internal. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing fungsi berdasarkan rapat fungsi, kemudian dilakukan evaluasi melalui rapat tim SPIP, selanjutnya rumusan risiko di reviu oleh Auditor Internal, hasil reviu dikembalikan kepada masing-masing fungsi untuk dilakukan perbaikan. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang SPIP maka seluruh ASN BBPOM di Padang telah mengikuti pelatihan mandiri melalui IDEAS sehingga telah dapat melakukan identifikasi risiko sesuai pedoman Manajemen Risiko. Risiko yang dimitigasi dilakukan monitoring dan harus sudah diselesaikan sesuai timeline yang direncankan di RTP.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Pada tahun 2025 di Balai Besar POM di Padang terdapat 28 Indikator Kinerja Kegiatan dimana masing-masing indikator kinerja kegiatan tahun 2025 telah dilakukan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi, sesuai dengan tabel seperti berikut ini :

Tabel . 3.103 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan Oktober sampai Desember 2025

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI (UNTUK STATUS YANG BELUM SELESAI)	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA SEBAGAI RISIKO (Y/T)	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	89.25	96.84	108.50%	1. Kerusakan alat HPLC di Lab OT (1 unit dari 2 unit)	1. Perbaikan alat HPLC lab OT (HPLC Waters)	1. Perbaikan alat HPLC	Progres	1. Memperbaiki 1 unit alat HPLC waters (lab OT), menunggu jadwal perbaikan oleh teknisi	November	Y	A-01	Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium
		November	89.25	96.71	108.36%	1. Kerusakan alat HPLC di Lab OT (1 unit dari 2 unit)	1. Perbaikan alat HPLC lab OT (HPLC Waters)	1. Perbaikan alat HPLC	Selesai			Y	A-01	Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium
		Desember	89.25	97.37	109.10%	1. Berdasarkan evaluasi capaian di TW 3, terdapat kelabihan sampling komoditi kosmetik sebanyak 2 sampel karena terjadi kekeliruan dalam pemenuhan jumlah sampling per kategori	1. Melakukan evaluasi dan revisi renlak untuk memastikan kategori sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	1. Persentase kategori terpenuhi	Selesai			T		

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Oktober	-	-	-		-							
		November	-	-	-	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, adalah 11 sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD, terdapat penambahan laporan dari 5 fasyankes baru di Bulan November 2025	1. Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso. 2. Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan.	1. Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan. 2. Pelakasanaan Forum Komunikasi hasil pemantauan KTD/ESO secara luring Monitoring pelaporan KTD/ESO doi TW 4 hingga sesuai dengan target yang ditetapkan.	Progres	1. Monitoring pelaporan KTD/ESO di TW 4 hingga sesuai dengan target yang ditetapkan	Desember	Y	O-34	Tenaga kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	26.00	28.89	111.12%	Hasil Monev laporan melalui website e-meso, terdapat 8 sarana pelayanan kesehatan yang baru melaporkan KTD, di Bulan November dan Desember 2025	1. Mengingatkan kembali tenaga kesehatan melalui WAG kolaborasi Meso. 2. Mengingatkan PIC Farmakovigilans untuk segera melaporkan KTD bersamaan dengan penagihan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan.	Pemantauan Pelaporan dari KTD/ESO https://e-meso.pom.go.id/subsite	Selesai			Y	O-34	Tenaga kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	89.00	100	112.36%	1. Kerusakan alat ICP MS pada Lab. Pangan dan Air terhitung sejak TW 2 dan pada TW 3 bulan September bisa digunakan kembali karena teknisi alat meminjamkan suku cadangnya untuk penyelesaian sampel sehingga adanya keterlambatan dalam pengujian sampel parameter penetapan kadar cemaran logam 2. Kerusakan 1 unit alat HPLC mengakibatkan perlambatan pada pengujian kimia di Lab. Pangan dan Air 3. Terlambat dalam pengadaan pengisian ulang gas Argon MS yang digunakan untuk pengujian cemaran logam di Lab. Pangan disebabkan oleh anggaran yang tersedia terbatas dan menunggu Revisi anggaran. Hal ini mengakibatkan perlambatan dalam pengujian	1. Membuat list/jadwal penggunaan alat AAS untuk pemakaian bersama disebabkan rusaknya alat ICP MS 2. Melaporkan pada PPK, PPK merevisi anggaran, mengusahakan dan bernegosiasi dengan penyedia untuk segera melakukan perbaikan alat HPLC beserta kalibrasinya 3. Tim Lab. Pangan dan Air mengatur ulang sistem/jadwal pekerjaan, dan penambahan waktu diuar jam kerja agar target tercapai	1.Alat ICP MS telah digunakan kembali sementara waktu dengan adanya peminjaman suku cadang dari teknisi 2. Telah dilakukan pengadaan pengisian ulang gas Argon MS yang digunakan untuk pengujian cemaran logam di Lab. Pangan dan Air. 3. Program Profisiensi sebanyak 2 kali sudah dapat diselesaikan pada bulan September dan 1 program profisiensi masih berlanjut penyelesaiannya pada bulan Oktober 2025 dengan hasil yang memuaskan (inlier) 4. Surveilan KAN ISO 17025 sudah selesai dilaksanakan pada akhir September 2025	Progres	1. Melakukan koordinasi dengan PPK, PP penanggung jawab pemeliharaan atau perawatan alat secara terus menerus untuk percepatan perbaikan kerusakan 1 unit alat HPLC beserta kalibrasi alatnya di Lab. Pangan dan Air 2. Menjawab ketidaksesuaian temuan pada Surveilan KAN ISO 17025 sudah selesai dilaksanakan berupa pembuatan CAPA beserta data dukungnya	Desember	Y	1. A-03 2. O-19 3. IT-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 3. Pelaporan Hasil Uji secara SIPT tidak real time

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						parameter tersebut, namun masih bisa dikerjakan dalam ketentuan batas time. 4. Pada TW 3 bulan September, pada laboratorium pangan terjadi penumpukan jadwal program wajib terpadu dari Pusat yang harus diselesaikan seperti Sampel rutin, Profisiensi sebanyak 3 kali, Surveilan KAN ISO 17025, penyelesaian target SKL beserta verifikasinya, ketidakteraturan dari jadwal pendampingan program MBG yang sering mendadak. Ini semua mengakibatkan tim Lab.Pangan dan Air kewalahan dalam mengatur waktu dan pelaksanaan pengujian								

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	89.00	100	112.36%	1. Kerusakan alat ICP MS pada Lab. Pangan dan Air masih belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran pemeliharaan/perwatan alat sehingga pengujian sampel parameter penetapan kadar cemaran logam dialihkan ke alat AAS. 2. Kerusakan 1 unit alat HPLC mengakibatkan perlambatan pada pengujian kimia di Lab. Pangan dan Air.	1. Membuat list/jadwal penggunaan alat AAS untuk pemakaian bersama disebabkan rusaknya alat ICP MS 2. Melaporkan pada PPK, PPK merevisi anggaran, mengusahakan dan bernegosiasi dengan penyedia untuk segera melakukan perbaikan alat HPLC beserta kalibrasinya	1. Perbaikan kerusakan 1 unit alat HPLC di Lab. Pangan dan Air beserta kalibrasinya sudah selesai dilaksanakan	Progres	Mengingatkan PPK agar meanggarkan pada RKAKL TA 2026 untuk perbaikan/perawatan kerusakan ICP MS sesuai dengan data dukung penawaran harga yang diberikan oleh vendor	Desember	Y	1. A-03 2. S-04	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Alokasi anggaran yang diterima tidak sesuai kebutuhan/permintaan
		Desember	89.00	100	112.36%	Persentase pengujian sampel pangan olahan rutin yang beresiko pada RAPK bulan November telah melewati target 89 % yaitu 100 % dengan jumlah sampel 484 sampel. Semuanya memenuhi persyaratan parameter yang telah ditetapkan yaitu : Kesesuaian target sampel, Keseuaian parameter uji, Ketepatan	Melakukan pengujian sampel pangan olahan rutin yang beresiko sesuai perencanaan pada bulan Desember yaitu sebanyak 2 sampel sehingga tercapai target tahun 2025 sebanyak 486 sampel (100 %)	1. Telah selesai dilakukan pengujian sampel pangan olahan rutin yang beresiko sesuai perencanaan sesuai pada bulan Desember yaitu sebanyak 2 sampel sehingga tercapai target tahun 2025 sebanyak 486 (100 %) 2. Melakukan koordinasi rutin dengan fungsi terkait target sampling pengujian beserta kategorinya	Selesai			Y	1. A-03 2. O-19 3. IT-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 3. Pelaporan

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						pengambilan kesimpulan, Ketepatan waktu pengambilan, Ketepatan waktu pengambilan, dan Tindak lanjut sesuai pedoman								Hasil Uji secara SIPT tidak real time
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Oktober	100.00	100	100.00%	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai s/d akhir TW 3 sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar. Sampel KLB sampai dengan bulan Oktober yang dilaporkan, diinvestigasi dan diuji sebanyak 36 item (dari 9 kasus yang masuk). Pada bulan Oktober ini. diterima laporan kejadian KLB sebanyak 4 kasus dengan 24 item sampel uji, dengan hasil uji TMS sebanyak 8	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait tindak lanjut pengaduan kasus KLB KP.	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP sd Oktober.	Selesai			Y	1. O-19 2. A-03 3. SDM-04	1. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 2. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 3. Pelaksanaan pengujan Tidak sesuai Metoda Analisa/Instruksi

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						item ; MS sebanyak 16 item.								Kerja/parameter uji yang ditetapkan pada pedoman sampling
		November	100.00	100	100.00%	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai s/d November sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar. Sampel KLB sampai dengan bulan November yang dilaporkan, diinvestigasi dan diuji sebanyak 39 item (dari 11 kasus yang masuk). pada bulan November ini diterima laporan kejadian KLB sebanyak 2 kasus dengan 3 item sampel uji, dengan hasil uji TMS sebanyak 2 item : MS sebanyak 1 item.	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait tindak lanjut pengaduan kasus KLB KP.	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP sd November.	Selesai			Y	1. O-19 2. A-03 3. SDM-04	1. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 2. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 3. Pelaksanaan pengujan Tidak sesuai Metoda Analisa/Instruksi Kerja/parameter uji

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														yang ditetapkan pada pedoman sampling
		Desember	100.00	100	100.00%	Realisasi penyelesaian sampel KLB KP yang ditindaklanjuti tercapai sesuai target (100%). Laporan evaluasi selesai tepat waktu dan sesuai standar. Sampel KLB sampai dengan bulan Desember yang dilaporkan, diinvestigasi dan diuji sebanyak 39 item (Total spl KLB 2025)	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait tindak lanjut pengaduan kasus KLB KP.	Menindaklanjuti (menguji dan melaporkan) sampel KLB KP sd Desember	Selesai			Y	1. O-19 2. A-03 3. SDM-04	1. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 2. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 3. Pelaksanaan pengujan Tidak sesuai Metoda Analisa/Instruksi Kerja/parameter uji

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														yang ditetapkan pada pedoman sampling
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	85.00	100	117.65%	Pelaksanaan sampling dan pengujian untuk sampel PIRT telah selesai dilaksanakan sesuai target tahun 2025 pada TW 2 dan sesuai arahan dari Ditwas Deputi 2	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan.	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan.	Selesai			Y	1. A-03 2. O-19 3. IT-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 3. Pelaporan Hasil Uji secara SIPT tidak real time

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	85.00	100	117.65%	Pelaksanaan sampling dan pengujian untuk sampel PIRT telah selesai dilaksanakan sesuai target tahun 2025 pada TW 2 dan sesuai arahan dari Ditwas Deputi 3	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan.	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan.	Selesai			Y	1. A-03 2. O-19 3. IT-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat waktu 3. Pelaporan Hasil Uji secara SIPT tidak real time
		Desember	85.00	100	117.65%	Pelaksanaan sampling dan pengujian untuk sampel PIRT telah selesai dilaksanakan sesuai target tahun 2025 pada TW 2 dan sesuai arahan dari Ditwas Deputi 3	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan	Monitoring tindaklanjuti hasil pengujian sampel PIRT secara berkelanjutan	Selesai			Y	1. A-03 2. O-19 3. IT-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Pelaksanaan pengujian sampel rutin dan sampel pihak ketiga tidak dapat diselesaikan tepat

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														waktu 3. Pelaporan Hasil Uji secara SIPT tidak real time
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Oktober	89.50	94.96	106.10%	Masih ada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA sesuai batas waktu yang ditentukan. Kendala dan keterbatasan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan sehingga menunda mengirimkan respon CAPA hasil pemeriksaan sarana	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TL melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Mengingatkan petugas untuk memastikan sarana yang diperiksa agar segera mengirimkan CAPA. 3. Melakukan kegiatan yang dapat mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana.	1. Mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TLnya melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp dan hardcopy melalui ekspedisi. 2. Menginventarisir CAPA dengan rapi dalam folder respon sesuai link yang telah dimasukkan dalam setiap surat tindak lanjut ke pelaku usaha. 3. Melakukan evaluasi terhadap sarana yang telah mengirimkan CAPA nya	Progres	1. Melakukan pengawalan dan desk CAPA sebagian sarana lainnya.	Desember	Y	S-09	Timeline pemenuhan CAPA yang dikirim pelaku usaha tidak tercapai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	89.50	93.54	104.51%	Pelaku usaha belum semuanya mengirimkan CAPA	1. Memastikan surat TL diterima pelaku usaha/ linsek dengan selalu mengingatkan petugas untuk mengirimkan surat TL melalui media komunikasi online seperti email ataupun whatsapp. 2. Mengingatkan petugas untuk memastikan sarana yang diperiksa agar segera mengirimkan CAPA. 3. Melakukan kegiatan yang dapat mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana.	1. Menginventarisir CAPA dengan rapi dalam folder respon sesuai link yang telah dimasukkan dalam setiap surat tindak lanjut ke pelaku usaha. 2. Melakukan evaluasi terhadap sarana yang telah mengirimkan CAPA nya Melakukan kegiatan yang dapat mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana.	Progres	Melakukan kegiatan yang dapat mempercepat respon dari pelaku usaha seperti mengirimkan surat penagihan CAPA ke sarana atau jika anggaran memungkinkan akan menjemput CAPA secara on site ke sarana.	Desember	Y	S-09	Timeline pemenuhan CAPA yang dikirim pelaku usaha tidak tercapai
		Desember	89.50	92.95	103.85%	Pelaku usaha belum semuanya mengirimkan CAPA, semua telah dihubungi dan sudah berjanji akan mengirimkan, namun secara keseluruhan target telah tercapai	Melakukan monev CAPA dari pelaku usaha	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha.	Selesai			Y	S-09	Timeline pemenuhan CAPA yang dikirim pelaku usaha tidak tercapai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	90.00	95.83	106.48%	Target tersisa sebanyak 1 sarana, akan di periksa di November 2025	Memastikan petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai rencana, membuat surat tindak lanjut, melaporkan secara tepat waktu melalui SIPT dan melakukan monev CAPA dari pelaku usaha.	1. Melakukan pemeriksaan sarana target yang tersisa sesuai pedoman pemeriksaan. 2. Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang diberikan waktu 30 hari kerja setelah inspeksi dilakukan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha.	Progres	1. Melakukan pemeriksaan sarana target yang tersisa sesuai pedoman pemeriksaan. 2. Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang diberikan waktu 30 hari kerja setelah inspeksi dilakukan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha.	November			
		November	90.00			Target tersisa sebanyak 1 sarana, akan di periksa di November 2026	Memastikan petugas dapat melakukan pemeriksaan sesuai rencana, membuat surat tindak lanjut, melaporkan secara tepat waktu melalui SIPT dan melakukan monev CAPA dari pelaku usaha.	1. Melakukan pemeriksaan sarana target yang tersisa sesuai pedoman pemeriksaan. 2. Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang diberikan waktu 30 hari kerja setelah inspeksi dilakukan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha.	Selesai					
		Desember	90.00	95.83	106.48%									

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	91.00	100	109.89%	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha 3. Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	1. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 6 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. 2. Membuat 6 tindak lanjut hasil inspeksi sarana dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Progres	Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	November	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	91.00	100	109.89%	Pelaku usaha industri pangan olahan belum menerapkan seluruh aspek CPPOB dengan baik	1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar meningkatkan pemahaman terhadap penerapan CPPOB dalam proses produksi sehingga menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. 2. Membuat tindak lanjut hasil inspeksi sarana dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha 3. Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	1. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 2 sarana pangan olahan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik 2. Membuat 2 tindak lanjut hasil inspeksi sarana dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha Evaluasi terhadap CAPA/ tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha	Selesai			Y	S-06	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku
		Desember	91.00	100	109.89%	target telah tercapai di Desember 2025	-	-		-				
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	93.75	97.78	104.30%	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca	Progres	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
								penegakan sanksi bersama lintas sektor.		bersama lintas sektor.				
		November	93.75	97.84	104.36%	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA. Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi bersama lintas sektor.	Progres	Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi bersama lintas sektor.	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	93.75	97.89	104.42%	Sarana distribusi sediaan farmasi belum secara konsisten melakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan pemeriksaan sarana berdasarkan analisa resiko dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan sesuai timeline dan melakukan monev CAPA. Mendampingi pelaku usaha dan penyusunan CAPA dan memantau konsistensi sarana dalam penerapan CAPA yang telah dibuat, pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan dan monitoring pasca penegakan sanksi bersama lintas sektor.	Selesai			T	-	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	85.00	98.1	115.41%	1. Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . 2. Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Progres	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desember	Y	SDM - 07	Pembuatan surat TL hasil pemeriksaan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Lainnya belum optimal dalam pemenuhan waktu penyelesaian

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						kinerja yang maksimal.								
		November	85.00	99.84	117.46%	1. Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . 2. Peningkatan koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangkla mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan.	Progres	1. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan. 2. Terus meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Desember	Y	SDM - 07	Pembuatan surat TL hasil pemeriksaan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Lainnya belum optimal dalam pemenuhan waktu penyelesaian

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	85.00	100	117.65%	1. Belum optimalnya surat tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan serta terdapat surat tindak lanjut yang sedang proses masih dalam rentang kendali time line surat tindak lanjut . 2. Belum maksimalnya koordinasi dalam tim kerja sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kinerja yang maksimal.	1. Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut agar sesuai ketentuan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam tim kerja pengawasan sarana distribusi pangan	Selesai			Y	SDM - 07	Pembuatan surat TL hasil pemeriksaan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Lainnya belum optimal dalam pemenuhan waktu penyelesaian
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Oktober	91.60	99.9	109.06%	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Memperluas area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	1. Menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan sampling dengan sesuai target dan pelaksanaan direncanakan di awal bulan 2. Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Progres	Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	91.60	98.96	108.03%	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Memperluas area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	1. Menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan sampling dengan sesuai target dan pelaksanaan direncanakan di awal bulan 2. Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Progres	Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Desember	T	-	-
		Desember	91.60	99.04	108.12%	Jenis media iklan tertentu, terutama media cetak dan media penyiaran lokal, tidak selalu tersedia sehingga mempengaruhi realisasi perencanaan pengawasan iklan yang sudah dibuat. Pelaporan pengawasan iklan juga dapat terdampak karena petugas pengawasan memiliki tugas utama lainnya.	Memperluas area pengawasan iklan atau penambahan waktu pengawasan iklan khususnya pengawasan di kab/kota lain dan penjadwalan pelaksanaan pengawasan diatur pada awal bulan.	1. Menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan sampling dengan sesuai target dan pelaksanaan direncanakan di awal bulan 2. Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Selesai			T		

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Oktober	90.00	100	111.11%	Pelaporan pengawasan label/penandaan rokok elektronik masih menggunakan modul pelaporan berupa Google Form yang dimasukkan data pelaporannya langsung oleh petugas yang datanya langsung terkirimkan ke evaluator pusat. Dengan demikian, supervisor di Balai tidak dapat mengetahui dengan rinci data yang diinput oleh petugas untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.	Menyampaikan kepada Evaluator atau penanggung jawab di Pusat agar Google form diberikan opsi untuk mengirimkan feedback hasil pemasukan data melalui email petugas yang melakukan input data sehingga rekaman tersebut dapat diteruskan ke supervisor Balai untuk evaluasi. Alternatif lain, adalah dengan memberikan akses kepada supervisor Balai untuk melihat data yang dimasukkan melalui tautan respon Google formulir tersebut.	Mengusulkan untuk penambahan opsi feedback hasil input data pada Google form maupun pemberian akses terhadap file googlesheet respon input data formulir kepada evaluator/penanggung Pusat telah disampaikan.	Progres	Mengevaluasi hasil pengawasan label/penandaan produk tembakau dan terutama rokok elektronik untuk evaluasi kesesuaian penilaian.	Desember	T	-	-
		November	90.00	100	111.11%	Pelaporan pengawasan label/penandaan rokok elektronik masih menggunakan modul pelaporan berupa Google Form yang dimasukkan data pelaporannya langsung oleh petugas yang datanya langsung terkirimkan ke evaluator pusat. Dengan demikian, supervisor di Balai tidak dapat	Menyampaikan kepada Evaluator atau penanggung jawab di Pusat agar Google form diberikan opsi untuk mengirimkan feedback hasil pemasukan data melalui email petugas yang melakukan input data sehingga rekaman tersebut dapat diteruskan ke supervisor Balai untuk evaluasi. Alternatif lain, adalah dengan memberikan	Mengusulkan untuk penambahan opsi feedback hasil input data pada Google form maupun pemberian akses terhadap file googlesheet respon input data formulir kepada evaluator/penanggung Pusat telah disampaikan	Progres	Mengevaluasi hasil pengawasan label/penandaan produk tembakau dan terutama rokok elektronik untuk evaluasi kesesuaian penilaian.	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						mengetahui dengan rinci data yang diinput oleh petugas untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.	akses kepada supervisor Balai untuk melihat data yang dimasukkan melalui tautan respon Google formulir tersebut.							
		Desember	90.00	97.5	108.33%	Pelaporan pengawasan label/penandaan rokok elektronik masih menggunakan modul pelaporan berupa Google Form yang dimasukkan data pelaporannya langsung oleh petugas yang datanya langsung terkirimkan ke evaluator pusat. Dengan demikian, supervisor di Balai tidak dapat mengetahui dengan rinci data yang diinput oleh petugas untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.	Menyampaikan kepada Evaluator atau penanggung jawab di Pusat agar Google form diberikan opsi untuk mengirimkan feedback hasil pemasukan data melalui email petugas yang melakukan input data sehingga rekaman tersebut dapat diteruskan ke supervisor Balai untuk evaluasi. Alternatif lain, adalah dengan memberikan akses kepada supervisor Balai untuk melihat data yang dimasukkan melalui tautan respon Google formulir tersebut.	1. Mengusulkan untuk penambahan opsi feedback hasil input data pada Google form maupun pemberian akses terhadap file googlesheet respon input data formulir kepada evaluator/penanggung Pusat telah disampaikan. 2. Melakukan evaluasi hasil pengawasan terutama atas adanya ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh UPT dengan keputusan Pusat	Selesai			T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Oktober		0	0	1. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR merupakan IKU Baru yang dimulai semester 2 tahun 2025 dan RHK baru ditetapkan di TW 3. 2. Pengisian Tools AMR telah dilaksanakan secara rutin melalui SIPT. 3. joint inspection telah dilaksanakan ke Japfa Food. 4. Bimtek telah dilaksanakan tanggal 15 Oktober secara Luring di Aula BBPOM di Padang dan dan KIE melalui ig BBPOM di Padang	1. Publikasi Hasil pengawasan di akhir TW 2. Follow up advokasi ke pemerintah daerah denngan membuat surat permintaan pembuatan SE dengan dasar hasil pengawasan sarana Yanfar	1. Menggunakan tools AMR dalam pemeriksaan Apotek dan diinput ke SIPT telah dilaksanakan. 2. Joint Inspection, Bimtek dan KIE telah dilaksanakan	Progres	1. Publikasi hasil pengawasan secara periodik 2. Tindaklanjut advokasi berupa MoU atau SE	November	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November		0	0	1. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR merupakan IKU Baru yang dimulai semester 2 tahun 2025 dan RHK baru ditetapkan di TW 3. 2. Pengisian Tools AMR telah dilaksanakan secara rutin melalui SIPT, 3. joint inspection telah dilaksanakan ke Japfa Food. 4. Bimtek telah dilaksanakan tanggal 15 Oktober secara Luring di Aula BBPOM di Padang dan dan KIE melalui ig BBPOM di Padang. 5. Surat permintaan pembuatan SE dengan dasar hasil pengawasan sarana Yanfar telah dikirimkan ke Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota	1. Publikasi Hasil pengawasan di akhir TW 2. Follow up surat permintaan pembuatan SE AMR	1. Menggunakan tools AMR dalam pemeriksaan Apotek dan diinput ke SIPT telah dilaksanakan . 2. Joint Inspection, Bimtek dan KIE telah dilaksanakan.	Selesai			T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	100.00	105.57	105.57%	Kegiatan advokasi, bimtek, publikasi dan pengisian tools sudah dilaksanakan dan sesuai target	Pelaksanaan kegiatan pengendalian antimikroba tahun 2026	-		-		T	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Oktober	76.90	81.8	106.37%	Capaian Nilai SKL hasil evaluasi TW III 106.4 % sedangkan target TW III 76,9 dan realisasi 81,8.Capaian Nilai SKL seharusnya bisa lebih tinggi lagi jika target SRL obat tidak terkendala sampling/pengadaan sampel yang belum ditemukan di peredaran dan peningkatan SRL lab kosmetik terkendala ketersediaan kolom HPLC.	1.Melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Mempercepat pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL. 3. Mempercepat pengadaan suku cadang alat laboratorium untuk mendukung peningkatan standar ruang lingkup dan kompetensi personil laboratorium. 4. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait pemenuhan sampel yang menjadi target SRL dalam SKL.	Melaksanakan pemenuhan target SKL TW IV dengan mengupayakan realisasi sesuai target yang direncanakan.	Progres	Melaksanakan pemenuhan target SKL TW IV karena belum semua lab dapat melaksanakannya disebabkan saat ini prioritas pengujian sampel sesuai standar terlebih dahulu dan ada kendala juga dalam pemenuhan SRL Lab Obat dan Kosmetik.	Desember	Y	1. A-03 2. S-05 3. K3-01 4. SDM-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Standar minimal Ruang Lingkup pengujian tidak tercapai 3. Personil Laboratorium Terpapar bahan kimia 4. Personil Laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, karena adanya perpindahan / rotasi personil

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	76.90	81.8	106.37%	Capaian Nilai SKL sd TW IV ini masih menggunakan hasil evaluasi TW III yaitu sebesar 106.4 %, dimana target adalah 76,9 dan realisasi 81,8.Capaian Nilai SKL	1.Melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Merencanakan pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL. 3. Merencanakan pengadaan suku cadang alat laboratorium untuk mendukung peningkatan standar ruang lingkup dan kompetensi personil laboratorium. 4. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait pemenuhan sampel yang menjadi target SRL dalam SKL.	1. Melaksanakan pemenuhan target SKL TW IV dengan mengupayakan realisasi sesuai target yang direncanakan 2. Melaksanakan pemenuhan target SKL TW III karena belum semua lab dapat melaksanakannya disebabkan saat ini prioritas pengujian sampel sesuai standar terlebih dahulu dan ada kendala juga dalam pemenuhan SRL Lab Obat dan Kosmetik.	Progres	"1. Melaksanakan pemenuhan target SKL TW IV dengan mengupayakan realisasi sesuai target yang direncanakan 2. Melaksanakan pemenuhan target SKL TW III karena belum semua lab dapat melaksanakannya disebabkan saat ini prioritas pengujian sampel sesuai standar terlebih dahulu dan ada kendala juga dalam pemenuhan SRL Lab Obat dan Kosmetik."	Desember	Y	1. A-03 2. S-05 3. K3-01 4. SDM-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Standar minimal Ruang Lingkup pengujian tidak tercapai 3. Personil Laboratorium Terpapar bahan kimia 4. Personil Laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, karena adanya perpindahan / rotasi personil

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	77.00	82.8	107.53%	Capaian Nilai SKL sd TW IV ini yaitu sebesar 107,5 %, dimana target adalah 77,0 dan realisasi 82,8.	1.Melakukan pengujian dengan metoda analisa dalam SKL yang belum mampu uji untuk peningkatan Standar Ruang Lingkup dan kompetensi personil laboratorium serta verifikasi MA secara bertahap sesuai perencanaan yang disusun. 2. Merencanakan pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan standar peralatan dalam SKL. 3. Merencanakan pengadaan suku cadang alat laboratorium untuk mendukung peningkatan standar ruang lingkup dan kompetensi personil laboratorium. 4. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait pemenuhan sampel yang menjadi target SRL dalam SKL.	Pemenuhan target SKL Tahun 2025 sudah tercapai dengan sangat baik.	Selesai			Y	1. A-03 2. S-05 3. K3-01 4. SDM-05	1. Kerusakan Alat Instrumen Laboratorium 2. Standar minimal Ruang Lingkup pengujian tidak tercapai 3. Personil Laboratorium Terpapar bahan kimia 4. Personil Laboratorium belum kompeten dalam melakukan pengujian sampel, karena adanya perpindahan / rotasi personil
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Oktober		0	0	Telah terlaksana Advokasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang berada di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang	Melakukan seleksi terhadap Kabupaten/Kota yang akan didampingi dan melakukan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota dalam pengisian tool	Pemerintah Daerah melakukan pengisian tools penilaian mandiri dan upload data dukung penilaian oleh Kab/Kota pada link yang telah diberikan.	Progres	Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman saat ini sedang dalam proses penilaian oleh tim penilai, masih nunggu hasil penilaian akhir	Desember	Y	S-23	Kabupaten/Kota Pangan Aman yang didampingi tidak dapat memenuhi nilai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
							penilaian mandiri							minimal penilaian Kabupaten /Kota Pangan Aman
		November		0	0	Kota Padang Panjang telah melakukan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman dan telah melengkapai data dukung pada link yang telah ditentukan, dengan nilai yang diperoleh 83,29	Memantau hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Memantau hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Progres	Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman saat ini sedang dalam proses penilaian oleh tim penilai, masih nunggu hasil penilaian akhir	Desember	Y	S-23	Kabupaten /Kota Pangan Aman yang didamping i tidak dapat memenuhi nilai minimal penilaian Kabupaten /Kota Pangan Aman
		Desember	11.11	11.11	100%	Kota Padang Panjang telah melakukan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman dan telah melengkapai data dukung pada link yang telah ditentukan, dengan nilai yang diperoleh 83,30	Memantau hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Memantau hasil penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Selesai			Y	S-23	Kabupaten /Kota Pangan Aman yang didamping i tidak dapat memenuhi nilai minimal penilaian Kabupaten /Kota Pangan Aman

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	63.00	62.5	99.21%	Kegiatan telah selesai yaitu telah dilakukan pengawasan pada 5 sarana pangan fortifikasi yang ditargetkan namun target tidak tercapai karena perbedaan pembulatan dalam penetapan target sedangkan dalam perhitugan realsiasi dan capaian menggunkan 2 digit angka setelah koma. Kemudian untuk jumlah sarana yang dijadikan sebagai pembagi adalah jumlah sarana yang ada dengan bsasi data tahun 2023 yaitu 8 sarana.	-	-	-	-		Y	S-19	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku
		November	63.00	62.5	99.21%		-	-	-			Y	S-19	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku
		Desember	63.00	62.5	99.21%		-	-	-	-		Y	S-19	CAPA yang telah dibuat oleh Sarana Produksi Pangan Fortifikasi belum sesuai dengan rekomendasi dan

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														ketentuan yang berlaku
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Oktober	88.00	88.96	101.09%	Sampai dengan Bulan September 2025 tingkat efektivitas KIE sudah mencapat target, sebesar 89,35 (101,53%). Peningkatan efektivitas KIE dilaksanakan pada kegiaan, diantaranya: * Kegiatan KIE bersama TOMAS Ade Rizki Pratama, SE, MM Tahun 2025 sebanyak 3750 peserta (15 titik @ 250 peserta) baru terlaksana 2750 (73,33%) dan 1000 (26,67%) masih menunggu jadwal dari Tim Tomas.	Tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan KIE dalam rangka peningkatan efektifitas KIE, antara lain: - Senantiasa berkoordinasi dengan Tim Tomas Ade Rizki Pratama, SE, MM agar pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara sesuai pedoman dan cepat.	Melaksanakan: 1. Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM telah terlaksana sebanyak 80% (3000 peserta). 2. Melaksanakan Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM yang belum telah terlaksana sebanyak 20% (750 peserta).	Progres	Melaksanakan Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM yang belum telah terlaksana sebanyak 20% (750 peserta).	Desember	Y	O-29	Kegiatan KIE tidak terlaksana sesuai perencanaan
		November	88.00	88.96	101.09%	Sampai dengan Bulan September 2025 tingkat efektivitas KIE sudah mencapat target, sebesar 89,36 (101,55%). Peningkatan efektivitas KIE dilaksanakan pada kegiaan, diantaranya: * Kegiatan KIE bersama TOMAS Ade Rizki	Tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan KIE dalam rangka peningkatan efektifitas KIE, antara lain: 1. Senantiasa berkoordinasi dengan Tim Tomas Ade Rizki Pratama, SE, MM agar pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara sesuai pedoman dan cepat.	Melaksanakan: 1. Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM telah terlaksana sebanyak 86.66 % (3250 peserta) 2. Konten/ infografis yang diposting pada media sosial balai Besar POM di Padang	Progres	1. Melaksanakan Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM yang belum telah terlaksana sebanyak 13.33% (500 peserta). 2. Berkesinambungan membuat konten/ infografis yang diposting pada media sosial balai Besar POM di Padang	Desember	Y	O-29	Kegiatan KIE tidak terlaksana sesuai perencanaan

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						Pratama, SE, MM Tahun 2025 sebanyak 3750 peserta (15 titik @ 250 peserta) baru terlaksana 2750 (73,33%) dan 1000 (26,67%) masih menunggu jadwal dari Tim Tomas. * Kegiatan KIE pada Media (Media Sosial & Media Non Sosial)	2. Berkesinambungan membuat konten pada media sosial Balai Besar POM di Padang							
		Desember	88.00	89.51	101.72%	Sampai dengan TW III 2025 tingkat efektivitas KIE sudah mencapat target, sebesar 88,96 (101,09%). Peningkatan efektivitas KIE dilaksanakan pada kegiaan, diantaranya: * Kegiatan KIE bersama TOMAS Ade Rizki Pratama, SE, MM Tahun 2025 sebanyak 3750 peserta (15 titik @ 250 peserta) baru terlaksana 3250 (86,66%) dan 500 (13,33%) masih menunggu jadwal dari Tim Tomas. * Kegiatan KIE pada Media (Media Sosial & Media Non Sosial)	Tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan KIE dalam rangka peningkatan efektifitas KIE, antara lain: - Senantiasa berkoordinasi dengan Tim Tomas Ade Rizki Pratama, SE, MM agar pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara sesuai pedoman dan cepat. - Berkesinambungan membuat konten pada media sosial Balai Besar POM di Padang	Melaksanakan: 1. Kegiatan KIE Tomas Ade Rezki Pratama, SE, MM telah terlaksana sebanyak 100 % (3750 peserta) 2. Konten/ infografis yang diposting pada media sosial balai Besar POM di Padang	Selesai			T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
20	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Oktober	75.00	80	106.67%	Sebelumnya telah terlaksana Monev dan Penilaian Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan melakukan kunjungan langsung ke masing-masing sekolah didampingi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cabdin Pendidikan Wilayah III Solok Raya	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Terpadu bersama Pemerintah Daerah dan Penyerahan Sertifikat Apresiasi Pelaksanaan Program	Telah terlaksana monitoring dan evaluasi program keamanan pangan terpadu di Kabupaten Solok bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 24 Oktober 2025 Seluruh tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah terlaksana	Selesai					
		November	90.00	80	88.89%	Semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 7 sekolah karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi sehingga target 14 sekolah tidak tercapai.	Berkoordinasi dengan unit pengampu terkait pencapain target akibat efisiensi anggaran	1. Berkoordinasi dengan unit pengampu terkait pencapain target akibat efisiensi anggaran melalaui surat. 2. Seluruh tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah terlaksana	Selesai					

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	14.00	7	50.00%	Semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 7 sekolah karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi sehingga target 14 sekolah tidak tercapai.	Prioritas anggaran untuk pelaksanaan program prioritas nasional dapat disesuaikan dengan jumlah target yang harus dicapai	-	Selesai	-				
19	Jumlah desa pangan aman	Oktober	75.00	75	100.00%	Sebelumnya telah dilakukan monitoring terkait pelaksanaan program secara mandiri oleh kader keamanan pangan desa/nagari	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Terpadu bersama Pemerintah Daerah dan Penyerahan Sertifikat Apresiasi Pelaksanaan Program	Seluruh tahapan program Desa Pangan Aman telah terlaksana Telah terlaksana monitoring dan evaluasi program keamanan pangan terpadu di Kabupaten Solok bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 24 Oktober 2025	Selesai					
		November	90.00	75	83.33%	Semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 3 desa karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi sehingga target 6 desa tidak tercapai.	Berkoordinasi dengan unit pengampu terkait pencapain target akibat efisiensi anggaran	1. Berkoordinasi dengan unit pengampu terkait pencapain target akibat efisiensi anggaran melalaui surat. 2. Seluruh tahapan program Desa Pangan Aman telah terlaksana	Selesai					

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	6.00	3	50.00%	Semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 3 desa karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi sehingga target 6 desa tidak tercapai.	Prioritas anggaran untuk pelaksanaan program prioritas nasional dapat disesuaikan dengan jumlah target yang harus dicapai	-	Selesai	-				
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Oktober	100.00	100	100.00%	-	-	-	Selesai	-				
		November	100.00	100	100.00%	-	-	-	Selesai	-				
		Desember	1.00	1	100.00%	-	-	-	Selesai	-				

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Oktober	71.00	89.23	125.68%	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami CPPOB. 2. Pelaku usaha UMKM Kosmetik belum memahami CPKB 3. Pelaku usaha UMKM Obat Tradisional belum memahami CPOTB	Melakukan pendampingan langsung kepada UMKM pangan, UMKM OBA dan UMKM Kosmetik dalam penerapan IP CPPOB, CPOTB dan CPKB serta pembuatan dokumen mutu .	Melakukan pendampingan langsung kepada 2 UMKM pangan, 1 UMKM Kosmetik dalam penerapan IP CPPOB dan CPKB serta pembuatan dokumen mutu . Melakukan pendampingan sertifikasi IP CPPOB kepada 4 UMKM Pangan Olahan	Progres	Melakukan pendampingan sertifikasi IP CPPOB kepada 4 UMKM Pangan Olahan	November	Y	O - 28	Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu.
		November	79.17	97.69	123.39%	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum menerapkan CPPOB dengan baik 2. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami proses pengajuan IP CPPOB di aplikasi e-bpom	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum menerapkan CPPOB dengan baik. 2. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami proses pengajuan IP CPPOB di aplikasi e-bpom	1. Sosialisasi CPPOB ke 4 pelaku usaha UMKM Pangan. 2. Desk e-reg pangan olahan kepada 32 pelaku usaha UMKM Pangan di hotel ZHM Padang tgl 26 - 27 November 2025.	Progres	1. Desk IP CPPOB kepada 1 pelaku usaha UMKM Pangan	Desember	Y	O - 28	Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu.
		Desember	15.85	18.29	115.39%	1. Pelaku usaha UMKM pangan belum menerapkan CPPOB dengan baik 2. Pelaku usaha UMKM pangan belum memahami proses pengajuan IP CPPOB di aplikasi e-bpom	1. Petugas melakukan desk IP CPPOB kepada 1 sarana UMKM Pangan	1. Desk IP CPPOB kepada 1 pelaku usaha UMKM Pangan	Selesai			Y	O - 28	Pelaku usaha tidak dapat menggunakan aplikasi e sertifikasi BPOM dan melengkapi dokumen mutu.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Oktober	80.00	75	93.75%	Tercapainya target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan perencanaan yang matang dan selalu berkoordinasi yang baik dengan korwas PPNS Polda Sumbar dan JPU. Namun ada kasus tersangka dan BB belum bisa diserahkan ke JPU	Telah diberikan surat panggilan I dan ke II kepada terlapor yang telah diterima oleh istri terlapor untuk menghadap ke PPNS BBPOM Padang agar dapat memberikan keterangan	Melaksanakan konsultasi dengan Koorwas PPNS Polda Sumbar untuk menghadirkan terlapor menghadap PPNS BBPOM di Padang	Progres	1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen. 2. Merencanakan dan melaksanakan operasi penindakan sediaan farmasi dan pangan olahan	November	T	-	-
		November	83.00	75	90.36%	Telah terlaksananya target perkara sebanyak 4 perkara, namun realisasi IKU pada Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih rendah dari target yang disebabkan tersangka/pelapor melarikan diri.	Telah dilakukan konsultasii dengan Korwas polda Sumbar untuk melakukan kordinasi dengan aparat lingkungan untuk menyatakan keberadaan terlapor. Syamsir	Melaksanakan konsultasi dengan Koorwas PPNS Polda Sumbar untuk membuat permohonan pencarian saksi (DPS) atas nama terlapor Syamsir Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumbar tentang terbitnya DPS kasus terlapor Syamsir	Progres	Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumbar tentang terbitnya DPS kasus terlapor Syamsir	Desember	T		

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	90.00	75	83.33%	Telah terlaksananya target perkara sebanyak 4 perkara, namun realisasi IKU pada Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih rendah dari target yang disebabkan tersangka/pelapor melarikan diri sehingga belum bisa diproses lebih lanjut	Telah dilakukan konsultasii dengan Korwas Polda Sumbar untuk melakukan menerbitkan dan mencari DPO/DPS terhadap perkara yang ditangani oleh penyidik BBPOM di Padang.	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Koorwas PPNS Polda Sumbar untuk pencarian Tersangka dan Terlapor	Selesai			T		
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Oktober	50.00	50	100.00%	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Cegah Tangkal telah dilaporkan namun ada 2 (dua) poin yang belum diverifikasi oleh verikator 3. Laporan analisis	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu. 2. Telah dibuat laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan. 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan.	1. Membuat Laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu dan input data kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan pada dashboard penindakan. 2. Menunggu verifikasi terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal.	Progres	Menyusun dan menyelesaikan laporan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan	November	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						kerawanan kejahatan sedang diolah dan dibuat.								
		November	50.00	50	100.00%	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Cegah Tangkal telah dilaporkan namun ada 2 (dua) poin yang belum diverifikasi oleh verikator. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan sedang diolah dan dibuat.	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu. 2. Telah dibuat laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan. 3. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan.	1. Membuat Laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu dan input data kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan pada dashboard penindakan. 2. Menyusun laporan analisis kerawanan kejahatan.	Progres	1. Menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	90.00	95	105.56%	1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang didistribusikan secara online telah dilaksanakan. 2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari Direktorat Cegah Tangkal telah dilaporkan. 3. Laporan analisis kerawanan kejahatan telah diselesaikan dan dilaporkan	-	1. Membuat Laporan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu dan input data kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan pada dashboard penindakan 2. Menyusun dan melaporkan laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal 3. Melaporkan Tindak lanjut rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal	Selesai		\	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Oktober	-	-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan September 4.00 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) September : 99.88 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Oktober 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Oktober. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Oktober. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Oktober.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Oktober 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Oktober 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Oktober. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Oktober.	Selesai			Y	1. SDM-17 2. F-02	1. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) antara petugas dengan pelaku usaha. 2. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	-	-	-	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan Oktober 3.93 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Oktober : 98,19 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan November. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan November. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan November. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan November.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan November. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan November 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan November. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan November.	Selesai			Y	1. SDM-17 2. F-02	1. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) antara petugas dengan pelaku usaha. 2. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	4.70	4.84	102.98%	Mendapat Hasil survei indeks pelayanan publik bulan November 3.96 dan Survey SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) November : 98,64 Kemampuan pelaku usaha dalam teknologi mengakibatkan proses pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB belum dapat dilakukan secara cepat dan mandiri.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Desember. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Desember. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Desember. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Desember.	1. Melakukan kegiatan layanan publik informasi dan pengaduan bulan Desember. 2. Melakukan kegiatan layanan pengujian pihak ketiga bulan Desember. 3. Melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pangan olahan dalam pembuatan dokumen mutu dan pengajuan penerbitan sertifikat IP CPPOB di aplikasi OSS RBA bulan Desember. 4. Melaksanakan survei pelayanan publik kepada konsumen bulan Desember.	Selesai			Y	1. SDM-17 2. F-02	1. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) antara petugas dengan pelaku usaha. 2. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Oktober	-	-	-	1. Melakukan monitoring pelaksanaan renja dan program prioritas. 2. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor. 3. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP . 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik. 5. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 6. Proses SKP TW 3. 7. Pelaksanaan UKOM Bacth 3. 8. Persiapan KP Desember 2025. 9. Nilai Hasil Evalausi Pembangunan ZI 2025 telah keluar dengan hasil MS	1. Melaksanakan Renja. 2. Monitoring dan evaluasi Renja. 3. Melaksanakana Program prioritas. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro. 5. Fasilitasi penilaian SKP TW 3. 6. Fasilitasi UKOM Batch 4. 7. Implementasi aplikasi Sagalo dalam pelaksanaan kegiatan. 8. Melaksanakan Monev kinerja bulan September 2025. 9. Merevieu standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik. 10. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan September. 11. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko	1. Melaksanakan Renja. 2. Monev Renja. 3. Memantau progres pelaksanaan program prioritas. 5. Memfasilitasi penyelesaian SKP TW 3 6. Melaksanakan Ukom Batch 3. 7. Mersiapan KP Desember 2025. 8. Memanfaatkan Google Site SAGALO. 9. Melaksnakan monotiring dan evaluasi kinerja bulan September 10. Meningkatkan Nilai Pokja Pelayanan Publik. 11. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan September	Progres	1. Mengevaluasi progres program prioritas 2. Melaksanakan Monev Renja 3. Melaksanakan Renja 4. mempersiapan pelaksanaan UKOM Batch 4 5. Memanfaatkan semua menu Google Site SAGALO 6. Melaksanakan Monev kinerja bulan Oktober 7. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko .	November	Y	1. S-01 2. IT-07 3. IT-08 4. IT-09 5. SDM-01 6. SDM-02 7. F-01 8. F-02	1. Ketidaktepatan dalam menetapkan target kinerja 2. Subsite SAGALO tidak dapat diakses secara offline 3. Keamanan tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 4. Keterbatasan kapasitas tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 5. Terdapat pengisian komponen pengelolaan kinerja pegawai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						disemua zona komponen pengungkit dan hasil dan terdapat rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti. 10. Aplikasi Sagalo pada Monev dan QMS telah dimanfaatkan. 11. Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja untuk bulan Juli 2025 telah dilaksanakan. 12. Monev online bulan Agustus sudah diinput. 13. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik. 14. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten 15. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko								pada aplikasi SIMAKIN yang belum sesuai dan tidak lengkap antara lain Adanya kesalahan dalam menginput target, ketidaksesuaian daduk, serta belum melaksanakan pembinaan kinerja. 6. Tidak lengkapnya berkas usulan naik pangkat pegawai. 7. Pelaku usaha memberi suap kepada petugas untuk menguranggi / menghilangkan ketidaksesuaian

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														8. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	-	-	-	1. Melakukan monitoring pelaksanaan renja dan program prioritas. 2. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor. 3. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik 5. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 6. Proses SKP TW 4. 7. Pelaksanaan UKOM Bacth 4. 8. Persiapan KP Desember 2025. 9. Nilai Hasil Evalausi Pembangunan ZI 2025 telah keluar dengan hasil MS disemua zona	1. Melaksanakan Renja 2. Monitoring dan evaluasi Renja 3. Melaksanakana Program prioritas 4. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro 5. Fasilitasi penilaian SKP TW 4. 6. Fasilitasi UKOM Batch 4. 7. Implementasi aplikasi Sagalo dalam pelaksanaan kegiatan. 8. Melaksanakan Monev kinerja bulan Oktober 20259. Meningkatkan/mempertahankan nilai IPAK. 10. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan Oktober. 11. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko	1. Melaksanakan Renja 2. Monev Renja. 3. Memantau progres pelaksanaan program prioritas. 4. Melaksanakan Ukom Batch 4. 5. Mersiapan KP Desember 2025 6. Memanfaatkan Google Site SAGALO. 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bulan Oktober. 8. Meningkatkan Nilai Pokja Pelayanan Publik. 9. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan Oktober. .	Progres	1. Mengevaluasi progres program prioritas 2. Melaksanakan Monev Renja 3. Melaksanakan Renja 4. Memfasilitasi penyelesaian SKP TW 4 5. mempersiapan pelaksanaan UKOM Batch 4 6. Penyelesaian kenaikan Pangkat Desember 2025 7. Memanfaatkan semua menu Google Site SAGALO 8. Melaksanakan Monev kinerja bulan November 9. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko.	Desember	Y	1. S-01 2. IT-07 3. IT-08 4. IT-09 5. SDM-01 6. SDM-02 7. F-01 8. F-02	1. Ketidaktepatan dalam menetapkan target kinerja 2. Subsite SAGALO tidak dapat diakses secara offline 3. Keamanan tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 4. Keterbatasan kapasitas tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 5. Terdapat pengisian komponen pengelolaan kinerja pegawai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						komponen pengungkit dan hasil dan terdapat rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti. 10. Aplikasi Sagalo pada Monev dan QMS telah dimanfaatkan. 11. Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja untuk bulan September 2025 telah dilaksanakan. 12. Monev online bulan September sudah diinput. 13. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik . 14. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. 15. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko								pada aplikasi SIMAKIN yang belum sesuai dan tidak lengkap antara lain Adanya kesalahan dalam menginput target, ketidaksesuaian daduk, serta belum melaksanakan pembinaan kinerja. 6. Tidak lengkapnya berkas usulan naik pangkat pegawai. 7. Pelaku usaha memberi suap kepada petugas untuk menguranggi / menghilangkan ketidaksesuaian

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														8. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	90.00	90.21	100.23%	1. Melakukan monitoring pelaksanaan renja dan program prioritas. 2. Program prioritas zona 2 helpdesk berjalan lancar dan selalu dimonitor. 3. Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan di setiap fungsi sesuai SOP. 4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi kegiatan dalam pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik/ 5. Monitoring dan evaluasi KIP sesuai peraturan per-UU. 6. Proses SKP TW 4. 7. Pelaksanaan UKOM Bacth 4. 8. Persiapan KP Desember 2025. 9. Nilai Hasil Evalausi Pembangunan ZI 2025 telah keluar dengan hasil MS disemua zona	1. Melaksanakan Renja. 2. Monitoring dan evaluasi Renja. 3. Melaksanakana Program prioritas. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi adanya review/perubahan terhadap SOP Makro maupun Mikro. 5. Fasilitasi penilaian SKP TW 4. 6. Fasilitasi UKOM Batch 4. 7. Implementasi aplikasi Sagalo dalam pelaksanaan kegiatan. 8. Melaksanakan Monev kinerja bulan Noevember 2025. 9. Meningkatkan/mempertahankan nilai IPAK. 10. Memberi penghargaan dan sanksi kepda petugas layanan bulan November. 11. Mengembangakn inovasi pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen risiko	1. Melaksanakan Renja 2. Monev Renja 3. Memantau progres pelaksanaan program prioritas 4. Melaksanakan Ukom Batch 4 5. Mersiapan KP Desember 2025. 6. Memanfaatkan Google Site SAGALO. 7. Melaksanakan monotiring dan evaluasi kinerja bulan November. 8. Meningkatkan Nilai Pokja Pelayanan Publik. 9. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan bulan November .	Selesai			Y	1. S-01 2. IT-07 3. IT-08 4. IT-09 5. SDM-01 6. SDM-02 7. F-01 8. F-02	1. Ketidaktepatan dalam menetapkan target kinerja 2. Subsite SAGALO tidak dapat diakses secara offline 3. Keamanan tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 4. Keterbatasan kapasitas tempat penyimpanan data/dokumen di Subsite SAGALO. 5. Terdapat pengisian komponen pengelolaan kinerja pegawai

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						komponen pengungkit dan hasil dan terdapat rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti. 10. Aplikasi Sagalo pada Monev dan QMS telah dimanfaatkan. 11. Implementasi Sakip dalam pencapaian kinerja untuk bulan Desember 2025 telah dilaksanakan. 12. Monev online bulan Oktober sudah diinput. 13. Peningkatan Nilai Pokja Pelayanan Publik. 14. Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan secara konsisten. 15. Inovasi Pelayanan Publik yang berdasarkan kebutuhan stakeholder atau hasil manajemen resiko								pada aplikasi SIMAKIN yang belum sesuai dan tidak lengkap antara lain Adanya kesalahan dalam menginput target, ketidaksesuaian daduk, serta belum melaksanakan pembinaan kinerja. 6. Tidak lengkapnya berkas usulan naik pangkat pegawai. 7. Pelaku usaha memberi suap kepada petugas untuk menguranggi / menghilangkan ketidaksesuaian

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														8. Adanya pemberian gratifikasi dari pelaku usaha kepada petugas agar hasil audit memenuhi kriteria untuk direkomendasikan.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Oktober	-	-	-	1. Terdapatnya IKU baru tahun 2025 yg mulai dihitung realisasi pada bulan Agustus 2025 2. Semua target IKU yang telah tercapai.	1. Menginput data monev online bulan September 2025 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan September 2025 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target selalu tercapai 4. Menyusun Laporan Evaluasi Internal dan Kinerja Interim TW 3 Tahun 2025	1. Menginput data monev online bulan September 2025 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan September 2025. 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua IKU agar target selalu tercapai. 4. Menyusun Laporan Evaluasi Internal dan Kinerja Interim TW 3 Tahun 2025	Selesai			Y	1. S-01 2. S-02 3. O-05 4. O-06 5. O-07 6. S-03 7. O-11	1. Ketidakte patan dalam menetapk an target kinerja. 2. Ketidakte patan dalam menetapk an target RAPK per bulan 3. Pengumpu lan dan pengolaha n data yang salah 4. Monitorin g kendala/h ambatan dengan tindak lanjut dan rencana aksi tidak selaras. 5. Pengirima n laporan tidak tepat waktu. 6. Terdapatn ya

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														kesalahan data pada Laporan kinerja interim. 7. Data Dukung LKE SAKIP tidak lengkap.
		November	-	-	-	Terdapat target satu Indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai.	1. Menginput data monev online bulan Oktober di aplikasi. 2. Menginput Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan Oktober 2025. 3. Melaksanakan implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua Indikator kinerja kegiatan agar target dapat tercapai	1. Menginput data monev online bulan Oktober 2025. 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan Oktober 2025 3. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua Indikator kinerja kegiatan agar target selalu tercapa.	Selesai			Y	1. S-01 2. S-02 3. O-05 4. O-06 5. O-07 6. S-03 7. O-11	1. Ketidakte patan dalam menetapkan target kinerja. 2. Ketidakte patan dalam menetapkan target RAPK per bulan 3. Pengumpulan dan pengolahan data yang salah

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														4. Monitoring kendala/hambatan dengan tindak lanjut dan rencana aksi tidak selaras. 5. Pengiriman laporan tidak tepat waktu. 6. Terdapatnya kesalahan data pada Laporan kinerja interim. 7. Data Dukung LKE SAKIP tidak lengkap.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	82.00	80.54	98.22%	Terdapat target Indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai.	1. Menginput data monev online bulan November di aplikasi. 2. Menginput Monev capaian kinerja oleh ka Tim Bulan November 2025. 3. Melaksanakan implementasi SAKIP sesuai pedoman pada semua Indikator kinerja kegiatan agar target dapat tercapai	1. Menginput data monev online bulan November 2025 2. Mengisi Monev capaian kinerja bulan November 20253. Mengimplementasikan SAKIP sesuai pedoman pada semua Indikator kinerja kegiatan agar target selalu tercapai	Selesai			Y	1. S-01 2. S-02 3. O-05 4. O-06 5. O-07 6. S-03 7. O-11	1. Ketidakte patan dalam menetapkan target kinerja. 2. Ketidakte patan dalam menetapkan target RAPK per bulan 3. Pengumpulan dan pengolahan data yang salah 4. Monitoring kendala/hambatan dengan tindak lanjut dan rencana aksi tidak selaras. 5. Pengiriman laporan tidak tepat waktu. 6. Terdapatnya

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														kesalahan data pada Laporan kinerja interim. 7. Data Dukung LKE SAKIP tidak lengkap.

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Oktober	-	-	-	Nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Oktober yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 4. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Oktober. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Oktober. 6. Melaporkan capaian output bulan September secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Oktober. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	1. Melakukan revisi DIPA 2. Menjaga konsistensi RPD bulan September yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bulan Oktober. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Oktober. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Oktober. 6. Melaporkan capaian output bulan September secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Oktober	Selesai			Y	1. K-01 2. K-02 3. O-08 4. O-09 5 O-10	1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. 2. Besarnya pengembalian sisa TUP 3. Revisi anggaran melebihi batas maksimal dalam 1 semester 4. Realisasi anggaran per triwulan tidak mencapai target triwulan yang ditetapkan oleh Kemenkeu 5. Realisasi

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		November	-	-	-	Nilai IKPA belum maksimal.	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan November yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 4. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan November. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan November. 6. Melaporkan capaian output bulan Oktober secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan November. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	1. Menjaga konsistensi RPD bulan November yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan November. 3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulanNovember. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan November. 5. Melaporkan capaian output bulan Oktober secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan November	Selesai			Y	1. K-01 2. K-02 3. O-08 4. O-09 5 O-10	1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. 2. Besarnya pengembalian sisa TUP 3. Revisi anggaran melebihi batas maksimal dalam 1 semester 4. Realisasi anggaran per triwulan tidak mencapai target triwulan yang ditetapkan oleh Kemenkeu 5. Realisasi

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	5.00	5	100.00%	Nilai IKPA 96,90 dan Nilai EKA 85,92 maka nilai NKA 50% IKPA + 50% EKA= 91,41 dengan kategori sangat baik (level 5)	1. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan dan memaksimalkan pengajuan beberapa jenis revisi dalam 1 kali pengajuan revisi. 2. Menjaga Konsistensi RPD bulan Desember yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa untuk mencapai target realisasi anggaran TW 4. 4. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Desember. 5. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulan Desember. 6. Melaporkan capaian output bulan November secara tepat dan tepat waktu. 7. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Desember. 8. Melakukan efisiensi anggaran RO SBK.	1. Menjaga konsistensi RPD bulanDesember yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA. 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan barang dan jasa pada bualan Desember. 3. Mendaftarkan data kontrak secara tepat waktu pada bulan Desember. 4. Mempercepat pembayaran belanja kontraktual pada bulanDesember. 5. Melaporkan capaian output bulanNovember secara tepat dan tepat waktu. 6. Menyelesaikan pertanggungjawaban UP dan TUP dengan tepat waktu pada bulan Desember.	Selesai			Y	1. K-01 2. K-02 3. O-08 4. O-09 5 O-10	1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah tertuang dalam halaman III DIPA. 2. Besarnya pengembalian sisa TUP 3. Revisi anggaran melebihi batas maksimal dalam 1 semester 4. Realisasi anggaran per triwulan tidak mencapai target triwulan yang ditetapkan oleh Kemenkeu 5. Realisasi

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
														Capaian Output lebih rendah dari target bulanan yang telah ditetapkan
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Oktober	-	-	-	1. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 2. Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Telah menetapkan isu Internal dan eksternal 2025. 4. Hampir semua IKU telah diidentifikasi	1. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. 2. Memastikan kembali seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 3. Mememeriksa kesesuaian identifikasi risiko yang ada apakah telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada. 4. Memeriksa daftar	1. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi (risiko yang dimitigasi yaitu penindakan dan Infokom). 2. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 3. Telah melakukan identifikasi ada beberapa isi internal dan eksternal tidak	Progres	1. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
						risikonya. 5. Semua risiko yang dimitigasi telah dilakukan monitoring risiko	risiko yang ada apakah telah meliputi semua IKK yang telah ditetapkan	ada dalam daftar risiko dan juga ada IKK yang belum teridentifikasi risikonya						
		November	-	-	-	1. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 2. Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Telah menetapkan isu Internal dan eksternal 2025. 4. Hampir semua IKU telah diidentifikasi risikonya. 5. Semua risiko yang dimitigasi telah dilakukan monitoring risiko	1. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi 2. Mememeriksa kesesuaian identifikasi risiko yang ada apakah telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada. 3. Memeriksa daftar risiko yang ada apakah telah meliputi semua IKK yang telah ditetapkan	1. Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah diidentifikasi (risiko yang dimitigasi yaitu penindakan dan Infokom). 2. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 3. Telah melakukan identifikasi ada beberapa isu internal dan eksternal tidak ada dalam daftar risiko dan juga ada IKK yang belum teridentifikasi risikonya.	Progres	1. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Desember	T	-	-

NO	INDIKATOR	PERIODE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	STATUS	PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI	TIMELINE	APAKAH SUDAH DIKELOLA	KODE RISIKO	PERISTIWA RISIKO
		Desember	2.95	2.94	99.66%	1. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko. 2. Belum semua identifikasi risiko telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada 3. Telah menetapkan isu Internal dan eksternal 2025. 4. Hampir semua IKU telah diidentifikasi risikonya. 5. Semua risiko yang dimitigasi telah dilakukan monitoring risiko	1. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap risiko yang telah diidentifikasi 2. Mememeriksa kesesuaian identifikasi risiko yang ada apakah telah mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal yang ada.	1. Semua pegawai telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko 2. Telah melakukan identifikasi ada beberapa isi internal dan eksternal tidak ada dalam daftar risiko dan juga ada IKU yang belum teridentifikasi risikonya	Selesai			T	-	-

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pemanfaatan Informasi dapat berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Pemanfaatan Informasi Kinerja terhadap capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   Indikator ini baru muncul pada target Renstra 2025-2029. Pada definisi operasional dinyatakan bahwa tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil uji. UPT juga harus melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampel banyak faktor yang harus menjadi perhatian dan harus dilaksanakan karena menjadi penentu realisasi indikator tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian. Terdapat perubahan defenisi operasional dan perubahan matriks kertas kerja serta perubahan target mulai bulan Agustus 2025. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyusun perencanaan kerja sampling dan pengujian berbasis resiko sesuai petunjuk teknis pedoman sampling tahun 2025. Selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi dan revisi anggaran, terutama anggaran pembelian sampel dan reagensia. Pada bulan oktober dilakukan usulan perubahan target kategori sampling berdasarkan realisasi sampling sampai triwulan 3 dengan persetujuan unit pengampu. Pada akhir tahun 2025, target indikator dapat tercapai, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampel sediaan farmasi telah dilakukan sesuai pedoman.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

   Realisasi indikator dihitung pada akhir tahun, namun progress sudah bisa dihitung setelah diberikan KIE Farmakovigilans berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Maka dari hasil monitoring progres pelaporan KTD/ESO setelah pelaksanaan KIE secara daring pada Bulan Februari 2025 sampai Bulan Oktober, hanya ada laporan dari 6 fasilitas pelayanan kesehatan, dan tidak ada progres penambahan laporan dari Bulan Agustus hingga Oktober 2025. Menindaklanjuti tidak adanya progres pelaporan ini, Balai Besar POM di Padang mengadakan kegiatan Forum Komunikasi dengan mengundang kembali peserta KIE secara luring ke Kantor Balai Besa POM di Padang dan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Pengawas pelaksanaan Farmakovigilans di fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus narasumber untuk berdiskusi menyamakan persepsi dan mengadakan desk serta coaching pelaporan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id.

   Setelah pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaporan KTD/ESO pada tanggal 6 November 2025, terdapat penambahan 6 fasyankes baru yang melaporkan KTD/ESO pada Bulan November dan 1 fasyankes pada Bulan Desember, sehingga total laporan menjadi 13 dan mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Indikator ini terdapat pada target Renstra 2025-2029. Pada defenisi operasional dinyatakan bahwa tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil uji. UPT juga harus melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampel banyak faktor yang harus menjadi perhatian dan harus dilaksanakan karena menjadi penentu realisasi indikator. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian (parameter penilaian) diantaranya :

   1. Kesesuaian target sampel dengan bobot 20%
   2 Kesesuaian parameter uji dengan bobot 20%
   3. Ketepatan pengambilan kesimpulan dengan bobot 20%
   4. Ketepatan waktu pengambilan sampel dengan bobot 10%
   5. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dengan bobot 10%
   6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan bobot 20%

Diitindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan antara lain terhadap produk TIE, rusak, kadaluarsa, TMS pemgujian, pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pemeriksaan terkait hasil pengujian TMS, koordinasi dengan pusat terkait sampel TMS dan Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyusun perencanaan kerja sampling dan pengujian berbasis resiko sesuai petunjuk teknis pedoman sampling tahun 2025. Selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi dan revisi anggaran, terutama anggaran pembelian sampel dan reagensia. Pada bulan agustus terdap perubahan target indikator berdasarkan hasil kesepatan bersama dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melihat realisasi indikator sampai triwulan II. Kemudian pada bulan oktober dilakukan usulan perubahan target kategori sampling berdasarkan realisasi sampling sampai triwulan 3 dengan persetujuan unit pengampu. Pada akhir tahun berjalan, target indikator dapat tercapai dengan persentase yang melenihi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampling dan pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan telah dilakukan sesuai pedoman.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

   Yang dimaksud sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB. Sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan sampel KLB melibatkan berbagai pihak oleh karena itu perlu meningkatkan koordinasi internal dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus KLB. Nilai indikator ini dapat tercapai hingga akhir tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100%.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   Indikator ini terdapat pada target Renstra 2025-2029 dengan timeline penyelesaian sampling dan pengujian pada triwulan II. Pada defenisi operasional dinyatakan bahwa tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil uji. UPT juga harus melaporkan

tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampel banyak faktor yang harus menjadi perhatian dan harus dilaksanakan karena menjadi penentu realisasi indikator. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan masing-masing komponen penilaian (parameter penilaian) diantaranya :

1. Kesesuaian target sampel dengan bobot 20%
2 Kesesuaian parameter uji dengan bobot 20%
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan dengan bobot 20%
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel dengan bobot 10%
5. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dengan bobot 10%
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan bobot 20%

Diitindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan antara lain terhadap produk TIE, rusak, kadaluarsa, TMS pemgujian, pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi, pemeriksaan terkait hasil pengujian TMS, koordinasi dengan pusat terkait sampel TMS dan Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyusun perencanaan kerja sampling dan pengujian berbasis resiko sesuai petunjuk teknis pedoman sampling tahun 2025. Selanjutnya dilakukan monitoring evaluasi dan revisi anggaran, terutama anggaran pembelian sampel dan reagensia. Pada akhir bulan Juni, target indikator ini dapat tercapai dengan persentase yang melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampling dan pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan telah dilakukan sesuai pedoman. Adapun usaha yang dilakukan untuk pencapaian target ini adalah dengan melakukan percepatan sampling, pengujian dan tindak lanjut hasil laporan pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimulai dengan melakukan proses pelaksanaan sampling pada minggu 1 sehingga laporan pengujian dan tindak lanjut juga dapat terealisasi pada bulan yang sama serta melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antara fungsi pemeriksaan dan pengujian

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Target indikator ini belum tercapainya pada triwulan I karena masih belum semua sarana mengirimkan CAPAnya, hal ini karena sarana masih membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Untuk mengatasi ini maka diperlukan

pengawalan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, agar segera melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan sesuai dengan rekomendasi keputusan tindak lanjut yang diberikan. Dengan adanya tindak lanjut terhadap evaluasi yang dilakukan, realisasi indikator ini meningkat signifikan pada triwulan II tahun 2025 namun target belum tercapai dan pada triwulan III target telah dapat dicapai.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Tercapainya kinerja ini disebabkan telah terpenuhinya dengan baik semua parameter penilaian dalam pemeriksaan sarana yang dilakukan. Diperlukan komitmen petugas yang ditunjuk agar semua parameter pemeriksaan terpenuhi secara konsisten. Selain itu diperlukan kerjasama tim yang solid dan kerja keras petugas terutama dalam kompetensi melakukan pemeriksaan sesuai pedoman yang diatur dalam SOP sehingga setiap poin-poin pemeriksaan dapat menjadi masukan yang positif dalam pembinaan terhadap pelaku usaha produksi sediaan farmasi. Pada bulan agustus terdap perubahan target indikator berdasarkan hasil kesepatan bersama dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melihat realisasi indikator sampai triwulan II

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Pada bulan agustus terdap perubahan target indikator berdasarkan hasil kesepatan bersama dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melihat realisasi indikator sampai triwulan II.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan melalui tahapan proses yang dimulai dari perencanaan pengawasan berbasis resiko, pelaksanaan pengawasan sarana sesuai petunjuk teknis, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil dalam SIPT dengan tepat waktu sesuai timeline. Pada bulan

agustus terdap perubahan target indikator berdasarkan hasil kesepatan bersama dengan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melihat realisasi indikator sampai triwulan II. Target realisasi indikator pada tahun 2025 tercapai, hal ini menunjukkan bahwa tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Target realisasi indikator pada tahun 2025 dapat tercapai, hal ini menunjukkan bahwa tahap2 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

    Berdasarkan rumusan perhitungan indikator ini dapat diketahui bahwa kualitas hasil pengawasan iklan pada masing-masing komoditi mempengaruhi nilai capaian kinerja pengawasan iklan secara keseluruhan. Perencanaan yang disusun telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengawasan spesifik yang ditetapkan pada masing-masing komoditi, sehingga target indikator dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian seperti keterbatasan jenis media tertentu serta kualitas kompetensi petugas pengawasan iklan memerlukan langkah tindak lanjut yang sesuai.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

    Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan merupakan inidkator yang baru dilakukan penilaiannya pada Agustus tahun 2025. Untuk efektivitas pencapaian target perlu memperhatikan ketersediaan produk yang diawasi terutama produk rokok elektronik dan kecukupan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasannya. Pelaporan pengawasan untuk produk rokok elektronik sebaiknya sudah diakomodasi dengan pelaporan melalui SIPT.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

Realisasi indikator dihitung pada akhir tahun, namun progress sudah bisa dihitung setiap akhir triwulan melalui Link Monev Kegiatan AMR dari Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP. Informasi Kinerja tiap triwulan ini dapat diukur dari kepatuhan petugas dalam pengisian tools antibiotik yang bisa diukur melalui pengisian di SIPT, pelaksanaan advokasi maupun tindak lanjut dari kegiatan advokasi melalui terbitnya Surat Edaran dari pemerintah Daerah yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja serta rencana kerja pengendalian antimikroba. Bimbingan teknis untuk APJ sesuai juknis dilaksanakan secara luring untuk memudahkan penyamaan persepsi dan berdiskusi kepada tenaga kesehatan sebagai frontliner keluarnya antibiotik kepada masyarakat.

14. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

    Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Standar Ruang Lingkup, standar peralatan laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metoda Analisa yang Terverifikasi. Target Tahun 2025 tercapai karena kolaborasi pengawalan dan kerja sama tim laboratorium untuk meningkatkan kinerja, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

    Indikator ini merupakan indikator yang baru ada ketika tahun berjalan yaitu pada bulan Agustus 2025. Indikator ini tidak memiliki rincian output khusus sehingga untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan tercapainya target maka menggunakan anggaran dari QIC.004 sehingga dilaksanakan revisi anggaran untuk penyesuaian kegiatan. Dengan kerjasama tim dan sinergi dengan pemerintah daerah maka target indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 dapat tercapai.

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 sarana pangan fortifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan

fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 62,5 % dengan capaian 99,21%.

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

    Kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang pada Tahun 2025 telah terealisasi dengan capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 101.72 % (kategori Sangat Baik) dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100% (efisien). Kegiatan KIE telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman (Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan). Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya, yaitu: penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan peningkatan kompetensi *public speaking*, media digital, jurnalistik, dan kompetensi yang terkait dengan komunikasi dan edukasi lainnya.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

    Realisasi bulanan IKU ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target RAPK sebanyak 2 kali, revisi yang pertama disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksankan dapat memenuhi target revisi ini. Kemudian dilakukan kembali revisi target pada triwulan 2, hal ini disebabkan karena perhitungan target awal berdasarkan jumlah sekolah yang dapat dilaksanakan intervensi oleh Balai Besar POM di Padang sesuai anggaran setelah efisiensi, namun sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target pada Renstra 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target jumlah sekolah dan desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target tahunan inidikator ini tidak tercapai 100% yaitu intervensi yang dapat dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia karena blokir hanya untuk 5 sekolah dari target awal 14 sekolah.

19. Jumlah desa pangan aman

Realisasi bulanan indikator ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target RAPK pada triwulan I yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memenuhi target revisi ini. Kemudian dilakukan kembali revisi target pada triwulan 2, hal ini disebabkan karena perhitungan target awal berdasarkan jumlah desa yang dapat dilaksanakan intervensi oleh Balai Besar POM di Padang sesuai anggaran setelah efisiensi, namun sesuai arahan dari pengampu bahwa progress RHPK tetap harus berdasarkan target pada Renstra 2025-2029 maka perlu dilakukan revisi target bulanan berdasarkan perhitungan terhadap target desa sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. . Target tahunan inidikator ini tidak tercapai 100% yaitu intervensi yang dapat dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia karena blokir hanya untuk 3 desa dari target awal 6 desa.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Realisasi bulanan indikator ini dihitung berdasarkan progress tahapan program berdasarkan bobot masing-masingnya. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau target yang ditetapkan. Telah dilakukan revisi target RAPK pada triwulan I yang disebabkan adanya kebijakan dari pusat perubahan tahapan dan waktu pelaksanaan program sebagai akibat efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut sehingga progress kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memenuhi target revisi ini pada triwulan III tahun 2025 dengan capaian 100% dan kegiatan telah selesai dilaksankan.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT dan UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Keberhasilan Pencapaian Indikator ini adalah karena Penetapan target sarana UMKM pangan. OBA dan kosmetik yang akan di dampingi telah dilakukan dengan memastikan komitmen masing-masing pelaku usaha akan melaksanakan tahapan pendampingan secara konsisten. Tahapan proses

pendampingan UMKM baik UMKM pangan, OBA dan kosmetik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian pada agustus terdapat perubahan defenisi operasional yang menyebabkan perubahan cara perhitungan dan target tahunan, namun dengan perubahan ini target dapat tercapai bahkan dengan capaian melewati 100%.

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Nilai inidiaktor ini berdasarkan pembobotan proses tahap penyidikan mulai dari SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), Tahap I (selesainya berkas perkara), P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) dan Tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti). Pada tahun 2025 perkara tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target yaitu 4 perkara yang terdiri dari 3 perkara kasus oabta bahan alam tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan 1 perkara kasus obat ilegal. Kemudian untuk 1 perkara carry over telah diselesaikan pada Juni 2025 dengan surat pemebritahuan dihentikannya penyidikan. Dalam pelaksaan kegiatan penindakan petugas didampingi oleh pihak kepolisian dan pada proses penanganan perkara PPNS Balai Besar POM di Padang selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumatera Barat.

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Nilai indikator ini terdiri dari laporan patroli siber dan profiling siber, rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, dan laporan analisis kerawanan kejahatan. Balai Besar POM di Padang pada akhir tahun 2025 memperoleh nilai 95% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaporan Analisis kejahatan Balai Besar POM di Padang telah sesuai kualitas analisanya dan telah dialporkan tepat waktu.

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Nilai Indeks Pelayanan baru dihitung pada akhir tahun, namun nilai telah keluar pada triwulan III. Berdasarkan nilai IPP tahun 2024 dapat dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap nilai yang masih rendah dan pemenuhan data dukung sehingga realisasi Tahun 2025 dapat tercapai sebesar 4,84.

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.

Nilai Pembangunan ZI dihitung pada akhir tahun, namun nilai sudah keluar oada Triwulan III ini. Berdasarkan nilai Indeks RB BBPOM di Padang Tahun 2024 belum memenuhi syarat untuk WBBM (90), untuk itu telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi Inspektorat nilai RB tahun 2024 yang dituangkan dalam penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi RB 2025, sehingga pada tahun 2025 target dapat tercapai dengan nilai pembangunan ZI BBPOM di Padang sebesar 90,21.

26. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

Nilai AKIP dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan evaluasi Inspektorat atas nilai AKIP tahun 2024 maka telah dilakukan perbaikan terhadap rekomendasi atas hasil penilaian AKIP 2024 dan pengisian lembar kerja Evaluasi Sakip Tahun 2025. Desk penilaian Sakip Balai Besar POM di Padang telah dilaksanakan dan dari hasil evaluasi maka nilai AKIP 2025 tidak mencapai target dan nilai mengalami penurunan dari tahun 2024. Maka untuk perbaiknnya kedepannya Balai Besar POM di Padang akan melaksanakan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oelh evaluator.

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran dihitung pada akhir tahun yang etrdiri dari 50% dari nilai IKPA dan 50% dari nilai EKA. Nilai IKPA dihitung setiap bulan maka Balai Besar POM di Padang menargetkan mendapatkan nilai IKPA maksimal pada setiap bulan. Untuk mendapatkan nilai IKPA yang tinggi diperlukan perencanaan dan pelaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman setiap indikator pembentuk nilai IKPA. Sedangakan untuk nilai EKA final dapat dilihat pada akhir tahun. Pada akhir tahun 2025 Nilia Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang telah mencapai target yang ditetapkan namuan Nilai IKPA dan EKA masih bisa dimaksimalkan.

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Nilai Indeks Manajemen Risiko diukur pada akhir tahun. Nilai Maturitas Risiko Balai Besar POM di Padang belum mencapai 3 dengan nilai 2,906. Untuk itu perlu perbaikan penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Padang supaya mendapatkan nilai 3 dengan Tingkat maturitas risk defined. Balai Besar POM di Padang telah melakukan identifikasi Risiko Semester I dan II 2025 dengan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi pada hasil evaluasi penilaian maturitas Risiko Tahun 2024. Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan pengisian kertas kerja penilaian Mandiri Maturitas Risiko dan pengiriman data dukung sehingga memperoleh indeks

manajemen risiko 2,94. Indeks tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 namun masih belum mencapai target 2025. Maka untuk peningaktan ke depannya Balai Besar POM di Padang akan menindakalnjuti rekomendasi dari evaluator untuk peningkatan indeks manajemen risiko.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran dengan pagu awal sebesar Rp.36.739.481.000 (termasuk blokir sebesar Rp.4.867.946.000) sesuai yang telah ditetapkan pada DIPA Nomor: SP DIPA- 063.01.2.432810/2025 tanggal 02 Desember 2024. Kemudian terdapat perubahan dan pergeseran pagu sebagai berikut:

1. Pemblokiran mandiri dalam rangka Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara pada belanja barang dan belanja modal dengan total sebesar Rp.17.106.396.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 01 tanggal 22 Februari 2025.
2. Pemanfaatan belanja modal dari rincian output pengadaan alat laboratorium ke rincian output layanan perkantoran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran gaji PPNPN sampai Desember 2025 sebesar Rp.272.970.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 02 tanggal 21 Maret 2025.
3. Pembukaan blokir relaksasi anggaran pada belanja barang sebesar Rp.4.562.382.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 03 tanggal 09 April 2025.
4. Pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp.259.336.000 dan penambahan belanja barang sebesar Rp.8.808.000 dalam rangka Revisi Anggaran Kebutuhan Belanja Pegawai Exsisting dan Anggaran CASN TA 2025 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 05 tanggal 07 Juli 2025.
5. Pengurangan pagu belanja modal sebesar Rp.68.132.000 dalam rangka Memenuhi kebutuhan anggaran untuk CASN TA 2025 Biro SDM yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 08 tanggal 31 Oktober 2025.
6. Pembukaan blokir relaksasi anggaran pada belanja barang sebesar Rp.75.778.000 yang ditetapkan pada DIPA Revisi ke 09 tanggal 11 November 2025.

Maka pagu anggaran akhir Balai Besar POM di Padang pada tahun 2025 sebesar Rp.36.412.013.000 dengan total blokir pada belanja barang dan belanja modal sebesar Rp.12.468.236.000 sesuai dengan DIPA Revisi ke 10 tanggal 26 November 2025. Balai Besar POM di Padang mengelola anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan

penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.23.751.537.766 atau 65,23%. Adapun realisasi setelah dikurangi pagu blokir sebesar 99,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.104. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	BLOKIR (Rp.)	PAGU SETELAH DIKURANGI BLOKIR (Rp.)	REALISASI (Rp.)*	PERSENTASE REALISASI (%)	
					SEBELUM DIKURANGI BLOKIR	SETELAH DIKURANGI BLOKIR
Belanja Pegawai	8.779.337.000	0	**8.779.337.000**	**8.768.855.600**	99,88%	**99,88%**
Belanja Barang	22.574.646.000	11.585.104.000	**10.989.542.000**	**10.810.528.590**	47,89%	**98,37%**
Belanja Modal	5.058.030.000	883.132.000	**4.174.898.000**	**4.172.153.576**	82,49%	**99,93%**
Total	**36.412.013.000**	**12.468.236.000**	**23.943.777.000**	**23.751.537.766**	**65,23%**	**99,20%**

*Ket: *OMSPAN*

Sisa anggaran tertinggi pada belanja barang yaitu dari perjalanan dinas, honor konsultasi, pemeliharaan halaman dan langganan daya dan jasa (listrik, air, dan internet).

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 28 indikator kinerja dengan 8 sasaran kegiatan serta 23 rincian output sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja

Tabel 3.105 Realisasi Anggaran per Indikator Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
		TARGET		DESEMBER		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
		RENSTRA 2029	TAHUN 2025	TARGET	REALISASI	BULANAN	TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI**	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	89,25	89,25	97,37	109,10	109,10	103,31	614.745.000	613.877.855	99,86

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
		TARGET		DESEMBER		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	26,00	28,89	111,12	111,12	96,30	36.100.000	2.000.000	5,54
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	89,00	89,00	100,00	112,36	112,36	107,53	391.600.100	391.466.606	99,97
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32.249.420	32.238.426	99,97
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	105,26	36.856.480	36.843.916	99,97
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,25	89,50	89,50	92,95	103,85	103,85	101,86	26.921.310	26.792.535	99,52
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	90,00	90,00	95,83	106,48	106,48	101,95	5.325.000	5.323.200	99,97
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,00	91,00	100,00	109,89	109,89	105,26	39.050.000	39.036.800	99,97
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,25	93,75	93,75	97,89	104,42	104,42	99,63	538.426.200	535.850.701	99,52
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	85,00	100,00	117,65	117,65	105,26	287.160.640	285.787.041	99,52
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	96,00	91,60	91,60	99,04	108,12	108,12	103,17	17.947.540	17.861.690	99,52
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,00	90,00	90,00	97,50	108,33	108,33	103,72	8.973.770	8.930.845	99,52

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
		TARGET		DESEMBER		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	105,57	105,57	105,57	105,57	8.973.770	8.930.845	99,52
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,67	77,00	76,90	82,80	107,67	107,53	124,19	7.449.869.000	7.371.860.920	98,95
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	85,90	11,11	11,11	11,11	100,00	100,00	12,93	8.973.770	8.930.845	99,52
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	63,00	62,50	99,21	99,21	83,33	2.040.000	2.040.000	100,00
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	88,00	89,51	101,72	101,72	97,80	8.429.205.000	1.243.825.241	14,76
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	14,00	7,00	50,00	50,00	33,33	574.628.000	85.779.750	14,93
19	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	6,00	3,00	50,00	50,00	30,00	882.108.000	50.609.500	5,74
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	50,00	120.163.000	20.895.000	17,39
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	15,85	15,85	18,29	115,39	115,39	18,29	40.082.000	1.190.000	2,97
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	90,00	75,00	83,33	83,33	79,79	480.364.000	462.239.106	96,23

NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR							ANGGARAN		
		TARGET		DESEMBER		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)			2025		CAPAIAN (%)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	90,00	95,00	105,56	105,56	101,06	144.506.000	10.080.000	6,98
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70	4,70	4,84	102,98	102,98	98,78	124.228.000	114.647.064	92,29
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00	90,00	90,21	100,23	100,23	100,01	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00	82,00	80,54	98,22	98,22	95,88	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95	2,95	2,94	99,59	99,59	93,27	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
TOTAL									**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja tertinggi sebesar 117,65% yaitu pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi anggaran sebesar 99,52% dan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi anggaran sebesar 99,97%. Sedangkan untuk capaian kinerja terendah sebesar 50% yaitu pada indikator:

1. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi anggaran sebesar 14,93%. Hal ini karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi sehingga anggaran yang bisa digunakan terbatas.
2. Jumlah desa pangan aman dengan realisasi anggaran sebesar 5,74%. Hal ini karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi sehingga anggaran yang bisa digunakan terbatas.

Kemudian untuk realisasi anggaran per indikator tertinggi sebesar 100% yaitu pada indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian indikator 99,21%. Target pengawasan sarana fortifikasi tahun 2025 adalah 5 sarana dan kelima sarana telah diperiksa sehingga menyerap anggaran 100% sedangkan untuk capaian indikator diperoleh dari target 5 sarana yang diperiksa dibagi dengan total jumlah sarana fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan basis data tahun 2023 yaitu 8 sarana sehingga capaian indikator 2025 diperoleh 99,21%. Jadi walaupun tidak 100% namun target 5 sarana telah diperiksa dan ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk realisasi anggaran terendah sebesar 2,97% yaitu pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian indikator 115,39%. Realisasi rendah karena terdapat blokir anggaran pada rincian output UMKM namun indikator tetap tercapai karena skema kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan UMKM yang sebelumnya luring sebagian dialihkan menjadi daring.

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Tabel 3.106 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (Rata-Rata Indikator)	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi**	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,15	9.503.172.000	9.385.732.225	98,76
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,21	2.040.000	2.040.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	75,43	10.006.104.000	1.401.109.491	14,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115,39	40.082.000	1.190.000	2,97
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,33	480.364.000	462.239.106	96,23
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,56	144.506.000	10.080.000	6,98
7	Layanan Publik UPT yang prima	102,98	124.228.000	114.647.064	92,29

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (Rata-Rata Indikator)	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi**	%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,51	16.111.517.000	12.374.500.079	76,81
Total		**98,69**	**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
***Realisasi Omspan*

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai capaian sasaran kegiatan tertinggi 115,39% yaitu pada sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan realisasi anggaran sebesar 2,97%. Sedangkan nilai capaian sasaran kegiatan terendah 75,43% yaitu pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar 14,00%. Kemudian realisasi anggaran sasaran kegiatan tertinggi sebesar 100% yaitu pada sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai capaian sasaran 99,21%. Sedangkan realisasi anggaran sasaran kegiatan terendah sebesar 2,97% yaitu pada sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan nilai capaian sasaran 115,39%. Persentase realisasi anggaran diperoleh dari total pagu termasuk pagu blokir.

c. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel 3.107 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Pagu 2025*	Realisasi	%
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,066,935,000	11,514,230,297	52.18
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14,345,078,000	12,237,307,469	85.31
Total		**36,412,013,000**	**23,751,537,766**	**65.23**

*Ket: *Total pagu termasuk pagu blokir*

Tabel 3.108 Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Pagu*	Realisasi**	%
1	DR	3165	AEA	'001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	14	100	144.506.000	10.080.000	6,98
2	DR	3165	BAH	'001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	569	99,99	124.228.000	114.647.064	92,29

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Pagu*	Realisasi**	%
3	DR	3165	BDC	'001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	4044	99,99	8.271.190.000	1.213.960.641	14,68
4	DR	3165	BKB	'001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	1	100	884.000.000	137.192.411	15,52
5	DR	3165	BMB	'001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	36	100	158.015.000	29.864.600	18,90
6	DR	3165	CAB	'001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	121.000.000	-	0,00
7	DR	3165	CAN	'001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	100.000.000	-	0,00
8	DR	3165	CBV	'001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	661.439.000	-	0,00
9	DR	3165	PDD	'001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	1	100	3.274.278.000	3.199.707.344	97,72
10	DR	3165	QCD	U18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	4	100	480.364.000	462.239.106	96,23
11	DR	3165	QDB	'001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	Lembaga	7	99,99	574.628.000	85.779.750	14,93
12	DR	3165	QDB	'002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	3	99,99	882.108.000	50.609.500	5,74
13	DR	3165	QDB	'003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	1	100	120.163.000	20.895.000	17,39
14	DR	3165	QDC	'001	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	36.100.000	2.000.000	5,54
15	DR	3165	QDG	'001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	15	100	40.082.000	1.190.000	2,97
16	DR	3165	QIA	'001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	528	100	460.706.000	460.548.948	99,97
17	DR	3165	QIA	'002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	1038	100	614.745.000	613.877.855	99,86
18	DR	3165	QIC	'001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	51	100	44.375.000	44.360.000	99,97
19	DR	3165	QIC	'003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	2.040.000	2.040.000	100,00

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Pagu*	Realisasi**	%
20	DR	3165	QIC	'004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	692	100	897.377.000	893.084.502	99,52
21	DR	3165	RAB	'001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	1	100	4.175.591.000	4.172.153.576	99,92
22	WA	6384	EBA	956	Layanan BMN	1	Layanan	1	100	8.000.000	7.870.000	98,38
23	WA	6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100	14.337.078.000	12.229.437.668	85,30
Total						**30432**		**7057**		**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
*** Realisasi OMSPAN*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 23 RO terdapat 3 RO yang anggaran full diblokir dan 11 RO diblokir sebagian. Adapun untuk realisasi target volume 1 RO tidak tercapai, 3 RO tercapai sebagian sesuai anggaran yang tersedia setelah dikurangi blokir, dan 4 RO realisasi melebihi target.

RO yang tidak tercapai adalah BAH.001. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT dengan realisasi volume 569 dari target 791 dokumen. Realisasi layanan sertifikasi ini terdiri dari sertifikasi yaitu rekomendasi PBF, IP CPPOB, CPOTB, SPA CPKB, SKE dan SKI dengan total 323 layanan dan pengujian sampel pihak ke-3 sebanyak 246 sampel dengan total keputusan sertifikasi 569 dokumen. Faktor penyebab target RO BAH.001 ini tidak tercapai karena rendahnya pengujian sampel pihak ketiga. Pengujian sampel pihak ketiga dari kepolisian berkurang pada tahun 2025 karena pada tahun ini mulai diberlakukan tarif uji sesuai Kepka Nomor 489 Tahun 2024 yang mana tarif uji pengujian lebih tinggi daripada tarif yang berlaku sebelumnya yaitu PP Nomor 32 Tahun 2017 sehingga sampel pihak ketiga yang biasanya banyak dari kepolisian menjadi berkurang dan pihak kepolisian memilih mengujikan sampelnya ke Laboratorium Forensik POLDA Riau. Hal ini menyebabkan realisasi Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga) menjadi turun signifikan sehingga target tidak tercapai.

Adapun untuk 3 RO tercapai sebagian sesuai anggaran yang tersedia setelah dikurangi blokir yaitu:

1. BDC.001. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE dengan realisasi volume 4044 dari target 27194 orang. Hali ini karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi maka target masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE 27.194 Orang disesuaikan menjadi 3.944 orang (KIE TOMAS + Rutin) dan telah dilaksanakan dengan realisasi sebanyak 4.044 orang.
2. QDB.001. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi volume 7 dari target 14 sekolah. Hali ini karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi maka intervensi sekolah hanya bisa dilaksanakan untuk 7 dari target 14 sekolah dan semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 7 sekolah.
3. QDB.002. Desa Pangan Aman dengan realisasi volume 3 dari target 6 desa. Hal ini karena karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi maka intervensi desa hanya bisa dilaksanakan untuk 3 dari target 6 desa dan semua tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk 6 desa.

Kemudian realisasi anggaran tertinggi sebesar 100% yaitu pada rincian output Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT dengan realisasi 4 dari target output 5 sarana. Sedangkan untuk realisasi anggaran terendah sebesar 2,97% yaitu pada rincian output UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT dengan realisasi 15 dari target output 13 UMKM.

d. Pengukuran Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = 1$$

.

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

Pada tahun 2025 telah terdapat 28 indikator. Dari 28 indikator berdasarkan tingkat efisiensi maka 22 indikator dikategorikan efisien dengan persentase 100% dan 6 indikator tidak efisien. Jadi secara secara total tingkat efisien 100% dengan nilai tingkat efisiensi 0,02.

Tabel 3.109 Nilai Efisiensi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	97,37	109,10	614.745.000	613.877.855	99,86	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	28,89	111,12	2.000.000	2.000.000	100,00	**1,11**	**0,11**	**100 %**	Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	100,00	112,36	391.600.100	391.466.606	99,97	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	32.249.420	32.238.426	99,97	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	36.856.480	36.843.916	99,97	**1,18**	**0,18**	**100 %**	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	92,95	103,85	26.921.310	26.792.535	99,52	**1,04**	**0,04**	**100 %**	Efisien

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	95,83	106,48	5.325.000	5.323.200	99,97	**1,07**	**0,07**	**100 %**	Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	39.050.000	39.036.800	99,97	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	97,89	104,42	538.426.200	535.850.701	99,52	**1,05**	**0,05**	**100 %**	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	287.160.640	285.787.041	99,52	**1,18**	**0,18**	**100 %**	Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60	99,04	108,12	17.947.540	17.861.690	99,52	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90,00	97,50	108,33	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100,00	105,57	105,57	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,06**	**0,06**	**100 %**	Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,90	82,80	107,67	7.449.176.000	7.371.860.920	98,96	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11	11,11	100,00	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan	63,00	62,50	99,21	2.040.000	2.040.000	100,00	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**	
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	89,51	101,72	1.247.970.000	1.243.825.241	99,67	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	7,00	50,00	85.801.000	85.779.750	99,98	**0,50**	**-0,50**	**Tidak Efisien**	
19	Jumlah desa pangan aman	6,00	3,00	50,00	50.630.000	50.609.500	99,96	**0,50**	**-0,50**	**Tidak Efisien**	
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	20.900.000	20.895.000	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,85	18,29	115,39	2.122.000	1.190.000	56,08	**2,06**	**1,06**	**86 %**	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	75,00	83,33	480.364.000	462.239.106	96,23	**0,87**	**-0,13**	**Tidak Efisien**	

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	95,00	105,56	10.500.000	10.080.000	96,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,84	102,98	124.228.000	114.647.064	92,29	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	90,21	100,23	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	80,54	98,22	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**	
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,94	99,59	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
TOTAL					**23.943.777.000**	**23.751.537.965**	**99,20**				
RATA-RATA EFISIENSI				**101**	**855.134.893**	**848.269.213**	**99,20**	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien

*Ket: * Target Anggaran adalah Pagu setelah dikurangi Blokir*

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Sebagai capaian output adalah capaian masing-masing IKK sedangkan inputnya adalah persentase realisasi anggaran yang mendukung IKK terkait dengan menggunakan target anggaran setelah dikurangi pagu blokir pada RO terkait.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian masing-masing indikator kinerja kegitan sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan target anggaran Tahun 2025 yang berasal dari rincian output QIA.002 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,86%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (109,10%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO berasal dari rincian output QDC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (100%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (111,12%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan KIE Farmakovigilans telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai. Dengan katerbatasan anggaran maka kegiatan KIE Farmakovigilans dilaksanakan secara daring dengan mengundang narasumber dari Komite Farmakologi Medik RSUP M Djamil, Padang, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan pagu yang dialokasikan untuk honor narasumber.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 85%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (112,36%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 7%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel KLB telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 8%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (117,65%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 3%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder termasuk efisien (92%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (103,85%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai. Pencapaian kinerja dilakukan melalui komunikasi aktif dengan stakeholder dan setiap respon stakeholder dalam mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan dihitung sebagai capaian. Namun untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh stakeholder belum diperiksa secara onsite ke sarana untuk melihat apakah perbaikan benar telah dilakukan atau hanya dokumentasi semata.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 12%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (106,48%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi telah digunakan sesuai dengan

rencana sehingga target indikator kinerja tercapai. Pelaksanaan kegiatan menjadi efisien karena ada perjalanan dinas yang dilakukan sehari selesai sehingga dapat menghemat anggaran penginapan. Namun metode seperti ini tidak memungkinkan dilakukan terhadap sarana yang berada di luar kota yang pada jarak tempuhnya terdapat beberapa titik potensi kerusakan jalan akibat hujan atau medan jalan yang ekstrim, karena ini akan membahayakan petugas dalam perjalanan kembali apalagi di sore hari tingkat intensitas hujan tinggi yang dapat memicu longsor dan kerusakan jalan lainnya.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 88%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,97%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (109,89%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 60%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (104,42%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 32%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran

untuk pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (117,65%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 2%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (108,12%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan iklan sedian faramsi dan pangan olahan telah telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 1%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (108,33%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan label tembakau telah telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 1%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada

persentase capaian indikator (105,57%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan AMR telah telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berasal dari rincian output PDD.001 dan RAB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (98,96%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (107,6%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan laboratorium pengujian telah telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berasal dari rincian output QIC.004 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 1%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,52%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berasal dari rincian output QIC.003 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (100%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (99,21%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan

untuk pengawasan 5 sarana yang ditargetkan di tahun 2025, namun capaian tidak 100% karena dalam perhitungan realisasi indikator sesuai dengan manual indikator yang menjadi pembagi bukan target tahun berjalan dan bukan juga jumlah sarana yang ada di tahun berjalan melainkan jumlah sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan basis data tahun 2023, yaitu 8 sarana. Sehingga realiasi indikator 62,5% sedangkan target 63%. Ada kemungkinan dalam penetapan target menggunakan angka pembulatan sedangkan pada perhitungan realisasi dan capaian menggunakan angaka 2 digit di belakang koma.

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berasal dari rincian output BDC.001 dan BMB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,67%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (101,72%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan KIE telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berasal dari rincian output QDB.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (99,67%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (50%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sekolah telah digunakan sesuai dengan rencana namun target indikator kinerja tidak tercapai. Penyebab tidak indikator tidak tercapai karena keterbatasan anggaran yang tersedia karena dampak dari blokir sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan interevensi ke sejumlah sekolah yang sudah ditargetkan.

19. Jumlah desa pangan aman berasal dari rincian output QDB.002 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (99,96%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (50%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan desa telah digunakan sesuai dengan rencana namun target indikator kinerja tidak tercapai. Penyebab tidak indikator tidak tercapai karena keterbatasan anggaran yang tersedia karena dampak dari blokir sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan interevensi ke sejumlah desa yang sudah ditargetkan.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berasal dari rincian output QDB.003 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas termasuk efisien (100) karena persentase realisasi anggaran (99,98%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pasar telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan berasal dari rincian output QDG.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan termasuk tidak efisien (86%) karena persentase realisasi anggaran (56,08%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (115,39%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan UMKM belum digunakan sesuai dengan rencana namun target indikator kinerja tercapai. Terdapat beberapa kegiatan tambahan yang dianggarkan pada indicator ini berupa tindak lanjut tanggap bencana Kota Padang pada November 2025 yang tidak terkait UMKM namun hingga akhir tahun tidak jadi direalisasikan, sehingga penyerapan anggaran lebih kecil. Adapun untuk pelaksanan kegiatan UMKM juga melibatkan anggaran kegiatan lain untuk Pelatihan IP CPPOB yang

melibatkan Orang Tua Angkat dan fasilitasi UMKM sehingga anggaran pada RO QDG.001 tidak diserap secara maksimal.

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT berasal dari rincian output QCD.U18 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (96,23%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (83,33%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan penyidikan telah digunakan sesuai dengan rencana namun target indikator kinerja tidak tercapai. Penyebab tidak tercapai sasaran kegiatan ini karena dari 4 perkara yang ditargetkan baru 2 perkara yang sudah selesai sampai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sedangkan 2 perkara lagi belum bisa diselesaikan sampai tahap 2 disebabkan tersangka dan saksi melarikan diri dan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar berasal dari rincian output AEA.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (96,00%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (105,56%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan analisis kejahatan telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

23. Indeks Pelayanan Publik UPT berasal dari rincian output BAH.001 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 100%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik UPT termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (92,29%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (102,98%). Hal ini menunjukkan bahwa

anggaran untuk kegiatan layanan publik telahdigunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM) berasal dari rincian output BKB.001, EBA 956, dan EBA.994 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 25%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,39%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100,23%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan ZI telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

25. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker) berasal dari rincian output BKB.001, EBA 956, dan EBA.994 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 25%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM termasuk tidak efisien karena persentase realisasi anggaran (99,39%) lebih tinggi daripada persentase capaian indikator (98,22%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan AKIP telah digunakan sesuai dengan rencana namun target indikator kinerja tidak tercapai. Penyebab tidak tercapainya target kinerja ini karena masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan SAKIP.

26. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM berasal dari rincian output BKB.001, EBA 956, dan EBA.994 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 25%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,39%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengelolan anggaran telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja tercapai.

27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM berasal dari rincian output BKB.001, EBA 956, dan EBA.994 dengan persentase dukungan anggaran sebesar 25%. Berdasarakan tabel efisiensi maka anggaran untuk pencapaian indikator Indeks

Manajemen Risiko UPT BPOM termasuk efisien (100%) karena persentase realisasi anggaran (99,39%) lebih rendah daripada persentase capaian indikator (99,59%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan manajemen risiko telah digunakan sesuai dengan rencana sehingga target indikator kinerja mendekati tercapai.

Tabel 3.110 Nilai Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Output (Target%)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,15	99,69	1,08	0,08	100 %	Efisien
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,21	100,00	0,99	-0,01	Tidak Efisien	
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	75,43	99,89	0,76	-0,24	Tidak Efisien	
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115,39	56,08	2,06	1,06	86 %	Tidak Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,33	96,23	0,87	-0,13	Tidak Efisien	
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,56	96,00	1,10	0,10	100 %	Efisien
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	102,98	92,29	1,12	0,12	100 %	Efisien
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,51	99,39	1,00	0,00	100 %	Efisien
RATA-RATA EFISIENSI		**98,69**	**92,45**	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas maka 4 sasaran kegiatan efisiensi dan 4 sasaran kegiatan tidak efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah Rp. 9.385.732.225 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp.9.468.379.000 dengan persentase capaian anggaran 99,13%.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 15 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi dengan TE 0,08. Hal ini menunjukkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sampel, sarana sediaan farmasi dan pangan olahan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan telah digunakan dengan optimal.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah Rp.2.040.000 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp. 2.040.000 dengan persentase capaian anggaran 100%. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisiensi dengan TE -0,01. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi fortifikasi namun sasaran kegiatan belum tercapai. Sasaran kegiatan belum tercapai bukan karena kegiatan tidak dilaksanakan tetapi dari hasil perhitungan sarana yang diperiksa dibagi sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang lebih rendah daripada target 2025. Jadi telah dilaksankana pengawasan terhadap 5 sarana fortifikasi yang ditargetkan di tahun 2025.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT adalah Rp.1.401.109.491 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp. 1.405.301.000. dengan persentase capaian anggaran 99,70%.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 4 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisien dengan TE -0,24. Hal ini menunjukkan anggaran telah

digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan KIE, Sekolah, Desa, dan Pasar pangan aman namun sasaran kegiatan belum tercapai. Hal ini karena capaian indikator sekolah dan desa tidak tercapai 100% sedangkan anggaran yang tersedia setelah dikurangi blokir terealisasi sampai 99%. Penyebab indikator sekolah dan desa tidak tercapai karena anggaran yang diblokir sangat besar sedangkan untuk target volume tidak ada penyesuaian.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT adalah Rp. 1.190.000 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp.2.122.000 dengan persentase capaian anggaran 56,08%.

28. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisien 86% dengan TE 1,06. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan jauh lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan dengan anggaran yang terbatas sasaran kegiatan tetap tercapai dikarenakan ada perubahan pada beberapa skema kegiatan yang dilaksanakan, semulanya dengan pertemuan langsung menjadi tidak langsung (daring). Selain itu untuk pelaksanan kegiatan UMKM juga melibatkan anggaran kegiatan pada RO lain untuk Pelatihan IP CPPOB yang melibatkan Orang Tua Angkat dan fasilitasi UMKM sehingga anggaran pada RO QDG.001 tidak terserap secara maksimal.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT adalah Rp.462.239.106 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp.480.364.000 dengan persentase capaian anggaran 96,23%. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai tidak efisien dengan TE -0,13. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan jauh lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan anggaran telah digunakan dengan optimal untuk pelaksanaan kegiatan penyidikan namun sasaran kegiatan belum tercapai. Penyebab tidak tercapai sasaran kegiatan ini karena dari 4 perkara yang ditargetkan baru 2 perkara

yang sudah selesai sampai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sedangkan 2 perkara lagi belum bisa diselesaikan sampai tahap 2 disebabkan tersangka dan saksi melarikan diri dan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Realisasi anggaran pada sasaran Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT adalah Rp.10.080.000 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp.10.500.000 dengan persentase capaian anggaran 96,00%.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0,10. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan telah tepat. Jadi dengan anggaran yang terbatas Balai Besar POM di Padang tetap dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

7. Layanan Publik UPT yang prima

   Realisasi anggaran pada sasaran Layanan Publik UPT yang prima adalah Rp.114.647.064 dari pagu tahun 2025 Rp. 124.228.000 dengan persentase capaian anggaran 92,29%.

   Sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0,12. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan layanan publik (informasi dan pengaduan, sertifkasi, dan pengujian sampel pihak ketiga) yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan telah tepat. Jadi dengan anggaran yang terbatas Balai Besar POM di Padang tetap dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

   Realisasi anggaran pada sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal adalah Rp.12.374.500.079 dari pagu tahun 2025 setelah dikurangi blokir Rp.12.450.843.000 dengan persentase capaian anggaran 99,39%.

Sasaran kegiatan ini memiliki 4 indikator dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi memperoleh nilai efisiensi 100% dengan TE 0,00. Hal ini karena capaian sasaran kegiatan lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025. Hal ini menunjukkan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tatakelola yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan telah tepat. Jadi dengan anggaran yang terbatas Balai Besar POM di Padang tetap dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensi adalah dengan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran sesuai dengan rencana dan memaksimalkan ketercapaian target kinerja. Secara rata-rata per sasaran kegiatan nilai efisiensi anggaran Balai Besar POM di Padang adalah 100% dengan nilai TE 0,07. Jadi dengan sumber daya anggaran yang ada Balai Besar POM di Padang tetap dapat mencapai sasaran kegiatan bahkan melebihi yang ditargetkan. Dalam konteks ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output kinerja dan input anggaran.



BAB IV
Penutup

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Dalam laporan kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 8 (delapan) sasaran kegiatan yang diukur dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar POM di Padang.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Padang tahun 2025.

Balai Besar POM di Padang telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

1. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Padang dengan membandingkan realisasi Tahun 2025 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Padang pada Tahun 2025 sebesar 100,15% dengan kategori Istimewa.
2. Balai Besar POM di Padang mencapai 3 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik, 2 sasaran kegiatan dengan kategori baik, 2 sasaran kegiatan dengan kategori cukup, dan 1 sasaran kegiatan dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
3. Dari 28 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target Tahun 2025, terdapat 13 indikator yang nilai capaian kinerja diantara 100% < s.d ≤ 110% dengan kategori Sangat Baik, 7 indikator yang nilai capaian kinerja 90% < s.d ≤ 100% dengan kategori Baik, 1 indikator yang nilai capaian kinerja 60% ≤ s.d ≤ 90% dengan kategori Cukup, 2 indikator yang nilai capaian kinerja < 60% dengan kategori kurang, serta 5 indikator mempunyai capaian melebihi 110% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
4. Terdapat perbedaan target indikator pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), hal ini dikarenakan adanya perubahan target indikator sesuai Renstra 2025-2029 dan berdasarkan kesepakatan antara unit pengampu, Biro perencanaan dan Keuangan serta Balai Besar POM di Padang.
5. Terdapat penambahan 3 Indikator Kinerja Kegiatan pada bulan agustus yang mendukung Sasaran Kinerja Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

di wilayah kerja UPT Balai Besar POM di Padang yaitu: Peresentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman. Kemudian perubahan target kinerja di bulan agustus 2025 sesuai dengan hasil kesepakatan final Target Renstra 2025-2029.

6. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 8 (delapan) sasaran kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.751.537.766 atau 65,23% dari total pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.36.412.013.000 dan 99,20% dari total pagu anggaran setelah dikurangi blokir yaitu sebesar Rp.23.943.777.000.
7. Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran yang diperoleh dari perbandingan capaian sasaran kegiatan dengan persentase realisasi anggaran maka diperoleh hasil bahwa kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Padang telah efisien dengan nilai capaian efisiensi sebesar 100%.

.

Pernyataan pencapaian setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan nilai capaian sasaran kegiatan 108,14% (Sangat Baik).
2. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,21% (Baik).
3. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan efektivitas KIE dengan nilai capaian sasaran kegiatan 75,43% (Cukup).
4. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan tandar keamanan dan mutu dengan nilai capaian sasaran kegiatan 115,39% (Tidak dapat disimpulkan) sehingga dinormalisasi menjadi 110%.
5. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan nilai capaian sasaran kegiatan 83,33% (Cukup).
6. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Melaksanakan kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan nilai capaian sasaran kegiatan 105,56% (Sangat Baik).
7. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan Layanan Publik UPT yang Prima dengan nilai capaian sasaran kegiatan 102,98% (Sangat Baik).
8. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang Mewujudkan tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan nilai capaian sasaran kegiatan 99,53% (Baik).

Capaian kinerja terhadap 28 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Indikator dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) sebanyak 13 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,10%.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 103,85%.
3. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 106,48%
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 109,89%
5. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 104,42%.
6. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 108,12%.
7. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 108,33%.
8. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dengan capaian 105,57%.
9. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian 107,53%.
10. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 101,72%.
11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 105,56%.
12. Indeks Pelayanan Publik UPT dengan capaian 102,98%.
13. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan capaian 100,23%.

b. Indikator dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 110%) sebanyak 7 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian 100%.
2. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100,00%.

3. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuaiketentuan dengan capaian 99,21%.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
5. Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian 98,22%.
6. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan capaian 100%.
7. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan capaian 99,66%.

c. Indikator dengan kriteria Cukup (dengan capaian 60% ≤ s.d ≤ 90%) sebanyak 1 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 83,33%.

d. Indikator dengan kriteria Kurang (dengan capaian < 60%) sebanyak 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :
1. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 50,00%.
2. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 50,00%.

e. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian > 110%) sebanyak 5 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :
3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan capaian 111,12%.
4. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 112,36%.
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117,65%.
6. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 111,11% dengan capaian 117,65%.
7. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian 115,39%.

Persentase capaian target indikator kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2025 berkisar antara 50% sampai dengan 117,65%. Persentase capaian indikator tertinggi adalah persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang diperoleh Balai Besar POM di Padang pada Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan maksimal. Dari 28 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 6 indikator yang belum tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan perbaikan berkelanjutan maka rencana perbaikan kinerja dapat difokuskan pada beberapa hal, antara lain dengan meningkatkan standar kinerja yang telah ada untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas kinerja. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan kinerja.

Supaya target kinerja tercapai maka perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap dapat dicapai dengan mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian target sejak dini. Menyusun strategi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan atau masyarakat sebagai impelementasi pelayanan prima Balai Besar POM di Padang dan sebagai wilayah kerja yang telah mendapat prediket Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



Lampiran

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Padang - Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, Website : https://padang.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

ABDUL RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR HK.02.3A.09.24.266 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBATDAN MAKANAN DI PADANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,70
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	14
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	96,83
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,97
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

ABDUL RAHIM

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Padang									**36,739.4**	**40,413.3**	**44,454.7**	**48,900.1**	**53,790.2**	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**22,408.0**	**24,648.8**	**27,113.7**	**29,825.0**	**32,807.6**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	89.25	90.50	91.75	93.00	94.25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai Besar POM di Padang	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai Besar POM di Padang	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	93.75	95.00	96.25	97.25	98.25						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	91.60	92.60	93.60	94.80	96.00						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai Besar POM di Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Padang	77.00	81.50	82.80	84.40	85.90						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai Besar POM di Padang	11.11	22.22	33.33	44.44	66.67						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	-	81.00	82.00	83.00	84.00						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai Besar POM di Padang	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	1,034.00	1,039.00	1,089.00	1,142.00	1,199.00						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	51.00	53.00	61.00	66.00	73.00						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	682.00	729.00	781.00	839.00	910.00						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai Besar POM di Padang	204.00	204.00	204.00	216.00	216.00						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai Besar POM di Padang	0.00	476.00	476.00	476.00	476.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Padang	63.00	63.00	63.00	75.00	75.00						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai Besar POM di Padang	88.00	88.88	89.76	90.64	91.52						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai Besar POM di Padang	14.00	16.00	19.00	20.00	21.00						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai Besar POM di Padang	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai Besar POM di Padang	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai Besar POM di Padang	27,194.00	27,300.00	27,360.00	27,432.00	27,518.00						UPT BPOM
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	33.00	16.00	18.00	21.00	23.00						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai Besar POM di Padang	14.00	16.00	19.00	20.00	21.00						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai Besar POM di Padang	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai Besar POM di Padang	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai Besar POM di Padang	15.85	32.93	52.44	74.39	100.00						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	13.00	14.00	16.00	18.00	21.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Padang	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai Besar POM di Padang	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima		Balai Besar POM di Padang											UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai Besar POM di Padang	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai Besar POM di Padang	791.00	900.00	910.00	933.00	957.00						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	90.00	90.05	90.10	90.15	90.20						UPT BPOM
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai Besar POM di Padang	2.95	3.00	3.05	3.10	3.15						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai Besar POM di Padang	10.00	32.00	32.00	32.00	32.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								**14,331.4**	**15,764.5**	**17,341.0**	**19,075.1**	**20,982.6**	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Padang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Website : http://padang.pom.go.id
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.12.25.202 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NO HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

MENIMBANG :

a. Bahwa keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.02.25.48 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.02.25.48 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029;

MENGINGAT :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.12.25.201 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.02.25.48 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NOMOR HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2025-2029;

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor HK.02.02.3A.02.25.48 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2025-2029 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

M. SUHENDRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG NO HK.02.02.3A.02.25.48 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG 2025-2029
NOMOR : HK.02.02.3A.12.25.202
TANGGAL : 05 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasidan Pangan Olahan di wilayahkerja UPT**
1.1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatanyang telah melaporkanKTD/ESO
1.3	persentase sampelpangan olahan berisikoyang ditindaklanjutisesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yangdiuji sesuai standar
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
SK 2	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE**
3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3.3	Jumlah desa pangan aman
3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**
7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 8	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optima**
8.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
8.2	Nilai AKIP UPT BPOM
8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



M. SUHENDRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIAT TU PIMPINAN BPOM RI
Tanggal Cetak : 14 Nov 2025 8:13

KODE DISPOSISI	:	**SIFAT SURAT :**	
KODE SURAT	: -	BIASA,	
		PENTING,	
		PENTING, SEGERA	
TGL TERIMA SURAT	: 14 November 2025	RAHASIA,	
TGL TURUN DISPOSISI	:	SEGERA,	

NO. SURAT	:	-
ASAL SURAT ASLI	:	**BALAI BESAR POM DI PADANG**
TGL SURAT	:	06 November 2025
PERIHAL	:	PK Tahun 2025 Balai Besar POM di Padang
DITERIMA DARI	:	BALAI BESAR POM DI PADANG

DISPOSISI		DITERUSKAN KEPADA	
1. UNTUK DIKETAHUI		1. SESTAMA	✓
2. UNTUK EVALUASI		2. DEPUTI 1	
3. DISKUSIKAN DENGAN SAYA		3. DEPUTI 2	
4. DISETUJUI		4. DEPUTI 3	
5. UNTUK DIGUNAKAN		5. DEPUTI 4	
6. DISIAPKAN TELAAHAN/KAJIAN		6. IRTAMA	
7. HADIR MEWAKILI		7. KARO UMUM / KARO KSHM / KA PUSAKOM	
8. DISIAPKAN BAHAN MATERI		8. KA PPPOMN	
9. SIAPKAN TANGGAPAN		9. BBPOM Padang	✓
10. UNTUK DITINDAKLANJUT		10.	
11. UNTUK DIARSIPKAN			
12. DIAGENDAKAN			
13. DIPANTAU / MONITOR			
14. DIBERI MASUKAN			
15. LAPORKAN			
16. UNTUK DIKOORDINASIKAN			
17. BAHAN UNTUK RAKORPIM			
18. *COPY* KEMBALI			

INSTRUKSI / INFORMASI KEPALA BADAN

CATATAN SEKRETARIATAN

PENCATAT : Hobie

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOTA DINAS
NOMOR: PR.07.01.3A.11.25.77

Yth.	: Kepala Badan POM RI
Dari	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Hal	: Revisi Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2025
Tanggal	: 06 November 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.05.09.1.09.25.98 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm sebagai Kepala Balai Besar POM di Padang terhitung sejak ditetapkan 29 September 2025 maka telah dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 Balai Besar POM di Padang, untuk itu mohon kiranya Bapak dapat menandatangani Perjanjian Kinerja tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. SUHENDRI
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
M. SUHENDRI	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan	91.6

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	11.11
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan	15.85 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 36.480.145.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22.135.067.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	14.345.078.000

Padang, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

M. SUHENDRI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	586.056.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	36.100.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	89	89	89	89	89	399.354.650
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	32.888.030
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	37.586.320
		06 - Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	27.412.110
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	5.350.560

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	39.237.440
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	548.242.200
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	292.395.840
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	81.09	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	18.274.740
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								90	90	90	90	90	9.137.370
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	9.137.370
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			76.7	76.7	76.7	76.8	76.8	76.8	76.9	76.9	76.9	77	7.518.001.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman												11.11	9.137.370
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63	5.033.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	8.429.205.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	25	47.5	47.5	50	50	60	75	90	14	574.628.000
		03 - Jumlah desa pangan aman			5	25	37.5	45	45	50	60	75	90	6	882.108.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	25	50	60	100	100	100	100	100	1	120.163.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	4.16	10.33	14.5	23.32	30.84	43.33	52.5	60	68.5	71	79.17	15.85	40.082.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42.5	42.5	42.5	42.5	43	43	45	65	70	80	83	90	480.364.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	144.506.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	124.228.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	4.027.879.250
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	4.027.879.250
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4.027.879.250
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	4.027.879.250
														Total	36.480.145.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Padang, 01 Oktober 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

M. SUHENDR

NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI DPADANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Capaian Dinormalisasi Tahun 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25	97.37	109.10%	109,10%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	28.89	111.12%	110%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.00	100.00	112.36%	110%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%	100%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	92.95	103.85%	103,85%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	95.83	106.48%	106,48%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109,89%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Capaian Dinormalisasi Tahun 2025
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	97.89	104.42%	104,42%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.60	99.04	108.12%	108,20%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	97.50	108.33%	108,33%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	105.57	105.57%	105,57%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00	82.80	107.53%	107,53%
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.11	11.11	100.00%	100%
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	62.50	99.21%	99,21%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.00	89.51	101.72%	101,72%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Capaian Dinormalisasi Tahun 2025
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	7	50,00%	50,00%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	6	3	50,00%	50,00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	100,00%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,85	18,29	115,39%	110%
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	75	83,33%	83,33%
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95	105,56%	105,56%
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,84	102,98%	102,98%
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,21	100,23%	100,23%
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	82	80,54	98,22%	98,22%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Capaian Dinormalisasi Tahun 2025
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00%	100,00%
28	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,94	99,66%	99,66%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						**100,15%**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI DPADANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25	97.37	109.10%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	28.89	111.12%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.00	100.00	112.36%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50	92.95	103.85%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	95.83	106.48%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	97.89	104.42%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.60	99.04	108.12%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	97.50	108.33%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	105.57	105.57%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00	82.80	107.53%
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.11	11.11	100.00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	62.50	99.21%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.00	89.51	101.72%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14.00	7.00	50.00%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	6.00	3.00	50.00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.85	18.29	115.39%
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90.00	75.00	83.33%
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	95.00	105.56%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.84	102.98%
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.00	90.21	100.23%
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	82.00	80.54	98.22%
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%
28	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	2.94	99.66%

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR					ANGGARAN		
				TARGET		REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)		2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025		TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI**	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	89,25	97,37	109,10	103,31	614.745.000	613.877.855	99,86
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	28,89	111,12	96,30	36.100.000	2.000.000	5,54
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	89,00	100,00	112,36	107,53	391.600.100	391.466.606	99,97
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32.249.420	32.238.426	99,97
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	100,00	117,65	105,26	36.856.480	36.843.916	99,97
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,25	89,50	92,95	103,85	101,86	26.921.310	26.792.535	99,52
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	90,00	95,83	106,48	101,95	5.325.000	5.323.200	99,97
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,00	100,00	109,89	105,26	39.050.000	39.036.800	99,97
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,25	93,75	97,89	104,42	99,63	538.426.200	535.850.701	99,52
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	85,00	100,00	117,65	105,26	287.160.640	285.787.041	99,52
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	96,00	91,60	99,04	108,12	103,17	17.947.540	17.861.690	99,52
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,00	90,00	97,50	108,33	103,72	8.973.770	8.930.845	99,52
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	105,57	105,57	105,57	8.973.770	8.930.845	99,52
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,67	77,00	82,80	107,53	124,19	7.449.869.000	7.371.860.920	98,95

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR					ANGGARAN		
				TARGET		REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)		2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025		TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI**	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	85,90	11,11	11,11	100,00	12,93	8.973.770	8.930.845	99,52
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	63,00	62,50	99,21	83,33	2.040.000	2.040.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,52	88,00	89,51	101,72	97,80	8.429.205.000	1.243.825.241	14,76
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21,00	14,00	7,00	50,00	33,33	574.628.000	85.779.750	14,93
		19	Jumlah desa pangan aman	10,00	6,00	3,00	50,00	30,00	882.108.000	50.609.500	5,74
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00	120.163.000	20.895.000	17,39
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	15,85	18,29	115,39	18,29	40.082.000	1.190.000	2,97
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94,00	90,00	75,00	83,33	79,79	480.364.000	462.239.106	96,23
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	90,00	95,00	105,56	101,06	144.506.000	10.080.000	6,98
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,70	4,84	102,98	98,78	124.228.000	114.647.064	92,29
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,20	90,00	90,21	100,23	100,01	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
		26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	84,00	82,00	80,54	98,22	95,88	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,15	2,95	2,94	99,59	93,27	4.027.879.250	3.093.625.020	76,81
TOTAL			**TOTAL**						**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

NO.	SASARAN KEGIATAN	NO.	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR					ANGGARAN		
				TARGET		REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)		2025		CAPAIAN (%)
				RENSTRA 2029	TAHUN 2025		TAHUNAN	RENSTRA	PAGU*	REALISASI**	

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
*** Realisasi OMSPAN*

CAPAIAN REALISASI ANGGRAN PER SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (Rata-Rata Indikator)	ANGGARAN		
			Pagu 2025*	Realisasi**	%
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,15	9.503.172.000	9.385.732.225	98,76
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,21	2.040.000	2.040.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	75,43	10.006.104.000	1.401.109.491	14,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115,39	40.082.000	1.190.000	2,97
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,33	480.364.000	462.239.106	96,23
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,56	144506000	10080000	6,98
7	Layanan Publik UPT yang prima	102,98	124228000	114647064	92,29
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,51	16111517000	12374500079	76,81
Total		**98,69**	**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PADANG

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Pagu*	Realisasi**	%
1	DR	3165	AEA	'001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	kegiatan	14	100	144.506.000	10.080.000	6,98
2	DR	3165	BAH	'001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	791	dokumen	569	99,99	124.228.000	114.647.064	92,29
3	DR	3165	BDC	'001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	27194	Orang	4044	99,99	8.271.190.000	1.213.960.641	14,68
4	DR	3165	BKB	'001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	laporan	1	100	884.000.000	137.192.411	15,52
5	DR	3165	BMB	'001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	kegiatan	36	100	158.015.000	29.864.600	18,90
6	DR	3165	CAB	'001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0	121.000.000	-	0,00
7	DR	3165	CAN	'001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	Unit	0	0	100.000.000	-	0,00
8	DR	3165	CBV	'001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0	0	661.439.000	-	0,00
9	DR	3165	PDD	'001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lembaga	1	100	3.274.278.000	3.199.707.344	97,72
10	DR	3165	QCD	U18	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PADANG	4	Perkara	4	100	480.364.000	462.239.106	96,23
11	DR	3165	QDB	'001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14	Lembaga	7	99,99	574.628.000	85.779.750	14,93
12	DR	3165	QDB	'002	Desa Pangan Aman	6	Lembaga	3	99,99	882.108.000	50.609.500	5,74
13	DR	3165	QDB	'003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	1	100	120.163.000	20.895.000	17,39
14	DR	3165	QDC	'001	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	Orang	45	100	36.100.000	2.000.000	5,54
15	DR	3165	QDG	'001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	UMKM	15	100	40.082.000	1.190.000	2,97
16	DR	3165	QIA	'001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	528	Produk	528	100	460.706.000	460.548.948	99,97

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Pagu*	Realisasi**	%
17	DR	3165	QIA	'002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1034	Produk	1038	100	614.745.000	613.877.855	99,86
18	DR	3165	QIC	'001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	Lembaga	51	100	44.375.000	44.360.000	99,97
19	DR	3165	QIC	'003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	5	Lembaga	5	100	2.040.000	2.040.000	100,00
20	DR	3165	QIC	'004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	682	Lembaga	692	100	897.377.000	893.084.502	99,52
21	DR	3165	RAB	'001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Paket	1	100	4.175.591.000	4.172.153.576	99,92
22	WA	6384	EBA	956	Layanan BMN	1	Layanan	1	100	8.000.000	7.870.000	98,38
23	WA	6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100	14.337.078.000	12.229.437.668	85,30
Total						**30432**		**7057**		**36.412.013.000**	**23.751.537.965**	**65,23**

Ket:
**Pagu termasuk pagu blokir*
*** Realisasi OMSPAN*

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	97,37	109,10	614.745.000	613.877.855	99,86	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	28,89	111,12	2.000.000	2.000.000	100,00	**1,11**	**0,11**	**100 %**	Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	100,00	112,36	391.600.100	391.466.606	99,97	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	32.249.420	32.238.426	99,97	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	36.856.480	36.843.916	99,97	**1,18**	**0,18**	**100 %**	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	92,95	103,85	26.921.310	26.792.535	99,52	**1,04**	**0,04**	**100 %**	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	95,83	106,48	5.325.000	5.323.200	99,97	**1,07**	**0,07**	**100 %**	Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	39.050.000	39.036.800	99,97	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	97,89	104,42	538.426.200	535.850.701	99,52	**1,05**	**0,05**	**100 %**	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	287.160.640	285.787.041	99,52	**1,18**	**0,18**	**100 %**	Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,60	99,04	108,12	17.947.540	17.861.690	99,52	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	90,00	97,50	108,33	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100,00	105,57	105,57	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,06**	**0,06**	**100 %**	Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,90	82,80	107,67	7.449.176.000	7.371.860.920	98,96	**1,09**	**0,09**	**100 %**	Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11	11,11	100,00	8.973.770	8.930.845	99,52	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	62,50	99,21	2.040.000	2.040.000	100,00	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**	

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,00	89,51	101,72	1.247.970.000	1.243.825.241	99,67	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,00	7,00	50,00	85.801.000	85.779.750	99,98	**0,50**	**-0,50**	**Tidak Efisien**	
19	Jumlah desa pangan aman	6,00	3,00	50,00	50.630.000	50.609.500	99,96	**0,50**	**-0,50**	**Tidak Efisien**	
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	20.900.000	20.895.000	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,85	18,29	115,39	2.122.000	1.190.000	56,08	**2,06**	**1,06**	**86 %**	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90,00	75,00	83,33	480.364.000	462.239.106	96,23	**0,87**	**-0,13**	**Tidak Efisien**	
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	95,00	105,56	10.500.000	10.080.000	96,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,84	102,98	124.228.000	114.647.064	92,29	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90,00	90,21	100,23	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82,00	80,54	98,22	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**	
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,01**	**0,01**	**100 %**	Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,94	99,59	3.112.710.750	3.093.625.020	99,39	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
TOTAL					**23.943.777.000**	**23.751.537.965**	**99,20**				
RATA-RATA EFISIENSI				**101**	**855.134.893**	**848.269.213**	**99,20**	**1,02**	**0,02**	**100 %**	Efisien

*Ket: * Target Anggaran adalah Pagu setelah dikurangi Blokir*

No	Indikator	Output (Indikator)			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T*	R	%				

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Sasaran Strategis	Output (Target %)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kategori				
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,15	99,69	**1,08**	**0,08**	**100 %**	Efisien	9.468.379.000	9.385.732.225	99,13	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,21	100,00	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**		2.040.000	2.040.000	100,00	
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	75,43	99,89	**0,76**	**-0,24**	**Tidak Efisien**		1.405.301.000	1.401.109.491	99,70	
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115,39	56,08	**2,06**	**1,06**	**86 %**	Tidak Efisien	2.122.000	1.190.000	56,08	
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,33	96,23	**0,87**	**-0,13**	**Tidak Efisien**		480.364.000	462.239.106	96,23	
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,56	96,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien	10.500.000	10.080.000	96,00	
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	102,98	92,29	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien	124.228.000	114.647.064	92,29	
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,51	99,39	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien	12.450.843.000	12.374.500.079	99,39	
RATA-RATA EFISIENSI		**98,69**	**92,45**	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**	**23.943.777.000**	**23.751.537.965**	99,20	

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No	Sasaran Strategis	Output (Target %)	Input (Anggaran %)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,15	99,69	**1,08**	**0,08**	**100 %**	Efisien
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,21	100,00	**0,99**	**-0,01**	**Tidak Efisien**	
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	75,43	99,89	**0,76**	**-0,24**	**Tidak Efisien**	
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	115,39	56,08	**2,06**	**1,06**	**86 %**	Tidak Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,33	96,23	**0,87**	**-0,13**	**Tidak Efisien**	
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,56	96,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	Efisien
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	102,98	92,29	**1,12**	**0,12**	**100 %**	Efisien
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,51	99,39	**1,00**	**0,00**	**100 %**	Efisien
RATA-RATA EFISIENSI		**98,69**	**92,45**	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**



KERTAS KERJA INDIKATOR TAHUN 2025

BALAI BESAR POM DI PADANG

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

L	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	62,00	86,75	100,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	79,00	86,75	96,15	96,67	92,50	99,11	96,11		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	95,00	86,75	95,88	100,00	92,50	100,00	97,10		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	182,00	86,75	96,67	97,86	97,37	97,70	97,40		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	338,00	86,75	97,89	84,93	100,00	97,39	95,05		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	481,00	86,75	98,72	90,16	95,59	94,09	94,64		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	614,00	86,75	97,94	92,34	99,11	96,10	96,37		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	741,00	89,25	94,25	96,98	97,44	98,18	96,71		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	853,00	89,25	94,06	97,44	98,04	98,68	97,06		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	949,00	89,25	92,48	97,58	98,04	99,25	96,84		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	1022,00	89,25	92,41	98,06	98,03	98,33	96,71		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	1036,00	89,25	93,89	98,23	98,06	99,31	97,37		

1.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1A. Sampel Obat

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud	C1	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud 2	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman sampling sampai dengan periode yang dimaksud	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	30,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	20,00	1,00	1,00	100,00	20,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	20,00	1,00	1,00	100,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	30,00	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	20,00	27,00	27,00	100,00	20,00	13,00	13,00	100,00	8,00	13,00	61,54	16,15	1,00	1,00	100,00	10,00	96,15		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	30,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	20,00	40,00	40,00	100,00	20,00	17,00	17,00	100,00	10,00	17,00	58,82	15,88	1,00	1,00	100,00	10,00	95,88		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	30,00	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	20,00	46,00	46,00	100,00	20,00	23,00	23,00	100,00	16,00	24,00	66,67	16,67	1,00	1,00	100,00	10,00	96,67		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00	30,00	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00	20,00	77,00	77,00	100,00	20,00	37,00	37,00	100,00	30,00	38,00	78,95	17,89	1,00	1,00	100,00	10,00	97,89		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	158,00	158,00	100,00	158,00	158,00	100,00	158,00	158,00	100,00	30,00	158,00	158,00	100,00	158,00	158,00	100,00	20,00	115,00	116,00	99,14	19,83	89,00	90,00	98,89	81,00	90,00	90,00	18,89	2,00	2,00	100,00	10,00	98,72		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	193,00	194,00	99,48	193,00	194,00	99,48	193,00	194,00	99,48	29,85	193,00	194,00	99,48	193,00	194,00	99,48	19,90	175,00	185,00	94,59	18,92	137,00	138,00	99,28	129,00	138,00	93,48	19,28	2,00	2,00	100,00	10,00	97,94		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	233,00	234,00	99,57	233,00	234,00	99,57	233,00	234,00	99,57	29,87	233,00	234,00	99,57	233,00	234,00	99,57	19,91	197,00	251,00	78,49	15,70	153,00	155,00	98,71	137,00	154,00	88,96	18,77	2,00	2,00	100,00	10,00	94,25		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	261,00	260,00	100,00	261,00	260,00	100,00	261,00	260,00	100,00	30,00	261,00	260,00	100,00	261,00	260,00	100,00	20,00	265,00	340,00	77,94	15,59	197,00	204,00	96,57	179,00	203,00	88,18	18,47	3,00	3,00	100,00	10,00	94,06		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	282,00	280,00	100,00	282,00	280,00	100,00	282,00	280,00	100,00	30,00	282,00	280,00	100,00	282,00	280,00	100,00	20,00	304,00	400,00	76,00	15,20	232,00	239,00	97,07	181,00	239,00	75,73	17,28	3,00	3,00	100,00	10,00	92,48		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	284,00	283,00	100,00	284,00	283,00	100,00	284,00	283,00	100,00	30,00	284,00	283,00	100,00	284,00	283,00	100,00	20,00	346,00	443,00	78,10	15,62	244,00	261,00	93,49	192,00	258,00	74,42	16,79	3,00	3,00	100,00	10,00	92,41		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	287,00	285,00	100,00	287,00	285,00	100,00	287,00	285,00	100,00	30,00	287,00	285,00	100,00	287,00	285,00	100,00	20,00	399,00	496,00	80,44	16,09	268,00	285,00	94,04	241,00	287,00	83,97	17,80	4,00	4,00	100,00	10,00	93,89		

1.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1B. Sampel OBA

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	10,00	10,00	100,00	0,00	12,00	0,00	50,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	1,00	100,00	#DIV/0!		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	15,00	15,00	100,00	16,00	24,00	66,67	83,33	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	1,00	1,00	100,00	96,67		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	19,00	19,00	100,00	29,00	29,00	100,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	32,00	32,00	100,00	33,00	42,00	78,57	89,29	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	2,00	2,00	100,00	97,86		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	72,00	74,00	97,30	51,00	98,00	52,04	74,67	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	2,00	4,00	50,00	84,93		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	100,00	101,00	99,01	98,00	138,00	71,01	85,01	67,00	71,00	94,37	71,00	71,00	100,00	71,00	71,00	100,00	5,00	7,00	71,43	90,16		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	129,00	129,00	100,00	141,00	147,00	95,92	97,96	96,00	104,00	92,31	104,00	104,00	100,00	104,00	104,00	100,00	5,00	7,00	71,43	92,34		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	157,00	156,00	100,00	183,00	183,00	100,00	100,00	118,00	139,00	84,89	139,00	139,00	100,00	139,00	139,00	100,00	35,00	35,00	100,00	96,98		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	185,00	190,00	97,37	245,00	245,00	100,00	98,68	162,00	183,00	88,52	183,00	183,00	100,00	183,00	183,00	100,00	35,00	35,00	100,00	97,44		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	206,00	210,00	98,10	270,00	270,00	100,00	99,05	167,00	188,00	88,83	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00	35,00	35,00	100,00	97,58		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	233,00	233,00	100,00	302,00	302,00	100,00	100,00	196,00	217,00	90,32	217,00	217,00	100,00	217,00	217,00	100,00	35,00	35,00	100,00	98,06		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	238,00	238,00	100,00	327,00	327,00	100,00	100,00	216,00	237,00	91,14	237,00	237,00	100,00	237,00	237,00	100,00	43,00	43,00	100,00	98,23		

1.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1C. Sampel SK

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	8,00	8,00	100,00	2,00	10,00	20,00	60,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	8,00	8,00	100,00	8,00	10,00	80,00	90,00	8,00	8,00	100,00	8,00	10,00	80,00	8,00	8,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	92,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	8,00	8,00	100,00	8,00	10,00	80,00	90,00	8,00	8,00	100,00	8,00	10,00	80,00	8,00	8,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	92,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	17,00	17,00	100,00	14,00	19,00	73,68	86,84	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	1,00	1,00	100,00	97,37		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	17,00	17,00	100,00	19,00	19,00	100,00	100,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	28,00	28,00	100,00	19,00	34,00	55,88	77,94	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	1,00	1,00	100,00	95,59		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	38,00	38,00	100,00	40,00	41,00	97,56	98,78	30,00	31,00	96,77	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00	1,00	1,00	100,00	99,11		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	47,00	46,00	100,00	49,00	49,00	100,00	100,00	34,00	39,00	87,18	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	14,00	14,00	100,00	97,44		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	51,00	46,00	100,00	63,00	63,00	100,00	100,00	46,00	51,00	90,20	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	100,00	14,00	14,00	100,00	98,04		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	61,00	55,00	100,00	66,00	66,00	100,00	100,00	46,00	51,00	90,20	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	100,00	14,00	14,00	100,00	98,04		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	62,00	62,00	100,00	78,00	78,00	100,00	100,00	55,00	61,00	90,16	61,00	61,00	100,00	61,00	61,00	100,00	14,00	14,00	100,00	98,03		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	62,00	62,00	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	56,00	62,00	90,32	62,00	62,00	100,00	62,00	62,00	100,00	24,00	24,00	100,00	98,06		

1.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1D. Kosmetik

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	32,00	32,00	100,00	0,00	42,00	0,00	50,00	32,00	32,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	38,00	38,00	100,00	52,00	56,00	92,86	96,43	38,00	38,00	100,00	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	99,11		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	44,00	44,00	100,00	64,00	64,00	100,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	64,00	64,00	100,00	67,00	87,00	77,01	88,51	64,00	64,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	10,00	10,00	100,00	97,70		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	134,00	134,00	100,00	130,00	176,00	73,86	86,93	134,00	134,00	100,00	99,00	99,00	100,00	99,00	99,00	100,00	10,00	10,00	100,00	97,39		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	194,00	194,00	100,00	179,00	257,00	69,65	84,82	192,00	194,00	98,97	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100,00	13,00	15,00	86,67	94,09		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	254,00	254,00	100,00	298,00	334,00	89,22	94,61	252,00	254,00	99,21	234,00	234,00	100,00	234,00	234,00	100,00	13,00	15,00	86,67	96,10		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	307,00	306,00	100,00	341,00	407,00	83,78	91,89	304,00	307,00	99,02	258,00	258,00	100,00	258,00	258,00	100,00	24,00	24,00	100,00	98,18		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	357,00	356,00	100,00	422,00	477,00	88,47	94,23	354,00	357,00	99,16	314,00	314,00	100,00	314,00	314,00	100,00	24,00	24,00	100,00	98,68		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	404,00	402,00	100,00	530,00	541,00	97,97	98,98	401,00	404,00	99,26	393,00	401,00	98,00	401,00	401,00	100,00	24,00	24,00	100,00	99,25		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	445,00	443,00	100,00	530,00	598,00	88,63	94,31	442,00	445,00	99,33	393,00	401,00	98,00	401,00	401,00	100,00	24,00	24,00	100,00	98,33		
3A	Pengawas	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	451,00	449,00	100,00	597,00	609,00	98,03	99,01	448,00	451,00	99,33	440,00	448,00	98,21	448,00	448,00	100,00	31,00	31,00	100,00	99,31		

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Januari		0,00	0,00	#DIV/0!
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari		0,00	45,00	0,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Maret		1,00	45,00	2,22
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	April		2,00	45,00	4,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Mei		2,00	45,00	4,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juni		2,00	45,00	4,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli		2,00	45,00	4,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Agustus		3,00	45,00	6,67
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	September		4,00	45,00	8,89
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Oktober		4,00	45,00	8,89
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	November		9,00	45,00	20,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Desember	26,00	13,00	45,00	28,89

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	38,00	0,00	52,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	70,55	efisiensi anggaran	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	45,00	85,00	88,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	77,75		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	55,00	85,00	94,51	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,90		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	111,00	85,00	76,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,21		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	161,00	85,00	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,49		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	231,00	85,00	88,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,64		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		85,00	97,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,43		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	436,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	473,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	486,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3A. Kesesuaian Target Sampel

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	37,00	37,00	100,00	3,00	55,00	5,45	52,73	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	45,00	45,00	100,00	55,00	71,00	77,46	88,73	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	55,00	55,00	100,00	73,00	82,00	89,02	94,51	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	115,00	111,00	103,60	81,00	167,00	48,50	76,05	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	161,00	161,00	100,00	167,00	223,00	74,89	87,44		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	231,00	231,00	100,00	223,00	292,00	76,37	88,18		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	352,00	352,00	100,00	450,00	477,00	94,34	97,17		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	436,00	436,00	100,00	516,00	599,00	86,14	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	473,00	473,00	100,00	546,00	650,00	84,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	479,00	100,00	619,00	694,00	89,19	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3A. Kesesuaian Target Sampel

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	484,00	100,00	697,00	698,00	99,86	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	486,00	486,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3B. Kesesuaian Parameter Uji

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	3,00	3,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	37,00	37,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	50,00	50,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	53,00	53,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	115,00	115,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	161,00	161,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	335,00	335,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	374,00	374,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	427,00	427,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	479,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	484,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan t	Desember	486,00	486,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3C. Ketepatan Pengam. Keputusan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	3,00	3,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	50,00	50,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	53,00	53,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	115,00	115,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	161,00	161,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	335,00	335,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	374,00	374,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	427,00	427,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	479,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	484,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	486,00	486,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3D. Ketepatan Waktu Pengambilan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	38,00	38,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	45,00	45,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	55,00	55,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	115,00	115,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	161,00	161,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	231,00	231,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	352,00	352,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	374,00	374,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	427,00	427,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	479,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	484,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	486,00	486,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	3,00	3,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	37,00	37,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	50,00	50,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	53,00	53,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	115,00	115,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	161,00	161,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	335,00	335,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	374,00	374,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	427,00	427,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	479,00	479,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	484,00	484,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	486,00	486,00	100,00		

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3F. Tindak Lanjut sesuai Pedoma

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	5,00	5,00	0,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	5,00	5,00	0,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	7,00	7,00	100,00	sampel yang hasil akhir uji bulan april ditindak lanjuti bulan selanjutnya	
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	10,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	18,00	18,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	29,00	29,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	35,00	35,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	37,00	37,00	100,00		

4. Persentase KLB yang diuji sesuai standar

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Januari	-	-		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Februari	100	100		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Maret	100	100		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	April	100	100		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Mei	100	100		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Juni	100	100		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Juli	100	100	Pada bulan Juli ini tidak ada sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd Juli sampel yang diuji berjumlah 11 item yang merupakan akumulasi sampel Jan-Maret dan Mei dengan capaian 100%	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Agustus	100	100	Pada bulan Agustus ini ada 1 sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd Agustus sampel yang diuji berjumlah 12 item yang merupakan akumulasi dengan capaian 100%	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	September	100	100	Pada bulan September tidak ada sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd september sampel yang diuji berjumlah 12 item yang merupakan akumulasi dengan capaian 100%	

3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Oktober	100	100	Pada bulan Oktober ada 24 sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd oktober sampel yang diuji berjumlah 36 sampel yang merupakan akumulasi dengan capaian 100%	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	November	100	100	Pada bulan November ada 3 sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd November sampel yang diuji berjumlah 39 sampel yang merupakan akumulasi dengan capaian 100%	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Desember	100	100	Pada bulan Desember tidak ada sampel yang diterima dan diuji dari pengaduan KLB, karena realisasi akumulasi, maka sd Desember sampel yang diuji berjumlah 39 sampel yang merupakan akumulasi dengan capaian 100%	

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	belum ada jadwal sampling	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	sampling 4 item versi efisiensi anggaran	
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	78,75		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	72,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

5A. Target Sampel

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** **Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian dik	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	1,00	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	4,00	4,00	2,00	5,00	70,00	target sampel efisiensi anggaran	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	5,00	5,00	7,00	8,00	93,75		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	18,00	18,00	8,00	18,00	72,22		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	42,00	42,00	42,00	56,00	87,50		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		

3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	42,00	42,00	56,00	56,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-5B. Parameter Uji

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1,00	1,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	5,00	5,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	6,00	6,00	100,00	entry sampel pirt pada TW1 belum dihitung	melaksanakan sesuai bulan berjalan
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	18,00	18,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	42,00	42,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-5C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan.

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1,00	1,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	5,00	5,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	6,00	6,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	18,00	18,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	42,00	42,00	100,00		

3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	42,00	42,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-5D. Ketepatan Waktu Sampling

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	1,00	1,00	0,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	5,00	5,00	100,00	sampling dilaksanakan efsiensi anggaran	dilaksanakan sampling Pirt untuk TW kedua
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	6,00	6,00	100,00	sampling dilaksanakan efsiensi anggaran	dilaksanakan sampling Pirt untuk TW kedua
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	18,00	18,00	100,00	koreksi data dari tw1	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	42,00	42,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-5E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1,00	1,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	5,00	5,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	6,00	6,00	100,00	Tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	18,00	18,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	42,00	42,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	42,00	42,00	100,00		

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-5F. Tindak Lanjut

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0,00	4,00	0,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	4,00	4,00	100,00	tidak ada kendala	
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	5,00	5,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	9,00	9,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	9,00	9,00	100,00		

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	89,50	20,00	100,00	60,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	89,50	40,00	33,33	36,67		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	89,50	46,43	33,33	39,88		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	89,50	100,00	66,67	83,33		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	89,50	100,00	66,67	83,33		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	89,50	91,25	87,50	89,38		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	89,50	100,00	87,50	93,75		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	89,50	82,12	100,00	91,06		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	89,50	83,42	100,00	91,71		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	89,50	89,91	100,00	94,96		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	89,50	87,08	100,00	93,54		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	89,50	85,89	100,00	92,95		

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

6A. Pelaku Usaha

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	1,00	5,00	20,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	4,00	10,00	40,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	13,00	28,00	46,43		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	31,00	31,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	41,00	41,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	73,00	80,00	91,25		

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

6A. Pelaku Usaha

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	133,00	133,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	147,00	179,00	82,12		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	156,00	187,00	83,42		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	205,00	228,00	89,91		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	236,00	271,00	87,08		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	274,00	319,00	85,89		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Januari	1,00	1,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Februari	1,00	3,00	33,33	Surat TL baru selesai diverifikasi atasan di akhir maret 2025	
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Maret	1,00	3,00	33,33		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	April	2,00	3,00	66,67		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Mei	2,00	3,00	66,67		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Juni	7,00	8,00	87,50		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Juli	7,00	8,00	87,50		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Agustus	10,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	September	10,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Oktober	10,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	November	10,00	10,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Desember	10,00	10,00	100,00		

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	85,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83

3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	90,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	90,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	90,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	90,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	90,00	#DIV/0!	100,00	91,67	95,83

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-7A. Sarprod Obat

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sarana	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan	% Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target tahunan	% Pelaksanaan inspeksi	Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	**Lengkapi dengan 6 komponen pembentuk**	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		

3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-7B Sarprod Oba dan SK

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/ inspeksi	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod OBA dan SK
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	1,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00

3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	1,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	100,00

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-7C Sarprod Kosmetik

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	jumlah target renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	jumlah sarana yang selesai diperiksa	% akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod Kosmetik
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	3,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67

3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	3,00	3,00	3,00	100,00	2,00	3,00	66,67	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	91,67

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan-7D Sarprod SK

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/ inspeksi	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod OBA dan SK
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3A	Balai Besar POM di Padang	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91,00	43,00	43,00	100,00	43,00	43,00	100,00	43,00	43,00	100,00	43,00	43,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91,00	45,00	45,00	100,00	44,00	45,00	97,78	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91,00	45,00	45,00	100,00	44,00	45,00	97,78	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00		

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	92,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	92,00	98,21	100,00	100,00	100,00	99,55
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	92,00	96,25	100,00	100,00	100,00	99,06
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	92,00	96,11	100,00	100,00	100,00	99,03
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	92,00	95,36	96,59	100,00	97,79	97,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92,00	95,27	96,67	100,00	98,61	97,64
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	92,00	94,92	100,00	100,00	98,97	98,47
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	93,75	94,55	98,08	100,00	98,82	97,86
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	93,75	95,82	98,51	100,00	98,97	98,32
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	93,75	94,26	98,03	100,00	98,82	97,78
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	93,75	94,38	98,03	100,00	98,95	97,84
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	93,75	94,59	98,03	100,00	98,95	97,89

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan-9A. Sardis Obat

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan pada	% pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standa	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, pada periode bulan berjalan	Komponen 1 - Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh ind	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah direview oleh independent supervisor melalui apli	Komponen 2 - Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh independent supervisor	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	14	14	14	100,00	13	14	92,86	14	14	100,00	96,43	98,21		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	20	20	20	100,00	17	20	85,00	20	20	100,00	92,50	96,25		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	45	45	45	100,00	38	45	84,44	45	45	100,00	92,22	96,11		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	93	93	93	100,00	72	86	83,72	86	88	97,73	90,72	95,36		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	122	142	122	100,00	111	123	90,24	129	142	90,85	90,54	95,27		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	180	180	180	100,00	137	152	90,13	154	172	89,53	89,83	94,92		

3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	222	222	222	100,00	162	182	89,01	165	185	89,19	89,10	94,55		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	239	239	239	100,00	219	239	91,63	219	239	91,63	91,63	95,82		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	270	270	270	100,00	239	270	88,52	239	270	88,52	88,52	94,26		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	274	276	274	100,00	245	276	88,77	245	276	88,77	88,77	94,38		
3A	Balai Besar POM di Padang	9A	Persentase sarana distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	274	278	278	100,00	247	276	89,49	247	278	88,85	89,17	94,59		

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan-9A. Sardis OBA

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	7	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	22	22	22	100,00	19	22	86,36	19	19	100,00	19	19	100,00	96,59		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	30	30	30	100,00	26	30	86,67	30	30	100,00	30	30	100,00	96,67		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	42	42	42	100,00	39	39	100,00	42	42	100,00	42	42	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	52	52	52	100,00	48	52	92,31	52	52	100,00	52	52	100,00	98,08		
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	67	67	67	100,00	63	67	94,03	67	67	100,00	67	67	100,00	98,51		

3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	74	76	76	100,00	72	76	94,74	75	76	98,68	75	76	98,68	98,03
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	74	76	76	100,00	72	76	94,74	75	76	98,68	75	76	98,68	98,03
3A	Balai Besar POM di Padang	9B	Persentase sarana distribusi OBA yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	74	76	76	100,00	72	76	94,74	75	76	98,68	75	76	98,68	98,03

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan-9A. Sardis SK

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis SK	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	1,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	2,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	2,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	7,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	13,00	13	13	100,00	13	13	100,00	13	13	100,00	13	13	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	17,00	17	17	100,00	17	17	100,00	17	17	100,00	17	17	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	22,00	22	22	100,00	22	22	100,00	22	22	100,00	22	22	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	24,00	24	24	100,00	24	24	100,00	24	24	100,00	24	24	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	28,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	28,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	28,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9C	Persentase sarana distribusi SK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	28,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	100,00		

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan-9A. Sardis Kosmetik

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kos	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	15	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	16	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	23	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	100,00		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	34	34	34	100,00	31	34	91,18	31	31	100,00	31	31	100,00	97,79		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	54	54	54	100,00	51	54	94,44	54	54	100,00	54	54	100,00	98,61		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	73	73	73	100,00	70	73	95,89	73	73	100,00	73	73	100,00	98,97		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	85	85	85	100,00	81	85	95,29	85	85	100,00	85	85	100,00	98,82		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	97	97	97	100,00	93	97	95,88	97	97	100,00	97	97	100,00	98,97		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	106	106	106	100,00	101	106	95,28	106	106	100,00	106	106	100,00	98,82		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	112	116	112	103,57	107	116	92,24	116	116	100,00	116	116	100,00	98,95		
3A	Balai Besar POM di Padang	9D	Persentase sarana distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	112	116	112	103,57	107	116	92,24	116	116	100,00	116	116	100,00	98,95		

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	85	10	10	20,00	7	10	49,00	10	10	10,00	79,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	85	20	19	21,05	19	20	66,50	18	20	9,00	96,55
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	85	50	58	17,24	26	50	36,40	49	50	9,80	63,44
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	85	66	66	20,00	66	66	70,00	63	66	9,55	99,55
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	85	89	89	20,00	80	89	62,92	80	89	8,99	91,91
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	85	111	125	17,76	97	111	61,17	105	111	9,46	88,39
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	85	123	145	16,97	118	123	67,15	123	123	10,00	94,12
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	85	138	152	18,16	138	152	63,55	130	138	9,42	91,13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	85	164	164	20,00	160	164	68,29	164	164	10,00	98,29
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	85	184	184	20,00	179	184	68,10	184	184	10,00	98,10
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	85	193	193	20,00	185	185	70,00	190	193	9,84	99,84
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	85	194	194	20,00	191	191	70,00	194	194	10,00	100,00

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	81,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	81,09	100,00	100,00	98,41	100,00	100,00	99,68
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	81,09	100,00	100,00	98,89	100,00	100,00	99,78
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	81,09	100,00	100,00	99,15	100,00	99,78	99,78
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	81,09	100,00	100,00	99,32	100,00	99,82	99,83
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	81,09	100,00	100,00	99,43	100,00	99,86	99,86
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	81,09	100,00	100,00	99,50	100,00	99,88	99,88
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	91,6	100,00	100,00	99,56	100,00	99,96	99,90
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	91,6	100,00	100,00	99,61	100,00	99,92	99,91
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	91,6	100,00	100,00	99,65	100,00	99,85	99,90
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	91,6	100,00	100,00	97,14	97,85	99,79	98,96
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	91,6	100,00	100,00	97,32	98,15	99,74	99,04

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan - Iklan Obat

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak 2	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Obat yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	15	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	29	29	29	100,00	29	29	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	43	43	43	100,00	43	43	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	56	56	56	100,00	56	56	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	70	70	70	100,00	70	70	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	83	83	83	100,00	83	83	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	97	97	97	100,00	97	97	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	110	110	110	100,00	110	110	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala ketersediaan iklan yang beredar.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	124	124	124	100,00	124	124	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala ketersediaan iklan yang beredar.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	137	137	137	100,00	137	137	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala ketersediaan iklan yang beredar.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	151	151	151	100,00	151	151	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala ketersediaan iklan yang beredar.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11A	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	164	164	164	100,00	164	164	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Penilaian kesesuaian iklan sedikit terhambat karena penelusuran database persetujuan iklan di SiAPIK yang tidak terlalu user friendly, sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil penilaian antara UPT dengan Pusat. Pengawasan iklan obat keras terkendala ketersediaan iklan yang beredar.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan - Iklan Kosmetik

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi 2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	29	3	3	100,00	3	3	100,00	17	17	100,00	6	6	100,00	100,00	29	29	100,00	29	29	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	58	6	6	100,00	6	6	100,00	34	34	100,00	12	12	100,00	100,00	58	58	100,00	58	58	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	88	8	8	100,00	8	8	100,00	54	54	100,00	18	18	100,00	100,00	88	88	100,00	88	88	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	116	9	9	100,00	9	9	100,00	74	74	100,00	24	24	100,00	100,00	116	116	100,00	116	116	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	144	10	10	100,00	10	10	100,00	94	94	100,00	30	30	100,00	100,00	144	144	100,00	144	144	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	169	11	11	100,00	11	11	100,00	114	114	100,00	33	33	100,00	100,00	169	169	100,00	169	169	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	197	12	12	100,00	12	12	100,00	134	134	100,00	39	39	100,00	100,00	197	197	100,00	197	197	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.

3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	225	13	13	100,00	13	13	100,00	154	154	100,00	45	45	100,00	100,00	225	225	100,00	225	225	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	253	14	14	100,00	14	14	100,00	174	174	100,00	51	51	100,00	100,00	253	253	100,00	253	253	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	281	15	15	100,00	15	15	100,00	194	194	100,00	57	57	100,00	100,00	281	281	100,00	281	281	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	309	16	16	100,00	16	16	100,00	214	214	100,00	63	63	100,00	100,00	309	309	100,00	309	309	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.
3A	Balai Besar POM di Padang	11B	Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	331	17	17	100,00	17	17	100,00	231	231	100,00	66	66	100,00	100,00	331	331	100,00	331	331	100,00	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Masih terdapat perbedaan kesimpulan hasil pengawasan dibandingkan dengan kesimpulan pusat terutama pada kesesuaian kesimpulan atas klaim manfaat produk. Referensi klaim tidak tersedia di sharing folder.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak. Komunikasi terkait referensi klaim manfaat produk dengan evaluator pusat.

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan - Iklan OBA

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi 2	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	11	11	11	100,00	11	11	100,00	11	11	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	21	21	21	100,00	21	21	100,00	20	21	95,24	98,41	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	30	30	30	100,00	30	30	100,00	29	30	96,67	98,89	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	39	39	39	100,00	39	39	100,00	38	39	97,44	99,15	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	49	49	49	100,00	49	49	100,00	48	49	97,96	99,32	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	58	58	58	100,00	58	58	100,00	57	58	98,28	99,43	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	67	67	67	100,00	67	67	100,00	66	67	98,51	99,50	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	75	75	75	100,00	75	75	100,00	74	75	98,67	99,56	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	86	86	86	100,00	86	86	100,00	85	86	98,84	99,61	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	96	96	96	100,00	96	96	100,00	95	96	98,96	99,65	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	105	105	105	100,00	96	105	91,43	105	105	100,00	97,14	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11C	Persentase Iklan OBA yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	112	112	112	100,00	103	112	91,96	112	112	100,00	97,32	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan - Iklan SK

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	3	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	5	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	8	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	9	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	11	11	11	100,00	11	11	100,00	11	11	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	17	17	17	100,00	17	17	100,00	17	17	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	20	20	20	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	22	22	22	100,00	22	22	100,00	22	22	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	25	25	25	100,00	25	25	100,00	25	25	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	29	29	29	100,00	29	29	100,00	29	29	100,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	31	31	31	100,00	29	31	93,55	31	31	100,00	97,85	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11D	Persentase Iklan SK yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	36	36	36	100,00	34	36	94,44	36	36	100,00	98,15	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diawasi Sesuai Ketentuan - Iklan PO

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO	Kendala	RTL
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	36	36	1	40,00	4	11,11%	1	14	38,89%	1,00	11	30,56%	1,00	7	19,44%	0,78	20,00	36	40,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	56	56	1	40,00	6	10,71%	1	22	39,29%	1,00	16	28,57%	1,00	12	21,43%	0,86	20,00	56	40,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	69	69	1	40,00	9	13,04%	1	26	37,68%	1,00	17	24,64%	0,99	17	24,64%	0,99	20,00	69	40,00	100,00	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	90	90	1	40,00	12	13,33%	1	34	37,78%	1,00	22	24,44%	0,98	22	24,44%	0,98	19,78	90	40,00	99,78	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	114	114	1	40,00	15	13,16%	1	43	37,72%	1,00	28	24,56%	0,98	28	24,56%	0,98	19,82	114	40,00	99,82	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	138	138	1	40,00	18	13,04%	1	52	37,68%	1,00	34	24,64%	0,99	34	24,64%	0,99	19,86	138	40,00	99,86	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya. Ditambah adanya efisiensi anggaran yang membatasi jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	162	162	1	40,00	21	12,96%	1	61	37,65%	1,00	40	24,69%	0,99	40	24,69%	0,99	19,88	162	40,00	99,88	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	188	188	1	40,00	24	12,77%	1	70	37,23%	0,99	47	25,00%	1,00	47	25,00%	1,00	19,96	188	40,00	99,96	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	214	214	1	40,00	27	12,62%	1	79	36,92%	0,98	54	25,23%	1,00	54	25,23%	1,00	19,92	214	40,00	99,92	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	240	241	1	40,00	30	12,45%	1	88	36,51%	0,97	61	25,31%	1,00	61	25,31%	1,00	19,85	241	40,00	99,85	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	266	267	1	40,00	33	12,36%	1	97	36,33%	0,97	68	25,47%	1,00	68	25,47%	1,00	19,79	267	40,00	99,79	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.
3A	Balai Besar POM di Padang	11E	Persentase Iklan PO yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	292	293	1	40,00	36	12,29%	1	106	36,18%	0,96	75	25,60%	1,00	75	25,60%	1,00	19,74	293	40,00	99,74	Terdapat keterbatasan ketersediaan iklan pada jenis media tertentu yang mengakibatkan kesulitan pemenuhan jumlah pengawasannya.	Pengawasan iklan kembali dilakukan dengan jangkauan wilayah pengawasan yang lebih luas (termasuk dari luar kota) untuk memungkinkan diperolehnya sumber iklan yang lebih banyak.

16. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	2	2	8	25,00	Sarana produksi pangan fortifikasi tidak menerapkan CPPOB secara konsisten	Memberikan peringatan dan pembinaan kepada sarana produksi agar menerapkan CPPOB
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	2	2	8	25,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	2	2	8	25,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	3	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	5	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	5	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	63	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	63	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	63	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	63	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	63	5	8	62,50		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	63	5	8	62,50		

18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	50	25,00	12,50	12,50	0,00	0,00	50,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	50	25,00	12,50	12,50	0,00	0,00	50,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	60	25,00	12,50	12,50	10,00	5,00	65,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	75	25,00	12,50	12,50	25,00	5,00	80,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	90	25,00	12,50	12,50	25,00	5,00	80,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	14						50,00	7		

Jumlah desa yang dilaksanakan intervensi : 14 sekolah (anggaran yang ada hanya untuk 7 sekolah)

Cara Pe
Formul

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00				0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00				0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	5	5,00	0,00				5,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00				25,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	37,5	25,00	12,50				37,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	45	25,00	12,50	10,00	0,00	0,00	47,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	45	25,00	12,50	10,00	0,00	0,00	47,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	50	25,00	12,50	10,00	0,00	0,00	47,50			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	60	25,00	12,50	10,00	2,50	10,00	60,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	75	25,00	12,50	10,00	17,50	10,00	75,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	90	25,00	12,50	10,00	17,50	10,00	75,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	6						50,00	3		

Jumlah desa yang dilaksanakan intervensi : 3 desa (anggaran yang ada hanya untuk 3 desa)

20. 15. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Januari	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Februari	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Maret	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	April	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Mei	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Juni	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Juli	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Agustus	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	September	11,11	1	9	11,11	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Oktober	11,11	1	9	11,11	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	November	11,11	1	9	11,11	Belum semua Kabupaten/Kota melakukan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tahun 2026 akan dilakukan pendampingan kembali kepada Kabupaten/Kota dalam pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Desember				11,11		
								Target Tercapai		

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0	0,00	0,00				0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	5	0,00	0,00				0,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	5,00	0,00				5,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00				25,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00				50,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	15,00		5,00	70,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00			
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						100,00	1,00		

Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPC

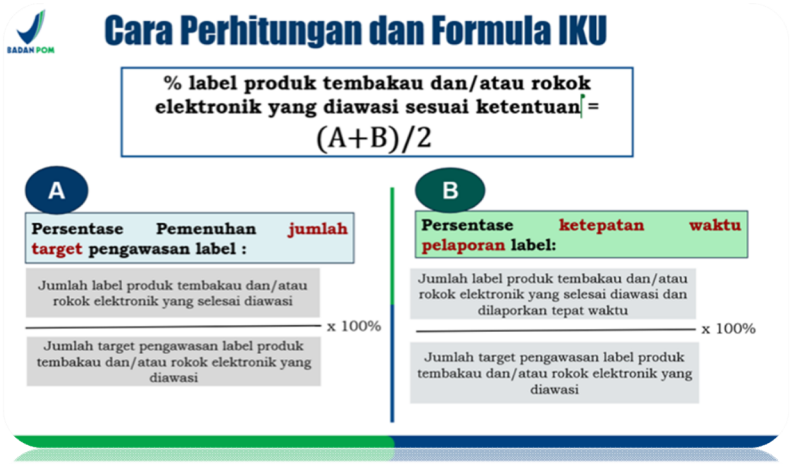
Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	4,16	0,00	10,00	10,00	1,54	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10,33	0,00	10,00	20,00	2,31	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	14,5	160,00	10,00	45,00	16,54	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	23,32	880,00	40,00	48,00	74,46	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	30,84	905,00	50,00	55,00	77,69	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	43,33	905,00	55,00	65,00	78,85	13

3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	52,5	930,00	60,00	70,00	81,54	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	60	930,00	70,00	70,00	82,31	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	68,5	955,00	90,00	90,00	87,31	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	71	980,00	90,00	90,00	89,23	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	79,17	1070,00	100,00	100,00	97,69	13
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	**Desember**	15,85	**11,00**	**1,00**	**3,00**	**18,29**	82,00

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21			Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	4	1	0	0	0			0		1	0,85			0	17,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	4	1	0	0	0			0		1	0,85			0	17,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	4	1	1	0	0,15			0		1	0,85			0	20,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	4	1	2	0	0,3			0		1	0,85			0	23,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	4	1	1	0	0,15	2		1,1		1	0,85			0	42,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	4	1	0	0	0	3		1,65		1	0,85			0	50,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	4	0	0	0	0			0	1		0,85	2		2	71,25		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	4	0	0	0	0			0	1		0,85	2		2	71,25		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	4				0			0	1		0,85	2		2	71,25		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	4		1		0,15			0	1		0,85	2		2	75,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	4		1		0,15			0	1		0,85	2		2	75,00		
3A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	4		1		0,15			0	1		0,85	2		2	75,00		

Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar



Nama UPT:	BBPOM PADANG
Nama Pengawas:	Ririn

Target 2025: 90%

Perhitungan Capaian Indikator UPT - BPOM Untuk Produk Tembakau

Bulan pengawasan	Target waktu pelaporan	Realisasi waktu pelaporan	Target		A. Aspek pemenuhan jumlah			B. Aspek ketepatan waktu			Realisasi : ((g/e)+(j/e))/2	Catatan (Berisi justifikasi realisasi jumlah dan ketepatan waktu, atau masalah lain)
			Target per bulan	Target kumulatif	Realisasi Jmlh per bulan	Akumulasi Realisasi Jumlah	Persen Jumlah	Realisasi tepat waktu per bulan	Akumulasi Laporan tepat waktu	Persen Tepat Waktu		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Januari	5 Feb 2025	3 Feb 2025	17	17	17	17	100,0%	17	17	100,0%	100,0%	
Februari	5 Mar 2025	24 Feb 2025	17	34	10	27	79,4%	10	27	79,4%	79,4%	
Maret	5 Apr 2025	10 Maret 2025	17	51	10	37	72,5%	10	37	72,5%	72,5%	
April	5 May 2025	30 April 2025	17	68	19	56	82,4%	17	54	79,4%	80,9%	
Mei	5 Jun 2025	28 Mei 2025	17	85	19	75	88,2%	17	71	83,5%	85,9%	
Juni	5 Jul 2025	22 Juni 2025	17	102	19	94	92,2%	17	88	86,3%	89,2%	
Juli	5 Aug 2025	31 Juli 2025	17	119	19	113	95,0%	17	105	88,2%	91,6%	
Agustus	5 Sep 2025	23 dan 30 Agust 2025	17	136	23	136	100,0%	17	122	89,7%	94,9%	4 laporan dikirim tgl 23 Agust 2025 19 laporan dikirim tgl 30 Agust 2025
September	5 Okt 2025	30 Sept 2025	17	153	19	155	101,3%	17	139	90,8%	96,1%	
Oktober	5 Nov 2025	20 Okt 2025	17	170	18	173	101,8%	17	156	91,8%	96,8%	
November	5 Dec 2025	27 Nov 2025	17	187	18	191	102,1%	17	173	92,5%	97,3%	
Desember	5 Jan 2026	6 Des 2025	17	204	17	208	102,0%	17	190	93,1%	97,5%	

·. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Januari	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Februari	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Maret	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	April	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Mei	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Juni	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Juli	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Agustus	-	-	-	-	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	September	11,11	1	9	11,11	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Oktober	11,11	1	9	11,11	-	-
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	November	11,11	1	9	11,11	Belum semua Kabupaten/Kota melakukan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tahun 2026 akan dilakukan pendampingan kembali kepada Kabupaten/Kota dalam pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
		30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten K	Desember				11,11		
								Target Tercapai		

MONEV

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Role Pilih TA (2025) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.432810	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	85,92	96,90	91,41

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Periode Data

01 Jan 2025 - 31 Oct 2025

Background Color

Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : **662**

Indeks Rata-Rata/Final : **89.35**

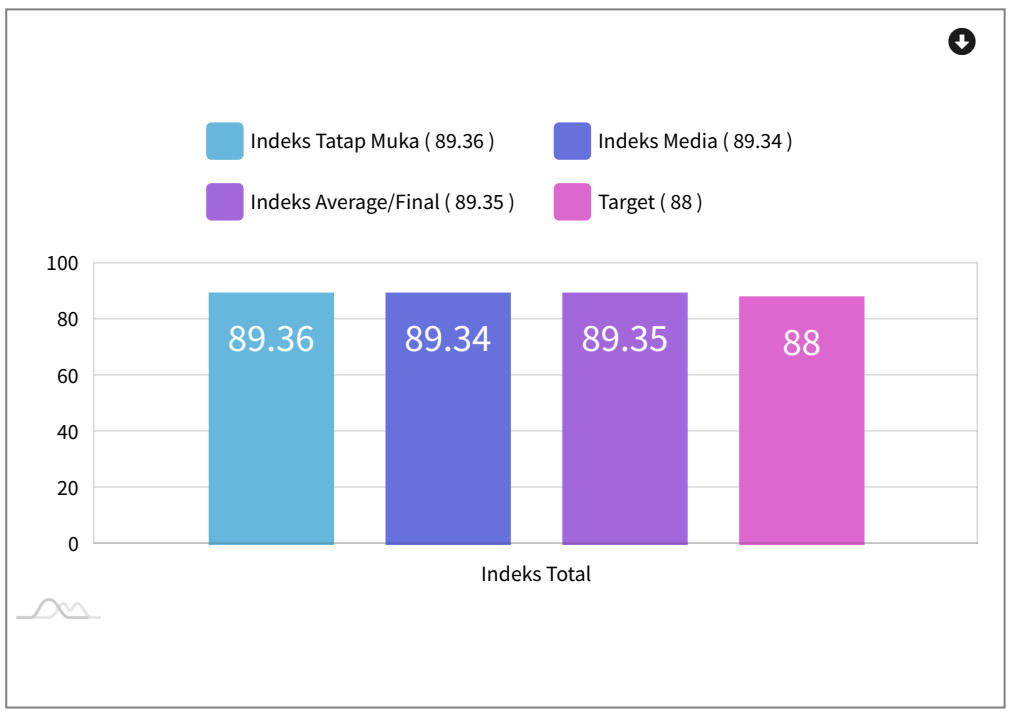
** EFEKTIF **

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 572)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Narasumber/Petugas	3.64	90.88
Konten/Informasi	3.64	91.05
Pemahaman Audiens	3.46	86.43
Manfaat	3.56	89.1
Indeks Tatap Muka	**89.36**	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 90)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Sumber Informasi	3.6	90
Konten/Informasi	3.7	92.5
Pemahaman Audiens	3.44	86.11
Manfaat	3.55	88.75
Indeks Media	**89.34**	

CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

Capaian : 101.53 %

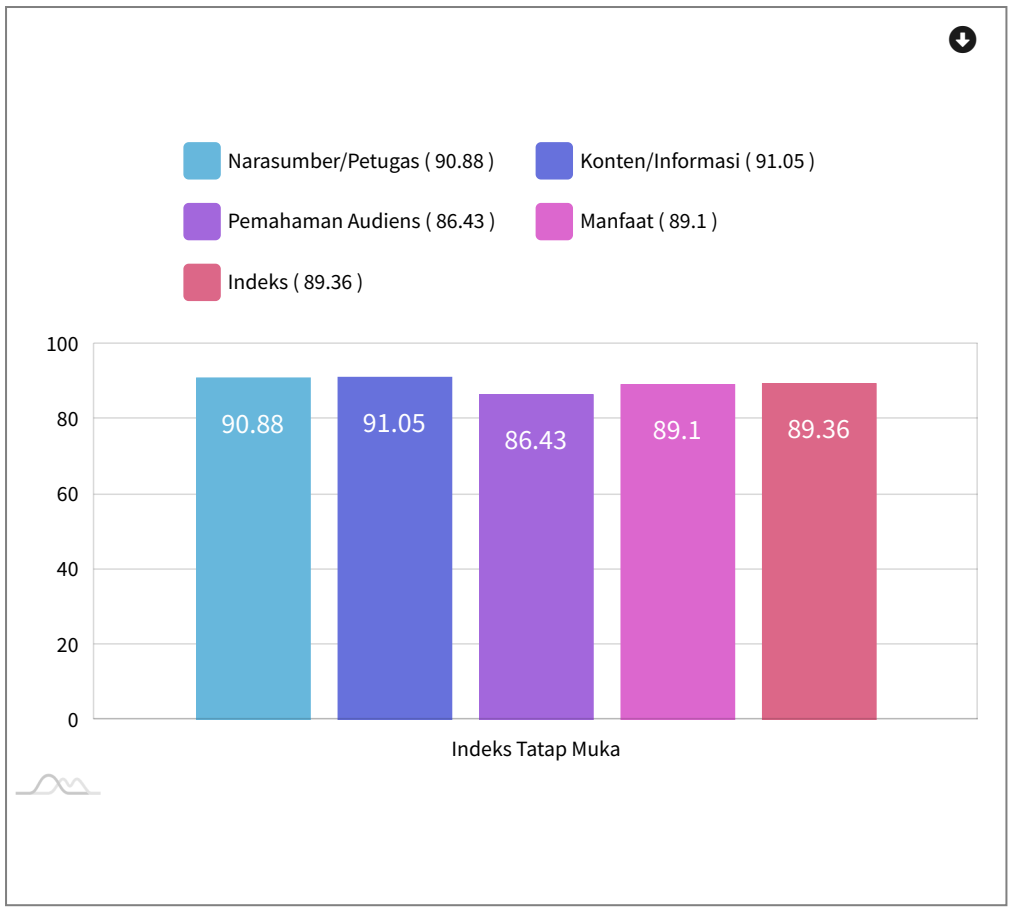


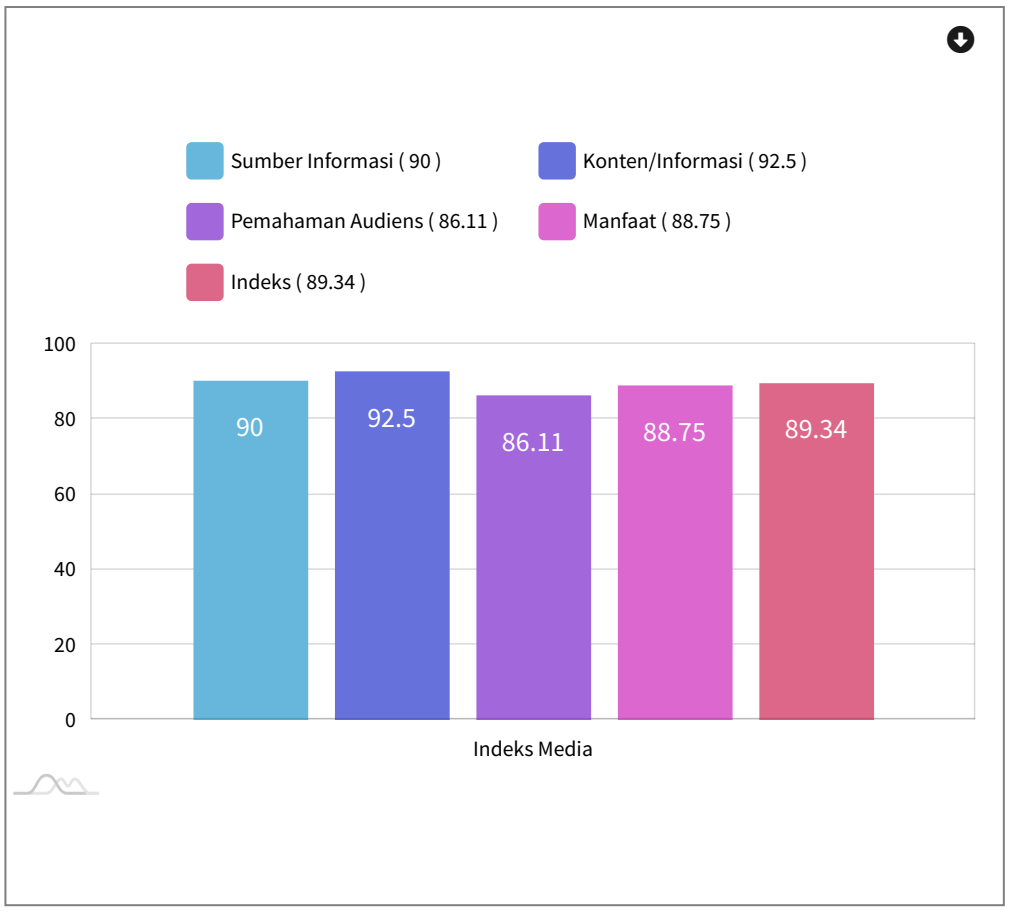
BERDASARKAN INDEKS TATAP MUKA

Efektif

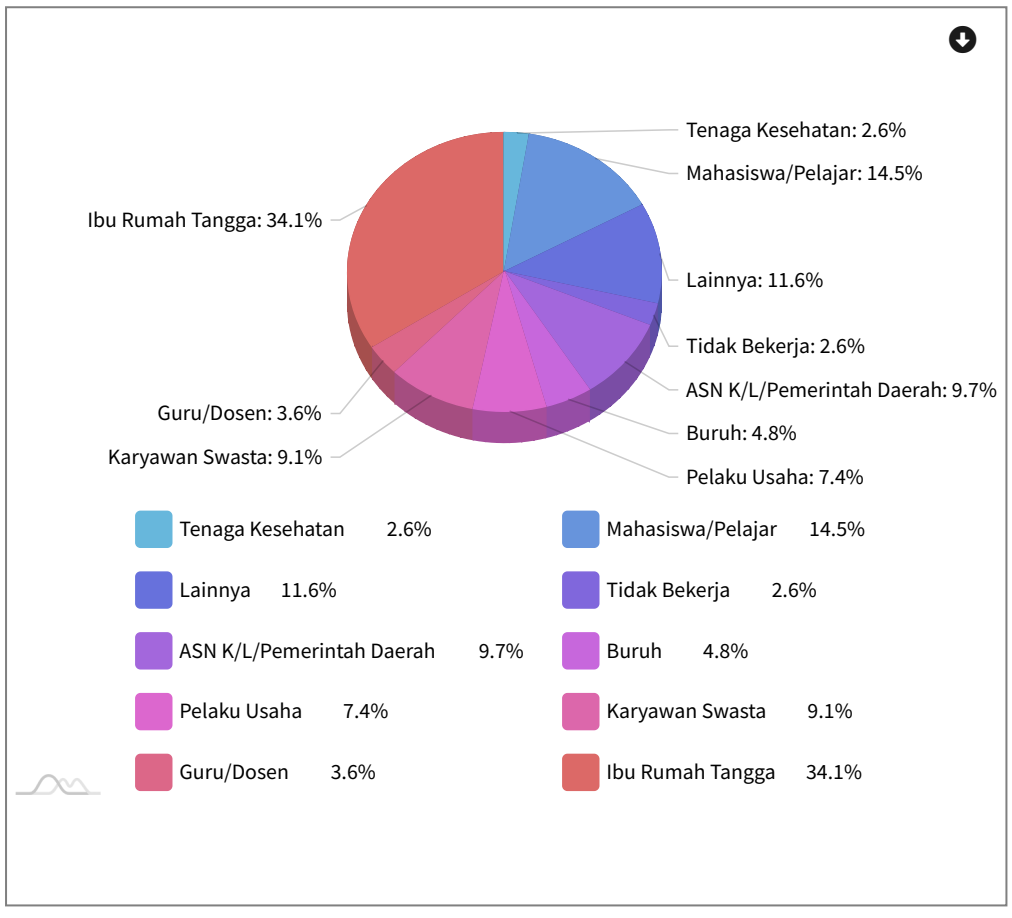
BERDASARKAN INDEKS MEDIA

Efektif

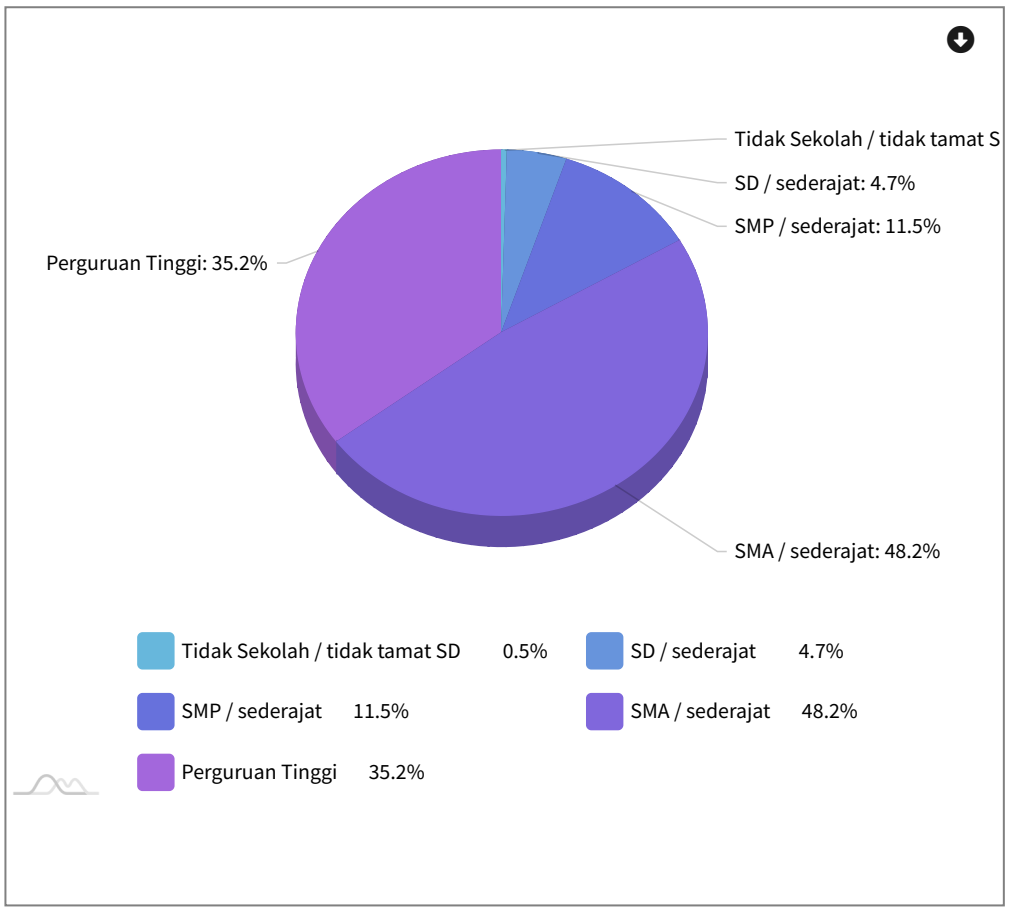




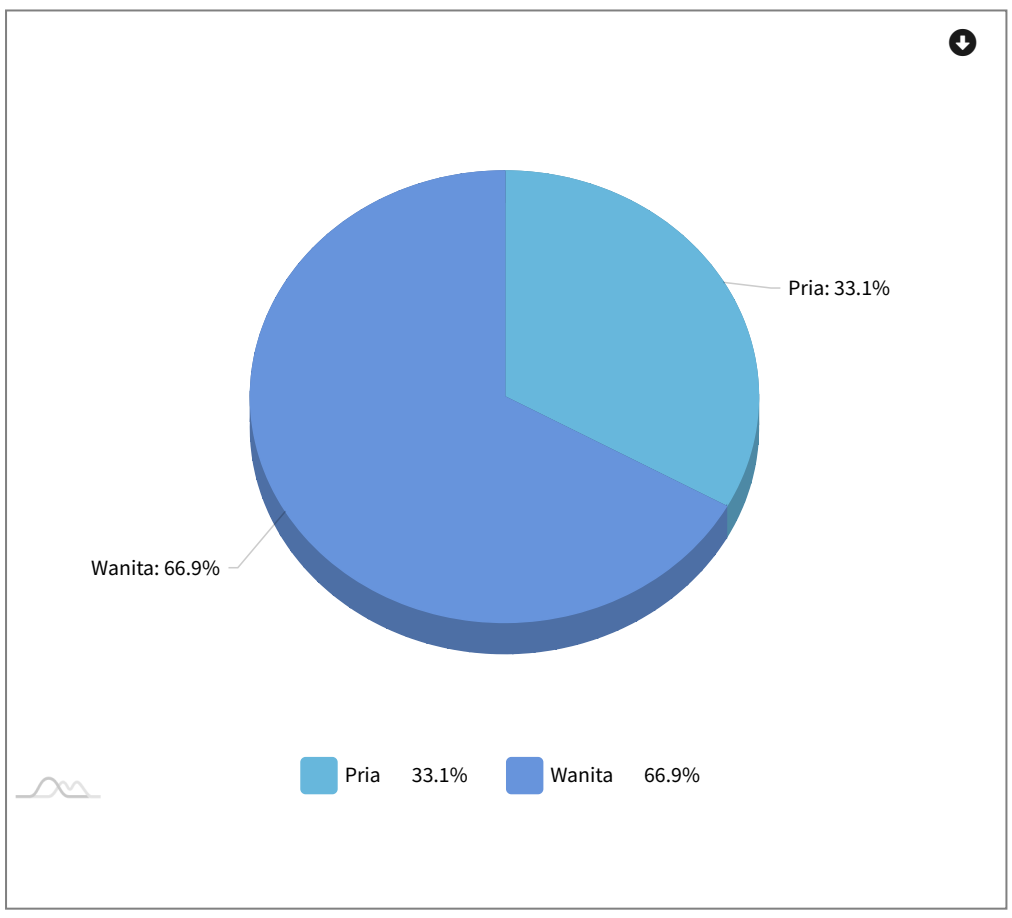
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



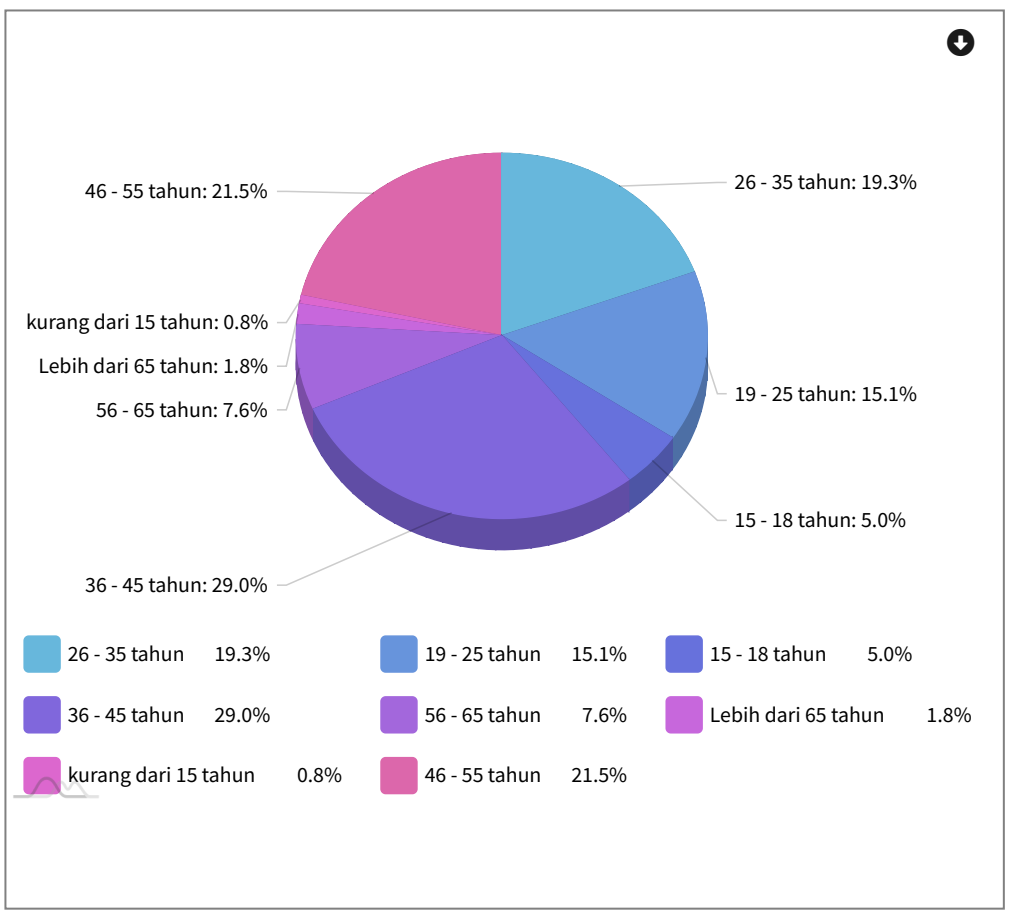
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



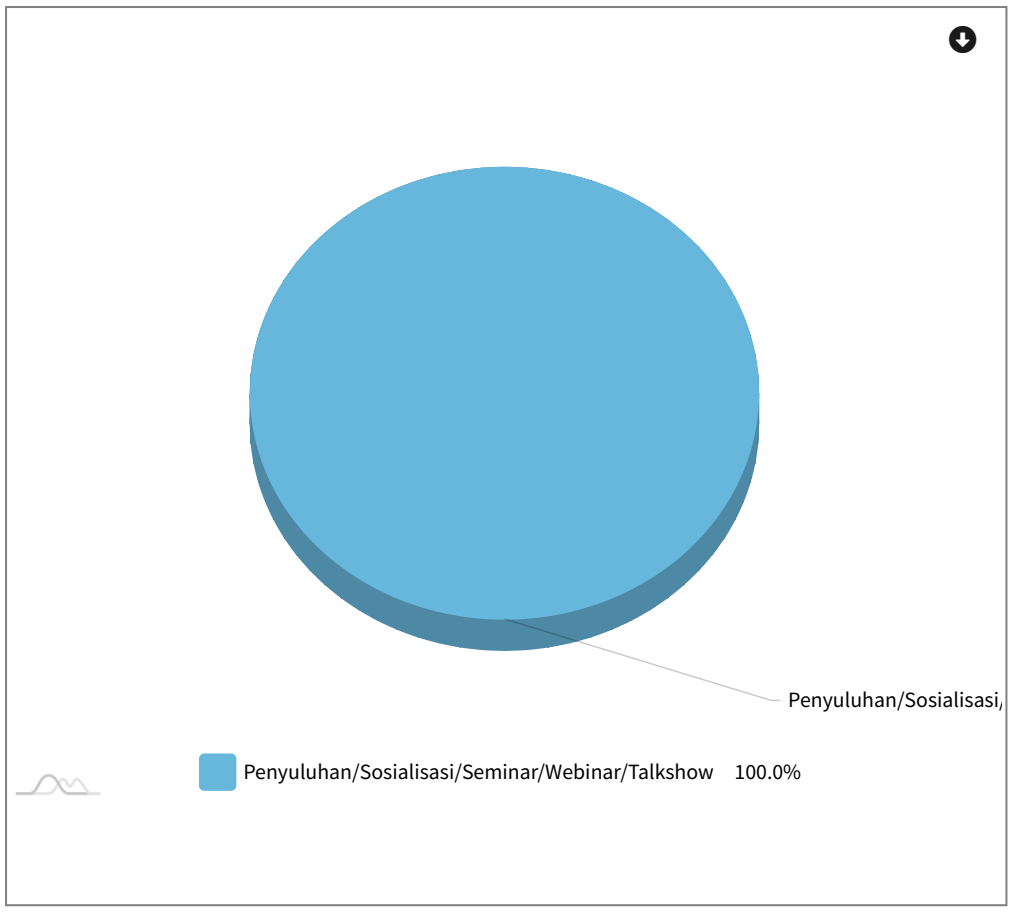
GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN



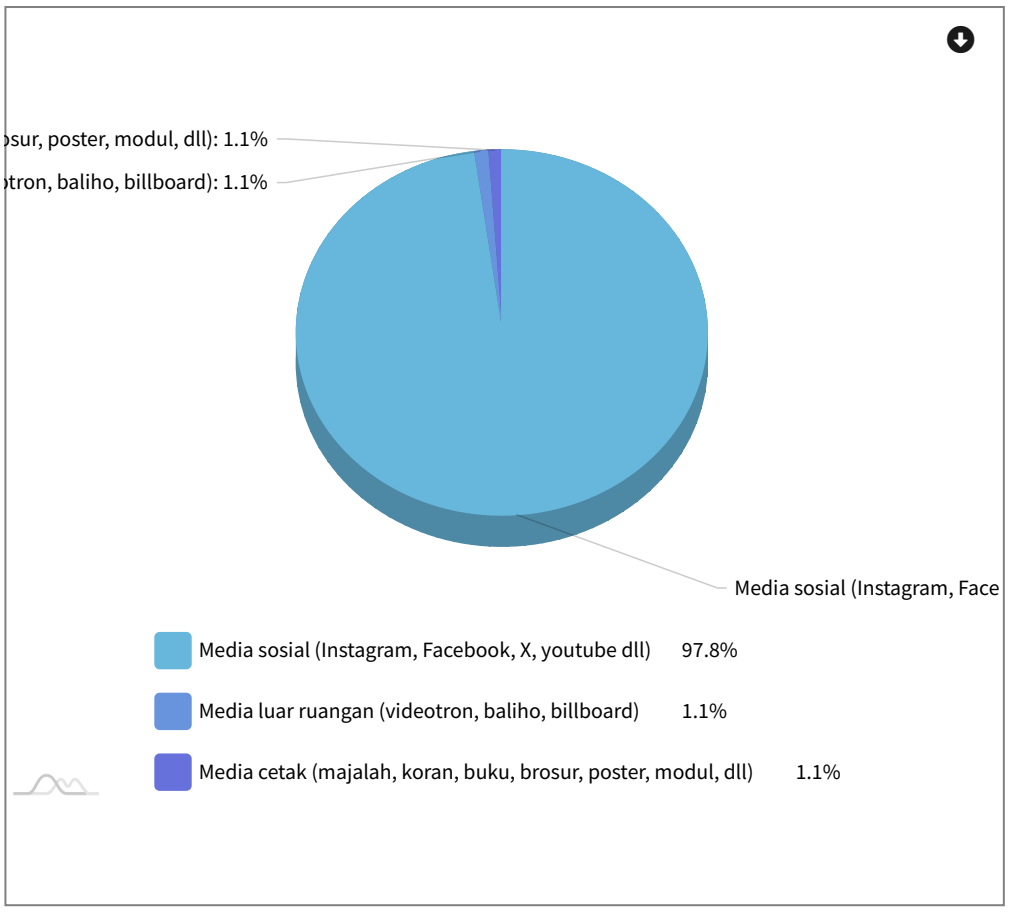
GRAFIK USIA RESPONDEN



KIE TATAP MUKA YANG DITERIMA



MEDIA YANG SERING DILIHAT/DENGAR/BACA



MATERI YANG DIINGAT RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Tugas dan wewenang BPOM	336
Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan	527
Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM MOBILE	376
Tanya HALOBPOM/ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan	173
Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM	268
Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan	211
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	166
Lainnya	14

MATERI YANG DIBUTUHKAN RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman	564
Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat	344
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	252
Lainnya	12

Copyright © 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan. All rights reserved.

Periode Data 01 Jan 2025 - 30 Nov 2025

Tipe Survei Semua Data

Background Color Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : **746**

Indeks Rata-Rata/Final : **89.36**

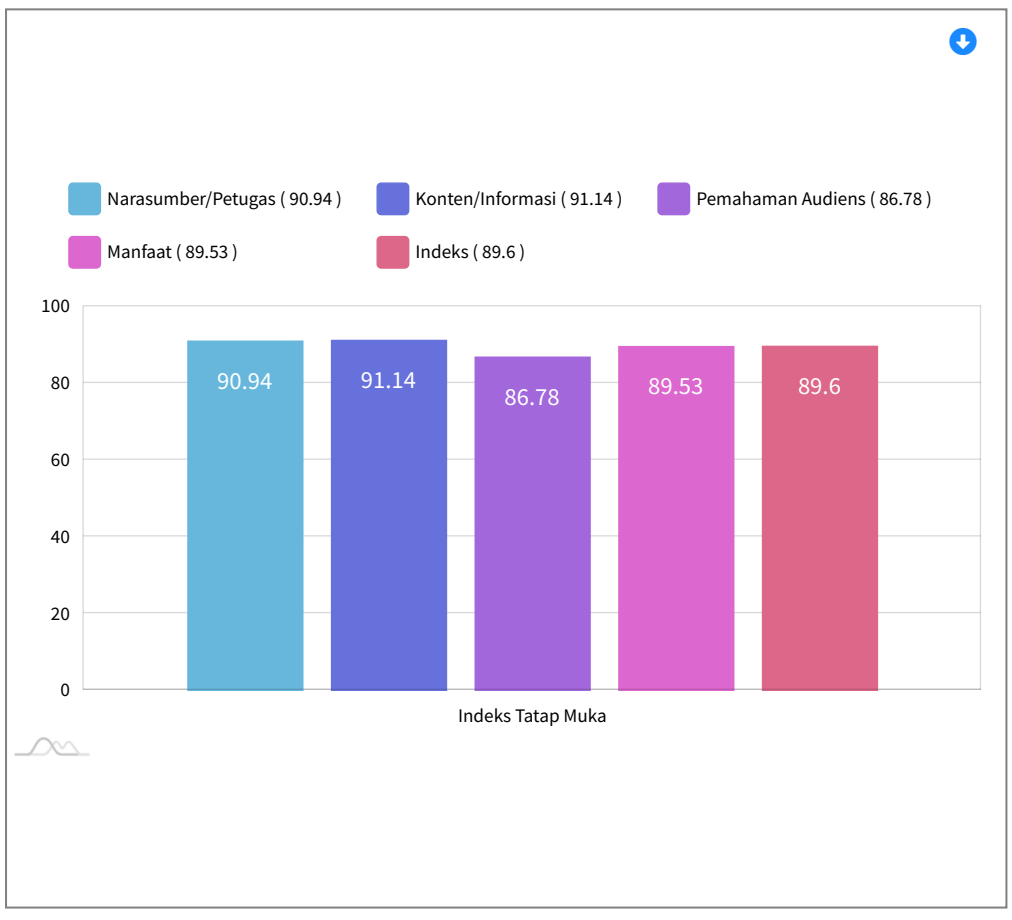
** EFEKTIF **

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 621)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Narasumber/Petugas	3.64	90.94
Konten/Informasi	3.65	91.14
Pemahaman Audiens	3.47	86.78
Manfaat	3.58	89.53
Indeks Tatap Muka	**89.6**	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 125)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Sumber Informasi	3.6	89.9
Konten/Informasi	3.67	91.8
Pemahaman Audiens	3.43	85.8
Manfaat	3.56	89
Indeks Media	**89.13**	

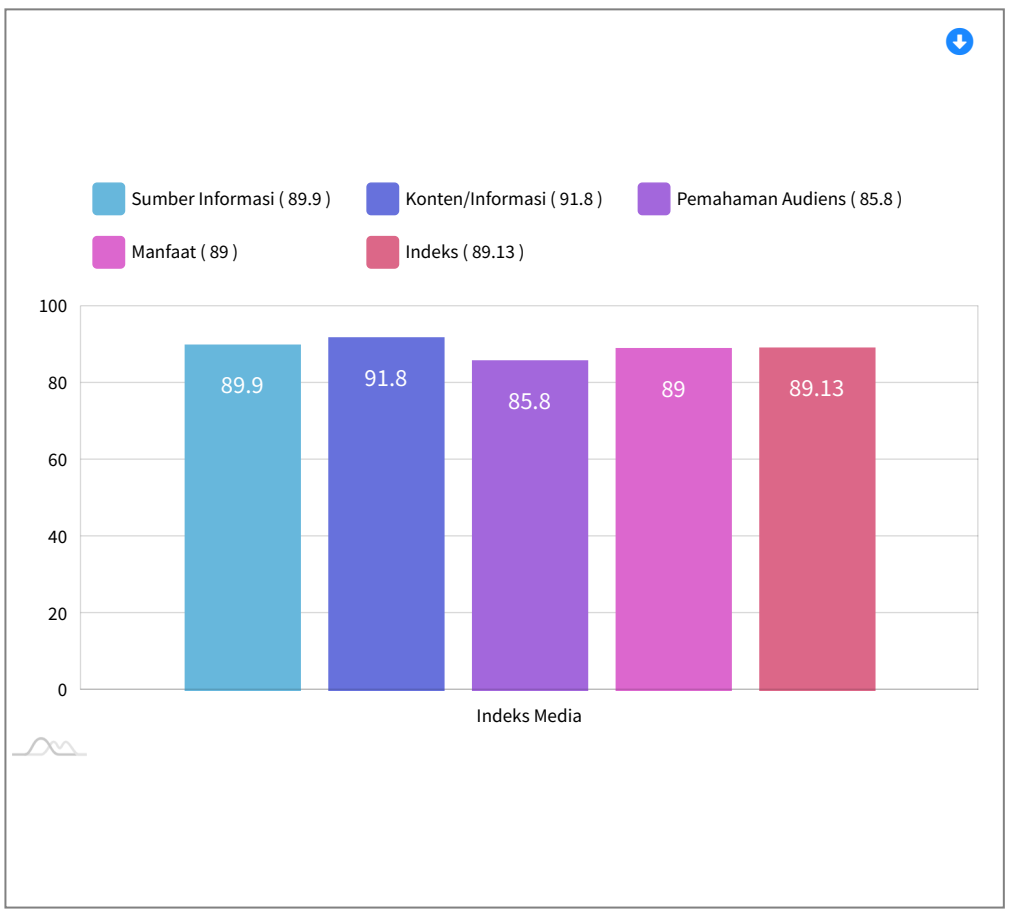
BERDASARKAN INDEKS TATAP MUKA

Efektif



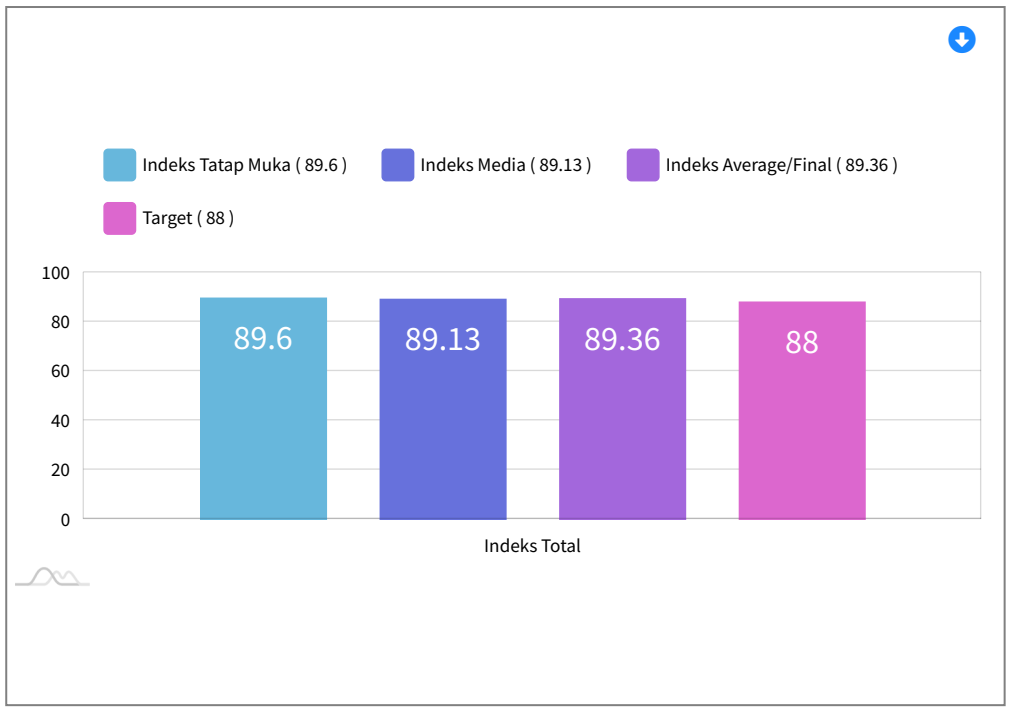
BERDASARKAN INDEKS MEDIA

Efektif

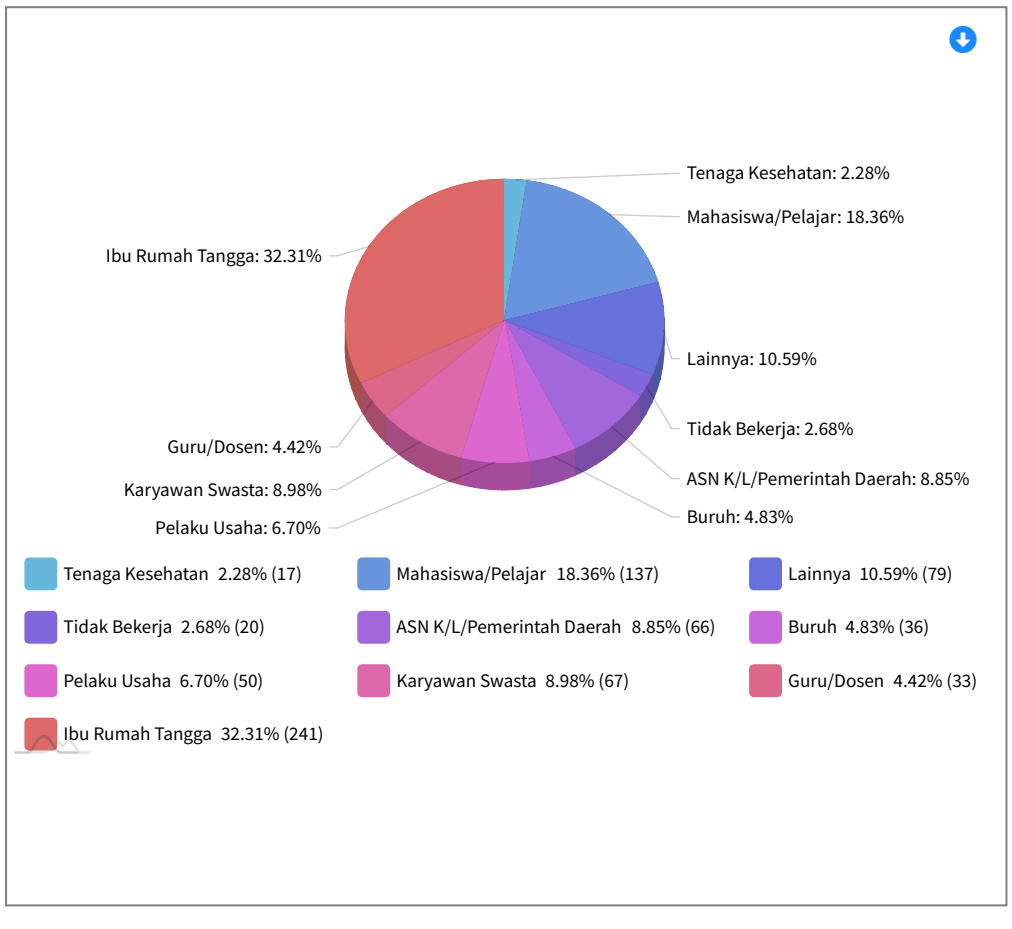


CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

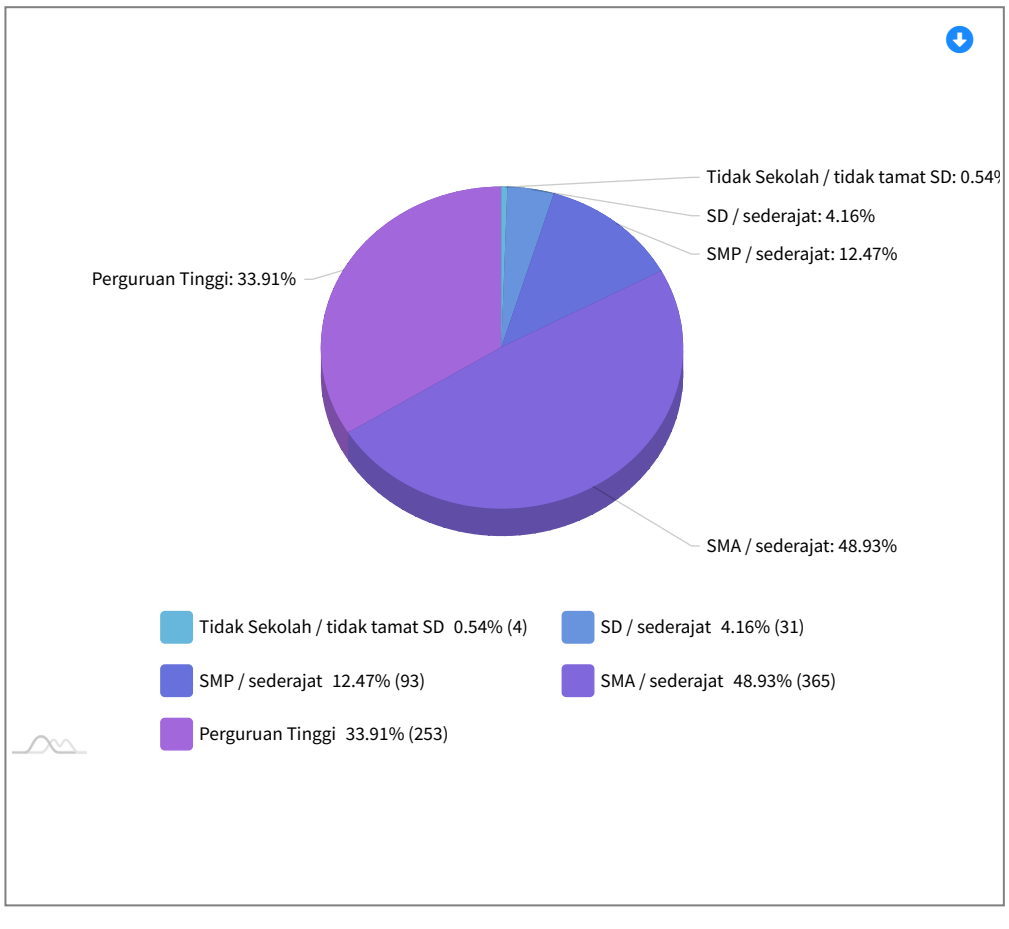
Capaian : 101.55 %



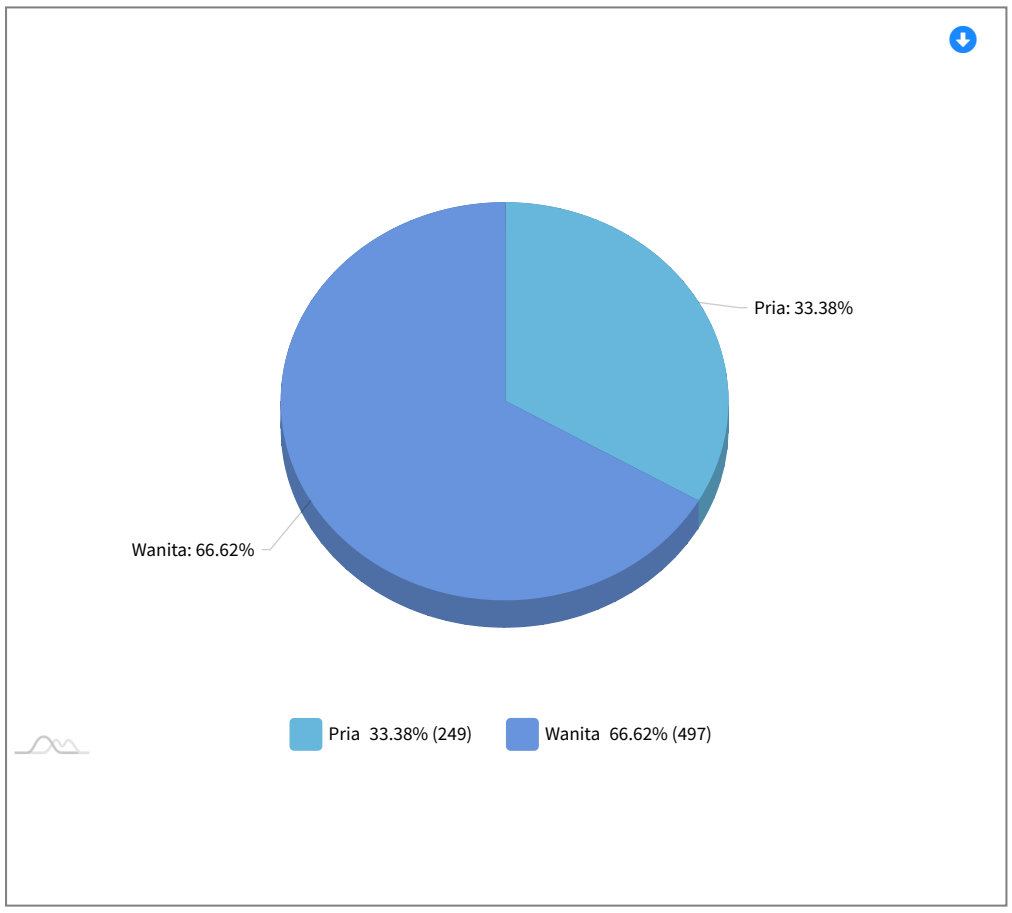
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



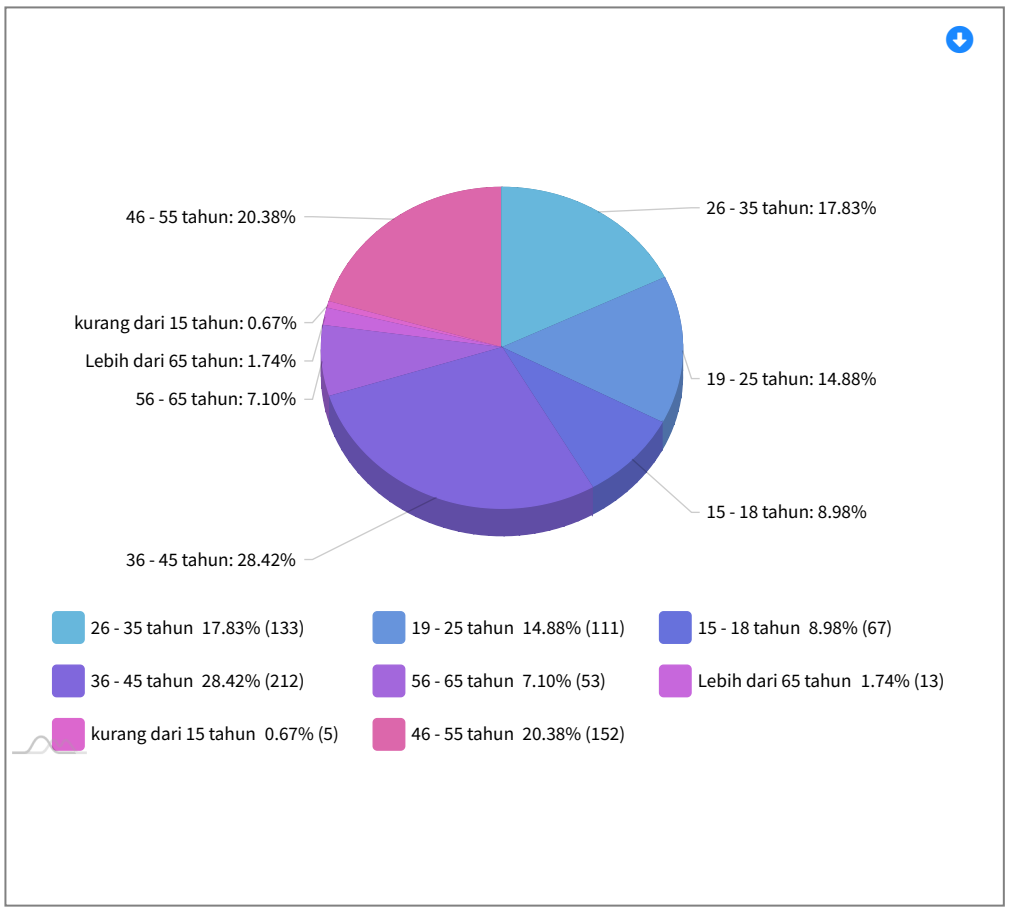
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN

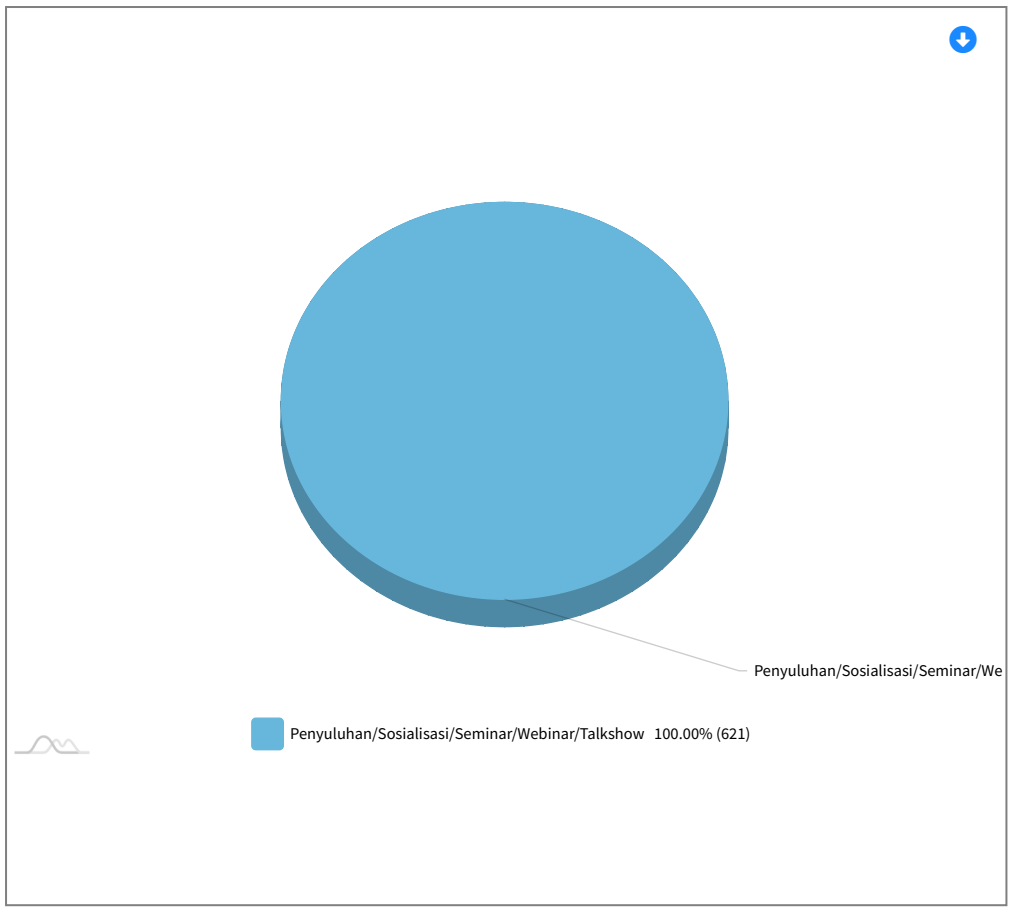


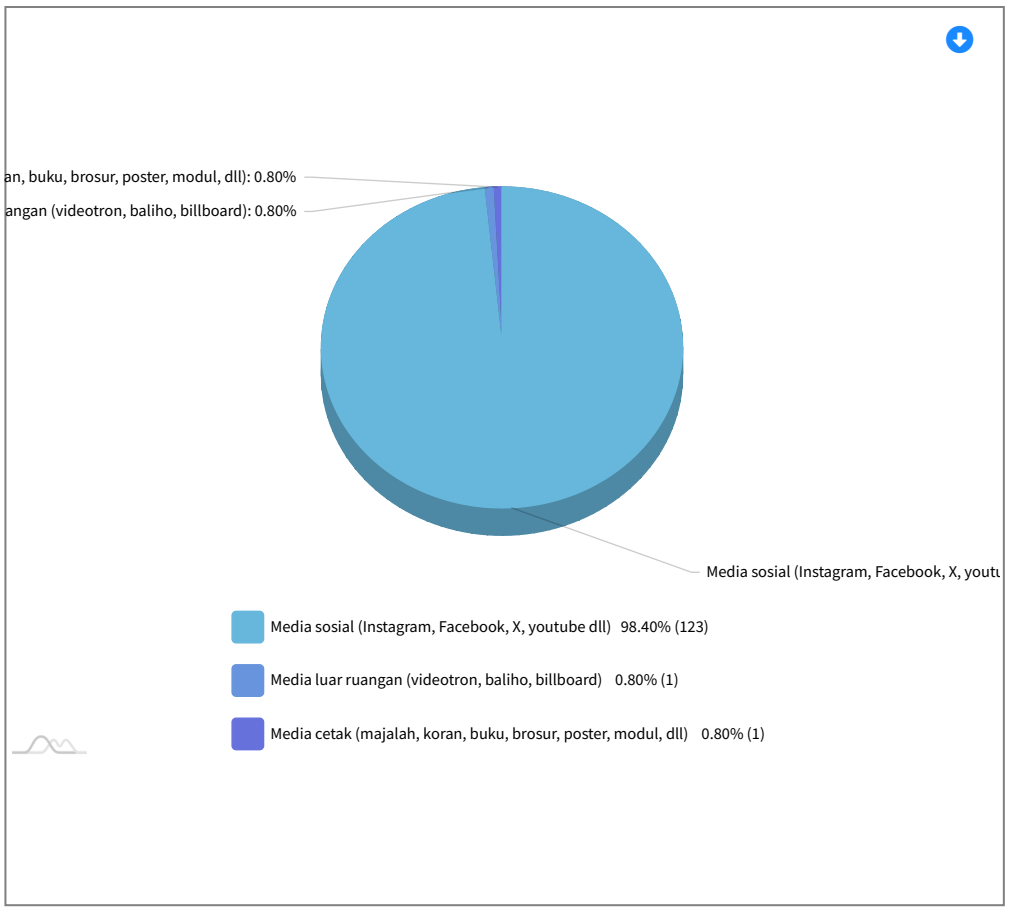
GRAFIK USIA RESPONDEN



KIE TATAP MUKA YANG DITERIMA

MEDIA YANG SERING DILIHAT/DENGAR/BACA





MATERI YANG DIINGAT RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Tugas dan wewenang BPOM	393
Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan	595
Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM MOBILE	416
Tanya HALOBPOM/ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan	192
Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM	300
Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan	229
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	189
Lainnya	17

MATERI YANG DIBUTUHKAN RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman	638
Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat	389
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	292
Lainnya	12

Copyright © 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan. All rights reserved.

Periode Data 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025

Tipe Survei Semua Data

Background Color Light

Tampilkan Dashboard

Total Responden : **809**

Indeks Rata-Rata/Final : **89.51**

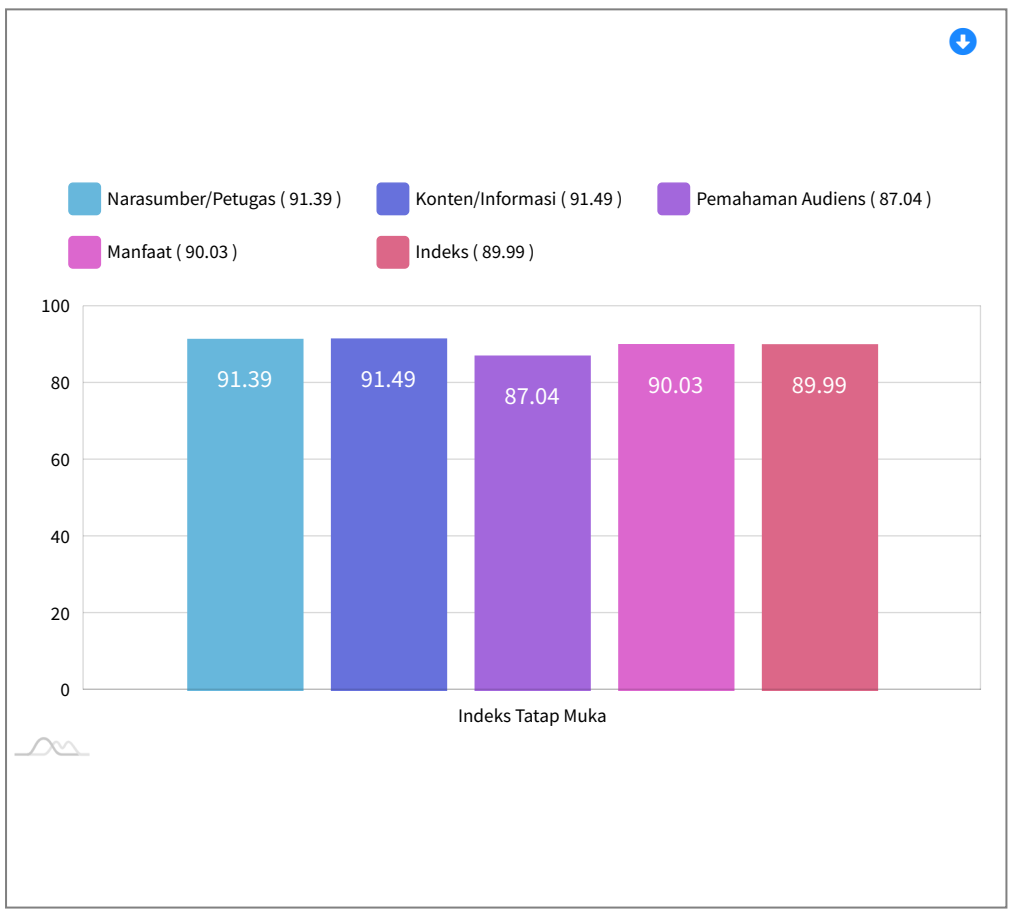
** EFEKTIF **

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 673)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Narasumber/Petugas	3.66	91.39
Konten/Informasi	3.66	91.49
Pemahaman Audiens	3.48	87.04
Manfaat	3.6	90.03
Indeks Tatap Muka	**89.99**	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 136)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Sumber Informasi	3.59	89.71
Konten/Informasi	3.67	91.73
Pemahaman Audiens	3.43	85.75
Manfaat	3.56	88.97
Indeks Media	**89.04**	

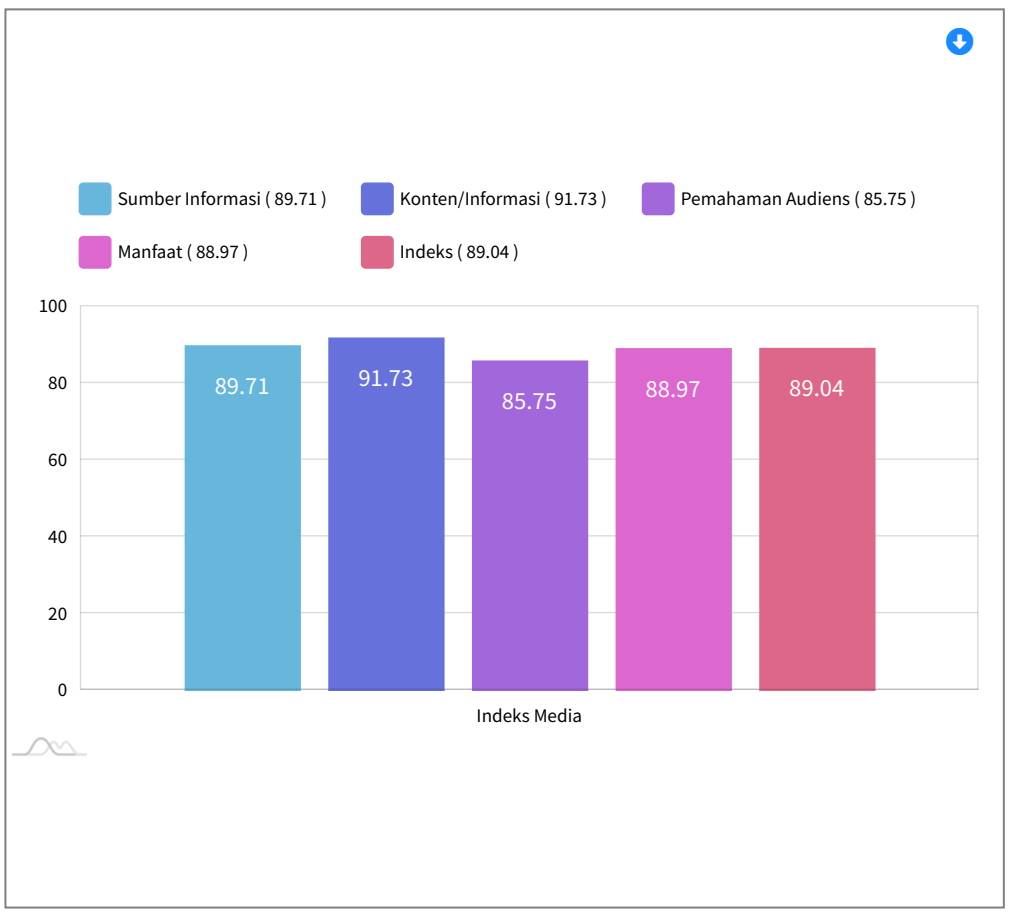
BERDASARKAN INDEKS TATAP MUKA

Efektif



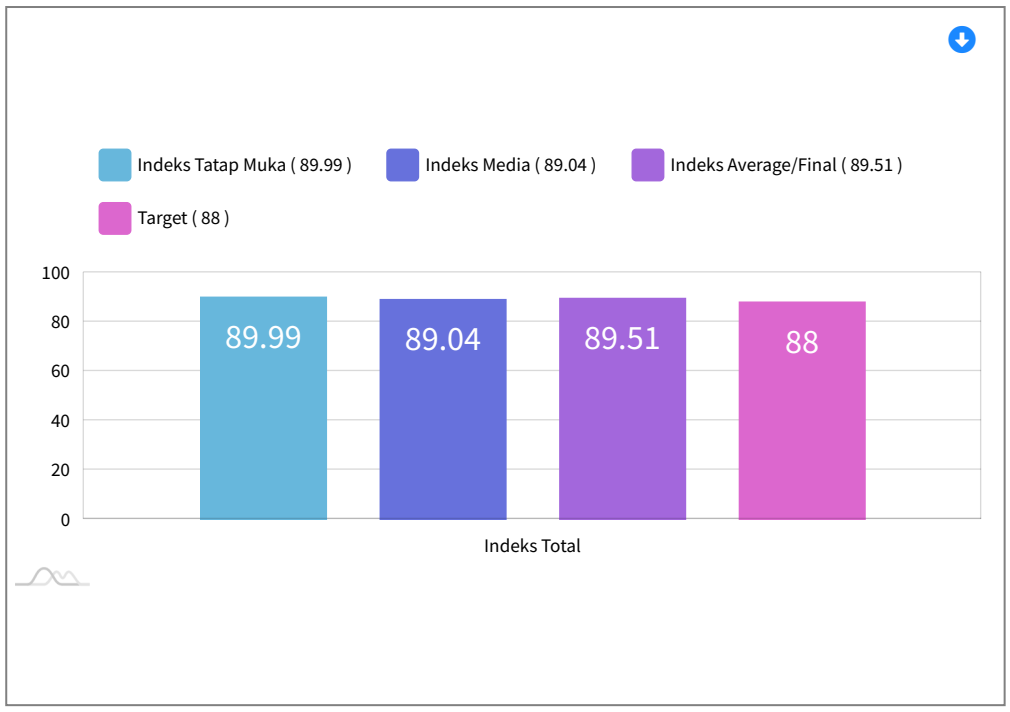
BERDASARKAN INDEKS MEDIA

Efektif

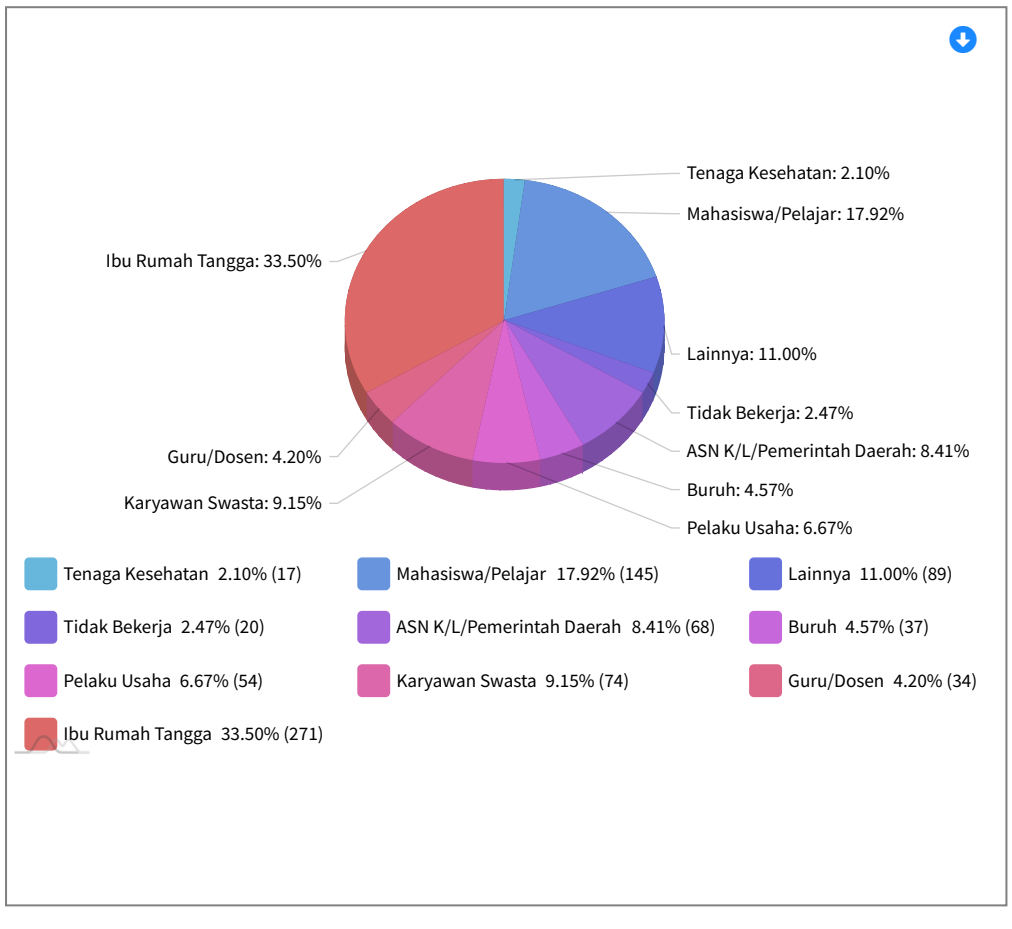


CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

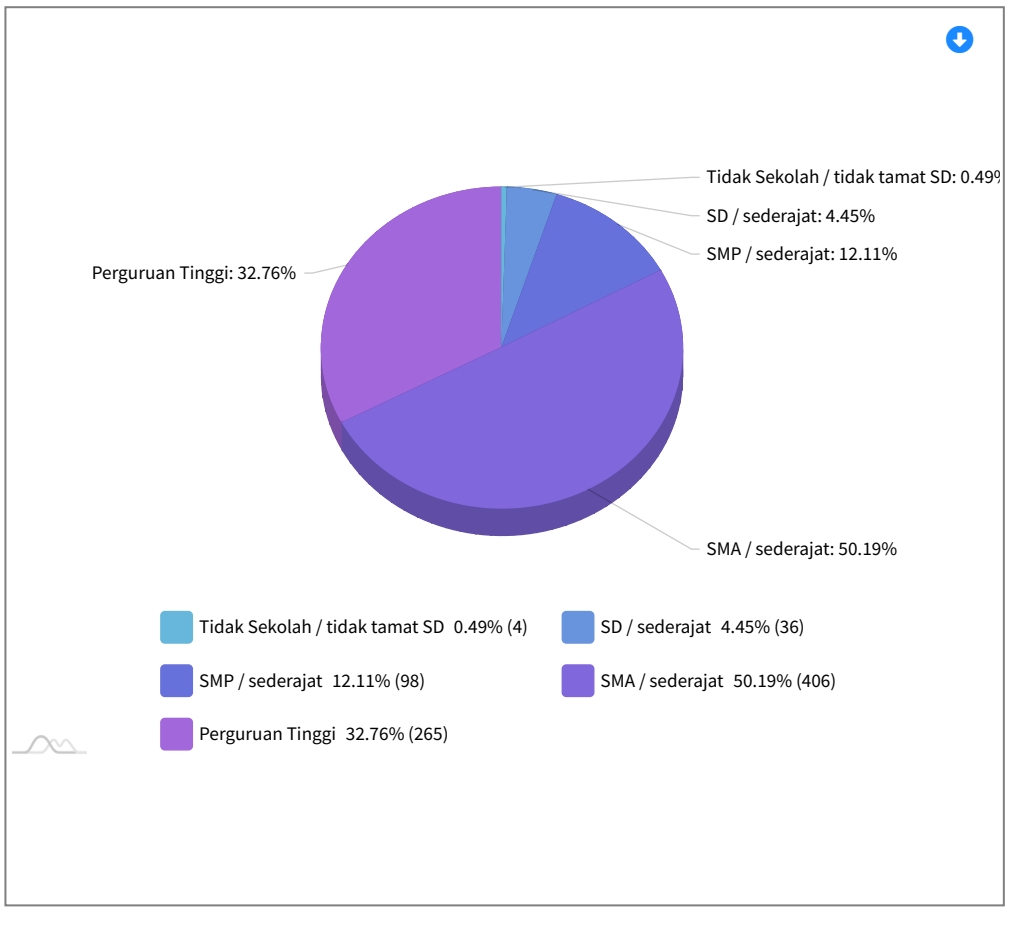
Capaian : 101.72 %



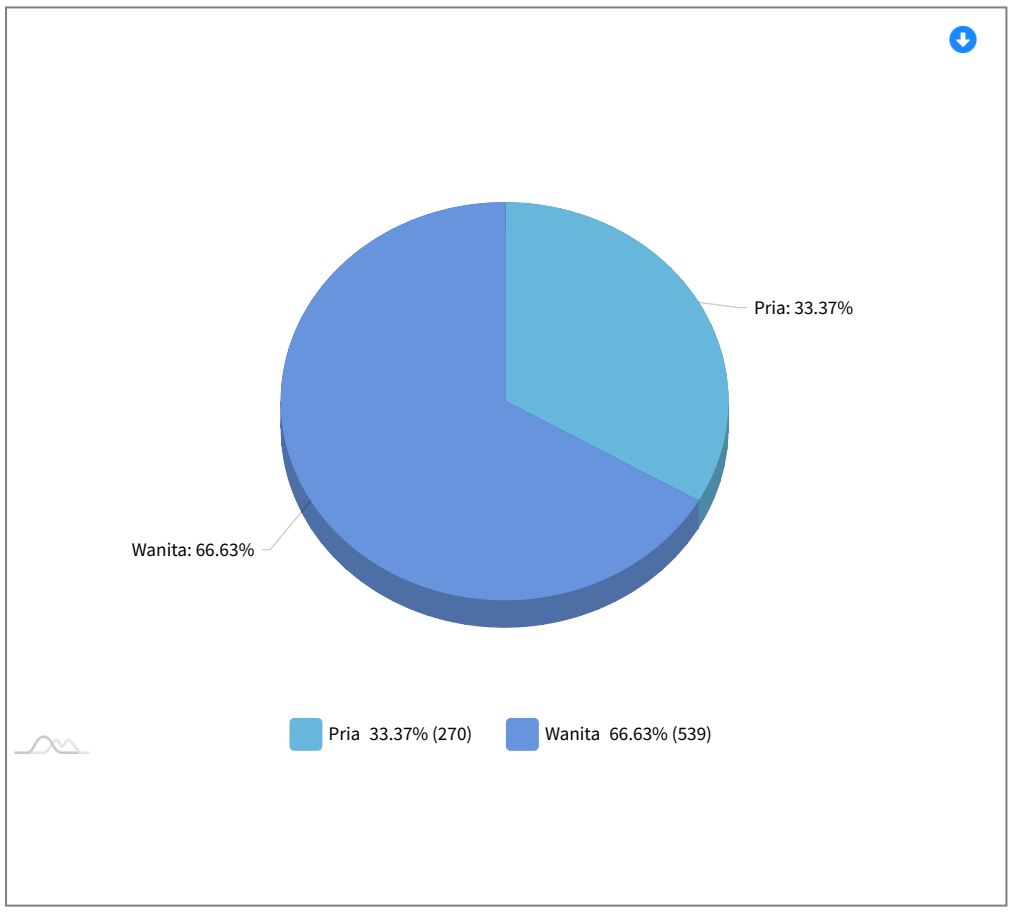
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



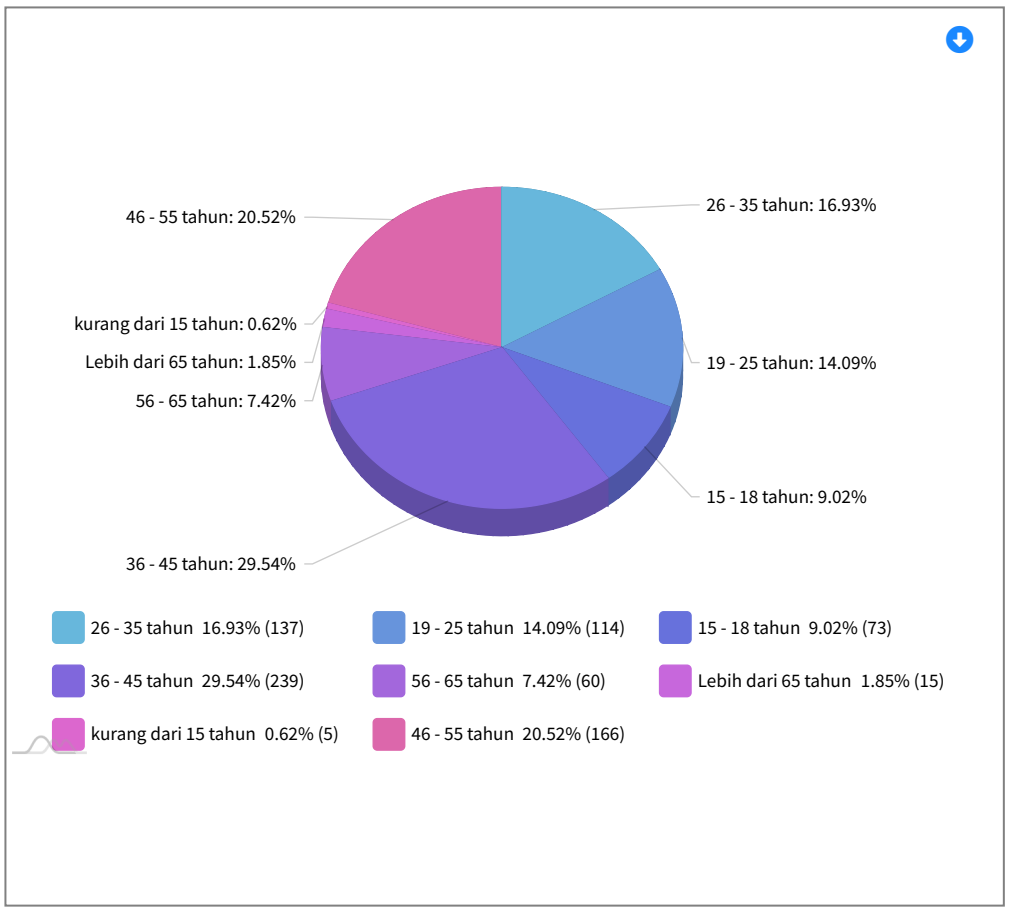
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN

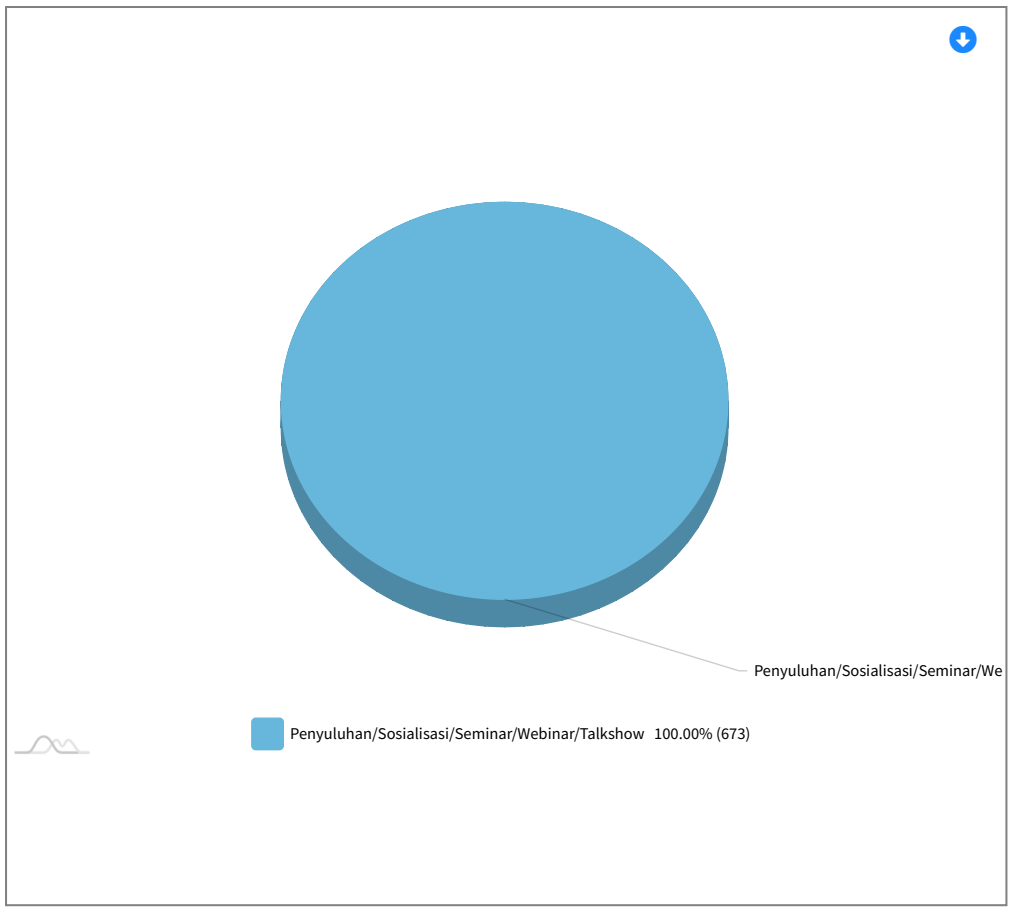


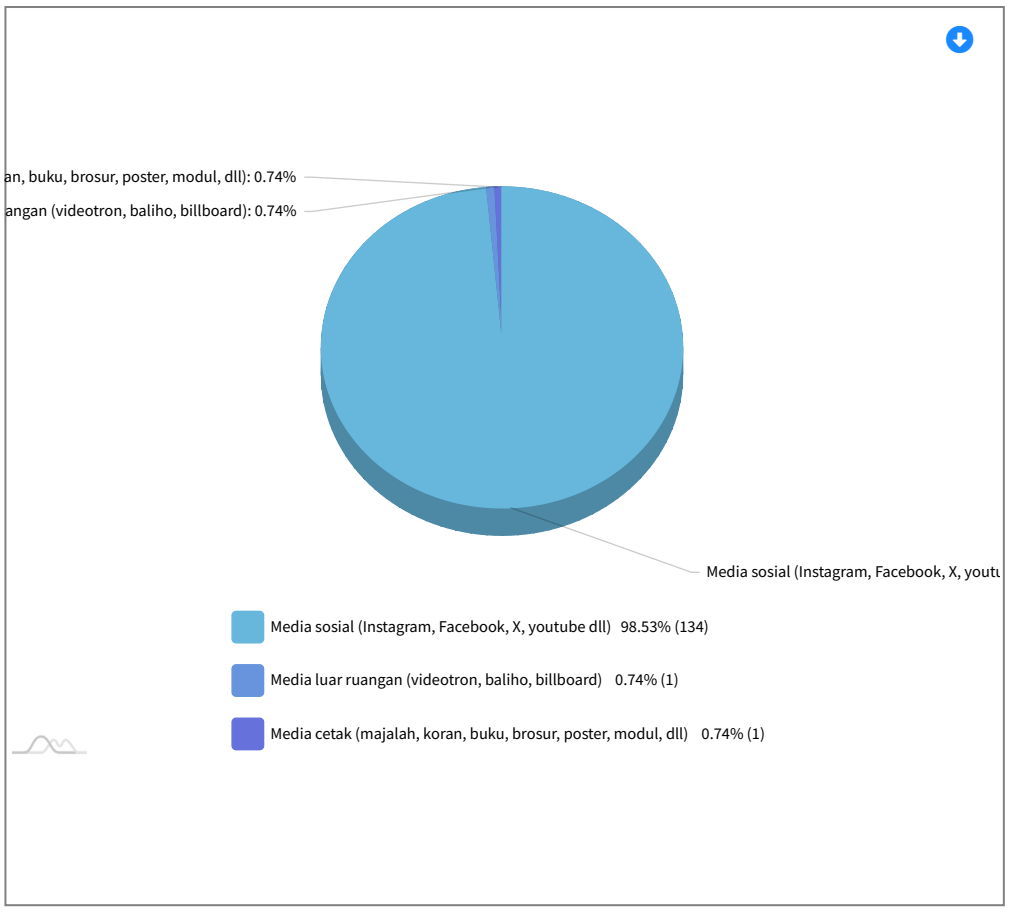
GRAFIK USIA RESPONDEN



KIE TATAP MUKA YANG DITERIMA

MEDIA YANG SERING DILIHAT/DENGAR/BACA





MATERI YANG DIINGAT RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Tugas dan wewenang BPOM	438
Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan	652
Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM MOBILE	457
Tanya HALOBPOM/ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan	215
Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM	336
Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan	248
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	212
Lainnya	17

MATERI YANG DIBUTUHKAN RESPONDEN

*** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi*

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman	699
Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat	431
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	317
Lainnya	12

Copyright © 2026 Badan Pengawas Obat dan Makanan. All rights reserved.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PI.06.07.71.7.01.26.02

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025
Tanggal	:	02 Januari 2026

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.11.25.220 dan PI.06.07.7.11.25.220 tanggal 4 November 2025.

Bersama ini kami sampaikan nilai tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada 115 (seratus lima belas) Satuan/Unit Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, 3 (tiga) Balai di lingkungan PPPOMN dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Rata-rata nilai maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja BPOM tahun 2025 sebesar **2,875** atau level ***Risk Aware****,* dengan rincian rata-rata per kluster sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai Satuan Kerja Eselon I sebesar 3,094 (*Risk Defined);*
2. Rata-rata nilai Unit Kerja Pusat sebesar 3,205 (*Risk Defined);*
3. Rata-rata nilai Balai Besar POM sebesar 2,974 (*Risk Aware);*
4. Rata-rata nilai Balai POM sebesar 2,814 (*Risk Aware);*
5. Rata-rata nilai Balai di lingkungan PPPOMN sebesar 1,948 (*Risk Naive);*
6. Rata-rata nilai Loka POM sebesar 2,491 (*Risk Aware).*

Adapun penjelasan mengenai masing-masing level maturitas manajemen risiko sebagaimana lampiran 1 sedangkan rincian nilai maturitas manajemen risiko Unit Pemilik Risiko tahun 2025 disampaikan sebagaimana lampiran 2.

Berdasarkan hasil evaluasi, catatan implementasi manajemen risiko di lingkungan BPOM secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Hal-hal yang telah diterapkan dengan baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Unit Pemilik Risiko telah melakukan pemutakhiran data manajemen risiko secara tertib yaitu minimal setiap semester;
2. Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi risiko pada setiap sasaran strategis/program/kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan;
3. Sebagian besar Unit Pemilik Risiko telah memiliki kriteria dalam penentuan level risiko baik level kemungkinan maupun dampak;
4. Telah terdapat integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja melalui *cascading* kinerja dan *tagging* risiko pada setiap Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai;
5. Mayoritas pegawai di lingkungan BPOM telah mengikuti pelatihan manajemen risiko minimal melalui aplikasi IDEAS.

B. Hal-hal yang perlu diperbaiki
1. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko;
2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat *bottom up;*
3. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru;
4. Masih terdapat Unit Pemilik Risiko yang belum melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16;
5. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16.

Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikan akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Level 1 Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*)	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Level 2 Sadar Risiko (*Risk Aware*)	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
Level 3 Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*)	Kerangka penilaian / tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4 Risiko Dikelola (*Risk Managed*)	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area proses bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Level 5 Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*)	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batasan yang telah ditetapkan

Parameter Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Tingkat Kematangan	**Parameter Penilaian**			
	Kepemimpinan	**Proses Manajemen Risiko**	**Aktivitas Penanganan Risiko**	**Hasil Penerapan Manajemen Risiko**
Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat rendah	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (*Risk Aware*)	Komitmen dan Pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sedang	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (*Risk Managed*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko tinggi	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	**Proses Manajemen Risiko**	**Aktivitas Penanganan Risiko**	**Hasil Penerapan Manajemen Risiko**
Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat tinggi	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Padang Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**46,50**	**47,00**	**0,50**
Nilai Maturitas	**2,906**	**2,938**	**0,032**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PI.04.71.7.01.26.03

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	2 (dua) berkas
Hal	:	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
Tanggal	:	5 Januari 2026

Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
3. Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.25.03 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
4. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025, Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025, dan Nomor PI.04.7.10.25.191 tanggal 10 Oktober 2025.

Bersama ini kami sampaikan nilai AKIP pada 83 (delapan puluh tiga) Satuan Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Mandiri Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 20 (dua puluh) Loka POM. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan rata-rata nilai SAKIP Tahun 2025 adalah sebesar 78,48, jika dibandingkan dengan rata-rata hasil evaluasi Tahun 2024 dengan rata-rata nilai sebesar 78,96 disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,48. Penyebab utama menurunnya nilai hasil evaluasi Tahun 2025 dikarenakan menurunnya capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM

Nilai hasil evaluasi AKIP sebagaimana terlampir pada lampiran II. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan kami sampaikan kemudian, untuk selanjutnya Satuan Kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan melalui aplikasi SAPA APIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yan Setiadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran-1
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Inspektur Utama
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
6. Deputi Bidang Penindakan
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
9. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
10. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
11. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
12. Kepala Balai Besar POM di Medan
13. Kepala Balai Besar POM di Padang
14. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
15. Kepala Balai Besar POM di Palembang
16. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
17. Kepala Balai Besar POM di Serang
18. Kepala Balai Besar POM di Jakarta
19. Kepala Balai Besar POM di Bandung
20. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
21. Kepala Balai Besar POM di Semarang
22. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
23. Kepala Balai Besar POM di Denpasar
24. Kepala Balai Besar POM di Mataram
25. Kepala Balai Besar POM di Pontianak
26. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
27. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
28. Kepala Balai Besar POM di Samarinda
29. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
30. Kepala Balai Besar POM di Manado
31. Kepala Balai Besar POM di Makassar
32. Kepala Balai Besar POM di Kupang
33. Kepala Balai Besar POM di Jayapura
34. Kepala Balai POM di Bengkulu
35. Kepala Balai POM di Jambi
36. Kepala Balai POM di Batam
37. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38. Kepala Balai POM di Payakumbuh
39. Kepala Balai POM di Tanjungbalai
40. Kepala Balai POM di Dumai
41. Kepala Balai POM di Indragiri Hulu
42. Kepala Balai POM di Tulang Bawang
43. Kepala Balai POM di Tangerang
44. Kepala Balai POM di Bogor
45. Kepala Balai POM di Tasikmalaya
46. Kepala Balai POM di Banyumas
47. Kepala Balai POM di Surakarta
48. Kepala Balai POM di Kediri
49. Kepala Balai POM di Jember
50. Kepala Balai POM di Sanggau
51. Kepala Balai POM di Tabalong
52. Kepala Balai POM di Balikpapan
53. Kepala Balai POM di Tarakan
54. Kepala Balai POM di Palu
55. Kepala Balai POM di Kendari
56. Kepala Balai POM di Mamuju
57. Kepala Balai POM di Bau-Bau
58. Kepala Balai POM di Palopo
59. Kepala Balai POM di Bima
60. Kepala Balai POM di Ende
61. Kepala Balai POM di Ambon
62. Kepala Balai POM di Sofifi
63. Kepala Balai POM di Manokwari
64. Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan
65. Kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah
66. Kepala Loka POM di Kab. Toba
67. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
68. Kepala Loka POM di Kab. Bungo
69. Kepala Loka POM di Kab. Rejang Lebong
70. Kepala Loka POM di Kab. Sijunjung
71. Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang
72. Kepala Loka POM di Kab. Belitung
73. Kepala Loka POM di Kab. Buleleng
74. Kepala Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
75. Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
76. Kepala Loka POM di Kab. Banggai
77. Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
78. Kepala Loka POM di Kab. Manggarai Barat
79. Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
80. Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

81. Kepala Loka POM di Kab. Sorong
82. Kepala Loka POM di Kab. Mimika
83. Kepala Loka POM di Kab. Merauke

Yan Setiadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Padang Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	19,44	-0,72
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,24	20,16	+1,92
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	9,72	-0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	15,20	-1,60
5.	Capaian Kinerja	20	16,49	16,02	-0,47
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**81,77**	**80,54**	**-1,23**
Predikat			**A**	**A**	**Tetap**

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.263

Yth.	:	Kepala Balai Besar POM di Padang
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Padang
Tanggal	:	14 Agustus 2025

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Padang.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Padang sebesar **90,21** dengan rincian sebagai berikut

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,50	3,25	6,75	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,88	3,00	5,88	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,41	5,00	9,41	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,89	4,64	8,53	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,29	7,50	13,79	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,68	3,48	8,15	MS
TOTAL PENGUNGKIT						**52,51**	**MS**
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,06	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,89	MS
TOTAL HASIL						37,70	
NILAI PMPZI						**90,21**	**MS**

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan ZI belum sepenuhnya memadai, antara lain:
   a. Belum seluruh rencana kerja dilengkapi dengan informasi terkait *timeline* pelaksanaan, penanggung jawab rencana kerja/kegiatan; dan
   b. Terhadap rencana kerja yang tidak terealisasi sesuai rencana, belum seluruhnya disertai penjelasan kendala/hambatan serta tindak lanjut atas kendala/hambatan tersebut.
   c. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan (arahan/masukan) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) serta pembangunan Zona Integritas (ZI).

2. Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir namun nilai indeks berakhlak Balai Besar POM di Padang tahun 2024 sebesar 60,50% masih berada dibawah rata-rata indeks berakhlak BPOM sebesar 61,10%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Balai Besar POM di Padang dalam menjalankan operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi, salah satunya Penggunaan aplikasi Galamai namun masih belum dilengkapi monitoring dan evaluasi implementasi inovasi hingga analisis dampak;
4. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM dan pemberian pelayanan publik;
5. Telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat pelaporan atas implementasi kebijakan tersebut yang disusun secara periodik serta belum dapat menunjukkan adanya proses monitoring dan evaluasi tindak lanjut atau status tanggapan atas permintaan informasi yang diterima;
6. Telah terdapat pedoman mengenai mekanisme pola mutasi dan rotasi pegawai, namun belum mempertimbangkan standar kompetensi jabatan;
7. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala;
8. Belum terdapat bukti keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja disertai dokumentasi yang memadai atas arahan/masukan/koreksian yang disampaikan;
9. Balai Besar POM di Padang telah membuat video pengendalian gratifikasi akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan inovasi melainkan sebuah metode penyampaian sosialisasi terkait gratifikasi;
10. Telah dilakukan monitoring atas pelaporan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* (WBS) secara berkala namun belum terdapat analisis dan/atau upaya yang dilakukan atas nihilnya pelaporan pengaduan masyarakat dan WBS tersebut;
11. Telah terdapat kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terlihat bukti implementasi dan monitoring kesesuaian pemberian layanan dengan standar pelayanan.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,86 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,90 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai yang ditetapkan KemenPANRB.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI antara lain dengan menambahkan informasi berupa timeline pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, penjelasan seluruh hambatan atau kendala terhadap rencana kerja yang belum terealisasi dan tindak lanjutnya dalam dokumen monitoring dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

evaluasi serta melibatkan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

2. Melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta menyusun strategi untuk meningkatkan indeks berakhlak Unit Kerja;
3. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan pelaksanaan inovasi yang efektif dan efisien dan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala serta menyusun analisis dampak *before-after* penerapan inovasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut;
5. Membuat laporan keterbukaan informasi publik secara periodik yang menyajikan penjelasan tindak lanjut atau status terhadap permintaan informasi yang diterima;
6. Menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk tiap pegawai;
7. Meningkatkan upaya dalam meminimalisir kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural, melalui perencanaan yang memadai berdasarkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala;
8. Melibatkan pimpinan pada kegiatan penyusunan perencanaan hingga pemantauan pencapaian kinerja serta mendokumentasikan arahan/ masukan/ pimpinan secara memadai;
9. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya WBS dan pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan;
10. Mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan jika tidak sesuai dengan standar pelayanan serta melakukan monitoring kesesuaian pemberian layanan dengan standar pelayanan tersebut;
11. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Balai Besar POM di Padang. Selanjutnya kami harapkan Balai Besar POM di Padang dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di Balai Besar POM di Padang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Yan Setiadi

Tembusan:
1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif selaku pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : T-PW.01.08.34.01.26.19
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian IKU AMR Level UPT Tahun 2025

Jakarta, 9 Januari 2026

Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Level UPT *"Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT"*, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor selaku koordinator Program Pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian AMR oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, diketahui bahwa **seluruh UPT BPOM memenuhi target IKU AMR Level UPT** *"Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT"* di Tahun 2025. Rincian capaian terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi atas komitmen dan upaya Saudara beserta jajaran dalam melaksanakan program pengendalian AMR di wilayah kerja masing-masing. Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi UPT BPOM dalam melakukan penginputan capaian IKU AMR Level UPT Tahun 2025 serta sebagai bahan penguatan pelaksanaan program pengendalian AMR pada periode selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,

Bayu Wibisono

Tembusan:
1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
2. Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Dinas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Nomor : T-PW.01.08.34.01.26.19
Tanggal : 9 Januari 2026

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN IKU AMR LEVEL UPT TAHUN 2025

No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100%	105.69%
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100%	106.14%
3	Balai Besar POM di Bandung	100%	100.26%
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	100%	106.18%
5	Balai Besar POM di Denpasar	100%	105.43%
6	Balai Besar POM di Gorontalo	100%	104.28%
7	Balai Besar POM di Jakarta	100%	103.41%
8	Balai Besar POM di Jayapura	100%	104.44%
9	Balai Besar POM di Kupang	100%	104.75%
10	Balai Besar POM di Makassar	100%	101.92%
11	Balai Besar POM di Manado	100%	104.18%
12	Balai Besar POM di Mataram	100%	105.69%
13	Balai Besar POM di Medan	100%	105.72%
14	Balai Besar POM di Padang	100%	105.57%
15	Balai Besar POM di Palangkaraya	100%	102.16%
16	Balai Besar POM di Palembang	100%	105.81%
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	100%	106.14%
18	Balai Besar POM di Pontianak	100%	102.13%
19	Balai Besar POM di Samarinda	100%	105.65%
20	Balai Besar POM di Semarang	100%	105.90%
21	Balai Besar POM di Serang	100%	103.45%
22	Balai Besar POM di Surabaya	100%	101.78%
23	Balai Besar POM di Yogyakarta	100%	105.08%
24	Balai POM di Ambon	100%	103.96%
25	Balai POM di Balikpapan	100%	104.69%
26	Balai POM di Banyumas	100%	101.19%
27	Balai POM di Batam	100%	105.64%
28	Balai POM di Bau-Bau	100%	106.25%
29	Balai POM di Bengkulu	100%	105.99%
30	Balai POM di Bima	100%	105.21%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian
31	Balai POM di Bogor	100%	105.71%
32	Balai POM di Dumai	100%	106.25%
33	Balai POM di Ende	100%	105.88%
34	Balai POM di Indragiri Hulu	100%	105.60%
35	Balai POM di Jambi	100%	105.73%
36	Balai POM di Jember	100%	106.08%
37	Balai POM di Kediri	100%	104.83%
38	Balai POM di Kendari	100%	105.78%
39	Balai POM di Mamuju	100%	102.59%
40	Balai POM di Manokwari	100%	105.08%
41	Balai POM di Palopo	100%	103.96%
42	Balai POM di Palu	100%	104.90%
43	Balai POM di Pangkalpinang	100%	104.72%
44	Balai POM di Payakumbuh	100%	105.63%
45	Balai POM di Sanggau	100%	104.40%
46	Balai POM di Sofifi	100%	104.15%
47	Balai POM di Surakarta	100%	105.27%
48	Balai POM di Tabalong	100%	105.27%
49	Balai POM di Tangerang	100%	101.34%
50	Balai POM di Tarakan	100%	106.25%
51	Balai POM di Tasikmalaya	100%	105.47%
52	Balai POM di Tulang Bawang	100%	103.08%
53	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100%	105.05%
54	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	100%	106.14%
55	Loka POM di Kabupaten Banggai	100%	106.12%
56	Loka POM di Kabupaten Belitung	100%	106.25%
57	Loka POM di Kabupaten Belu	100%	102.34%
58	Loka POM di Kabupaten Buleleng	100%	106.09%
59	Loka POM di Kabupaten Bungo	100%	101.61%
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	100%	106.25%
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	100%	106.10%
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	100%	106.16%
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	100%	102.34%
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	100%	101.99%
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	100%	106.25%
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100%	106.14%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian
67	Loka POM di Kabupaten Sambas	100%	105.60%
68	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	100%	104.73%
69	Loka POM di Kabupaten Sorong	100%	105.96%
70	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	100%	104.17%
71	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	100%	106.25%
72	Loka POM di Kabupaten Tanimbar	100%	106.25%
73	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	100%	104.95%
74	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100%	104.33%
75	Loka POM di Kota Tanjungbalai	100%	105.60%
76	Loka POM di Kota Tanjungpinang	100%	101.79%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL

NOTA DINAS
NOMOR : PR.09.02.61.01.26.21

Yth.	:	Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia
Dari	:	Direktur Cegah Tangkal
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar
Tanggal	:	09 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan realisasi indikator kinerja *"Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar"* sebagaimana terlampir.

Adapun perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025-2029.

Hasil penilaian ini telah melalui tahapan koordinasi dan klarifikasi dengan masing-masing Petugas di UPT untuk memastikan kesesuaian data dan informasi. Dengan demikian, hasil penilaian ini ditetapkan sebagai hasil akhir yang bersifat final.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Irwan

Tembusan:
1. Deputi Bidang Penindakan
2. Direktur Siber Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal
Nomor : PR.09.02.61.01.26.21
Tanggal : 9 Januari 2026

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

A. Manual IKU

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	( ) Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT BPOM
Definisi IKSK	:	Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan *Profiling* Siber yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang Pedoman Operasi Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**. 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (50%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) Keterangan: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber kejahatan siber sediaan farmasi dan pangan olahan yang disusun. Catatan: Laporan analisis siber kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun). b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase ( ) Nilai
Sumber Data	:	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT: a. Laporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: 1) Laporan Patroli Siber yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2) Laporan *Profiling* Siber yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. b. Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan. c. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT.
Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B01-B12 ● B01-B11 merupakan target pelaporan siber (50%) ● B12 merupakan target indikator Frekuensi Realisasi ● B01-B11 diisi oleh realisasi pelaporan siber ● B12 realisasi target indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Kertas Kerja Perhitungan

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	**90,67**
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	**93,75**
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	**84,03**
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	**95,14**
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	**95,00**
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	**94,00**
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
20	BBPOM Semarang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
21	BBPOM Serang	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
22	BBPOM Surabaya	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
23	BBPOM Yogyakarta	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**
24	BPOM Ambon	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
25	BPOM Balikpapan	100	92	44,44	50,00	23,00	11,11	**84,11**
26	BPOM Banyumas	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
27	BPOM Batam	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
28	BPOM Baubau	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**
29	BPOM Bengkulu	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
30	BPOM Bima	87,5	100	100,00	43,75	25,00	25,00	**93,75**
31	BPOM Bogor	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
32	BPOM Dumai	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
33	BPOM Ende	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
34	BPOM Indragiri Hulu	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
35	BPOM Jambi	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
36	BPOM Jember	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
37	BPOM Kediri	95,83	100	77,78	47,92	25,00	19,44	**92,36**
38	BPOM Kendari	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
39	BPOM Mamuju	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
40	BPOM Manokwari	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
41	BPOM Palopo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
42	BPOM Palu	95,83	92	66,67	47,92	23,00	16,67	**87,58**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
43	BPOM Pangkal Pinang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	**94,00**
44	BPOM Payakumbuh	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
45	BPOM Sanggau	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
46	BPOM Sofifi	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
47	BPOM Surakarta	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
48	BPOM Tabalong	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
49	BPOM Tangerang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
50	BPOM Tanjungbalai	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
51	BPOM Tarakan	100	88	100,00	50,00	22,00	25,00	**97,00**
52	BPOM Tasikmalaya	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
53	BPOM Tulangbawang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
54	Loka Kab. Aceh Selatan	100	88	88,89	50,00	22,00	22,22	**94,22**
55	Loka Kab. Aceh Tengah	95,83	88	100,00	47,92	22,00	25,00	**94,92**
56	Loka Kab. Banggai	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
57	Loka Kab. Belitung	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
58	Loka Kab. Belu	87,5	100	100,00	43,75	25,00	25,00	**93,75**
59	Loka Kab. Buleleng	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
60	Loka Kab. Bungo	91,67	100	100,00	45,84	25,00	25,00	**95,84**
61	Loka Kab. Kepulauan Sangihe	100	92	44,44	50,00	23,00	11,11	**84,11**
62	Loka Kab. Kepulauan Tanimbar	95,83	96	88,89	47,92	24,00	22,22	**94,14**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
63	Loka Kab. Kotawaringin Barat	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
64	Loka Kab. Manggarai Barat	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
65	Loka Kab. Merauke	95,83	96	77,78	47,92	24,00	19,44	**91,36**
66	Loka Kab. Mimika	91,67	100	100,00	45,84	25,00	25,00	**95,84**
67	Loka Kab. Pulau Morotai	87,5	96	100,00	43,75	24,00	25,00	**92,75**
68	Loka Kab. Rejang Lebong	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
69	Loka Kab. Sambas	91,67	80	77,78	45,84	20,00	19,44	**85,28**
70	Loka Kab. Sijunjung	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
71	Loka Kab. Sorong	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
72	Loka Kab. Sumba Timur	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
73	Loka Kab. Tanah Bumbu	83,33	84	100,00	41,67	21,00	25,00	**87,67**
74	Loka Kab. Toba	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
75	Loka Kota Lubuklinggau	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
76	Loka Kota Tanjung Pinang	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**

Irwan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar POM di Padang
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Nenden Solihatul Zannah, S.Si., Apt., M.Si.
2. Aan Risma Uli N., S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	84.9	82.8	77	107.6
2.	Standar Peralatan	88.6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	100			
4.	Standar Metode Terverifikasi	26.8			

Kendala Pemenuhan

-

Rencana Tindak Lanjut :

-

Tim Penilai PPPOMN

1 Nenden Solihatul Zannah, S.Si., Apt., M.Si.

2 Aan Risma Uli N., S.Si., Apt., M.Si.

Kepala Balai Besar POM di Padang

Drs. M Suhendri, Apt, M.Farm

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Website : http://padang.pom.go.id
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG
NOMOR HK.02.02.3A.01.26.23 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terwujudnya visi dan misi Badan POM RI, dipandang perlu membuat rencana strategis dan rencana kerja yang terarah dan penyusunan Laporan Kinerja sebagai informasi kinerja yang telah dicapai;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Keputusan Kepala BPOM Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Oat dan Makanan;
7. Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG.

Pertama : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Kepala Balai Besar POM di Padang
Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	:	Nery Revisa, S.E., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggota	
Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm.	: IKK 25, 26, 27,2 8
Linda Gusrini Fadri, S.Si., Apt., M.Farm.	: IKK 24
Dra. Patria Dehelen, Apt.	: IKK 22
Rina Syukrina, S.Farm., Apt.	: IKK 9, 25
Aria Bogorianti Asgul, S.Si., Apt.	: IKK 8,16, 21
Fitria, S.Si., Apt.	: IKK 3, 4, 5, 10
Fitra Yelli, S.Farm., Apt., M.Farm.	: IKK 6, 7
Saafrida, S.Si., Apt., M.Farm.	IKK 1
Mutiara Yulanda, S.Farm., Apt.	: IKK 1
Yelvina, S.Si., Apt.	: IKK 4,14, 25
Azfrianty, STP., M.Farm.	: IKK 17, 22, 25
Reni Sepriyanti, S.Farm., Apt.	: IKK 15,18, 19, 20
Thu Desy Cameryta, S.Farm., Apt., M.Farm.	: IKK 3,5
Ade Cahyana, S.Si., Apt., M.Pharm.	: IKK 11,12
Dilla Shavera, S.Si., Apt., M.Biomed.	: IKK 2, 13
Nining, M.H., S.Farm., Apt.	: IKK 23
Vera Sribanon, S.Si., Apt.	: IKK 25
Sony Aulia Dwita AM, S.E.	: Tata Usaha
Airin Muchlis, S.E.	: Tata Usaha
Editor	: Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M. Eng.
	: Taruna Wadi, S.Kom.

Kedua : Tugas tim adalah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,



M. SUHENDRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: HK.02.02.3A.01.26.23
TANGGAL: 28 JANUARI 2026

DAFTAR INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

No.	Nomor IKK	Daftar Nama IKK
1	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5	Indikator Kinerja Kegiatan 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6	Indikator Kinerja Kegiatan 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7	Indikator Kinerja Kegiatan 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8	Indikator Kinerja Kegiatan 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9	Indikator Kinerja Kegiatan 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10	Indikator Kinerja Kegiatan 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11	Indikator Kinerja Kegiatan 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12	Indikator Kinerja Kegiatan 12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13	Indikator Kinerja Kegiatan 13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14	Indikator Kinerja Kegiatan 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nomor IKK	Daftar Nama IKK
		Standar Kemampuan Laboratorium
15	Indikator Kinerja Kegiatan 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16	Indikator Kinerja Kegiatan 16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
17	Indikator Kinerja Kegiatan 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
18	Indikator Kinerja Kegiatan 18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
19	Indikator Kinerja Kegiatan 19	Jumlah desa pangan aman
20	Indikator Kinerja Kegiatan 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21	Indikator Kinerja Kegiatan 21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
22	Indikator Kinerja Kegiatan 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
23	Indikator Kinerja Kegiatan 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
24	Indikator Kinerja Kegiatan 24	Indeks Pelayanan Publik UPT
25	Indikator Kinerja Kegiatan 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
26	Indikator Kinerja Kegiatan 26	Nilai AKIP UPT BPOM
27	Indikator Kinerja Kegiatan 27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
28	Indikator Kinerja Kegiatan 28	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BBPOM DI PADANG

Jln. Gajah Mada, Gunung Pangilun
Padang - Sumatera Barat
https://padang.pom.go.id - https://bbpompadang,id